



SALINAN

BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Bupati yang daerahnya memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir Tahun 2024, perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2025-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-73 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Garut Provinsi Jawa Barat;

2. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Garut adalah unsur pembantu Bupati Garut dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten Garut untuk periode tahun 2025-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Garut untuk periode tahun 2025-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan pembangunan pada Tahun 2025-2026.

Pasal 3

Maksud penetapan RPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
- c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) Sistematika dan uraian dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX : PENUTUP

- (2) Sistematika dan uraian dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) RPD Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan/ atau

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPD dapat diubah tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 1 - 2024

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 9



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGNAN DAERAH
TAHUN 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Garut merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai potensi strategis. Kabupaten Garut terdiri atas 42 Kecamatan, 421 Desa dan 21 Kelurahan. Pembangunan Wilayah Kabupaten Garut sejalan dengan dilaksanakannya pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka pembangunan daerah berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 pada tahun 2024, maka untuk memenuhi kebutuhan dokumen rencana pembangunan menengah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat Minggu Keempat Bulan Januari Tahun 2024 serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat Minggu Kedua Bulan Februari Tahun 2024.

Penyusunan RPD Tahun 2025-2026 dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2019-2024 hingga Tahun 2023;
3. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;

5. Kebijakan nasional;

6. Regulasi yang berlaku.

Sebagai salah satu daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerah dan RPJMD pada tahun 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menyusun dokumen RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 oleh setiap perangkat daerah.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

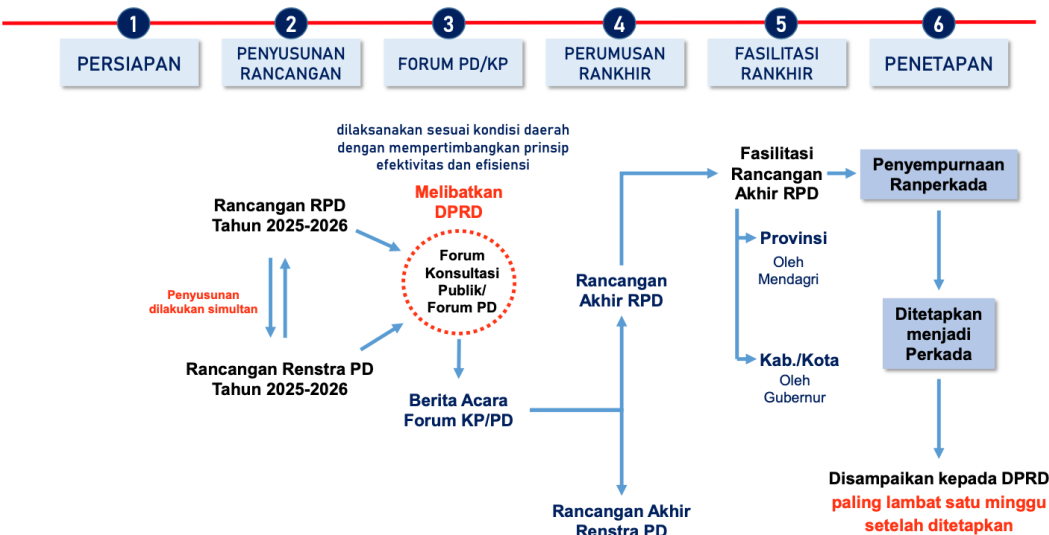
- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 4) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 5) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Mengingat pentingnya dokumen RPD sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melaksanakan penyusunan dokumen RPD Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Tahun 2025-2026, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen RPD Kabupaten Garut yang ditetapkan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPD Kabupaten Garut dengan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan periode 2025-2026, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Garut.

Alur penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026



Sumber: Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen RPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara dokumen RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dengan dokumen lain yang relevan diantaranya RPJPN, RPD Provinsi Jawa Barat, RPD atau RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Pembangunan Sektor lain.

1.3.1. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut

Penyusunan Dokumen RPD Kabupaten Garut memperhatikan dan mempedomani RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan RPD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD pada periode berkenaan.

1.3.2. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penyusunan RPD Kabupaten Garut memperhatikan dan mempedomani RPD Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada RPD dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah dan program strategis Provinsi maupun Nasional pada RPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.3. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Dokumen RPD Kabupaten Garut akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program perangkat daerah dalam Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan berpedoman pada dokumen RPD.

1.3.4. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 akan berpedoman pada RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. RKPD merupakan pelaksanaan dari RPD setiap tahun dan akan menjadi dasar dalam proses penganggaran daerah. RKPD yang berpedoman pada RPD, diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan RPD pada akhir periode.

1.3.5. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut

Penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam RTRW baik RTRW Nasional, Provinsi, maupun kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Penyusunan RPD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan RTRW yang memuat rencana program-program pemerintah daerah dengan RTRW yang ditetapkan dalam indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

1.3.6. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut dengan Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Lain.

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi maupun daerah lainnya, Penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral maupun spasial di tingkat nasional dan provinsi, sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang holistik.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 adalah memberikan rancangan arah pembangunan Kabupaten Garut selama dua tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Dokumen RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 menjadi pedoman bagi pembangunan tahunan Kabupaten Garut mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 atau hingga terpilih dan dilantiknya kepala daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Selain itu dokumen RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang memberi gambaran kondisi riil daerah;
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk tahun 2025-2026;
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Garut yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan;
4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut untuk tahun 2025-2026;
5. Merumuskan program perangkat daerah untuk pembangunan Kabupaten Garut untuk tahun 2025-2026;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) beserta target indikator tahun 2025-2026;
7. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Garut setiap tahun mulai tahun 2025.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 disusun dalam 9 (Sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPD.



Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, capaian RPJMD periode 2019-2024, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan atau APBD provinsi di kabupaten/kota, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kerjasama Daerah dan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya atau proyeksi keuangan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah berdasarkan kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir serta dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah dengan memperhatikan perkembangan isu global, nasional dan regional.

Bab V Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut periode tahun 2025-2026 serta memuat indikator kinerja pembangunan daerah dan target tahun 2025-2026.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini memuat uraian strategi pembangunan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk tahun 2025-2026. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan prioritas daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target kinerja, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.



Bab VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) tahun 2025-2026.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Garut beberapa tahun terakhir yang mencakup aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Karena itu Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga kota dan kabupaten di Sekitar Garut. Ibu kota Kabupaten Garut berada pada Ketinggian 717 m diatas permukaan laut (dpl) dikelilingi oleh beberapa gunung yakni Gunung Karacak (1.883 m), Gunung Cikuray (2.821 m), Gunung Papandayan (2.622 m) dan Gunung Guntur (2.249 m).

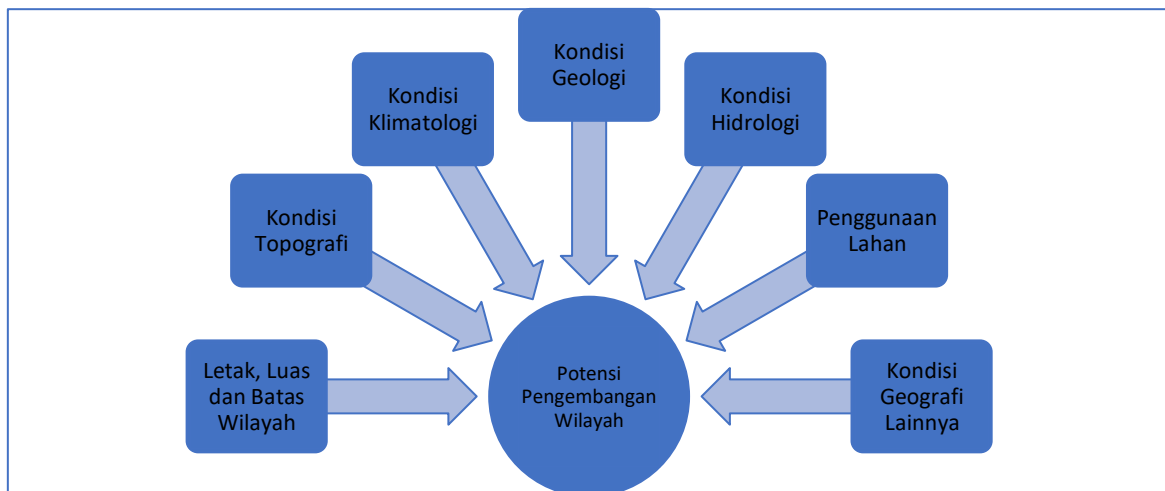
Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor. Kabupaten Garut turut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena sebagian wilayah di Kabupaten Garut merupakan kawasan konservasi alam dan hutan lindung.

Gambar 2.1.
Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut



Terdapat hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, yang diilustrasikan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Kondisi Geografi Daerah dengan Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

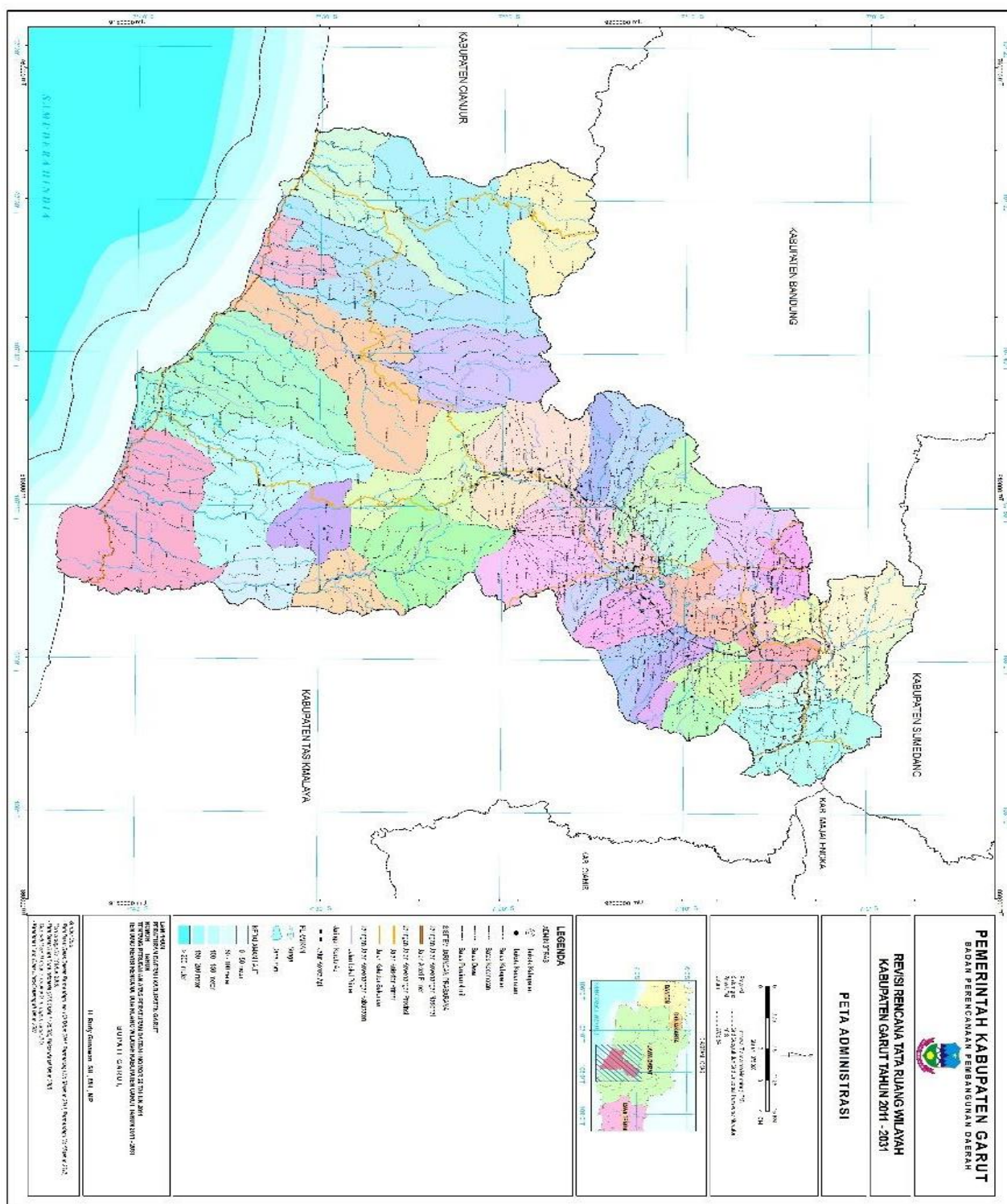


a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km² (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Gambar 2.3.
Peta Administrasi Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

Tabel 2.1.
Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut
Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)*	Jumlah Rukun Tetangga (RT)*
1.	Cisewu	-	9	77	280
2.	Caringin	-	6	59	238
3.	Talegong	-	7	55	248
4.	Bungbulang	-	13	135	461
5.	Mekarmukti	-	5	51	162
6.	Pamulihan	-	5	41	142
7.	Pakenjeng	-	13	126	519
8.	Cikelet	-	11	108	373
9.	Pameungpeuk	-	8	103	309
10.	Cibalong	-	11	98	343
11.	Cisompet	-	11	124	424
12.	Peundeuy	-	6	63	207
13.	Singajaya	-	9	76	309
14.	Cihurip	-	4	25	122
15.	Cikajang	-	12	112	513
16.	Banjarwangi	-	11	71	375
17.	Cilawu	-	18	195	723
18.	Bayongbong	-	18	153	593
19.	Cigedug	-	5	67	228
20.	Cisurupan	-	17	139	791
21.	Sukaresmi	-	7	47	251
22.	Samarang	-	13	120	425
23.	Pasirwangi	-	12	104	392
24.	Tarogong Kidul	5	7	169	670
25.	Tarogong Kaler	1	12	154	534
26.	Garut Kota	11	-	226	1025
27.	Karangpawitan	4	16	237	751
28.	Wanaraja	-	9	81	284
29.	Sucinaraja	-	7	63	206
30.	Pangatikan	-	8	83	264
31.	Sukawening	-	11	108	358
32.	Karantengah	-	4	36	136
33.	Banyuresmi	-	15	176	529
34.	Leles	-	12	141	431
35.	Leuwigoong	-	8	102	273
36.	Cibatu	-	11	138	437
37.	Kersamanah	-	6	55	218
38.	Cibiuk	-	5	58	174
39.	Kadungora	-	14	173	607
40.	Balubur Limbangan	-	14	162	470
41.	Selaawi	-	7	63	218
42.	Malangbong	-	24	154	675
Jumlah		21	421	4.528	16.688

Sumber: Kabupaten Garut dalam angka 2024, *DPMD Kabupaten Garut, Desember Tahun 2022 yang dikelola dalam SIPD

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi

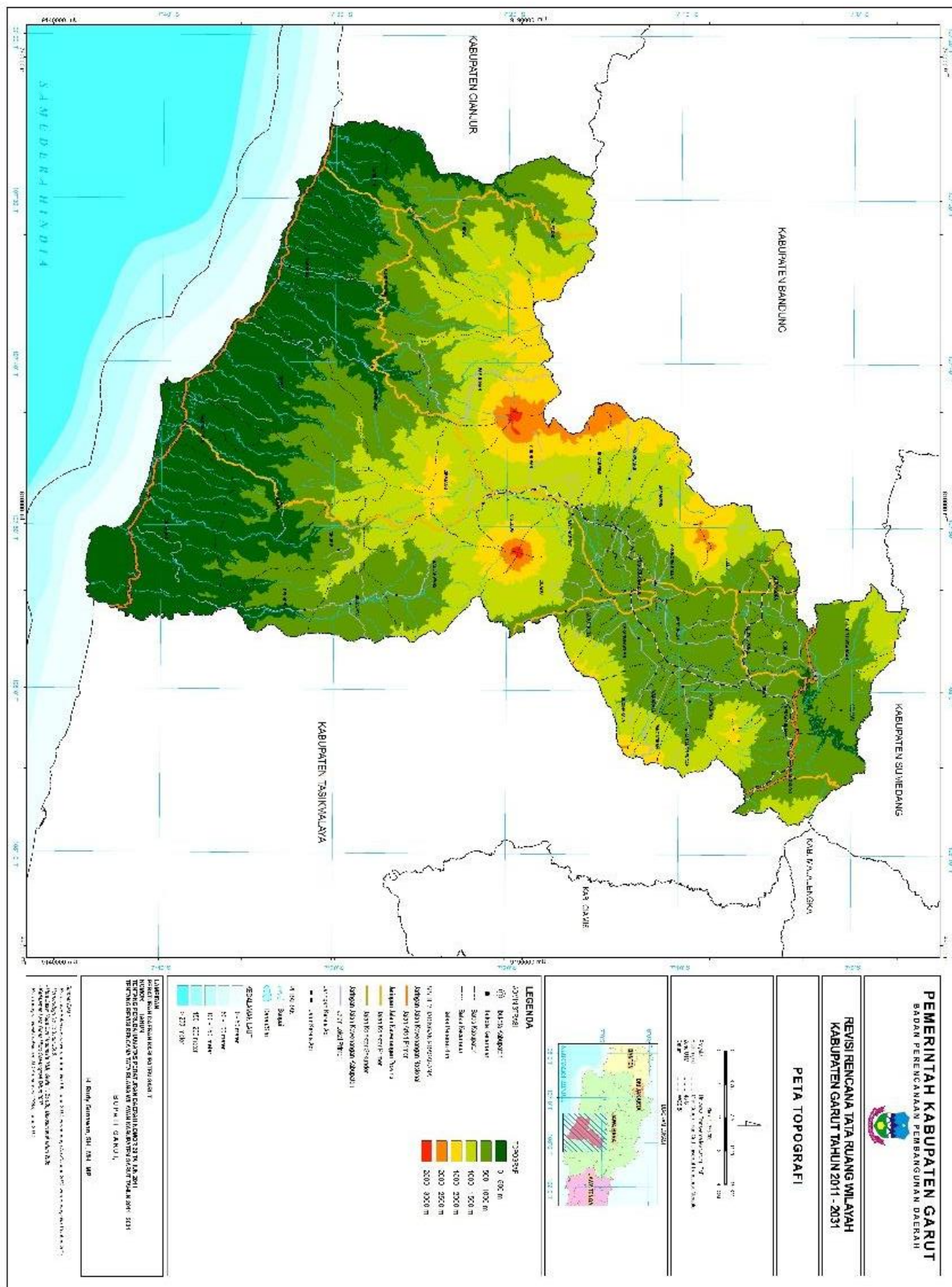
dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Luas Wilayah menurut Topografi

No.	Kemiringan (derajat°)	Luas (Ha)	Rasio terhadap Luas Wilayah (%)	Karakteristik
1.	0-2	32.229	10,51	Wilayah dataran tinggi berbukit dan pegunungan di bagian utara, timur dan barat
2.	2-15	38.097	12,43	
3.	15-40	110.326	35,99	Wilayah selatan sebagian besar memiliki kemiringan yang cukup curam
4	>40	125.867	41,06%	

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

Kondisi Topografi Kabupaten Garut



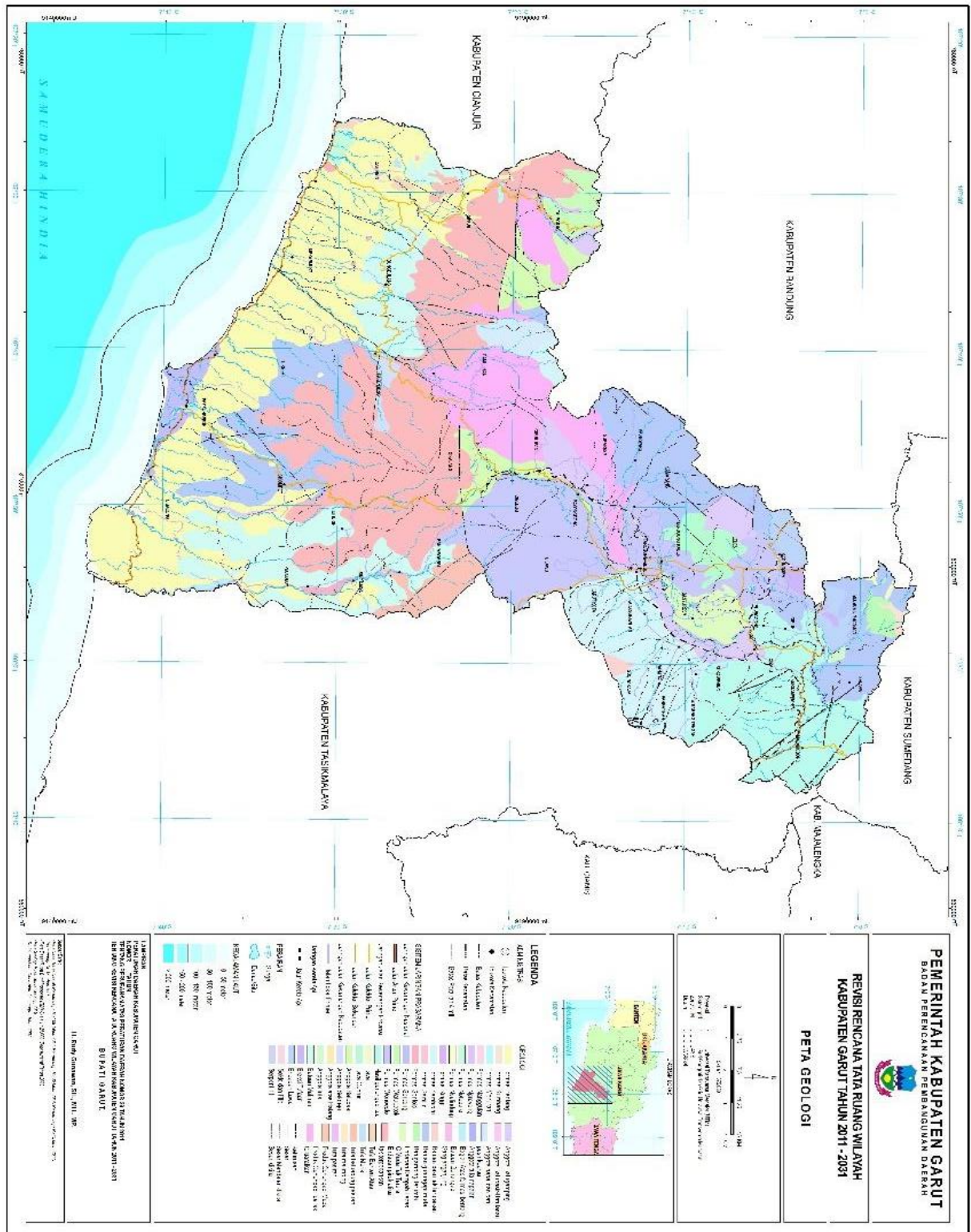
Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

Sementara untuk wilayah perairan laut Kabupaten Garut memiliki wilayah perairan laut di bagian selatan. Topografi pantai selatan Garut memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik pantai selatan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang cenderung curam. Pantai selatan Kabupaten Garut berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sehingga arus dan gelombang pantai selatan cenderung lebih besar. Berdasarkan Peta Laut Pushidrosal batimetri pantai selatan mencapai kedalaman maksimal 1.800 meter pada jarak 12 mil dari garis pantai.

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.

Kondisi Geologi Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

d. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara.

Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter perdetik.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

e. Kondisi Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung.

Variasi temperatur bulanan berkisar antara 18,5°C-31,2°C, dengan rata-rata suhu udara 25,3°C, kelembaban udara berkisar antara 43,9% hingga 96,0% dengan rata-rata kelembaban bulanan 72,5%. Kecepatan angin rata-rata bulanan berada pada kisaran 2,3 knot dan maksimal pada 11,4 knot dengan tekanan udara rata-rata bulanan berkisar pada 922,6 mb. Keadaan iklim Kabupaten Garut pada tahun 2022 secara terperinci adapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Kondisi Baseline Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	19,5	26,4	31,6	42	66,6	93	0	3,5	13,0	919,0	923,0	1016,0
Februari	19,8	25,0	31,0	44	72,5	95	0	2,7	15,0	917,9	922,0	926,7
Maret	18,8	26,0	31,4	38	70,2	96	0	2,7	13,0	917,7	921,8	926,5
April	18,4	25,3	31,4	49	75,3	97	0	1,6	10,0	918,5	923,0	1014,6
Mei	19,0	25,7	31,6	44	73,8	96	0	2,3	10,0	919,1	922,5	926,2
Juni	17,6	24,5	30,2	44	75,8	95	0	1,8	10,0	919,6	923,0	1012,9
Juli	16,8	25,1	30,6	45	70,5	95	0	2,2	11,0	919,4	922,4	926,9
Agustus	17,6	25,6	31,0	47	68,8	95	0	2,3	10,0	919,7	922,7	926,1
September	18,5	25,6	32,2	36	70,3	100	0	2,2	9,0	918,7	923,4	927,9
Oktober	18,4	25,0	30,6	43	74,9	98	0	1,9	16,0	919,1	922,9	926,8
November	18,7	25,0	31,0	46	75,8	96	0	2,2	9,0	918,4	922,5	951,8
Desember	19,4	24,9	31,4	49	75,1	96	0	2,3	11,0	917,3	921,7	929,8
Rata-rata	18,5	25,3	31,2	43,9	72,5	96	0	2,3	11,4	918,7	922,6	951,0

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023

Curah hujan bulanan berkisar antara 29,9 mm - 366,7 mm atau rata-rata curah hujan bulanan 192,6 mm dan sekitar 2.311,4 mm curah hujan rata-rata

tahunan dengan bulan basah 9 bulan, bulan lembab 1 bulan dan bulan kering 2 bulan dengan lama penyinaran matahari berada pada kisaran 4,6 %.

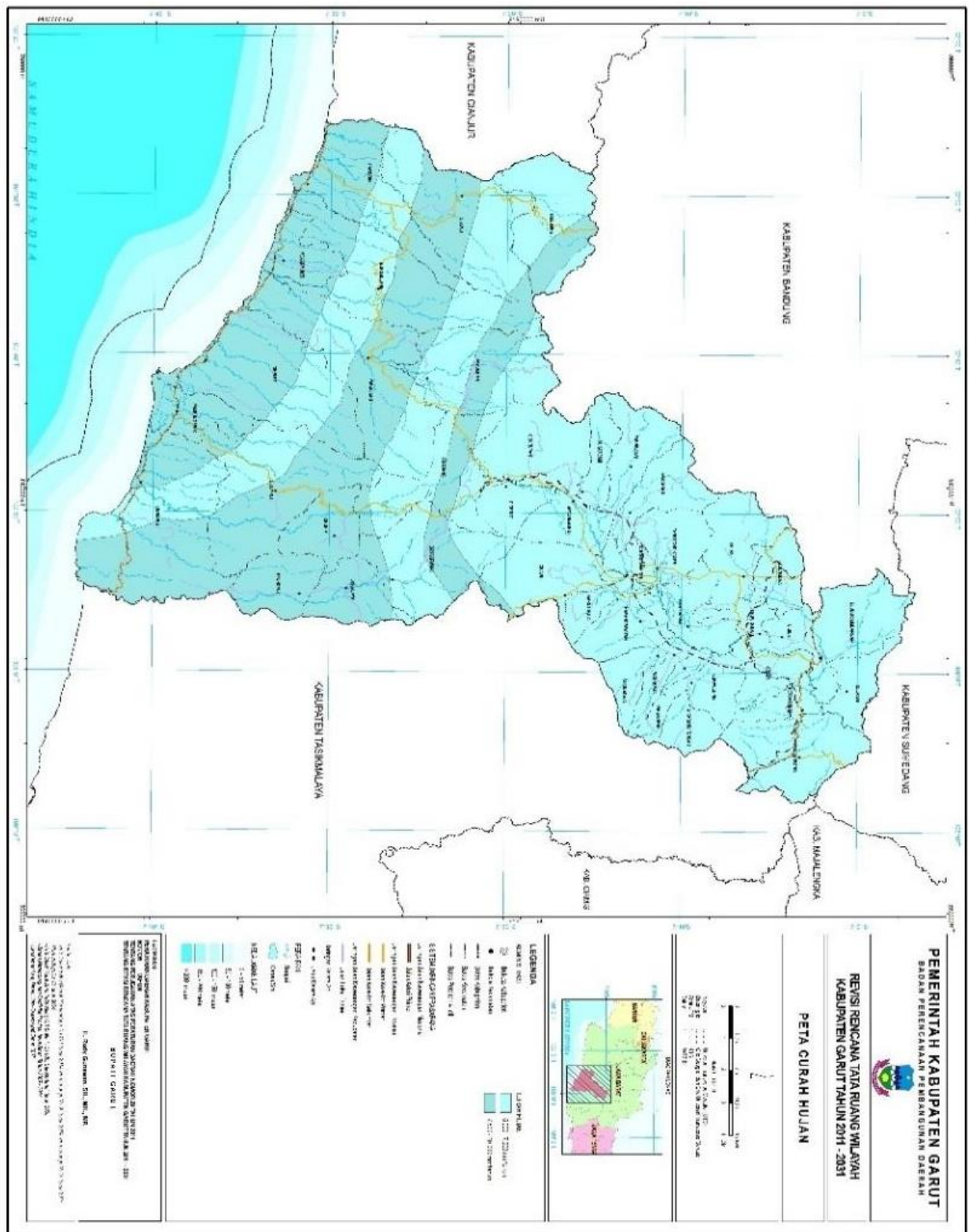
Tabel 2.4.
Keadaan Iklim Kabupaten Garut menurut Bulan

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	59,5	8	5,7
Februari	117,1	18	3,3
Maret	238,9	19	4,8
April	336,2	26	4,7
Mei	146,9	18	5,1
Juni	150,6	15	4,7
Juli	98,5	12	6,0
Agustus	29,9	9	6,0
September	182,2	15	4,9
Oktober	366,7	21	2,9
November	307,2	25	3,9
Desember	277,7	26	3,5
Rata-rata	192,6	17,7	4,6

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.

Gambar 2.7.
Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut



f. Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, dari total luas wilayah 310.705,29 Ha, sebagian besar berupa hutan seluas 73.657,20 Ha (23,71%), kebun/perkebunan seluas 55.752,67 Ha (17,94%), tanah ladang seluas 52.681,37 Ha (16,96%), semak belukar seluas 47.030,36 Ha (15,14%), sawah tadah hujan seluas 40.065,42 Ha atau 12,89%, area pemukiman seluas 19.408,17 Ha (6,25%), sawah irigasi seluas 17.492,23 Ha atau 5,63%, dan sisanya berupa padang rumput, air sungai, tanggul pasir, danau/situ, bangunan, kolam ikan, hutan bakau, empang/tambak, pasir darat, dan mata air.

Tabel 2.5.
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Air Sungai	1.592,39	0,51%
2	Area Pemukiman	19.408,17	6,25%
3	Bangunan	82,83	0,03%
4	Danau/Situ	211,12	0,07%
5	Empang/Tambak	30,56	0,01%
6	Hutan	73.657,21	23,71%
7	Hutan Bakau	31,83	0,01%
8	Kebun/Perkebunan	55.752,67	17,94%
9	Kolam Ikan	35,69	0,01%
10	Mata Air	2,58	0,00%
11	Padang Rumput	2.351,96	0,76%
12	Pasir Darat	5,27	0,00%
13	Sawah Irigasi	17.492,23	5,63%
14	Sawah Tadah Hujan	40.065,42	12,89%
15	Semak Belukar	47.030,36	15,14%
16	Tanah Ladang	52.681,37	16,96%
17	Tanggul Pasir	273,63	0,09%
	Jumlah	310.705,29	100,00%

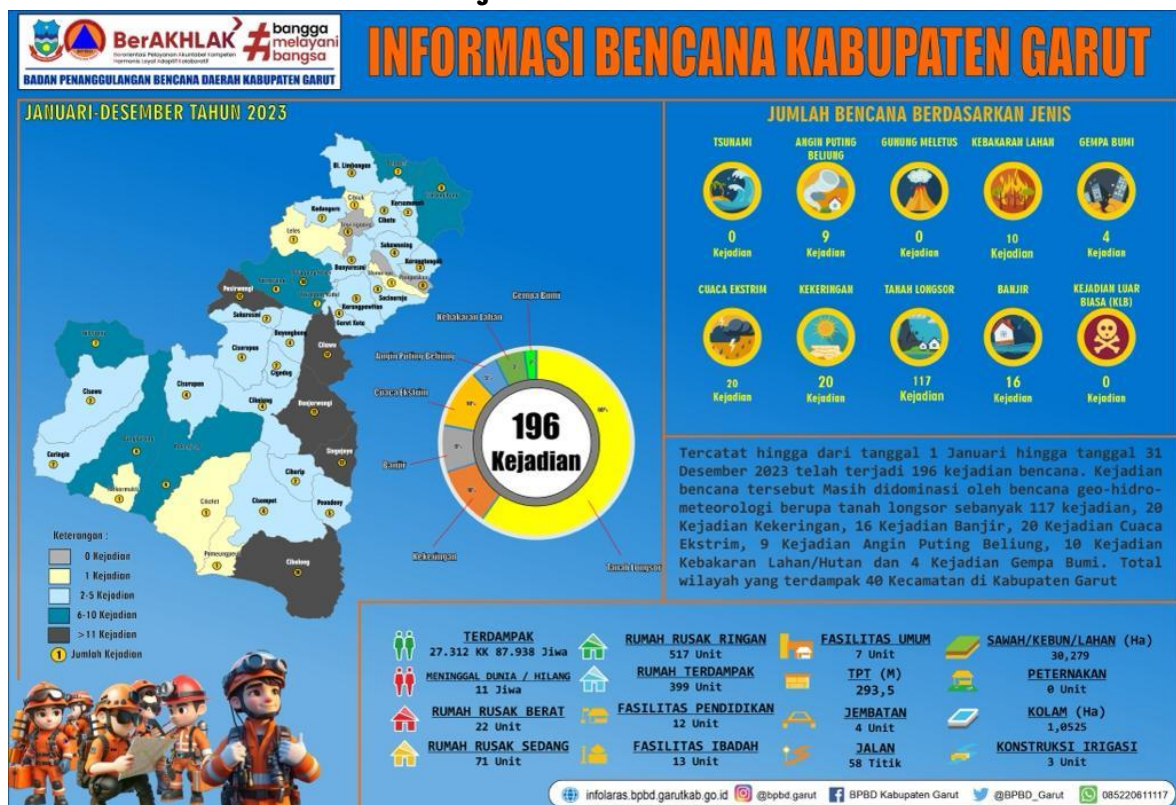
Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

g. Kondisi Potensi Wilayah dan Daerah Rawan Bencana

Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan

tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah. Tercatat berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2023 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Garut berada pada nilai 147,39 Poin meskipun cenderung menurun dari tahun 2022 yaitu pada nilai 164,91 poin. Tercatat hingga dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2023 telah terjadi 196 kejadian bencana, kejadian bencana tersebut masih didominasi oleh bencana geo-hidro-meteorologi berupa tanah longsor sebanyak 117 kejadian, 20 Kejadian Kekeringan, 16 Kejadian Banjir, 20 Kejadian Cuaca Ekstrem, 9 Kejadian Angin Puting Beliung, 10 Kejadian Kebakaran Lahan/Hutan dan 4 Kejadian Gempa Bumi. Total wilayah yang terdampak 40 Kecamatan di Kabupaten Garut.

Gambar 2.8.
Informasi Kejadian Bencana Tahun 2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Tahun 2023

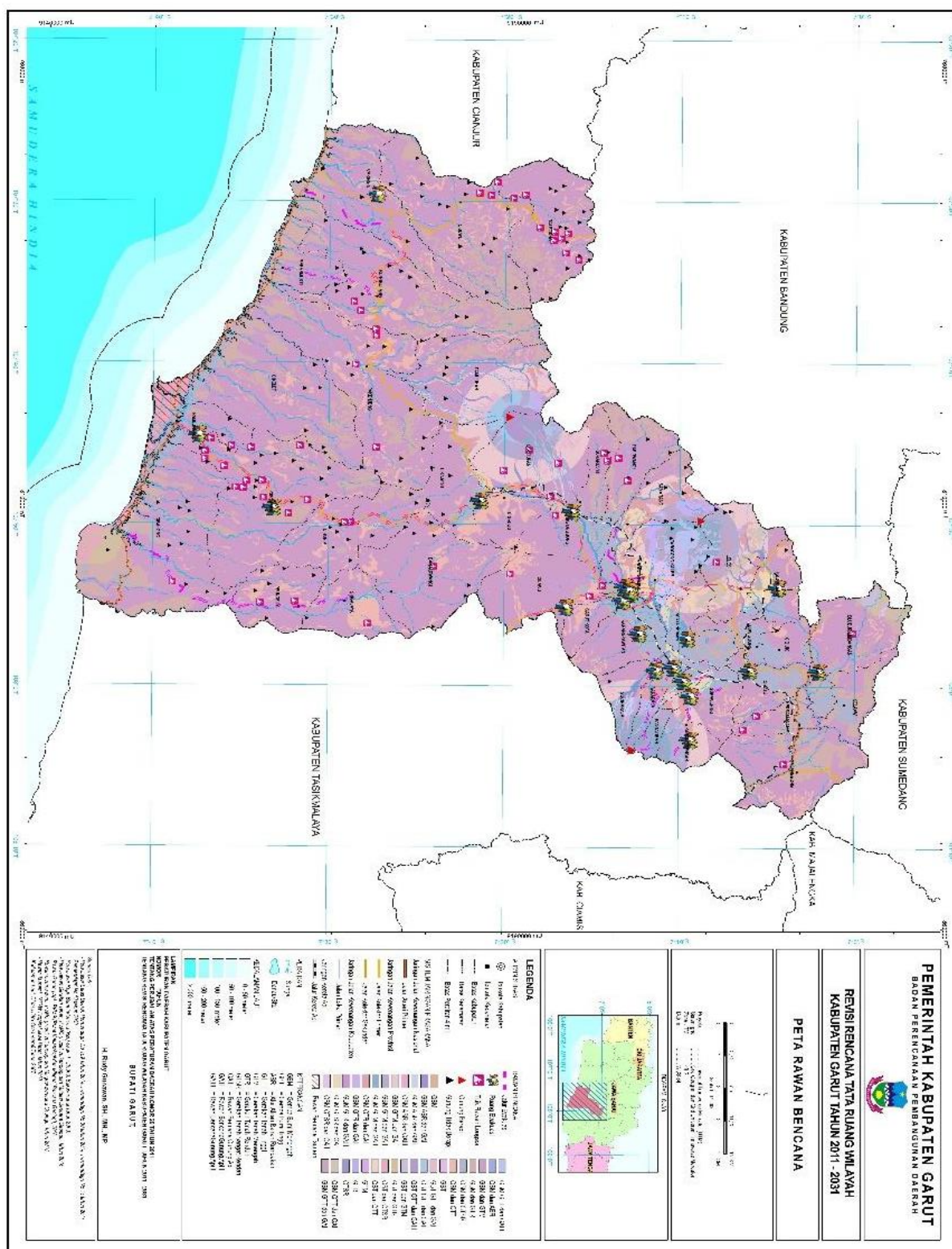
Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet,

Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara kompleks Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, maka Tingkat Ancaman dari setiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Garut adalah :

- Tanah Longsor memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman tinggi dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Banjir memiliki Tingkat Ancaman TINGGI dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Letusan Gunung Api dan Gempa Bumi memiliki Tingkat Ancaman SEDANG dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi;
- Tsunami memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar sedang;
- Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, dan Pandemi memiliki Tingkat Ancaman RENDAH dengan Indeks Ancaman rendah dan Indeks Penduduk Terpapar rendah.

Gambar 2.9.
Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRB) yang di rilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Garut termasuk kedalam kelas risiko bencana tinggi yang berada nilai 147,39 pada tahun 2023 capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IRB pada tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan data pada tabel dibawah ini, Kabupaten Garut memiliki Indeks Resiko bencana keempat tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Cianjur.

Tabel 2.6.
Perbandingan Penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Resiko
1	Cianjur	207,13	215,08	197,08	207,62	185,14	Tinggi
2	Sukabumi	190,75	190,75	192,40	186,61	178,12	Tinggi
3	Tasikmalaya	203,01	203,01	186,51	174,11	159,14	Tinggi
4	Garut	197	252,2	185	164,91	147,39	Tinggi
5	Karawang	175,20	174,43	165,58	157,81	152,32	Tinggi
6	Bandung	175,20	171,91	168,78	157,25	132	Tinggi
7	Kota Cirebon	160,63	160,63	147,51	156,28	144,56	Tinggi
8	Subang	174,00	174,00	161,89	145,94	143,43	Tinggi
9	Cirebon	152,80	152,80	152,80	145,04	144,56	Tinggi
10	Kota Banjar	172,76	172,76	157,19	141,07	129,60	Tinggi
11	Pangandaran	145,44	145,44	129,21	137,36	147,85	Sedang
12	Majalengka	166,00	143,43	127,74	136,35	120,84	Sedang
13	Sumedang	156,23	141,57	122,22	133,52	135,05	Sedang
14	Ciamis	162,00	142,15	124,39	129,87	117,12	Sedang
15	Purwakarta	138,00	137,31	124,53	128,98	117,89	Sedang
16	Bogor	131,60	131,60	123,18	124,95	107,93	Sedang
17	Indramayu	133,03	132,89	130,11	124,10	111,60	Sedang
18	Bekasi	167,22	136,79	114,59	122,49	116,85	Sedang
19	Kota Bekasi	136,88	136,88	125,31	116,54	111,58	Sedang
20	Kuningan	119,20	119,20	117,37	114,69	125,80	Sedang
21	Kota Bandung	154,00	131,13	131,13	113,58	97,15	Sedang
22	Kota Tasikmalaya	110,22	110,22	108,18	108,89	106,93	Sedang
23	Kota Sukabumi	122,32	122,32	111,32	103,05	84,55	Sedang
24	Bandung Barat	114,40	114,40	102,67	92,91	108,64	Sedang
25	Kota Cimahi	120,40	105,41	91,71	82,01	72,63	Sedang
26	Kota Depok	89,63	89,63	82,56	76,53	80,44	Sedang
27	Kota Bogor	75,75	75,75	65,38	71,01	63,49	Sedang

Sumber : IRBI Tahun 2023, BNPB

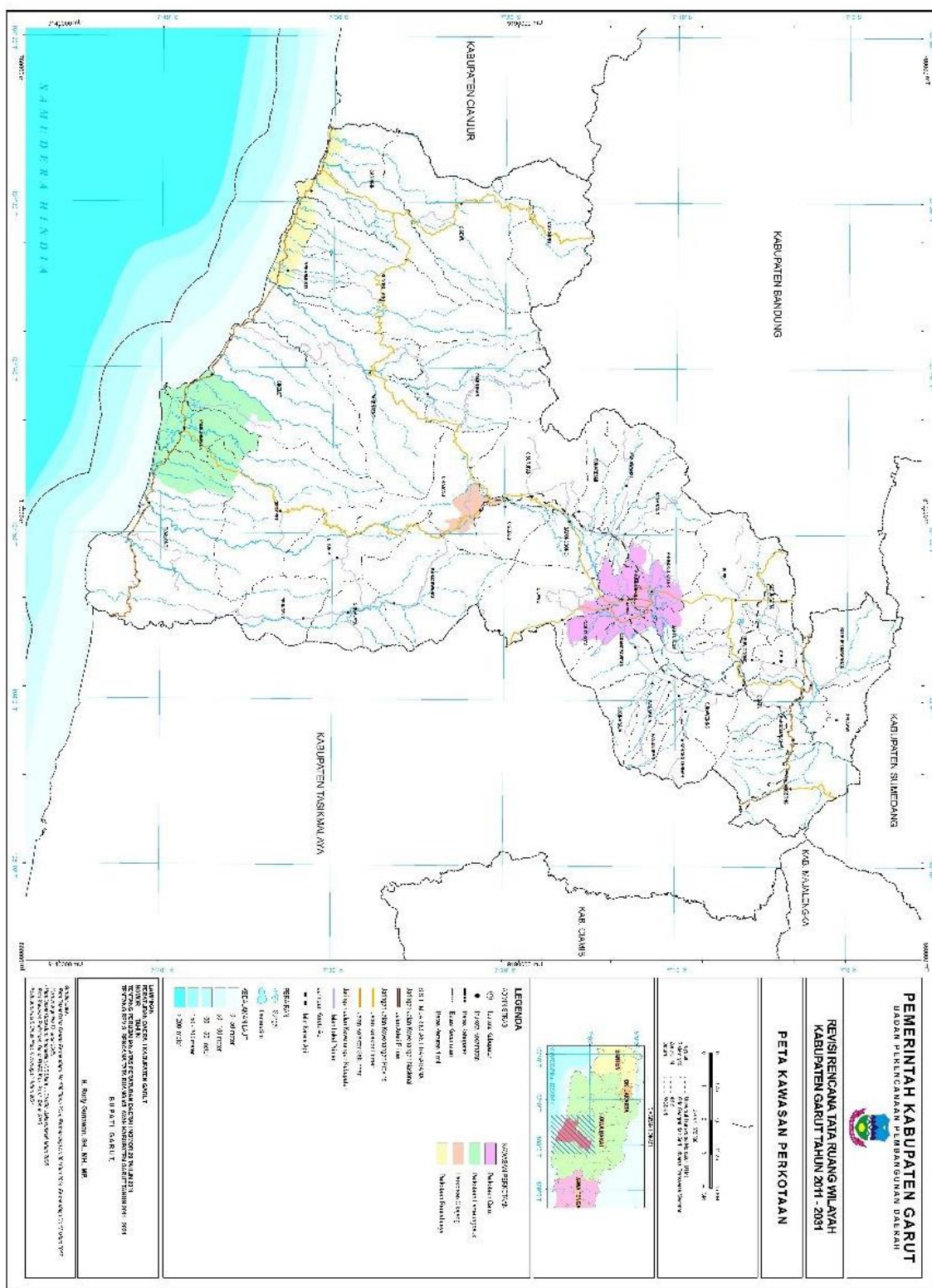
Keterangan: * Belum ada data

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Rancabuaya.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pakenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisurupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; Perkotaan Selaawi, Perkotaan Singajaya; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatu; dan Perkotaan Kadungora.
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi : Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu, Desa Sukarame Kecamatan Caringin, Desa Sukamulya Kecamatan Talegong, Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti, Desa Pananjung Kecamatan Pamulihan, Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet, Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang, Desa Sancang Kecamatan Cibalong, Desa Depok Kecamatan Cisompet, Desa Toblong Kecamatan Peundeuy, Desa

Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk, Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip, Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi, Desa Ciudian Kecamatan Singajaya, Desa Mangkurayat Kecamatan Cilawu, Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, Desa Barusuda Kecamatan Cigedug, Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan, Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi, Desa Cibodas Kecamatan Cikajang, Desa Sukakarya Kecamatan Samarang, Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi, Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja, Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan, Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja, Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening, Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah, Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi, Desa Cangkuang Kecamatan Leles, Desa Talagasari Kecamatan Kadungora, Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong, Desa Keresek Kecamatan Cibatuk, Desa Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah, Desa Majasari Kecamatan Cibiuk, Desa Galihpakuwon Kecamatan Balubur Limbangan, Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi dan Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong.

Gambar 2.10.
Rencana Kawasan Perkotaan Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet. Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan :

- 1) KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.
- 2) KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.

Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:

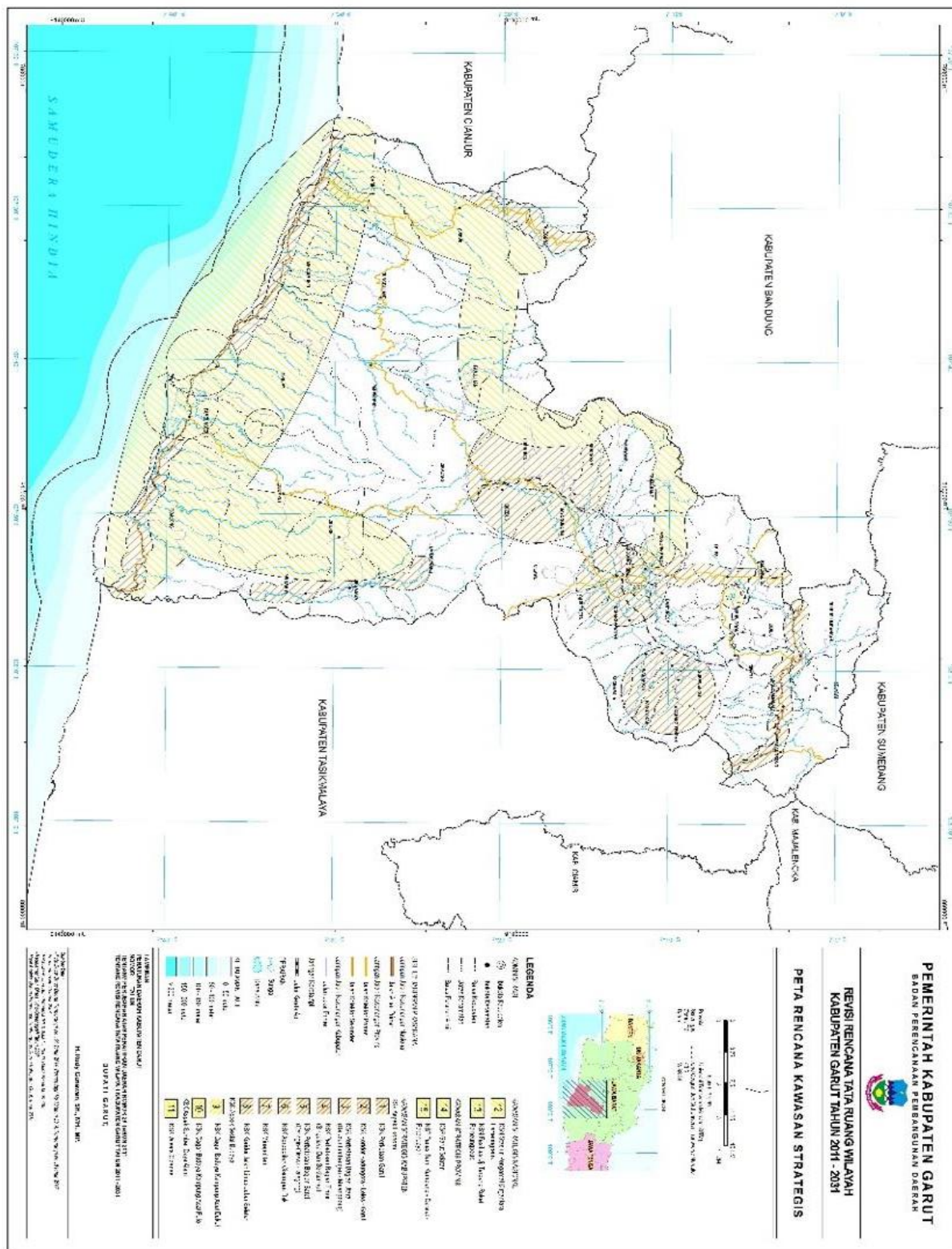
- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri atas:
 - a) KSK Perkotaan Garut terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
 - b) KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
 - c) KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatuan, dan Malangbong.
 - d) KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip.
 - e) KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.
 - f) KSK Agropolitan terletak di Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.



- g) KSK Minapolitan terletak di Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan.
 - h) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin.
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh yang berada di Kecamatan Cikelet dan Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles.
- 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas yang berada di Kecamatan Tarogong Kaler.

Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 mencapai sebesar 50,65% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Gambar 2.11.
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak 2.649.198 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.356.194 jiwa dan perempuan sebanyak 1.293.004 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,84%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 menjadi rata-rata sebesar 852,64 jiwa/km².

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2019–2023
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)*	2.622.425	2.585.607	2.604.787	2.627.220	2.649.198
- Laki-Laki (Jiwa)	1.319.079	1.324.971	1.334.360	1.345.400	1.356.194
- Perempuan (Jiwa)	1.303.346	1.260.636	1.270.427	1.281.820	1.293.004
2. Sex ratio (%)	101,21	105,1	105	105,12	104,89
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*	0,61	0,75	0,56	0,86	0,84
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	844,02	843,54	849,80	845,57	852,64
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	656.977	658.461	650.096	655.467	
6. Rasio Ketergantungan Umur	57,65	57,50	47,23	47,27	
<i>Keterangan : Hasil proyeksi interim</i>					
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)*		2,577,354	2,613,540	2,648,990	2,683,690
- Laki-Laki (Jiwa)		1,320,592	1,338,410	1,355,750	1,372,710
- Perempuan (Jiwa)		1,256,762	1,275,130	1,293,240	1,310,980
2. Sex ratio (%)		105.08	104.96	104.83	104.71
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*			1.4	1.36	1.31
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		829.52	841.16	852.57	863.74
5. Rasio Ketergantungan Umur		47.31	47.1	46.97	46.92
<i>Keterangan : Hasil proyeksi penduduk kabupaten Garut tahun 2020-2035</i>					

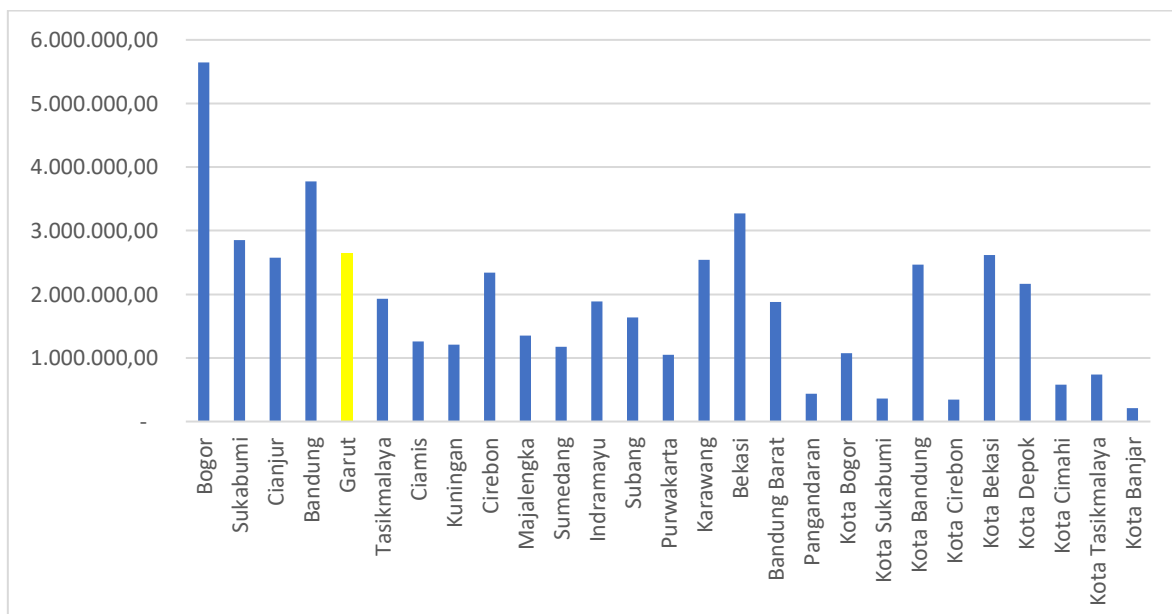
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan

perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2023 sebesar 104,89 yang berarti ada sekitar 104,89 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data penduduk BPS, jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2023 termasuk ke dalam 5 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut.

Gambar 2.12.

**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023* (Ribu Jiwa)**



Keterangan : * Hasil proyeksi interim

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Sementara itu, gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2023 menjadi 2.753.949 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang dilaporkan melalui SIK dapat dilihat bahwa jumlah penduduk cenderung menurun hal ini disebabkan oleh upaya dari pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data terhadap data kematian kepada desa melalui penyebaran buku pokok pemakaman dan pendataan terhadap pindah-datang warga, sehingga penurunan jumlah penduduk ini terdata dan telah dilaporkan kepada Dirjen Dukcapil. Kondisi

penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) penduduk pada tahun 2023 adalah sebesar 104,38 yang berarti ada sekitar 104 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK
Tahun 2019–2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.284.418	2.514.515	2.550.203	2.759.490	2.753.949
- Laki-Laki (Jiwa)	1.168.329	1.285.225	1.302.006	1.408.225	1.406.452
- Perempuan (Jiwa)	1.116.089	1.229.290	1.248.197	1.351.265	1.347.497
2. <i>Sex ratio</i> (%)	104,68	104,55	104,31	104,21	104,38
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,19	10,7	1,42	8,20	-0,20
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	735,24	809,29	820,78	888,13	886,35
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	844.182	849.981	856.511	915.327	907.609

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2023, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data pada SIAK, penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2023 berada di kecamatan Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota, Cilawu dan Tarogong Kidul.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan
Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019–2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garut Kota	120.315	125.822	127.346	134.153	132.592
2	Karangpawitan	119.903	132.051	134.108	146.364	146.285
3	Wanaraja	41.655	46.333	47.313	51.288	50.856
4	Tarogong Kaler	86.458	91.821	92.720	100.132	100.379
5	Tarogong Kidul	104.582	111.330	112.076	119.111	117.771
6	Banyuresmi	82.182	89.798	91.588	98.510	98.120
7	Samarang	67.876	75.647	76.595	83.393	83.474
8	Pasirwangi	53.093	62.210	63.660	70.786	72.067
9	Leles	72.259	79.785	81.145	88.428	88.552
10	Kadungora	87.039	92.200	93.564	99.715	98.247
11	Leuwigoong	42.449	46.040	46.557	50.780	50.445
12	Cibatu	68.397	73.144	73.838	79.110	78.141
13	Kersamanah	35.610	38.289	38.676	41.963	41.740
14	Malangbong	111.994	128.568	130.890	141.383	140.522
15	Sukawening	51.488	55.859	56.429	60.595	60.059

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
16	Karangtengah	16.863	18.337	18.555	19.893	19.703
17	Bayongbong	89.994	97.931	98.363	106.153	106.416
18	Cigedug	36.856	41.451	42.031	45.534	45.708
19	Cilawu	99.052	105.627	107.319	115.919	115.269
20	Cisurupan	80.624	92.120	93.760	103.678	106.621
21	Sukaesmi	34.271	38.778	39.405	43.247	43.716
22	Cikajang	72.433	79.741	81.183	87.518	87.722
23	Banjarwangi	44.142	54.049	55.656	61.096	60.964
24	Singajaya	39.885	45.762	46.107	50.065	49.644
25	Cihurip	16.766	18.616	18.912	20.236	19.946
26	Peundeuy	20.342	23.222	23.702	25.714	25.117
27	Pameungpeuk	38.511	42.165	42.419	44.970	44.443
28	Cisompet	47.339	51.185	52.199	55.918	56.005
29	Cibalong	39.716	44.368	45.168	48.588	48.408
30	Cikelet	38.425	42.903	43.743	46.905	46.832
31	Bungbulang	50.186	54.917	55.221	60.636	61.173
32	Mekarmukti	16.126	18.176	18.474	19.667	19.430
33	Pakenjeng	56.200	64.975	66.068	73.072	74.098
34	Pamulihan	16.516	18.212	18.270	19.518	19.330
35	Cisewu	30.482	32.743	33.106	35.424	34.956
36	Caringin	26.909	31.162	32.205	35.127	35.070
37	Talegong	25.681	28.102	28.511	30.846	30.529
38	Bl. Limbangan	67.553	75.841	76.794	86.029	85.937
39	Selaawi	39.021	41.474	41.613	44.820	44.474
40	Cibiuk	31.536	34.209	34.631	37.414	37.478
41	Pangatikan	37.210	40.636	41.093	44.340	44.235
42	Sucinaraja	26.479	28.916	29.190	31.452	31.475
	Jumlah	2.284.418	2.514.515	2.550.203	2.759.490	2.753.949

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2023, yang dikelola dalam SIPD

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Secara makro besaran PDRB yang diukur atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,639 Triliun atau 8,47% dari Rp 66,59 Triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 72,23 Triliun pada tahun 2023. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 2.10.

Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2019–2023

Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
a. PDRB atas dasar harga berlaku	Juta Rp	57.579.150	58.043.000	60.836.770	66.590.620	72.229,23
b. PDRB atas dasar harga Konstan	Juta Rp	39.092.650	38.598.150	39.981.190	42.012.960	44.087,22
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	Jiwa	2.622.425	2.585.607	2.604.787	2.627.220	2.683.665
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rp	22.116.000	22.480.000	23.356.000	25.346.000	26.914.399
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan	Rp	14.939.000	14.949.000	15.349.000	15.991.000	16.427.989
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	-1,26	3,58	5,08	4,94
g. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh berlaku	%	8,46	1,72	4,04	8,52	6,19
h. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh konstan	%	4,37	0,14	2,82	4,18	2,73

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan di Kabupaten Garut pada tahun tahun 2023 juga mengalami peningkatan 2022 juga mengalami peningkatan Rp 436 Juta atau tumbuh 2,73% dari sebesar Rp 15,99 Triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 16,427 Triliun pada tahun 2023. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2023 turun menjadi sebesar 4,94, lebih rendah 0,14 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,08 %.

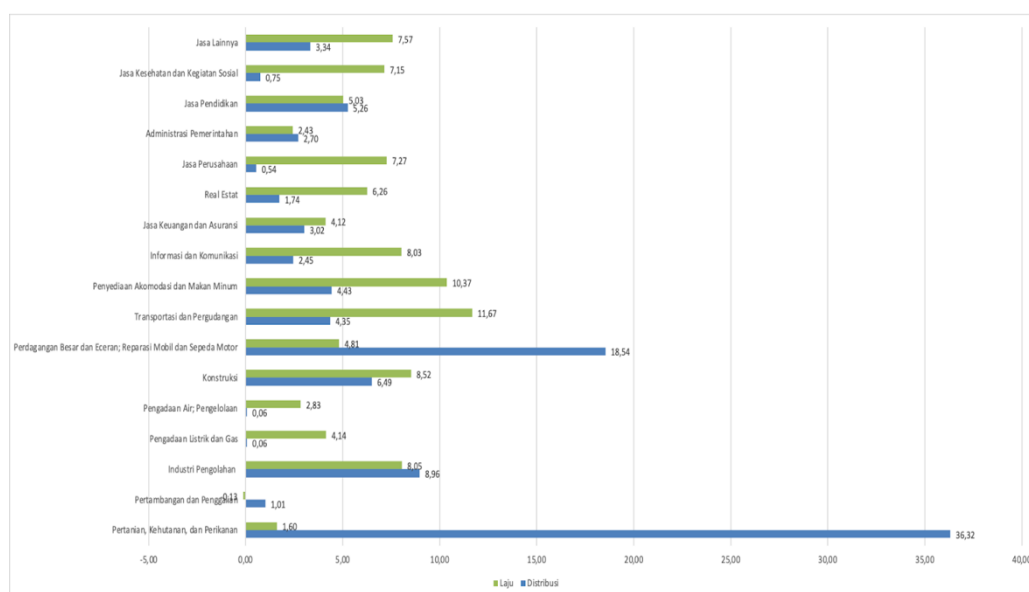
Tabel 2.11.
Target dan Realisasi serta Capaian Indikator
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	5,5	-3,07	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4	4,59 - 5,51	5,23
Realisasi (%)	5,02	-1,26	3,58	5,08	4,97	
Capaian (%)	91,27	-131,72	92,27	104,63	97,8	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Apabila dibandingkan dengan target LPE tahun 2023 sebesar 4,59 % - 5,51 %, maka capaian LPE 2023 adalah 97,8 % dari median range target tersebut. Data perbandingan target dan realisasi serta capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi tersaji pada tabel.

Gambar 2.13.
Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020-2023, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 36,32 % pada tahun 2023, meskipun memang mengalami penurunan 1,06 % dari Tahun 2022 sebesar 37,38 %. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian, perubahan iklim yang menyebabkan kemarau berkepanjangan juga turut menjadi penyebab menurunnya produktivitas hasil pertanian. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2023 selain sektor pertanian, adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 18,54% dan sektor industri pengolahan sebesar 8,96 %.

Tabel 2.12.
Pertumbuhan PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023 (Persen)

Lapangan Usaha	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,41	0,55	3,61	4,43	1,60
2. Pertambangan dan Penggalian	%	0,12	-0,69	1,29	-0,09	-0,13
3. Industri Pengolahan	%	8,93	-0,46	5,91	6,29	8,05
4. Pengadaan Listrik dan Gas	%	4,29	-1,21	10,18	3,62	4,14
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,23	6,42	9,82	2,81	2,83
6. Konstruksi	%	7,74	-5,58	6,82	1,98	8,52
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,91	-6,72	3,08	4,53	4,81
8. Transportasi dan Pergudangan	%	5,03	-3,21	0,21	11,89	11,67
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	10,50	-3,05	0,25	17,02	10,37
10. Informasi dan Komunikasi	%	3,91	23,15	7,28	6,07	8,03
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	%	5,54	0,48	4,33	0,19	4,12
12. Real Estate	%	9,24	-0,15	9,98	4,50	6,26
13. Jasa Perusahaan	%	7,55	-13,45	8,54	9,98	7,27
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	2,60	-1,74	-0,86	-0,31	2,43
15. Jasa Pendidikan	%	7,09	4,95	1,09	2,77	5,03
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	7,98	-5,09	7,59	7,25	7,15
17. Jasa lainnya	%	6,37	-2,76	0,82	9,82	7,57

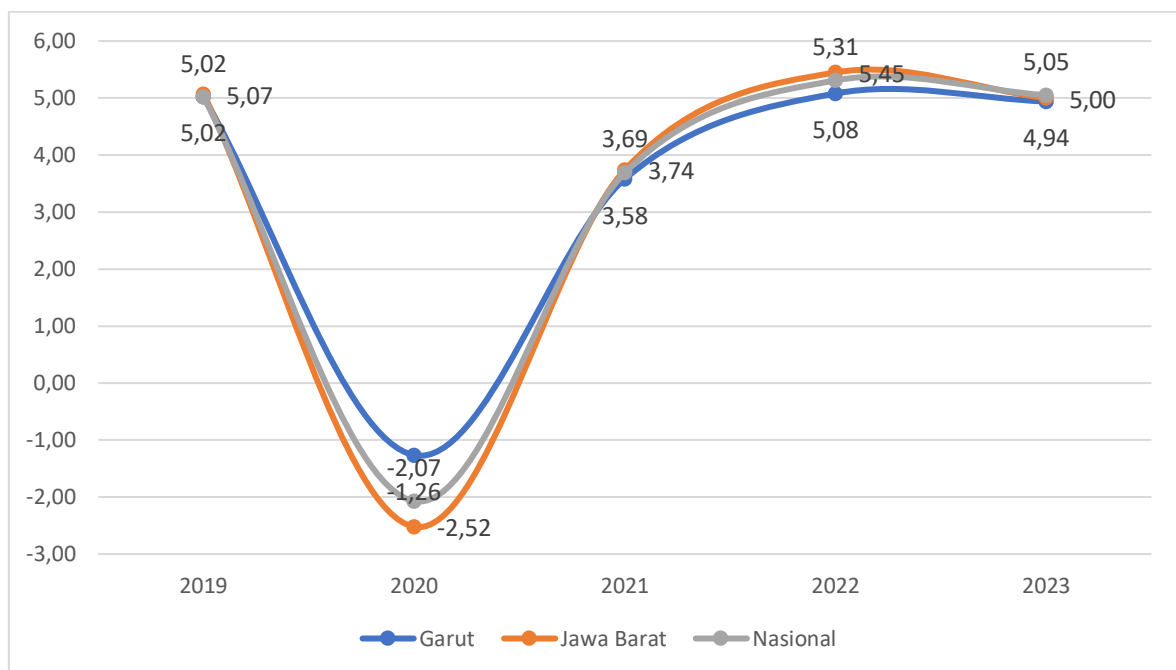
Sumber : BPS Garut Tahun 2023 diolah Bappeda

Adapun dilihat dari sektor lapangan usaha, hampir semuanya mencatatkan pertumbuhan positif kecuali untuk Pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan 1,03%. Sektor lapangan usaha yang menyumbang

pertumbuhan tertinggi yaitu Transportasi dan Pergudangan (11,67%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,37%), Konstruksi (8,52%), Industri Pengolahan (8,05%), Informasi dan Komunikasi (8,03%) dan Jasa Lainnya (7,57%).

Pada periode 2023, kinerja perekonomian Kabupaten Garut sebesar 4,97% masih berada dibawah capaian LPE Provinsi Jawa Barat (5,00%) dan Nasional (5,0%).

Gambar 2.14.
Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terhadap kabupaten/kota se-Jawa Barat menunjukkan LPE Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-23, turun tujuh peringkat dibandingkan tahun 2022. Adapun data perbandingan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten Garut dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2023

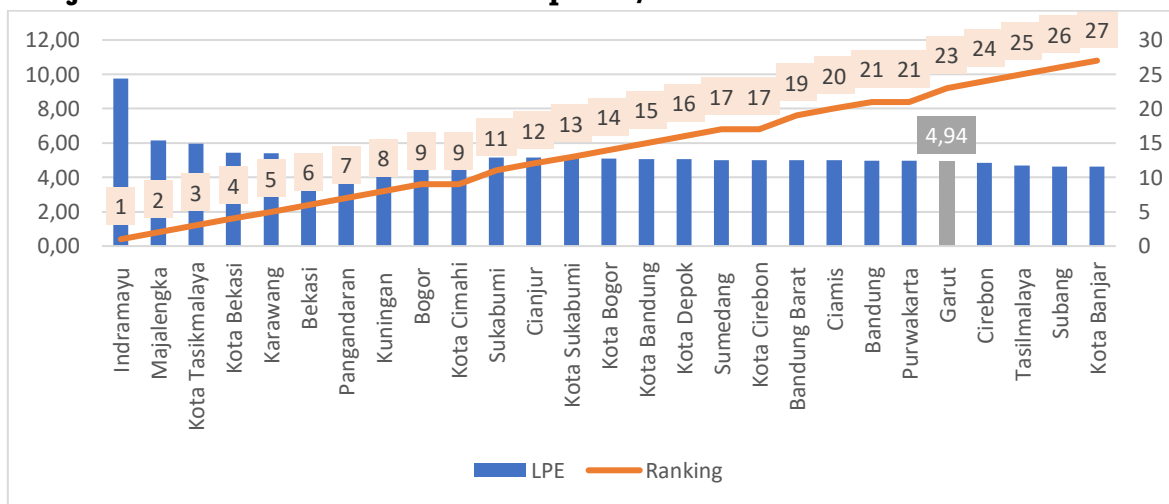
No	Kabupaten/Kota	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	Peringkat
1	Bogor	%	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19	9
2	Sukabumi	%	5,64	-0,92	3,75	5,12	5,17	11
3	Cianjur	%	5,67	-0,78	3,48	5,04	5,16	12
4	Bandung	%	6,36	-1,80	3,56	5,35	4,97	21
5	Garut	%	5,02	-1,26	3,58	5,08	4,94	23

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	Peringkat
6	Tasikmalaya	%	5,43	-0,98	3,43	4,7	4,69	25
7	Ciamis	%	5,38	-0,14	3,66	5,02	4,99	20
8	Kuningan	%	6,59	0,11	3,56	5,53	5,25	8
9	Cirebon	%	4,68	-1,08	2,47	4,09	4,85	24
10	Majalengka	%	7,77	0,89	4,75	6,63	6,15	2
11	Sumedang	%	6,33	-1,12	3,17	5,03	5,01	17
12	Indramayu	%	3,20	-1,58	0,58	2,88	9,76	1
13	Subang	%	4,61	-1,15	2,40	4,21	4,64	26
14	Purwakarta	%	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97	21
15	Karawang	%	4,21	-3,80	5,85	6,31	5,40	5
16	Bekasi	%	3,95	-3,40	3,65	5,3	5,32	6
17	Bandung Barat	%	5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00	19
18	Pangandaran	%	5,94	-0,05	3,67	5,03	5,26	7
19	Kota Bogor	%	6,19	-0,41	3,76	5,65	5,10	14
20	Kota Sukabumi	%	5,53	-1,49	3,71	5,35	5,12	13
21	Kota Bandung	%	6,79	-2,28	3,76	5,41	5,07	15
22	Kota Cirebon	%	6,29	-0,98	3,04	5,1	5,01	17
23	Kota Bekasi	%	5,41	-2,58	3,22	4,96	5,43	4
24	Kota Depok	%	6,74	-1,92	3,76	5,24	5,05	16
25	Kota Cimahi	%	7,85	-2,26	4,19	5,92	5,19	9
26	Kota Tasikmalaya	%	5,97	-2,01	3,57	5,01	5,96	3
27	Kota Banjar	%	5,03	0,94	3,46	4,19	4,63	27

Sumber: BPS Garut tahun 2024 diolah Bappeda

Gambar 2.15.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan gap kenaikan tahun 2020-2022, maka capaian LPE Kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran IV.

The scatter plot displays the relationship between the rate of economic growth (Laju Pertumbuhan Ekonomi) and the rate of change in economic growth (Perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi) for various districts in West Java, 2021-2022. The plot is divided into four quadrants (Kuadran I, II, III, IV) based on the LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) threshold of 5.10% and the LPE change threshold of 1.50%.

Legend:

- Kuadran I: Blue
- Kuadran II: Green
- Kuadran III: Orange
- Kuadran IV: Red

Quadrant Information:

- Kuadran IV:** Kabupaten/Kota: GARUT, Perubahan LPE: 1.50, LPE (%): 5.08

Data Points (Districts):

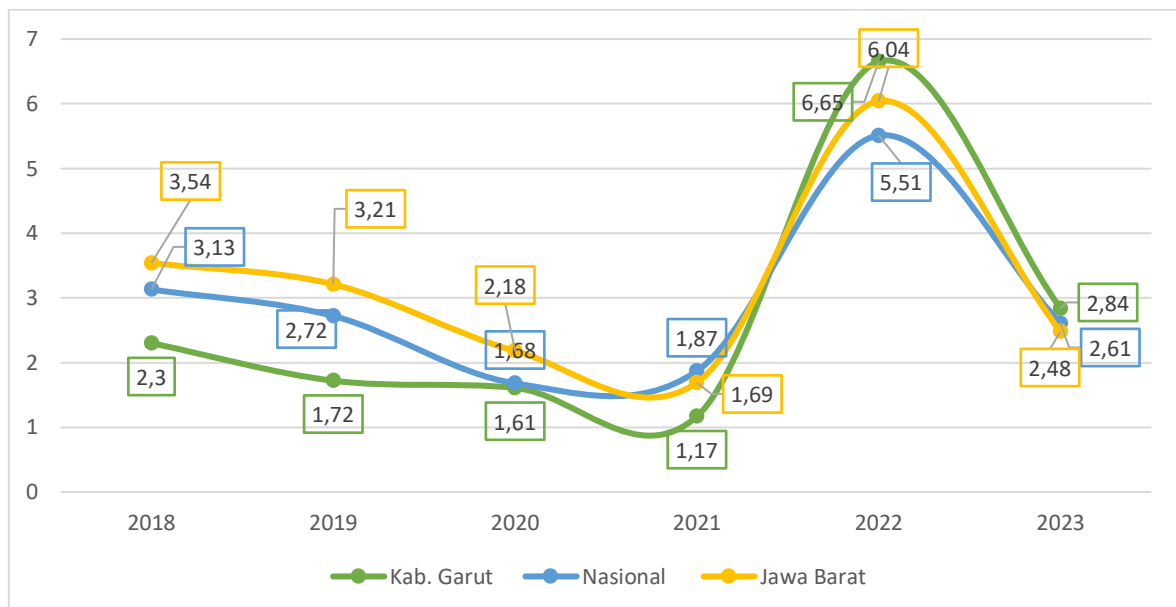
- KARAWANG (Green, Kuadran II)
- KOTA BANJAR (Red, Kuadran IV)
- TASIKMALAYA (Red, Kuadran IV)
- CIAMIS (Red, Kuadran IV)
- SUKABUMI (Green, Kuadran II)
- KOTA DEPOK (Green, Kuadran II)
- CIANJUR (Red, Kuadran IV)
- SUBANG (Red, Kuadran IV)
- KOTA CIREBON (Orange, Kuadran III)
- KOTA BEKASI (Orange, Kuadran III)
- SUMEDANG (Orange, Kuadran III)
- KOTA CIMAHI (Blue, Kuadran I)
- KOTA BOGOR (Blue, Kuadran I)
- KUNINGAN (Blue, Kuadran I)
- KOTA CIREBON (Blue, Kuadran I)
- INDRAMAYU (Orange, Kuadran III)
- MAJALENGA (Blue, Kuadran I)

Kelompok kabupaten/kota pada Kuadran I yaitu kabupaten/kota dengan capaian LPE Tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata (5,11%) dan gap rata-rata kenaikan LPE Tahun 2021-2022 lebih rendah dari rata-rata gap Kabupaten/Kota di Jawa Barat, LPE Kabupaten Garut berada pada angka 1,50% (1,61%). Indikasi yang dapat ditangkap yaitu Kabupaten Garut sudah memasuki fase pemulihan atau recovery ekonomi.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2023, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya sebesar 2,84% dengan IHK sebesar 114,96 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 116,16 tercatat inflasi tertinggi di Jawa Barat terjadi di Kota Bogor yakni sebesar 3,36%, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang lebih terkendali dibandingkan tahun

sebelumnya. Kondisi inflasi pada tahun 2023 dipengaruhi oleh komoditas beras, cabai merah, rokok kretek filter, sewa rumah, kontrak rumah, emas perhiasan, cabai rawit, bawang putih, rokok putih, rekreasi, daging ayam ras, sate, gula pasir, sekolah menengah atas, upah asisten rumah tangga. Sementara komoditas yang memberikan andil/ sumbangan deflasi y-on-y, diantaranya tarif air minum PAM, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, minyak goreng, bensin, bawang merah, tomat, sabun cair/cuci piring, daging sapi, petai, sepatu wanita, ikan gurame, tas sekolah, laptop/notebook, melon, telpon seluler. Penurunan inflasi hampir merata di seluruh wilayah termasuk inflasi Jawa Barat sebesar 2,48% dan Nasional sebesar 2,61%. Pencapaian inflasi tahun 2023 mencapai 10,00% dari target Tahun 2022 sebesar 2,5% - 4,5%. Pada tahun 2023 berdasarkan berita resmi yang dirilis oleh BPS pada semester 1 tahun 2023 atau per juni tahun 2023 Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 3,88% cenderung menurun jika dibandingkan dengan data inflasi YoY juni tahun 2023. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.17.
Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel 2.8 dibawah ini capaian target inflasi tahun 2023 berada pada nilai 118,86 persen dengan inflasi berada pada nilai 2,84 persen. Data target dan realisasi serta capaian indikator inflasi tahun 2019 hingga target tahun 2024 akan disajikan pada tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14.
Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Inflasi
Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	6	1,12-3,12	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
Realisasi (%)	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84	
Capaian (%)	171,33	124,05	166,57	10,00	118,86	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Perbandingan inflasi tahun 2023 pada tujuh kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Garut sebesar 2,84% (berdasarkan data BPS mengacu pada inflasi di Kota Tasikmalaya), mengalami inflasi tertinggi kedua dibandingkan dengan 6 kota lainnya, dan Kota Bandung berada pada peringkat satu dengan nilai inflasi 7,45%.

Tabel 2.15.
Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya
Tahun 2023 di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional

Kota		IHK Des 2023	Inflasi Des 2023	Inflasi Tahun Kalender (ytd)	Inflasi Tahun ke tahun (yoy)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	119,42	0,22	3,36	3,66
2	Sukabumi	116,40	0,19	2,72	2,72
3	Bandung	116,16	0,32	0,63	0,63
4	Cirebon	113,87	0,29	3,22	3,22
5	Bekasi	119,30	0,54	3,14	3,14
6	Depok	117,76	0,27	2,49	2,49
7	Tasikmalaya	114,96	0,27	2,84	2,84
Gabungan Jawa Barat		117,96	0,37	2,48	2,48
Nasional		116,56	0,41	2,61	2,61

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

c. PDRB Perkapita

Pada tahun 2023, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami pertumbuhan sebesar 6,19 % atau dari semula Rp 25,35 juta pada tahun 2022 menjadi Rp 26,91 juta pada tahun 2023. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata.

Tabel 2.16.
Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	adh Berlaku	adh Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2019	22,12	14,939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22,48	14,949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23,36	15,349	2.604.787	3,90	2,68
2022	25,35	15,991	2.627.220	8,52	4,18
2023	26,91	16,427	2.683.665	6,19	2,73

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan, namun demikian capaian Kabupaten Garut masih tergolong rendah jika dibandingkan capaian Jawa Barat sebesar Rp 52,65 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp 74,96 juta.

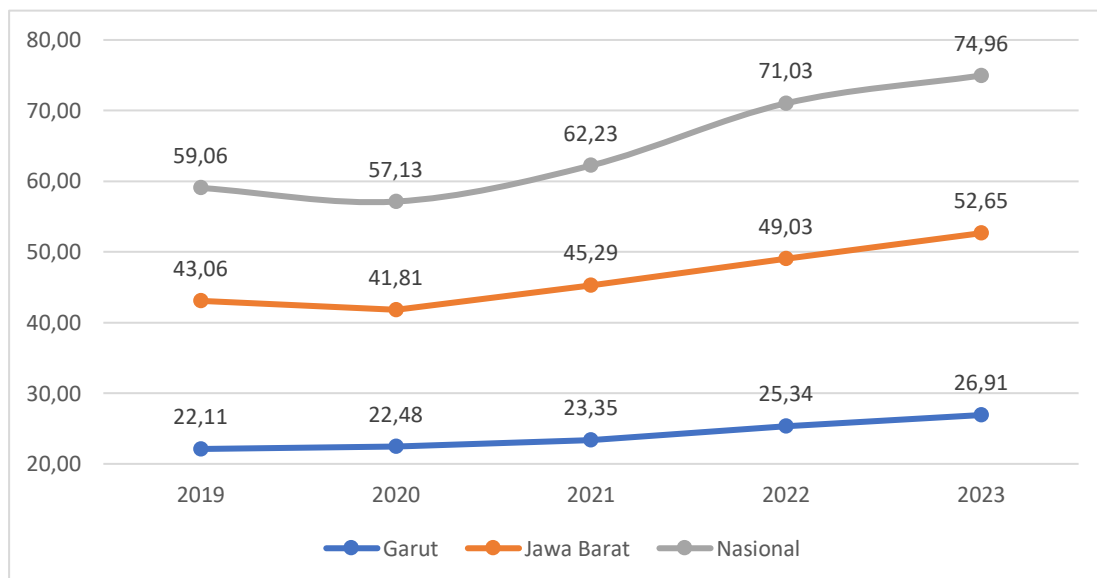
Tabel 2.17.
Target dan Realisasi serta Capaian Indikator PDRB Perkapita ADHB
Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (Juta Rp.)	21,28	21,62-22,09	22,39-22,59	23,25-23,52	24,33-24,49	25,43-25,61
Realisasi (Juta Rp.)	22,12	22,48	23,36	25,35	26,91	
Capaian (%)	103,16	100,70	103,85	108,40	110,24	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel 2.17 diatas data realisasi PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan tingkat capaian pada tahun 2023 berada pada nilai 110,24 persen atau dalam artian target telah dapat terpenuhi.

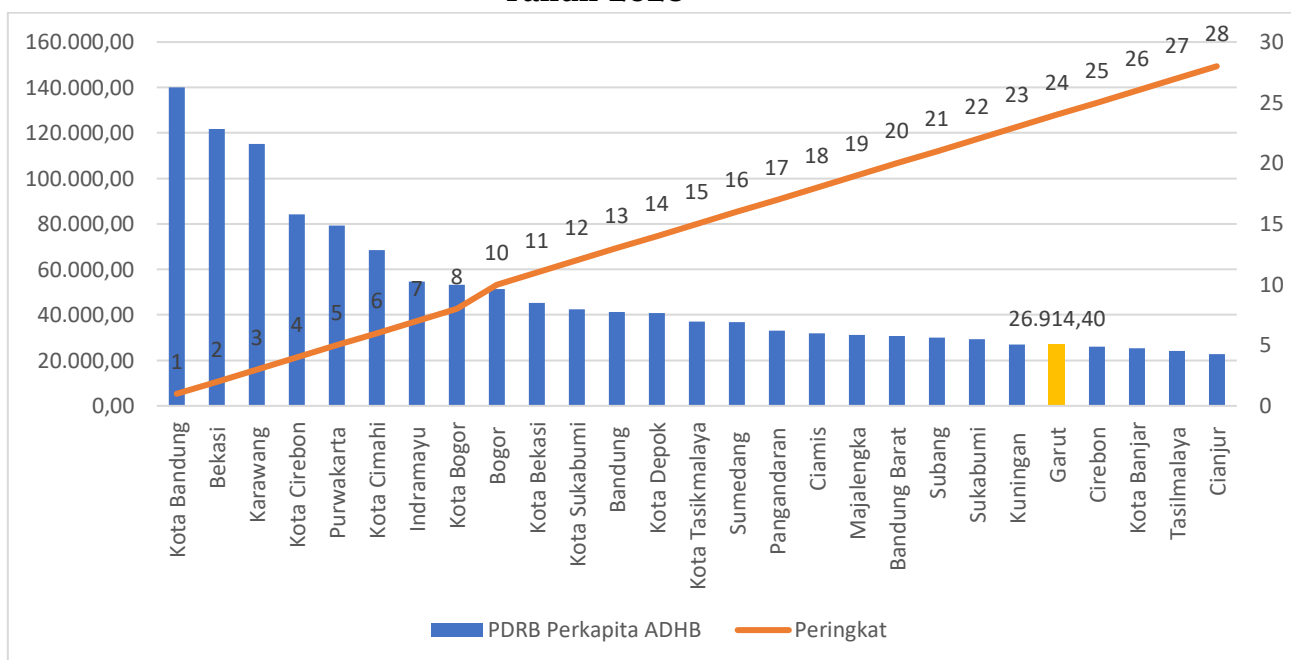
Gambar 2.18.
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Pencapaian PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Garut Tahun 2023 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, berada di peringkat 24 sama dengan peringkat dari tahun sebelumnya di bawah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.

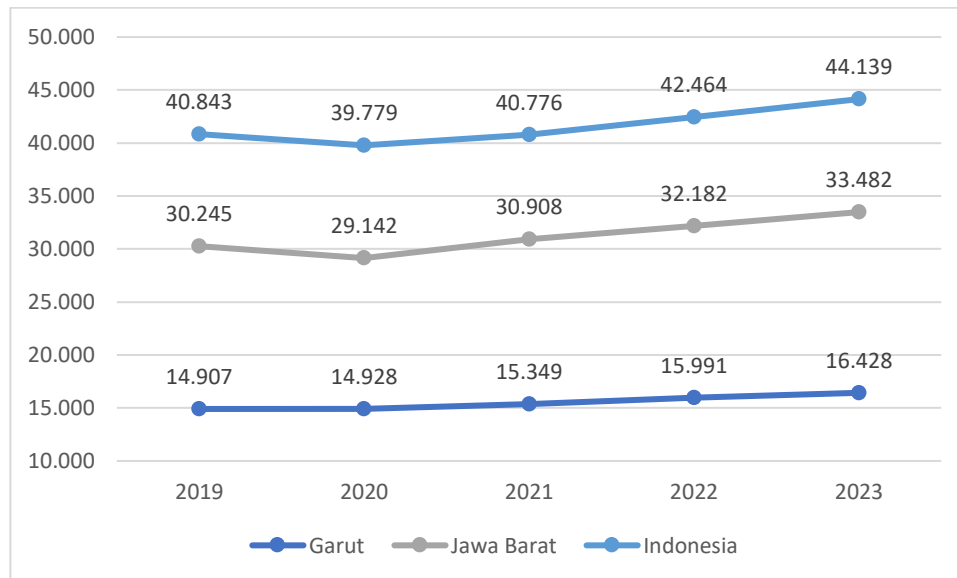
Gambar 2.19.
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

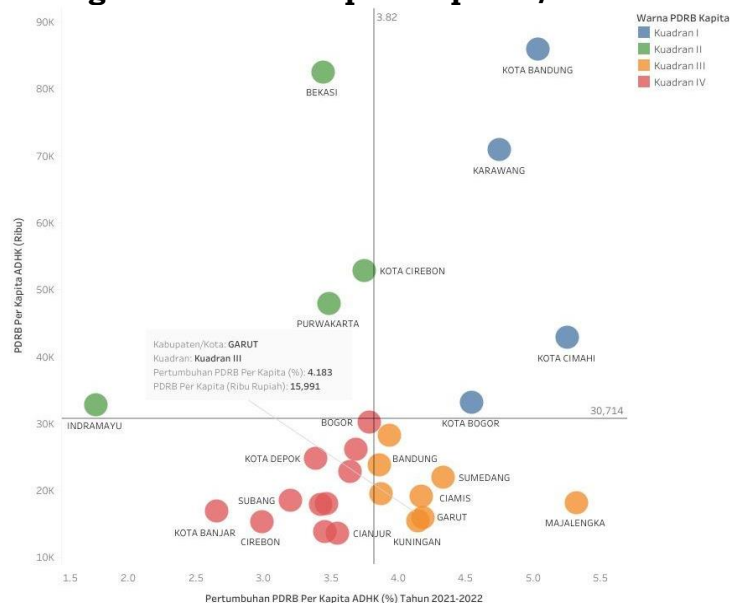
Capaian PDRB perkapita adh konstan tahun 2023 sebesar Rp.16,428 juta capaian ini sudah cenderung meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang berada pada angka Rp.15,86 juta, meskipun cenderung meningkat capaian PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Garut masih tergolong rendah atau hanya mencapai 49,06 % dari capaian Jawa Barat sebesar Rp 33,482 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp 44,139 juta.

Gambar 2.20.
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHK) Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.21.
Analisis Kuadran Perbandingan Capaian PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten
Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022



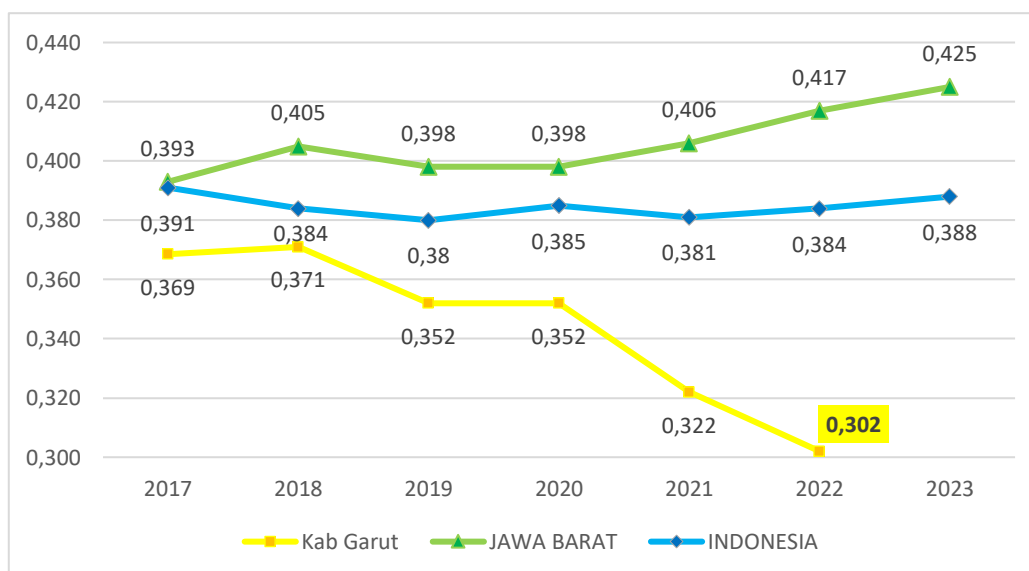
Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PDRB per kapita kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan gap kenaikan tahun 2021-2022, maka capaian PDRB per kapita kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran III, yaitu kabupaten/kota dengan pencapaian PDRB per kapita lebih rendah dari rata-rata (Rp 16,3 juta).

d. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai rasio gini, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 2.22.
Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2022 berada pada level menengah dengan besaran 0,302, lebih baik dari tahun 2021 sebesar 0,020 poin dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,417 dan Nasional sebesar 0,381. Pencapaian Indeks Gini tahun 2022 mencapai 116,34% dari target pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 0,360-0,362 poin.

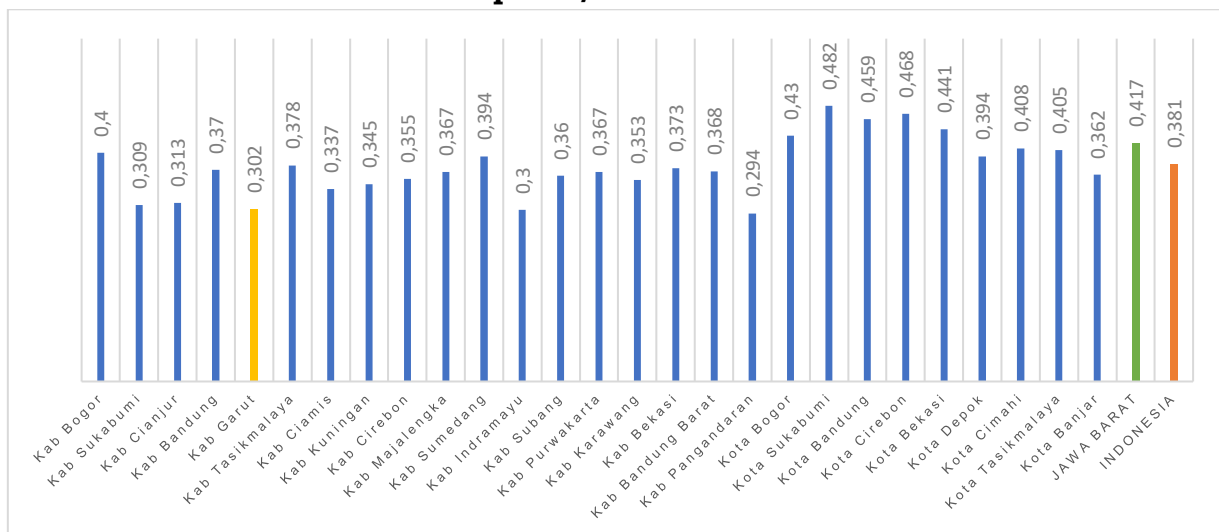
Tabel 2.18.
Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Indeks Gini
Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	n/a	0,359-0,361	0,360-0,362	0,36 – 0,362	0,36 – 0,362	0,35
Realisasi (%)	0,352	0,352	0,322	0,302		
Capaian (%)	n/a	110,52	102,22	116,34		

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

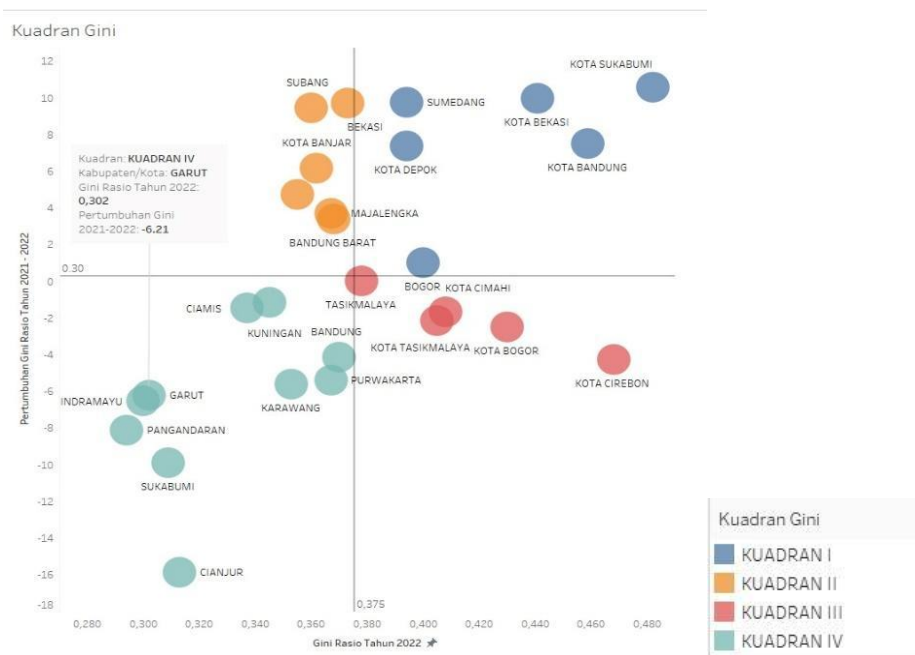
Jika dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Barat, pada tahun 2022 Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 di bawah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Indramayu. Kondisi tersebut sama dengan tahun 2021 Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah.

Gambar 2.23.
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.24.
Analisis Kuadran Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

Dari analisis kuadran, Kabupaten Garut berada di kuadran IV yaitu kabupaten/kota dengan pencapaian Indeks Gini lebih lebih baik dari rata-rata (0,375) dan penurunan/perbaikan tingkat ketimpangan lebih baik dari rata-rata, turun 0,020 poin menjadi 0,302 pada tahun 2022.

e. Penduduk Miskin

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 0,65% dari 10,42% menjadi 9,77% (Maret 2023). Angka ini masih lebih tinggi dari angka Provinsi (7,62%) dan Nasional (9,36%). Secara jumlah, penduduk miskin telah berkurang sekitar 16.190 jiwa menjadi 260,48 ribu jiwa pada tahun 2023.

Tabel 2.19.
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	301.202	310.437	320.050	335.134	367.681
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	235,19	262,78	281,36	276,67	260,48
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	8,98	9,98	10,65	10,42	9,77

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,87	0,97	1,40	1,81	1,17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,15	0,29	0,45	0,23

Sumber : Berita Resmi Statistik 2023 BPS Kabupaten Garut, per Maret Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut, secara umum pencapaian pada tahun 2023 belum dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

Tabel 2.20.
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan
Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2019	265.769	235.190	111,51%	111,51%	9,63	8,98	106,75%	106,75%
2020	252.110 – 265.410	262.780	98,75%	63,26%	6,92-7,03	9,98	80,48%	56,92%
2021	240.960 – 254.380	281.360	86,40%	53,59%	8,98-9,48	10,65	84,62%	47,31%
2022	227.670-230.670	276.670	79,27%	56,03%	8,41 - 8,52	10,42	76,90%	50,60%
2023	209.170-212.170	260.480	76,36%	64,45%	7,66 - 7,77	9,77	73,36%	59,93%
2024	190.670-193.670				6,92 - 7,03			

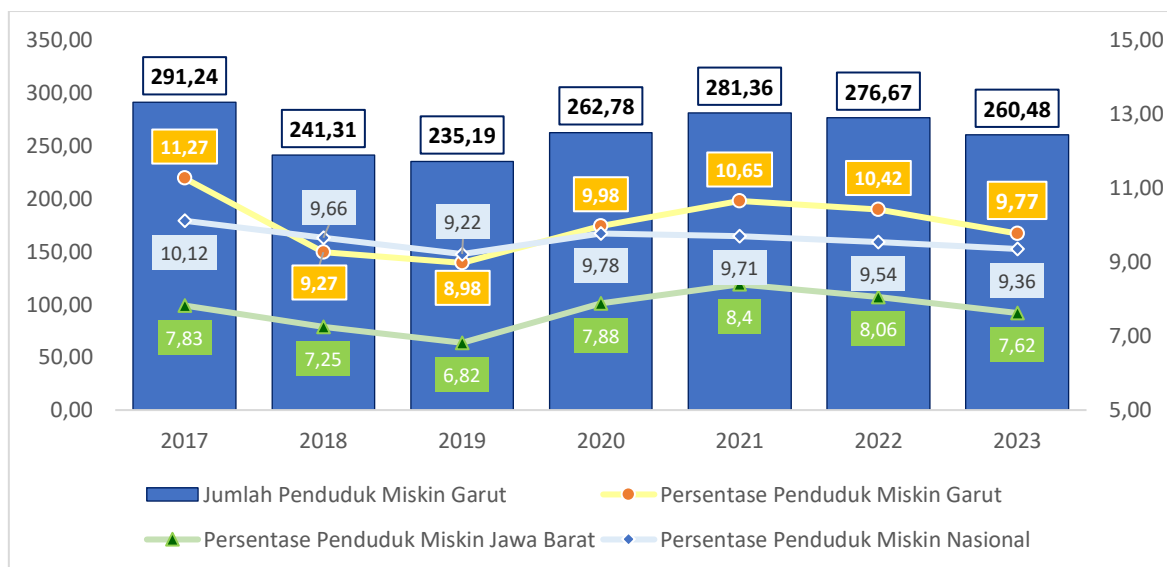
Sumber : Target RPJMD Kab. Garut dan data realisasi BPS Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2023 mengalami peningkatan Rp 32.547,- per kapita per bulan atau sebesar 9,71 % dari Rp 335.134,- per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 367.681,- per kapita per bulan pada tahun 2023. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2019-2023, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2015-2023. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2023 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non

makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Gambar 2.25.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Garut – Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

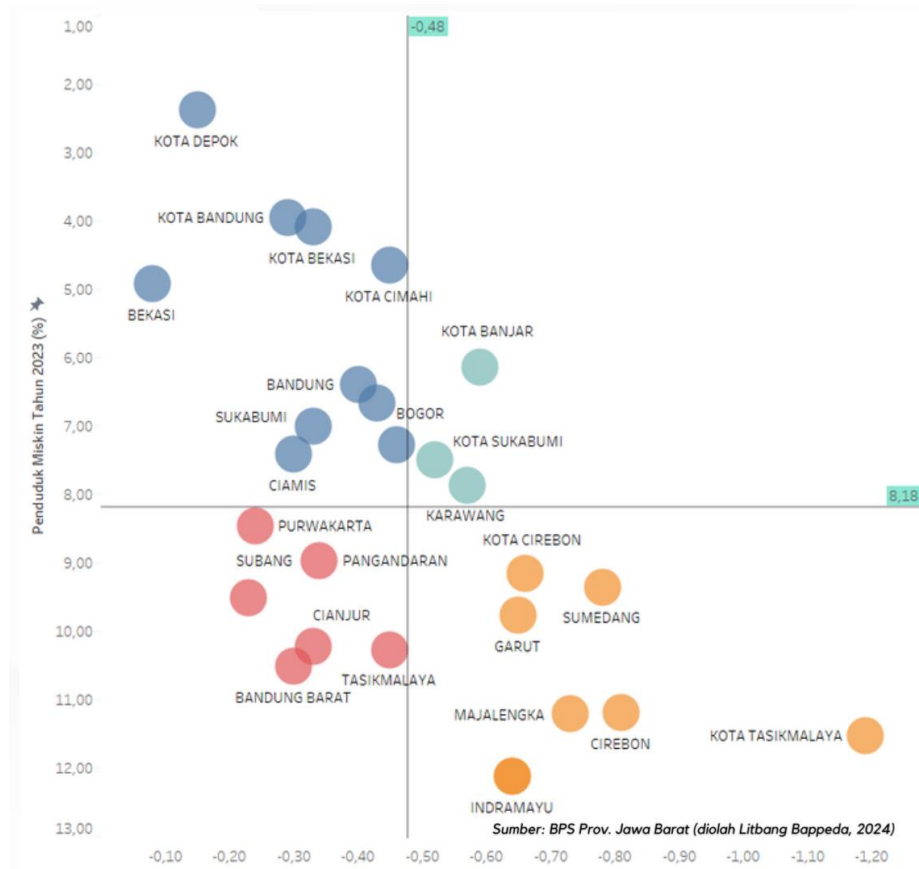


Sumber : BPS Kabupaten Garut, Maret Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,77% pada tahun 2023, berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 7,62 % dan Nasional sebesar 9,36 %. Hal ini perlu menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Garut. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut berada dalam urutan 10 besar kabupaten/kota persentase penduduk miskin terbanyak.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian persentase penduduk miskin kabupaten tahun 2023 dibandingkan dengan gap penurunan persentase penduduk miskin tahun 2022-2023, maka Kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran III dengan angka capaian persentase penduduk miskin diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan laju peningkatan diatas rata-rata.

Gambar 2.26.
Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan
Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

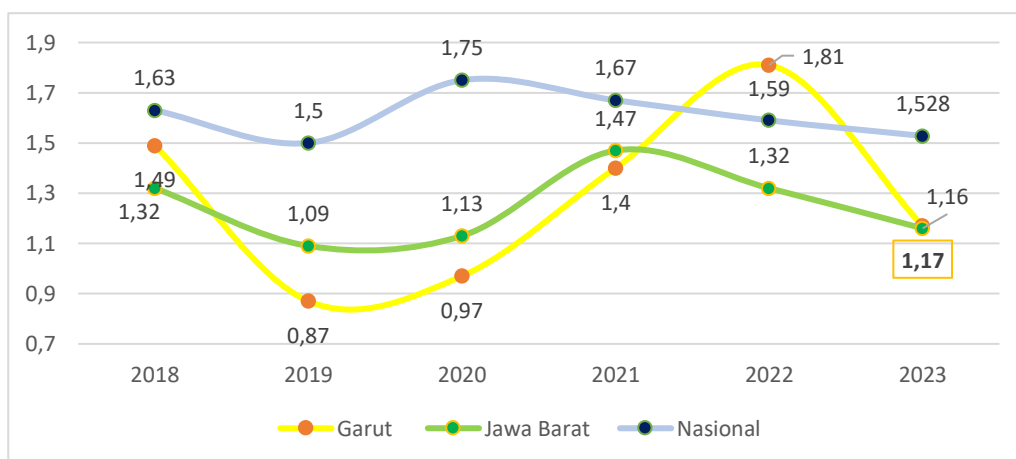
Bahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari indikator makro. Kabupaten Garut berada di kuadran III yang memiliki jumlah warga miskin di atas rata-rata provinsi (260,48 ribu jiwa) dan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 16,190 ribu jiwa. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa masyarakat Kabupaten Garut memiliki kerentanan tinggi dalam menghadapi sebuah krisis ekonomi.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahannya (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran

di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan naik. Ini mengindikasikan adanya perburukan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,81 poin pada tahun 2022 menjadi 1,17 poin pada tahun 2023, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2023 tersebut diatas Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar 1,16 poin dan dibawah Nasional sebesar 1,528 poin.

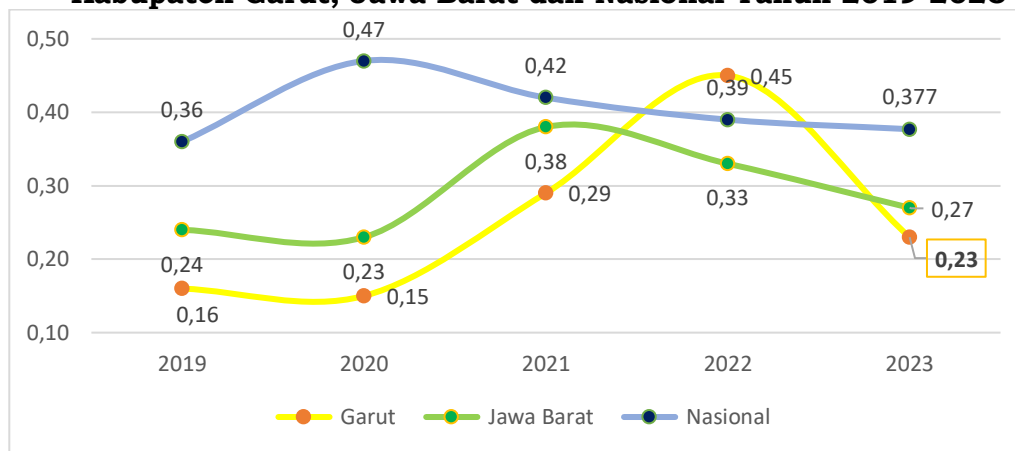
Gambar 2.27.
Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,45 poin pada tahun 2022 menjadi 0,23 poin pada tahun 2023, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menurun. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2023 tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,27 poin maupun Nasional sebesar 0,377 poin.

Gambar 2.28.
Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial, jumlah total DTKS Kabupaten Garut Tahun 2023 sebanyak 1.815.818 jiwa dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.21.
Jumlah DTKS menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	Banjarwangi	53.313	21.679
2	Banyuresmi	62.826	24.401
3	Bayongbong	64.471	23.100
4	Bl. Limbangan	55.815	21.584
5	Bungbulang	35.365	15.158
6	Caringin	21.304	8.904
7	Cibalong	37.445	15.289
8	Cibatu	55.999	20.957
9	Cibiuk	19.901	7.301
10	Cigedug	28.141	11.016
11	Cihurip	14.612	6.342
12	Cikajang	53.298	22.314
13	Cikelet	33.556	13.369
14	Cilawu	79.247	30.696
15	Cisewu	19.322	9.214
16	Cisompet	43.048	16.720
17	Cisurupan	64.294	26.706
18	Garut Kota	91.930	33.664
19	Kadungora	60.241	23.214
20	Karangpawitan	91.680	32.586
21	Karangtengah	13.565	5.170
22	Kersamanah	29.641	10.533
23	Leles	46.279	19.562
24	Leuwigoong	33.169	12.730
25	Malangbong	100.328	36.084
26	Mekarmukti	14.444	6.028

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
27	Pakenjeng	61.607	24.850
28	Pameungpeuk	29.179	11.993
29	Pamulihan	13.504	5.761
30	Pangatikan	31.685	12.059
31	Pasirwangi	53.083	20.880
32	Peundeuy	19.884	7.289
33	Samarang	51.835	20.139
34	Selaawi	30.934	11.949
35	Singajaya	40.977	16.147
36	Sucinaraja	22.935	9.458
37	Sukaesmi	33.233	12.345
38	Sukawening	42.326	15.206
39	Talegong	18.783	9.074
40	Tarogong Kaler	54.783	20.429
41	Tarogong Kidul	56.388	20.745
42	Wanaraja	31.444	12.587
	WILAYAH KOSONG	1	1
	WILAYAH KOSONG	3	3
	Jumlah	1.815.818	705.236

Sumber: Dinas Sosial Kab. Garut Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD

f. Indeks Pembangunan Manusia

Status pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 68,11 poin atau mencapai 98,53% dibandingkan target IPM Tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut tumbuh 1,03% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (67,41%). Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak yang diukur dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.

Tabel 2.22.
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	% Capaian
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,11	68,63 - 69,62	98,53%
A	Indeks Pendidikan	Poin	59,91	60,46 - 62,35	97,57%
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,16	12,07 - 12,15	100,41%
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,84	8,08 - 8,58	94,12%
B	Indeks Kesehatan	Poin	80,11	79,83 - 80,03	100,22%
	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,07	71,89 - 72,02	100,16%
C	Indeks Pengeluaran	Poin	65,83	64,09 - 64,15	97,82%
	Pengeluaran per kapita	(000 Rp)	8.685	9012,5 - 9212,5	95,31%

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target	% Capaian
D	Indeks Pembangunan Manusia (LF SP 2020)	Poin	69,22		
	Indeks Kesehatan (LF SP 2020)	Poin	84,09		
	Angka Harapan Hidup (LF SP 2020)	Tahun	74,66		

Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Selama periode Tahun 2019 sampai 2023, IPM mengalami tren kenaikan kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan yang kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat tidak hanya sisi kesehatan namun juga sisi perekonomian (indeks pengeluaran) serta pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan formal. Sedangkan berdasarkan hasil Long Form SP20 IPM Kabupaten Garut pada Tahun 2023 berada pada nilai 69,22 Poin.

Tabel 2.23
Target dan Realisasi serta Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target(Poin)	75,02	66,41-66,46	66,85-66,96	67,52-68,54	68,63-69,62	69,7
Realisasi(Poin)	66,22	66,12	66,45	67,41	68,11	
Capaian(%)	88,26	99,52	99,32	99,09	98,53	

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

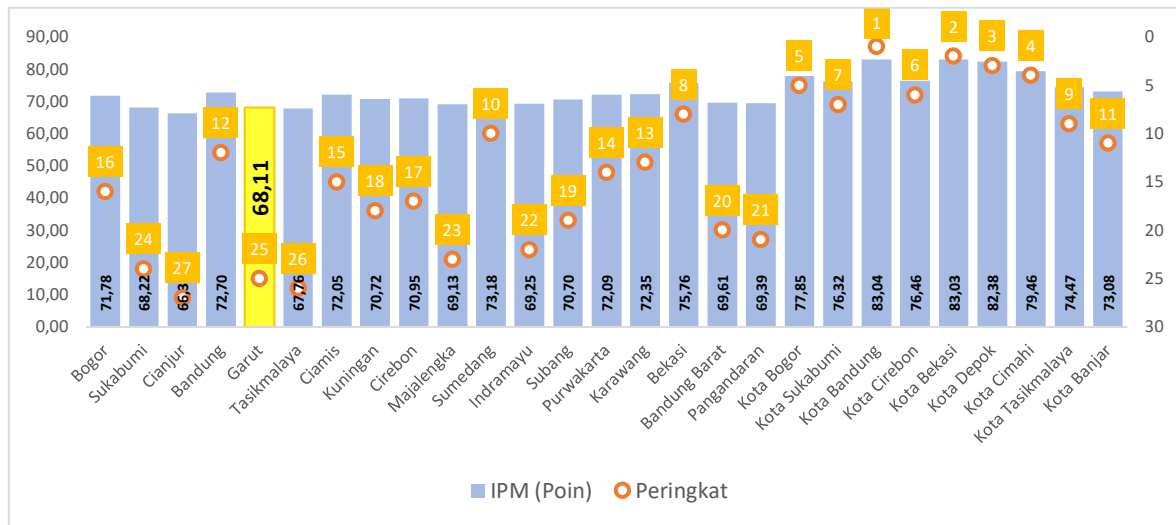
Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai IPM sebesar 68,11 poin berada pada peringkat ke-25 dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dari sisi pertumbuhan IPM (1,03 %), Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-6 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, lebih besar dari pertumbuhan IPM Jawa Barat sebesar 0,85 % dan Nasional sebesar 0,88 %.

Tabel 2.24.
Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia				
	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Garut	66,22	66,12	66,45	67,41	68,11
IPM Jawa Barat	72,03	72,09	72,45	73,12	73,74
IPM Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55
Rangking IPM di Jawa Barat	25	25	25	25	25
Rangking Pertumbuhan IPM di Jawa Barat	4	20	9	1	6
Selisih dari Jawa Barat (poin)	-5,81	-5,97	-6,00	-5,70	-5,63
Selisih dari Nasional (poin)	-5,70	-5,82	-5,84	-5,50	-5,45
Pertumbuhan IPM Garut	1,22%	-0,16%	0,50%	1,45%	1,03%
Pertumbuhan IPM Jawa Barat	1,02%	0,08%	0,50%	0,92%	0,85%
Pertumbuhan IPM Nasional	0,75%	0,02%	0,49%	0,86%	0,88%

Sumber : BPS RI, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

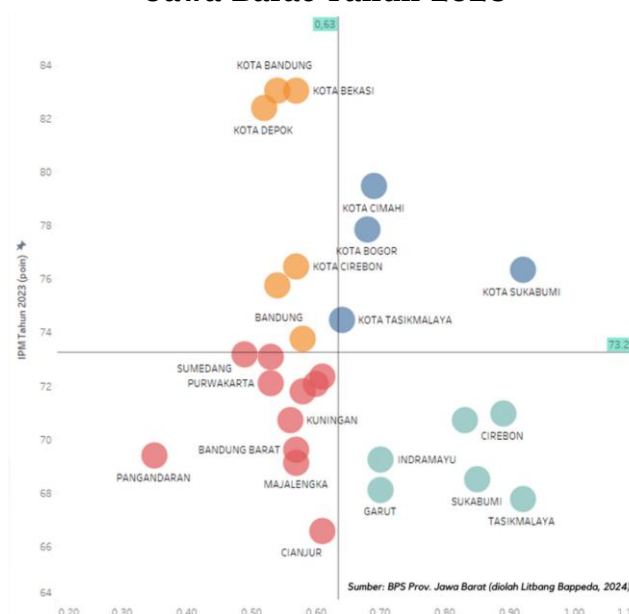
Gambar 2.29.
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan gap pertumbuhan IPM tahun 2022-2023, maka capaian IPM kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran III yaitu kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat namun perumbuhannya lebih baik dan lebih tinggi dari rata-rata.

Gambar 2.30.
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Gap Rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya yang berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. AMH pada tahun 2022 sebesar 99,60 %, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 99,14%. Angka ini mencapai 100,23% dari target tahun 2022 sebesar 99,37%.

Tabel 2.25.
Target dan Realisasi serta Capaian Angka Melek Huruf (AMH)
Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	99,53	99,21	99,29	99,37	99,45	99,53
Realisasi (%)	98,82	98,74	99,14	99,60		
Capaian (%)	98,82	98,74	99,14	100,23		

Sumber: BPS, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan diukur melalui tingkat pendidikan, menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS tahun 2022 sebesar 7,83 tahun atau setara dengan kelas VII, meningkat 0,3 tahun atau tumbuh 0,17% dari 2021 sebesar 7,53 tahun. RLS tahun 2022 mencapai 98,12 % dari target sebesar 7,73-8,23 tahun.

Tabel 2.26.
Target dan Realisasi serta Capaian Rata-Rata
Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ 2022-2023	Δ 2019-2023
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)								
	Target (Tahun)	8,70	7,53 - 7,54	7,62 - 7,64	7,73 - 8,23	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93		
	Realisasi (Tahun)	7,51	7,52	7,53	7,83	7,84		0,01	0,33
	Capaian (Tahun)	86,32	99,80	98,68	98,12	94,12			
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)								
	Target (Tahun)	13,10	11,85 - 11,86	11,98 - 12,00	12,01 - 12,09	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21		

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ 2022-2023	Δ 2019-2023
	Realisasi (Tahun)	11,82	11,91	12,03	12,15	12,16		0,01	0,34
	Capaian (Tahun)	90,23	100,46	100,33	100,83	100,41			

Sumber: BPS, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas), untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian HLS tahun 2023 sebesar 12,16 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,16 tahun atau hampir setara lulusan SMA, meningkat 0,01 tahun atau tumbuh 0,13 % dari tahun 2022. HLS tahun 2023 mencapai 100,41% dari target tahun 2023 sebesar 12,16 tahun. Indeks Pendidikan tahun 2023 mencapai 80,11 poin, tumbuh 0,42 persen atau meningkat 0,34 poin dari tahun 2022, mencapai 97,57% dari target tahun 2022.

Tabel 2.27.

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
RLS Garut	7,51	7,52	7,53	7,83	7,84	0,13%	4,39%
RLS Jawa Barat	8,37	8,55	8,61	8,78	8,83	0,57%	5,50%
RLS Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	0,92%	5,16%
Rangking RLS di Jawa Barat	19	20	20	20	21		
Rangking Pertumbuhan RLS di Jawa Barat	23	18	22	3	20		
Selisih dari RLS Jawa Barat (tahun)	-0,86	-1,03	-1,08	-0,95	-0,99	-0,44%	-1,10%
Selisih dari RLS Nasional (tahun)	-0,83	-0,96	-1,01	-0,86	-0,93	-0,79%	-0,76%

Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

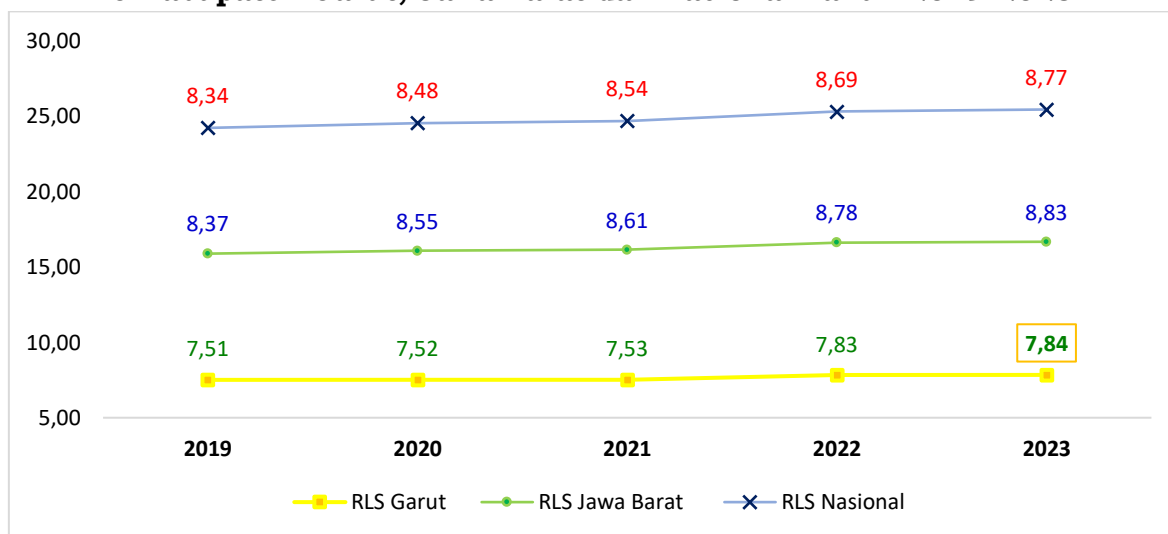
Keterangan : Belum ada data

Capaian RLS Kabupaten Garut tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yaitu masing-masing terpaut 0,99 tahun dan 0,93 tahun. Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai RLS berada pada peringkat ke-21 dan dari sisi pertumbuhan RLS dibandingkan tahun 2022 berada pada peringkat ke-20 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa

Barat tahun 2023. Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan pertumbuhan RLS pada tahun 2023 sebesar 0,13 % dan berada pada peringkat ke-20 dari 27 Kabupaten, serta berada dibawah pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 0,57 % dan Nasional sebesar 0,92%. Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan RLS Jawa Barat sebesar 5,50%, dan juga RLS Nasional sebesar 5,16 % sedangkan Kabupaen Garut hanya tumbuh 4,39% yang menyebabkan gap capaian RLS Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional semakin besar setiap tahunnya.

Gambar 2.31.

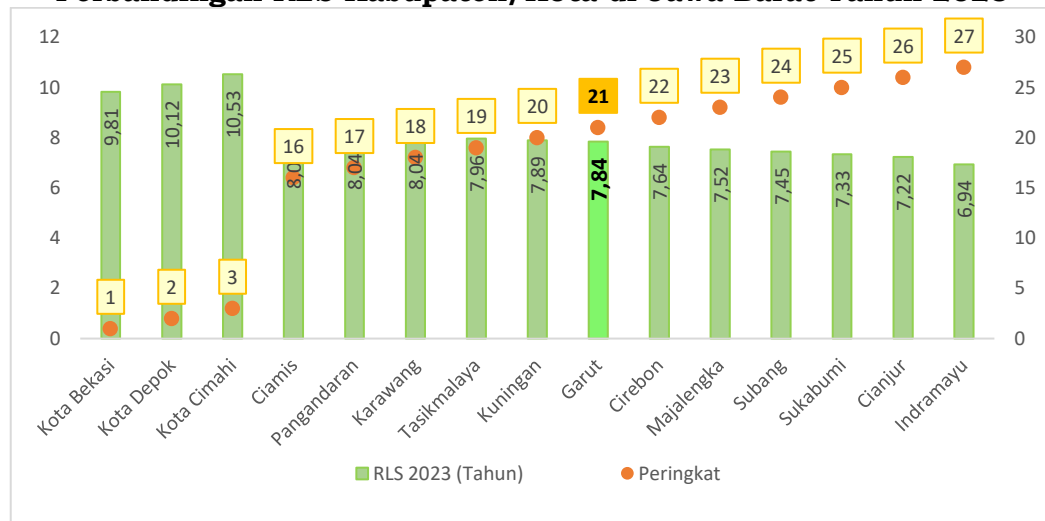
RLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian RLS Kabupaten Garut tahun 2023 masih berada di peringkat 21 di atas Kabupaten Tasikmalaya sebesar 7,83 tahun, namun masih dibawah Kabupaten Karawang sebesar 7,96 tahun. Pada tahun 2023, RLS tertinggi adalah Kota Bekasi, yang mencapai 11,66 tahun, diikuti oleh Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Gambar 2.32.
Perbandingan RLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 sebesar 12,16 tahun dengan capaian target 100,41%. Namun demikian, Capaian HLS tahun 2023 masih terpaut 0,52 tahun dari HLS Jawa Barat (12,68 tahun) dan masih terpaut 0,99 tahun dari HLS Nasional (13,15 tahun).

Tabel 2.28.
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

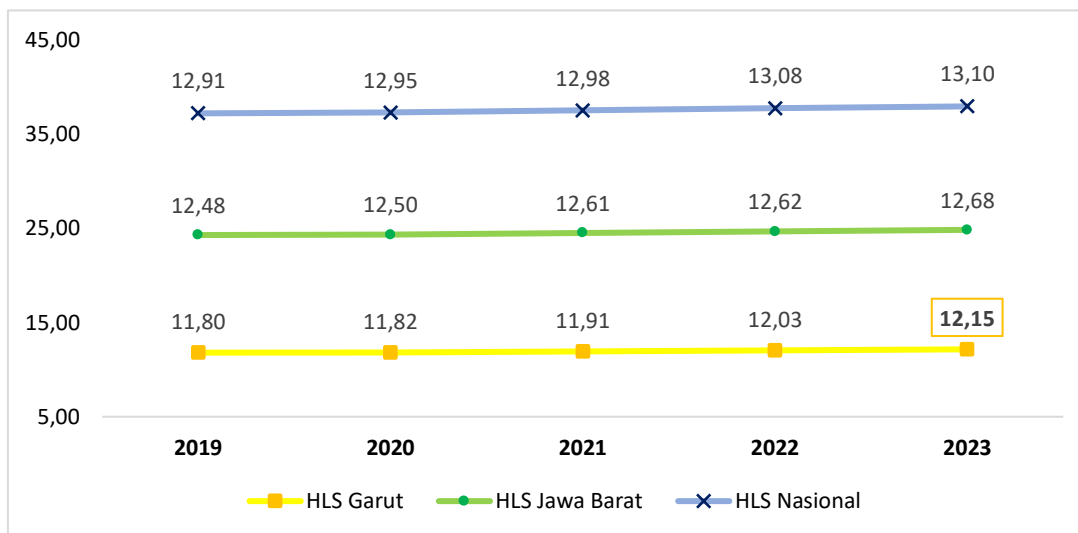
Uraian	EYS (Harapan Lama Sekolah) (Tahun)					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
HLS Garut (tahun)	11,82	11,91	12,03	12,15	12,16	0,08%	2,88%
HLS Jawa Barat (tahun)	12,48	12,50	12,61	12,62	12,68	0,48%	1,60%
HLS Nasional (tahun)	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15	0,38%	1,54%
Rangking HLS di Jawa Barat	26	25	24	22	24		
Rangking Pertumbuhan HLS di Jawa Barat	11	3	1	1	22	22	2
Selisih dari HLS Jawa Barat (tahun)	-0,66	-0,59	-0,58	-0,47	-0,52	-0,39%	1,27%
Selisih dari HLS Nasional (tahun)	-1,13	-1,07	-1,05	-0,95	-0,99	-0,30%	1,33%

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2023, capaian HLS berada pada peringkat ke-22 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pertumbuhan HLS Kabupaten Garut tahun 2019-2023 berada diatas pertumbuhan HLS Jawa Barat dan HLS Nasional yakni

berada pada nilai 2,88% sehingga gap capaian HLS Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional semakin kecil setiap tahunnya.

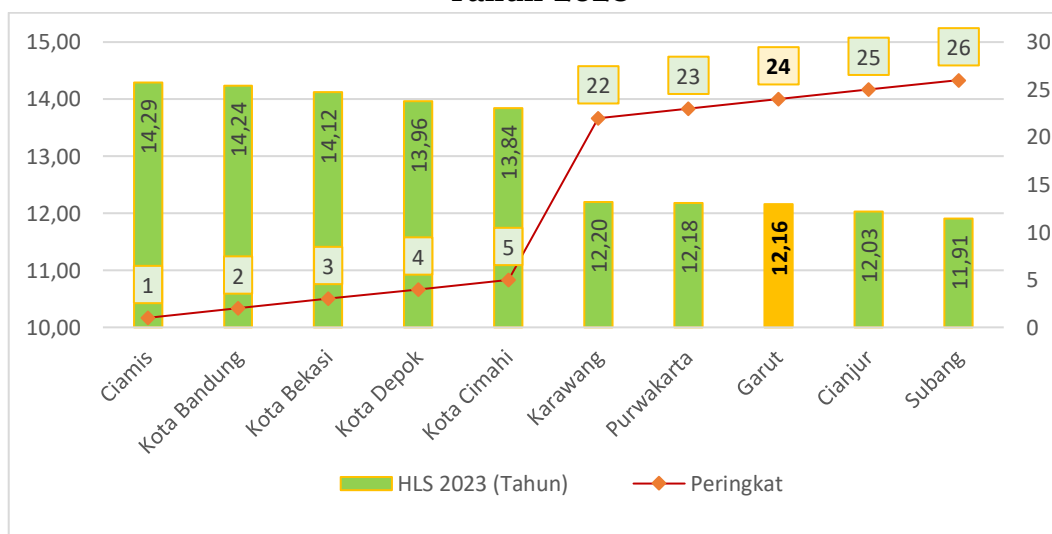
Gambar 2.33.
HLS Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian HLS kabupaten Garut tahun 2023 berada di peringkat 24 di atas Kabupaten Cianjur sebesar 12,16 tahun. Pada tahun 2023, HLS tertinggi adalah Kabupaten Ciamis yang mencapai 14,29 tahun, diikuti oleh Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Gambar 2.34.
Perbandingan HLS Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023



Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pendidikan tahun 2023 mencapai sebesar 59,91 poin, dan dibandingkan. Capaian Indeks Pendidikan tahun 2023 masih terpaut 4,74 poin dari Indeks Pendidikan Jawa Barat sebesar 64,66poin, dan terpaut 5,85 poin dari Nasional sebesar 65,76 poin.

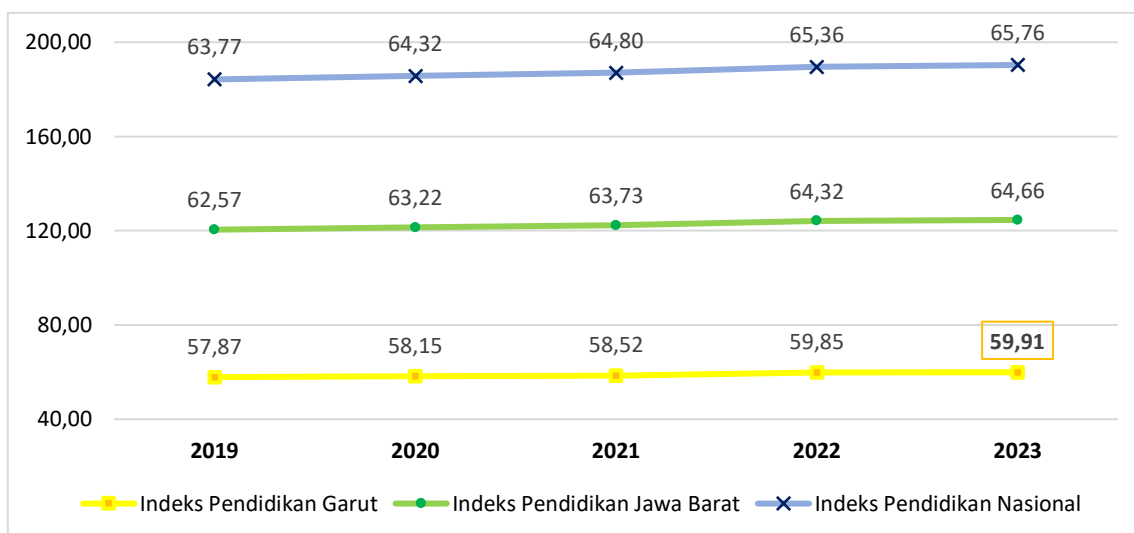
Tabel 2.29.
Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	Indeks Pendidikan					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
Indeks Pendidikan Garut	57,87	58,15	58,52	59,85	59,91	0,10%	3,53%
Indeks Pendidikan Jawa Barat	62,57	63,22	63,73	64,32	64,66	0,52%	3,34%
Indeks Pendidikan Nasional	63,77	64,32	64,80	65,36	65,76	0,62%	3,12%
Rangking Indeks Pendidikan di Jawa Barat	21	22	21	21	22		
Rangking Pertumbuhan Indeks Pendidikan di Jawa Barat	23	14	16	1	27	27	9
Selisih dari Indeks Pendidikan Jawa Barat (poin)	-4,70	-5,07	-5,21	-4,47	-4,74	-0,42%	0,19%
Selisih dari Indeks Pendidikan Nasional (poin)	-5,91	-6,17	-6,28	-5,51	-5,85	-0,52%	0,41%

Sumber : BPS, Tahun 202 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai Indeks Pendidikan sebesar 59,91 poin berada pada peringkat ke-22 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Pendidikan sebesar 0,10% dibandingkan tahun 2022 lebih rendah dari pertumbuhan indeks pendidikan Jawa Barat sebesar 0,52 % dan Nasional sebesar 0,62%. Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut berada diatas pertumbuhan Indeks Pendidikan Jawa Barat (3,34%) dan Nasional (3,12%) yakni berada pada pertumbuhan 3,53% yang mengakibatkan gap yang cenderung semakin mengecil.

Gambar 2.35.
Indeks Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Tantangan yang masih dihadapi di bidang pendidikan diantaranya pendidikan formal belum dirasakan oleh semua kalangan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan, maka dari sisi input perlu didahului oleh peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sehingga standar kualitas pelayanan pendidikan diantaranya rasio murid terhadap guru atau rasio guru terhadap sekolah, jumlah sekolah dan lainnya dapat dipenuhi, terutama jumlah sekolah antar jenjang pendidikan yang belum sebanding merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian karena terkait dengan kemudahan akses dan daya tampung terhadap pendidikan. Dari sisi proses, untuk meningkatkan kualitas output yang dihasilkan pada pembangunan manusia diantaranya melalui peningkatan kemudahan akses ke sarana pendidikan (sekolah) dengan mendekatkan jarak ke sekolah yang didukung kondisi jalan serta kemudahan menuju sekolah mengingat kondisi topografi Kabupaten Garut yang cukup beragam. Upaya untuk meningkatkan Indeks Pendidikan diantaranya dengan meningkatkan daya tampung pendidikan pada PAUD, SD dan SMP serta memberikan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk putus sekolah.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 72,07 tahun. Selama periode 2019-2023, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 0,31 % atau meningkat 0,22 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Tabel 2.30.
Target dan Realisasi serta Capaian Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ2022-2023	Δ2019-2023
Target (tahun)	71,02	71,42 - 71,48	71,63 - 71,74	71,7- 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16		
Realisasi (tahun)	71,22	71,41	71,59	71,85	72,07		0,31%	1,19%
Capaian (%)	100,29	99,94	99,87	100,03	100,16			

Sumber: BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

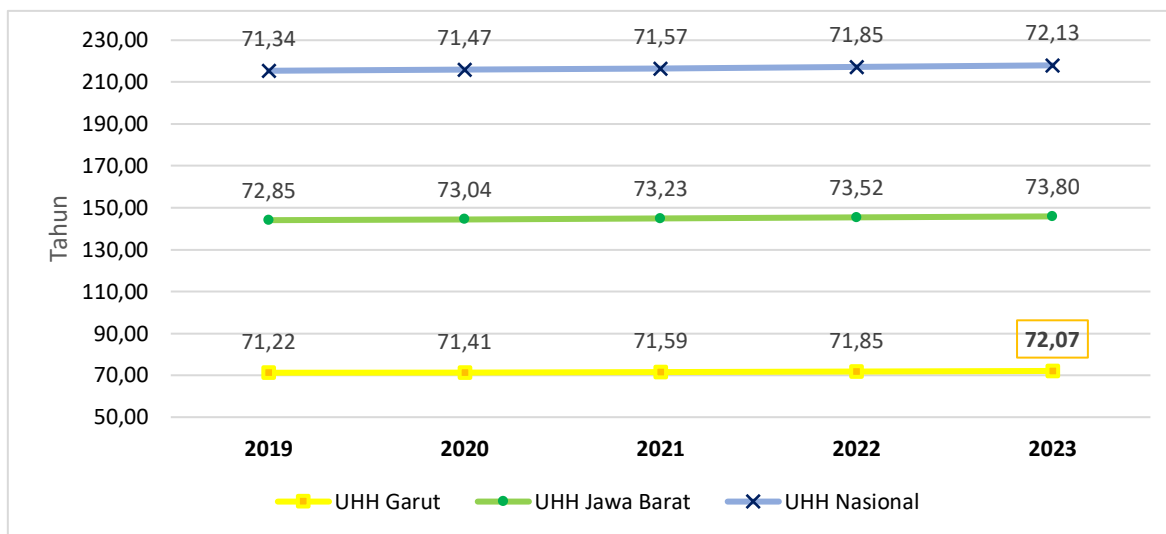
Dari capaian AHH yang tersaji pada data target dan realisasi serta capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pencapaian AHH tahun 2023 sebesar 72,07 tahun telah mencapai 100,16 % dari target pada tahun 2023.

Tabel 2.31.
Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	AHH (Angka Harapan Hidup (Tahun))					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
AHH Garut	71,22	71,41	71,59	71,85	72,07	0,31%	1,19%
AHH Jawa Barat	72,85	73,04	73,23	73,52	73,80	0,38%	1,30%
AHH Nasional	71,34	71,47	71,57	71,85	72,13	0,39%	1,11%
Rangking AHH di Jawa Barat	19	19	20	20	20		
Rangking Pertumbuhan AHH di Jawa Barat	14	14	18	25	26	26	24
Selisih dari AHH Jawa Barat (tahun)	-1,63	-1,63	-1,64	-1,67	-1,73	-0,07%	-0,11%
Selisih dari AHH Nasional (tahun)	-0,12	-0,06	0,02	0,00	-0,06	-0,08%	0,09%

Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

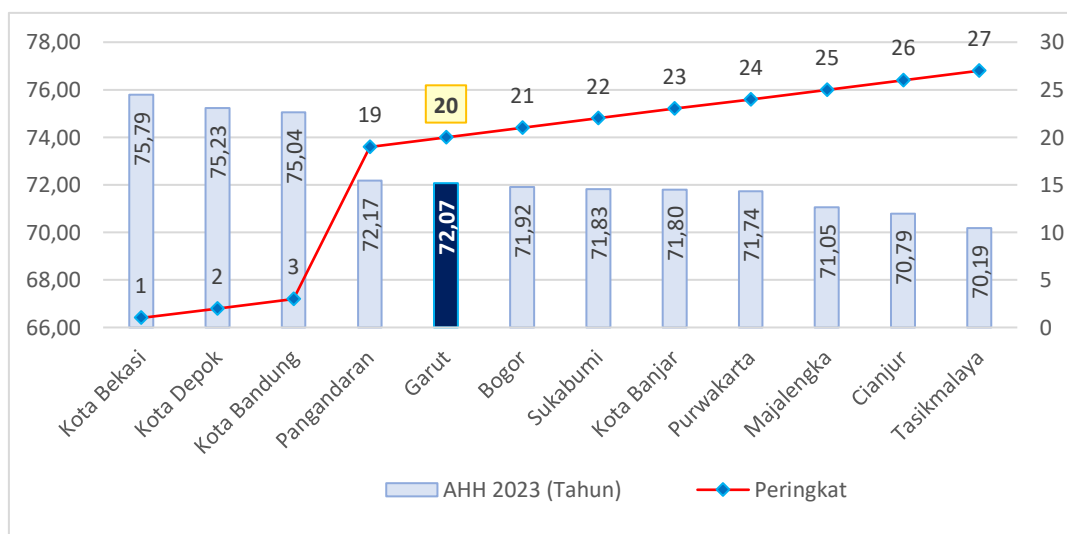
Gambar 2.36.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan AHH Kabupaten Garut sebesar 1,19 % berada di bawah pertumbuhan Jawa Barat (1,30%) namun berada diatas Nasional sebesar (1,11%). Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian AHH kabupaten Garut tahun 2023 masih berada di peringkat 20. Pada tahun 2023 AHH tertinggi adalah Kota Bekasi sebesar 75,79 tahun, disusul Kota Depok, dan Kota Bandung.

Gambar 2.37.
Perbandingan AHH Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

Indeks Kesehatan tahun 2023 mencapai sebesar 80,11 poin dan telah mencapai 100,22 dibandingkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Capaian Indeks Kesehatan tahun 2023 masih terpaut 2,66 poin dari Indeks Kesehatan Jawa Barat (82,77 poin), namun terpaut 0,09 dengan Indeks Kesehatan Nasional (80,20 poin).

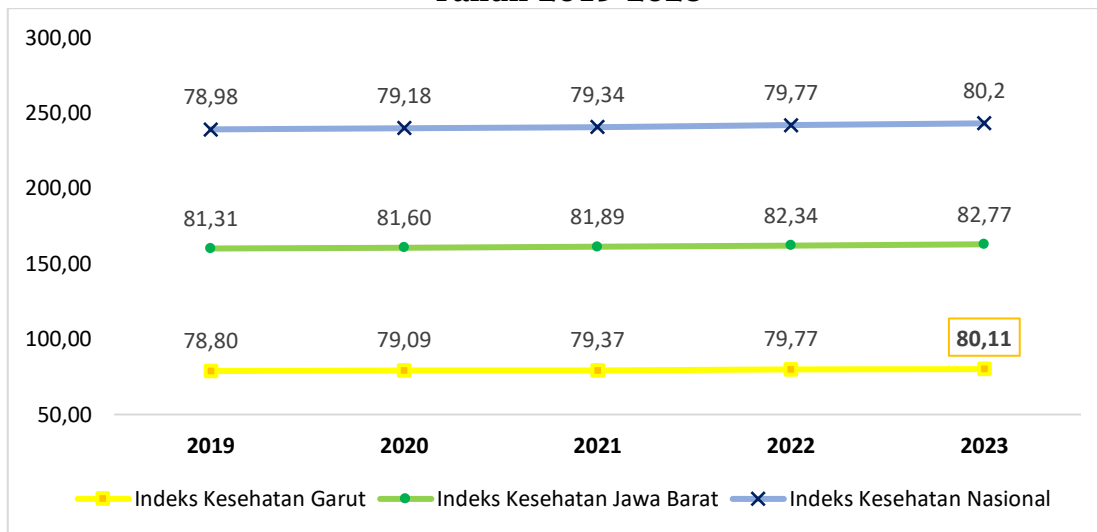
Tabel 2.32.
Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	Indeks Kesehatan					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
Indeks Kesehatan Garut	78,80	79,09	79,37	79,77	80,11	0,42%	1,66%
Indeks Kesehatan Jawa Barat	81,31	81,60	81,89	82,34	82,77	0,52%	1,80%
Indeks Kesehatan Nasional	78,98	79,18	79,34	79,77	80,20	0,54%	1,54%
Rangking Indeks Kesehatan di Jawa Barat	19	19	20	20	20		
Rangking Pertumbuhan Indeks Kesehatan di Jawa Barat	14	14	18	25	26	26	23
Selisih dari Indeks Kesehatan Jawa Barat (poin)	-2,51	-2,51	-2,52	-2,57	-2,66	-0,10%	-0,14%
Selisih dari Indeks Kesehatan Nasional (poin)	-0,18	-0,09	0,03	0,00	-0,09	-0,12%	0,12%

Sumber : BPS Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai Indeks Kesehatan sebesar 80,11 poin berada pada peringkat ke-20 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Kesehatan sebesar 0,50 %, berada pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Laju pertumbuhan Indeks Kesehatan Kabupaten Garut selama periode 2019-2023 lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sehingga pada tahun 2023.

Gambar 2.38.
Indeks Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Menurut konsep hidup sehat H.L.Blum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai faktor determinan timbulnya masalah kesehatan yang terdiri dari faktor lingkungan sebesar 45% (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor perilaku kesehatan/gaya hidup sebesar 30% (life style), faktor pelayanan kesehatan sebesar 20% (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor keturunan sebesar 5% (genetik). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat.

Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Garut sangat perlu terus dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut.

Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga

diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa dan perangkat daerah lainnya, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

d. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi standar hidup layak, indikator yang dipergunakan yaitu indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp 8,685 juta per kapita per tahun, naik Rp 266 ribu atau 3,34 % dari tahun sebelumnya. Walaupun relatif lambat, pengeluaran per kapita Garut selama periode 2019-2022 terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 13,16%.

Tabel 2.33.
Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	$\Delta 2022-2023$	$\Delta 2019-2023$	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	INDEKS PENGELUARAN	61,74	63,69	62,84	63,17	65,83	2,58%	3,35%	65,39-66,1	66,96-67,63	68,45-69,09
1.	Pengeluaran per kapita (000 Rp)	8.099	7.876	7.961	8.227	8.685	5,57%	7,24%	8562,5-8762,5	9012,5-9212,5	9462,5-9662,5

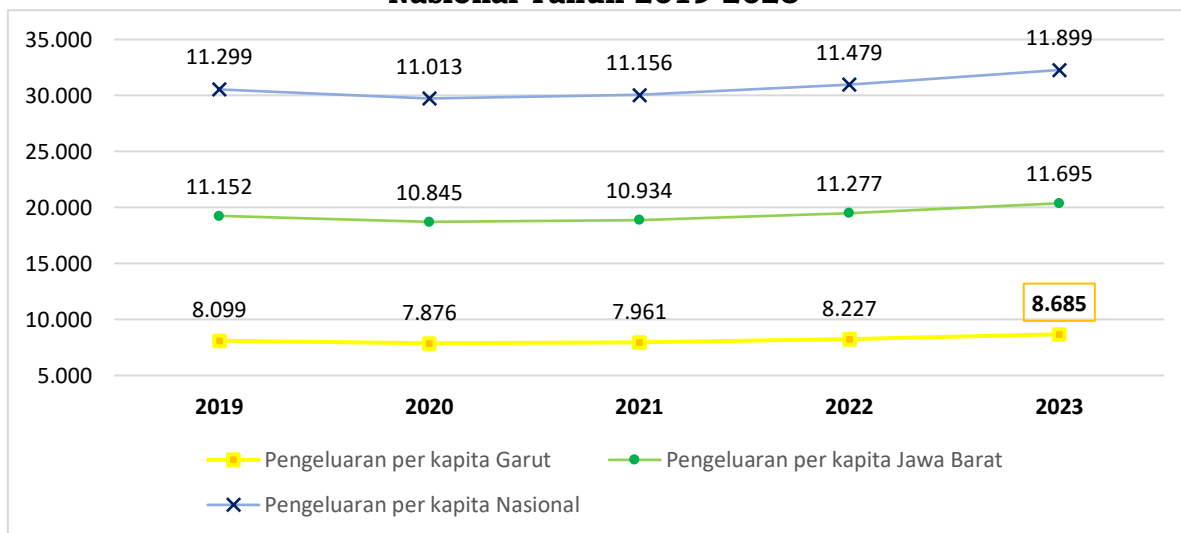
Sumber: BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dari capaian pengeluaran per kapita, maka Indeks Pengeluaran pada tahun 2023 mencapai 65,83 poin, mengalami pertumbuhan 2,58 % atau naik 1,66 poin dari tahun 2022. Selama periode 2019-2023, Indeks Pengeluaran meningkat 2,13 poin atau tumbuh 3,35 dari tahun 2019.

Pencapaian pengeluaran per kapita tahun 2023 sebesar Rp 8.685 juta apabila dibandingkan target telah mencapai 95,31%. Namun demikian, capaian pengeluaran per kapita tahun 2023 masih terpaut Rp 3,01 juta dari capaian Jawa Barat (Rp 11,695 juta) dan masih terpaut Rp 3,214 juta dari capaian Nasional (Rp 11,899 juta). Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai pengeluaran per kapita berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar

berada pada peringkat ke-1 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yaitu sebesar 5,57 %, lebih tinggi dari laju pertumbuhan capaian pengeluaran per kapita Jawa Barat (3,71%).

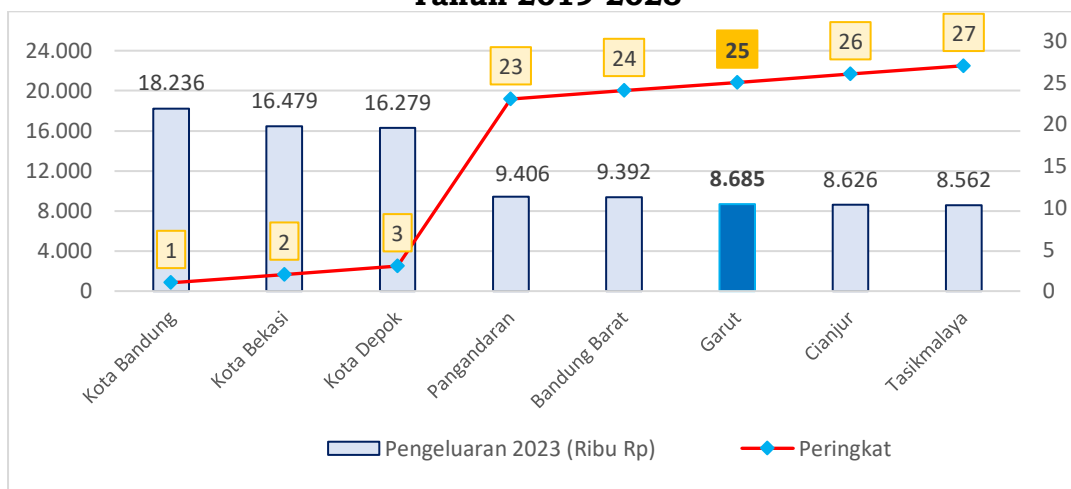
Tabel 2.39.
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Garut sebesar 7,24 %, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran per kapita Jawa Barat (4,87 %) dan Nasional (5,31%) sehingga gap capaian pengeluaran per kapita antara Kabupaten Garut dengan Jawa Barat dan Nasional menjadi semakin kecil dari selama periode 2019 - 2023.

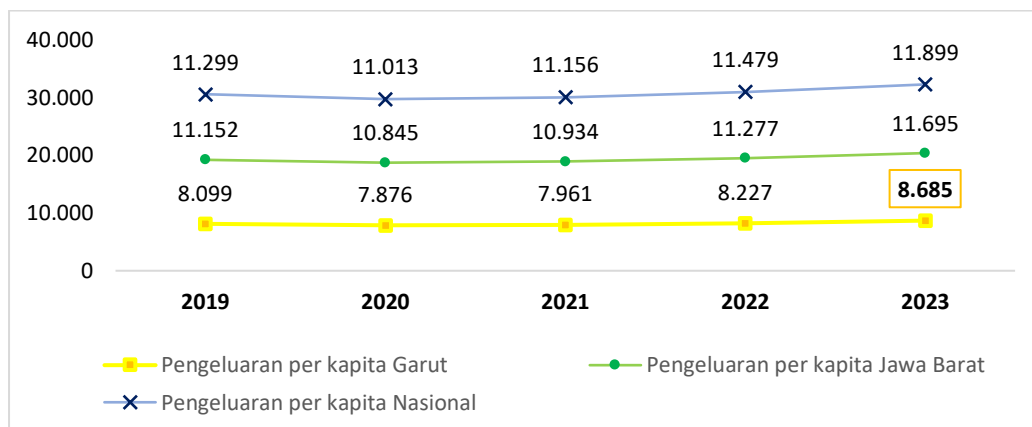
Gambar 2.40.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian Pengeluaran Per kapita Kabupaten Garut Tahun 2023 masih berada di peringkat 25 diatas Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2023, Pengeluaran Per kapita tertinggi adalah Kota Bandung, yang mencapai Rp 118,236 juta diikuti oleh Kota Bekasi, dan Kota Depok.

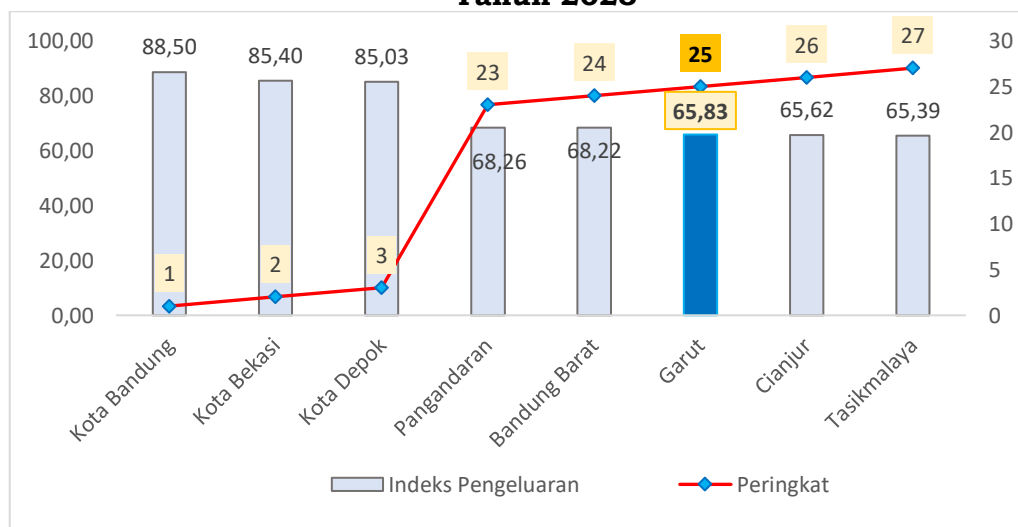
Gambar 2.41.
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Garut- Jawa Barat - Nasional Tahun 2019 -2023



Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pengeluaran tahun 2023 mencapai 65,83 poin dan telah mencapai 97,82% dari target 2023 (66,96-67,63). Capaian Indeks Pengeluaran tahun 2023 masih terpaut 9,09 poin dari Jawa Barat (74,92) dan terpaut 9,62 poin dari Nasional (75,45).

Gambar 2.42.
Perbandingan Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai Indeks Pengeluaran berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan Indeks Pengeluaran sebesar 2,58 %, berada pada peringkat ke-1 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat diatas pertumbuhan Indeks Pengeluaran Jawa Barat sebesar 1,51%. Baik dari sisi pertumbuhan maupun capaian indeks pengeluaran pada tahun 2023 peningkatan cukup signifikan dapat dilihat pada indeks pengeluaran Kabupaten Garut.

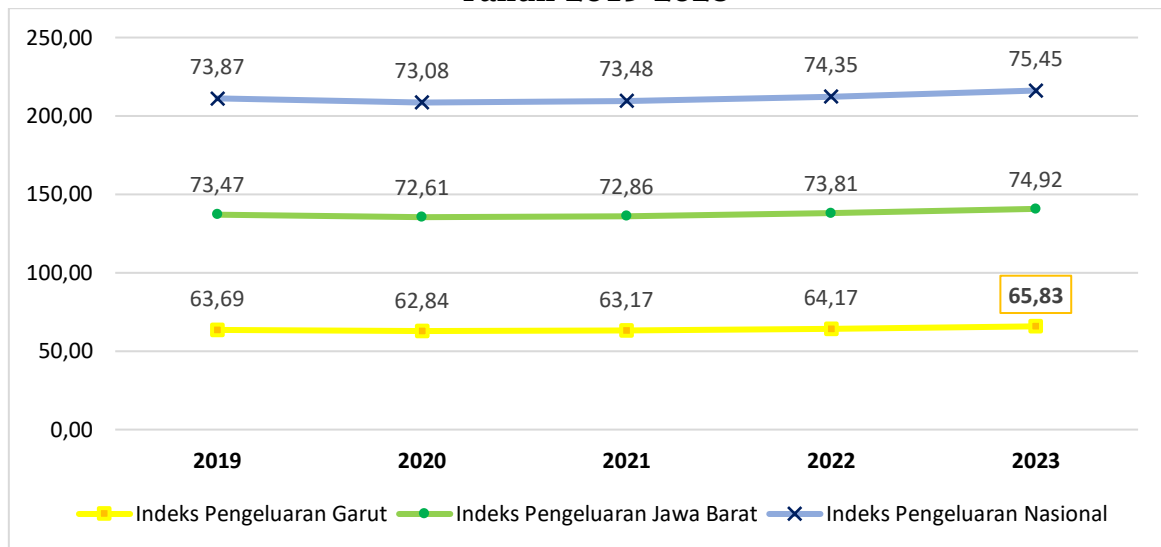
Tabel 2.34.
Perbandingan Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	Indeks Pengeluaran					% Pertumbuhan 2022 - 2023	% Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023		
Indeks Pengeluaran Garut	63,69	62,84	63,17	64,17	65,83	2,58%	3,35%
Indeks Pengeluaran Jawa Barat	73,47	72,61	72,86	73,81	74,92	1,51%	1,98%
Indeks Pengeluaran Nasional	73,87	73,08	73,48	74,35	75,45	1,48%	2,14%
Rangking Indeks Pengeluaran di Jawa Barat	26	26	26	26	25		
Rangking Pertumbuhan Indeks Pengeluaran di Jawa Barat	1	20	3	12	1	1	2
Selisih dari Indeks Pengeluaran Jawa Barat (poin)	-9,77	-9,78	-9,70	-9,64	-9,09	1,07%	1,37%
Selisih dari Indeks Pengeluaran Nasional (poin)	-10,18	-10,24	-10,31	-10,18	-9,62	1,10%	1,21%

Sumber : BPS Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

Selama periode Tahun 2019-2023, pertumbuhan Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut sebesar 3,35% berada di atas pertumbuhan Indeks Pengeluaran Jawa Barat dan Nasional sehingga gap capaian Indeks Pengeluaran menjadi semakin kecil.

Gambar 2.43.
Indeks Pengeluaran Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Garut diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan seni dan budaya selama periode tahun 2019-2023 sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diantaranya jumlah Organisasi Seni dan Budaya tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yakni 54 organisasi dan pada tahun 2022 jumlah grup kesenian meningkat dari 906 grup pada tahun 2021 menjadi 979 grup pada tahun 2022.

Tabel 2.35.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Kebudayaan					
1.	Organisasi Seni dan Budaya	40	51	54	54	54
2.	Jumlah grup kesenian	623	770	906	979	979
	Pemuda dan Olahraga					
1.	Jumlah gedung olahraga	6	6	8	16	16
2.	Jumlah stadion olahraga	10	10	10	12	12

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Sementara itu, dalam pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada optimalisasi olahraga prestasi dan membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu serta pembinaan terhadap atlet potensial sebagai sarana pembangkitan kreativitas masyarakat.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, dan Bahasa dan Sastra. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pendidikan selama tahun 2019 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan					
	Angka partisipasi kasar					
1	APK PAUD/TK	74,5	55,05	85,4	85,4	n/a
2	APK SD sederajat	105,66	105,66	98,58	106,54	n/a
3	APK SMP sederajat	115,11	115,11	79,66	99,6	n/a
	Angka pendidikan yang ditamatkan					
1.	APT SD sederajat	35,57	40,16	32,63	n/a	n/a
2.	APT SMP sederajat	16,24	18,09	16,6	n/a	n/a
	Angka Partisipasi Murni:					
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,3	99,3	94,45	97,18	97,97
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	98	98	67,13	83,28	79,9
	Angka partisipasi sekolah :					
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	85,76	98,49	99,59
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	100	59,59	95,29	95,77
	Angka Putus Sekolah:					
1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0	0,036	0,003	0,1	n/a
2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	0	0,004	0,021	0,5	n/a
	Angka Kelulusan:					
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	n/a
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	n/a
	Angka Melanjutkan (AM):					
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,67	96,67	77,17	80,75	n/a
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	n/a	80,81	n/a	n/a	n/a
	Fasilitas Pendidikan:					
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	73	73	99,26	65,48	n/a
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	82,91	83	99.25.00	70,13	n/a
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	n/a	n/a	42,52	n/a	n/a
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	14,03	23	24	25	n/a
6	Rasio guru/murid pendidikan menengah	14,7	20	19	19	n/a
7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	14,03	23	24	25	n/a
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata- rata	14,03	20	19	19	n/a
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98,46	100	n/a	n/a	n/a

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100	100	100	99,9	n/a
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,56	99,56	99,14	99,6	n/a
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,75	95,55	96,49	87,84	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Poin 9 dan 10 : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023

Keterangan : *Belum ada data

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2023 untuk jenis pendidikan dasar telah mencapai 96,03% untuk indikator Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs), untuk jenis pelayanan dasar kesetaraan telah mencapai 91,10 %, sementara untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 91,55 %. Capaian SPM untuk pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, sedangkan untuk pendidikan anak usia dini pada tahun 2022 memiliki capaian yang rendah dikarenakan ada perubahan dalam perhitungan.

Tabel 2.37.

**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2019-2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	98,90	99,27	89,50	97,50	96,03
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	n/a	30,54	15,06	81,68	91,10
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	97,1	97,30	85,40	46,32	91,55

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Garut, 2023, yang dikelola dalam SIPD

2. Kesehatan

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, screening faktor risiko penyakit tidak menular. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kesehatan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pelayanan medis	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan penunjang medis	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan profesi medis	%	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan keperawatan	%	89,71	99,9	100	100	100
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan	%	81,25	85,5	100	100	100
6	Persentase Capaian SPM yang mencapai target	%	n/a	n/a	70,83	72,07	74,77
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	orang	248	210	225	334	320,00
8	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	51.486	44.778	51.175	48.178	N/A
9	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	orang	2	7 orang (0,02)	6 orang (0,027)	11	N/A
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	orang	4,31	196 orang (4,58)	219 orang (4,28)	250	6,5
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	orang	82,27	58 orang (135,51)	112 orang (242,3)	48	117,65



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
12	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	1/100	1/53	1/53	1 / 53	1/100
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1/7784	1/7784	1/13.235	1/7.600	
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	1/443737	1/4394395	1/396825	1/382.221	
15	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1/6574	1/7965	1/5419	1/11291	
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	1/1042	1/5795	1/4916	1/7304	
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	rasio	69,89	14,46	100	100	100
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,84	87,05	89,68	94	96
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	82,57	77,6	60,42	90,04	96,28
20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	-	-	-	Tidak ada data	100
22	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95,42	95	87,71	101,52	96,77
23	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	2,37	0,042	2,13	2,6	11,35
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	71,09	41,19	35,64	63,15	
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	50,78	34,69	71,8	120,1	91,86
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	98	86	178,2	278,5	281,5
27	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	0,98	2,3	2,6	2,2	4,03
28	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	42,62	34,69	100	100	91,85
29	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	40,91	85,80	72,5	84,18	83,82
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
31	Penderita diare yang ditangani	%	85	36	100	89,57	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
32	Angka kejadian Malaria	Kasus/ 100.000	5	4	0,27	0,34	0,41
33	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/ 1000	0	0	0	0	0
34	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0
35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0
36	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,00019	0,025	0,23	0,32	0,38
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	n/a	n/a	n/a	0	n/a
38	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	20	20	47,23	0	49,1
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	25,75	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif,
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,81	100,00	100	95,58	95,99
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94,38	87,05	94,6	94,00	91,81
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,39	104,00	100	99,30	94,76
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,22	84,96	66,3	92,00	90,33
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	75,76	66,78	46,7	82,99	97,06
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	67,16	64,08	42,2	113,95	98,61
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	77,10	66,79	58,9	78,89	98,86
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	3,83	25,70	35,71	91,99	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	7,00	53,25	39,66	89,10	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	84,00	68,7	84,66	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	45,19	82,74	124,33	98,57
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	65	62,60	52,6	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Garut, 2023, yang dikelola dalam SIPD

Capaian Pelayanan Dasar Kesehatan telah di targetkan mencapai 100 persen pada tahun 2023, berdasarkan data yang telah di dapatkan dari Dinas Kesehatan hanya 4 (tiga) jenis pelayanan dasar yang dapat mencapai target. Rata-rata capaian 8 jenis pelayanan dasar lainnya berada pada nilai capaian diatas 90 persen, adapun capaian terendah jika dibandingkan dengan capaian jenis

pelayanan dasar lainnya adalah pada jeneis pelayanan dasar pelayanan pada kesehatan ibu bersali, hal ini diakibatkan oleh akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan atau kelahiran seperti puskesmas, klinik maupun bidan masih terbatas dikarenakan aksesibilitas yang masih terbatas terutama diwilayah perdesaan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup 11 (sebelas) sub urusan yaitu Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Salah satu indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yakni persentase kemantapan jalan, persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi , persentase tampungan air yang tersedia baru mencapai 46,16% dan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang baru mencapai 99,90% serta indikator persentase penurunan luas genangan air hal ini dilatarbelakangi oleh kapasitas drainase yang sudah tidak sesuai kondisi debit air akibat run off pada kawasan terbangun yang semakin tinggi, daerah resapan air semakin sempit serta masterplan pengendalian banjir yang belum terupdate secara berkala dan penanganan sistem drainase masih dilakukan secara parsial. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019-2023

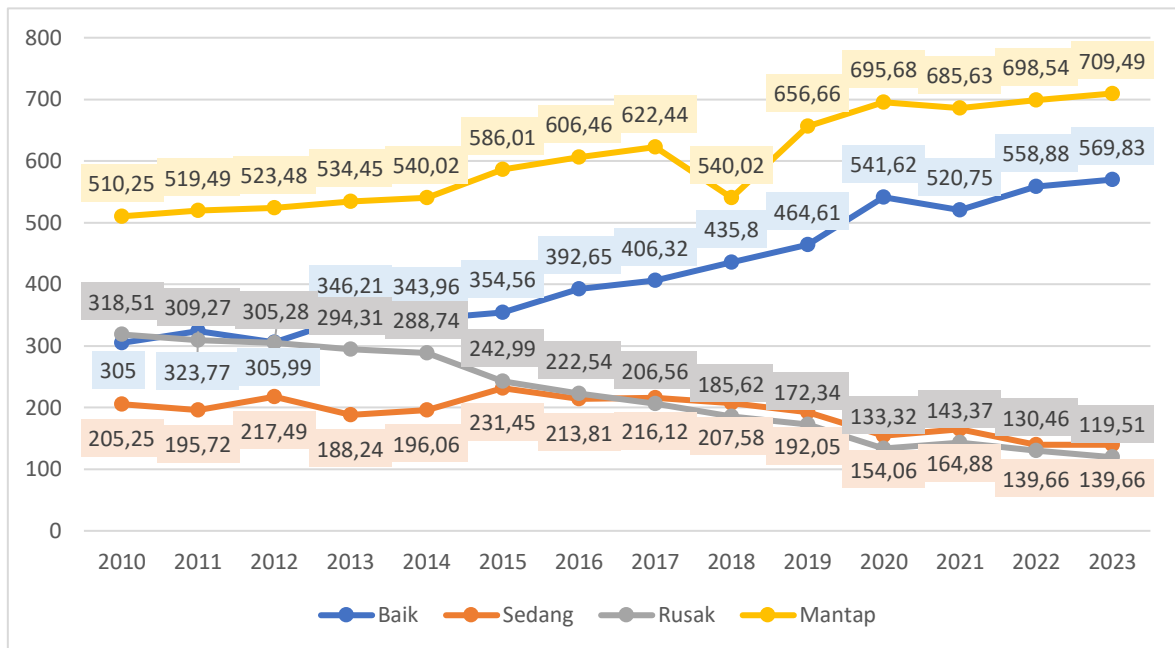
No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					Target 2023	%Capaian 2023
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kemantapan Jalan	%	n/a	n/a	49,92	51,42	55,25	55,27	99,96
2	Cakupan air Minum layak	%	79,84	85,08	86,96	88,51	90,04	90,04	100,00
3	Cakupan sanitasi layak	%	66,73	67,03	67,20	67,69	68,11	68,11	100,00
4	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi	%	n/a	n/a	81,89	82,70	84,4	84,4	98,85
5	Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	n/a	60	50	27,5	25	90,00
6	Persentase tampungan air yang tersedia	%	n/a	6,93	23,81	34,92	38,1	82,54	46,16
7	Persentase bangunan yang Layak Teknis dan fungsi	%	n/a	0,05	8,4	9,52	10,31	9,45	109,10
8	Persentase Luas Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	%	n/a	n/a	6	12	32,48	20	162,40
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	78,83	82,5	83	83,50	83,92	84	99,90
10	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	n/a	8,33	19,64	23,73	32,27	27,24	118,47
11	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

a. Jaringan Jalan

Tingkat kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2023 mencapai 55,25% dengan Kondisi jalan mantap sepanjang 709,49 Km jalan rusak ringan sepanjang 119,51 Km yang di dominasi oleh jalan desa.

Gambar 2.44.
Kondisi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Garut
Tahun 2010-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

b. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah, saluran primer 174,02 km, saluran sekunder 51,96 km dan saluran tersier 3,50 km. Saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 57,98% meliputi saluran primer 102,75 km (59,04%), saluran sekunder 28,40 km (54,66%) dan saluran tersier 1,89 km (54,09%). Luas areal terlayani sampai dengan tahun 2022 sebesar 82,70% (13.287,41 ha) mengalami peningkatan seluas 129,70 ha dibandingkan tahun 2021 seluas 13.157,71 ha (81,89%).

c. Air Bersih dan Sanitasi

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dinilai melalui cakupan air minum layak dan cakupan sanitasi layak. Persentase Air Minum Layak artinya dimana air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat

kesehatan dan dapat langsung diminum sedangkan sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik. Adapun data pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang air bersih dan sanitasi tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan air Minum layak	%	79,84	85,08	86,96	88,51	90,04
2.	Cakupan sanitasi layak	%	66,73	67,03	67,20	67,69	68,11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Pencapaian kinerja cakupan air minum layak pada tahun 2023 sebesar 90,047%% mengalami peningkatan 1,54% dari tahun 2022 yang mencapai 88,51%. Meskipun cenderung meningkat dari capaian di tahun sebelumnya namun beberapa permasalahan masih ditemui diantaranya ketersediaan air yang semakin menurun, belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan pasca pembangunan serta perlindungan sumber-sumber air yang belum dilakukan secara maksimal.

Pencapaian kinerja cakupan sanitasi layak pada tahun 2023 sebesar 68,11% mengalami peningkatan 0,42% dari tahun 2022 yang mencapai 67,69%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian cakupan sanitasi layak di Kabupaten Garut yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, pengelolaan air masih belum dilaksanakan, pengelolaan pasca pemebangunan belum dilakukan, dan pengelolaan air limbah berskala kawasan belum dilakukan serta belum terdapat unit-unit kerja khusus dalam pengelolaan air limbah.

d. Penataan Ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada tahun 2023 mencapai 90,04% meningkat dibanding tahun sebelumnya dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.42.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	79,84	81,27	86,97	88,51	90,04
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,73	67,38	67,20	67,69	68,11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2023, meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 90,04% mengalami peningkatan 1,54% dari tahun 2022. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 68,11% mengalami peningkatan 0,42 % dari tahun 2022 yang mencapai 67,69%. Meskipun berdasarkan capaian SPM Pekerjaan umum tahun 2023 belum dapat mencapai 100 persen dikarenakan capaian pelayanan dihitung secara akumulatif setiap tahunnya, namun secara pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum telah mencapai 100 persen.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2019– 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	n/a	100	100	100	100
2	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh	Ha	n/a	0,87	0	1,3	4,12
3	Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	42.057	36.138	32.504	31.010	28.936
4	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha	n/a	n/a	6.727	346,5	6936
5	Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi	Perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	30

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 2.074 unit, sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang pada tahun 2023 menurun menjadi 28.936 unit, sudah lebih rendah dari target tahun 2022, meskipun demikian cakupan penurunan luas permukiman kumuh tahun 2023 meningkat cukup signifikan yakni mencapai 4,12 Ha meskipun mengalami peningkatan. Selain pencapaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut.

Tabel 2.44.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%*	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan realisasi capaian 100%.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bencana, dan Kebakaran. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Pencapaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	100	80	75	64	96
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	91	45	60	75	70
3	Rasio Linmas/10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	62	62	62	62	62
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	n/a	n/a	100	100	87,27
5	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	n/a	0,46	0,39	0,65	0,72

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan : *Belum ada data

Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda pada tahun 2023 mencapai 96% dan Prosentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas mencapai 70% telah mencapai target tahun 2022. Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk pada tahun 2023 sebesar 62 orang per 10.000 penduduk juga telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 62 per 10.000 penduduk.

Indeks Kapasitas Daerah tahun 2023 adalah sebesar 0,72 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan telah dapat mencapai target tahun 2023. IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100%. Dua jenis pelayanan dasar belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya kebijakan keuangan terkait efisiensi anggaran yang digeserkan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga realisasi pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum dapat tercapai 100%. Selain itu faktor lain yang menyebabkan pelayanan informasi rawan bencana yang belum dapat mencapai 100% adalah karena tidak semua daerah rawan bencana mendapatkan layanan informasi lewat media sosial karena adanya keterbatasan teknologi informasi dan jangkauan internet yang masih belum dapat menjangkau seluruh daerah rawan bencana.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% yaitu:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Dua jenis pelayanan dasar belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya kebijakan keuangan terkait efisiensi anggaran yang digeserkan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga realisasi pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum dapat tercapai 100%. Selain itu faktor lain yang menyebabkan pelayanan informasi rawan bencana yang belum dapat mencapai 100% adalah karena tidak semua daerah rawan bencana mendapatkan layanan informasi lewat media sosial karena adanya keterbatasan teknologi informasi dan jangkauan internet yang masih belum dapat menjangkau seluruh daerah rawan bencana.

Tabel 2.46.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian Tahun 2023(%)	Perangkat Daerah
1	Pelayanan ketertarikan dan ketertarikan Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	98,86	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	50,55%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	77,26%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	87,27%	Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber : Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

6. Sosial

Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Sosial selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Pencapaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021*)	2022	2023
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	39,95	56,73	70
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	59,77	35,24	77
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	76,82	57,93	
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	6,13	8,02	
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021*)	2022	2023
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	75,01	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	0,57	1,68	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *) Perhitungan capaian kinerja tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% sebagai berikut.

Tabel 2.48.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Sosial
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Katutura Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

7. Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Tabel 2.49.
Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan
Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,28	8,96	8,68	7,6	7,33
b. Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	84.045	103.607	104.212	101.135	102.010
c. Persentase Penduduk Bekerja	%	92,72	91,04	91,32	92,40	92,67
d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,70	61,11	62,76	68,84	70,10
e. Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.842.301	1.892.059	1.912.716	1.785.309	1.985.377
f. Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.155.071	1.156.180	1.200.346	1.330.355	1.391.755
g. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	1.071.026	1.052.573	1.096.134	1.229.218	1.289.745
h. Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	687.230	735.879	712.370	602.126	593.622

Sumber : BPS Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.391.755 orang, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 1.330.355 orang. Persentase jumlah penduduk bekerja dari total angkatan kerja pada tahun 2023 meningkat dari 92,40% (1.229.218) pada tahun 2022 menjadi 92,67% (1.289.745) dimana angkatan kerja yang menjadi pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 7,6% menjadi 7,33% pada tahun 2023. Adapun dari sisi jumlah nya naik 875 orang menjadi 102.010 orang. Adapun data target dan realisasi serta capaian TPT dan Jumlah Penganggur tersaji pada tabel dibawah ini.

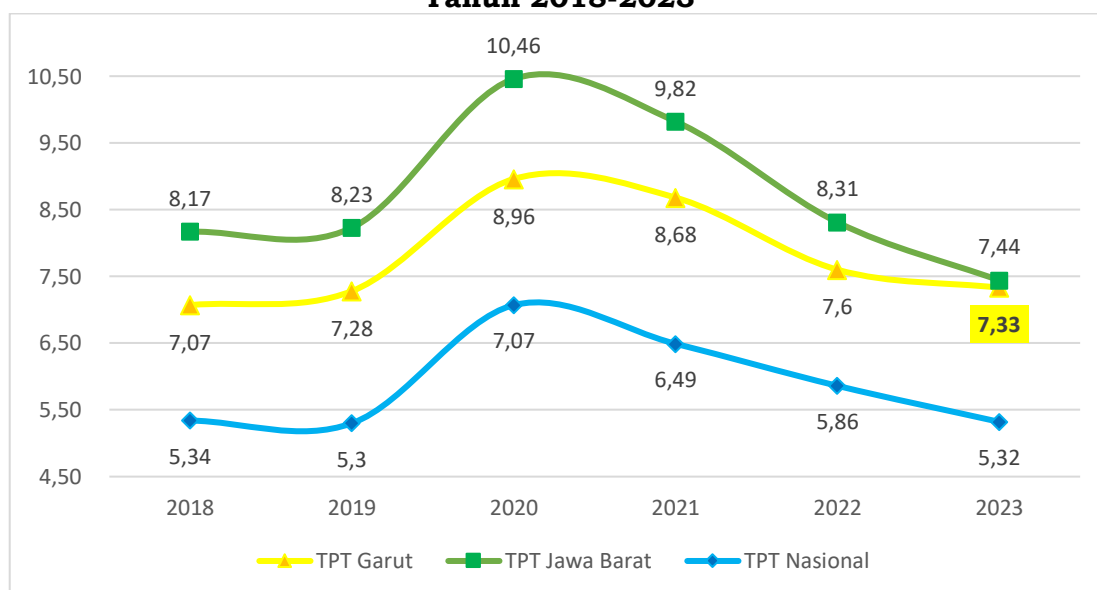
Tabel 2.50.
Target dan Realisasi serta Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Jumlah Penganggur Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Penganggur			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	Target(Jiwa)	Realisasi(Jiwa)	Capaian(%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019		84.045		4,25	7,28	98,82
2020	110.560-118.473	103.607	109,52	9,78-10,48	8,96	98,74
2021	106.560-114.473	104.212	105,70	8,96-9,46	8,68	99,14
2022	102.500-110.473	101.135	105,05	8,21 - 8,41	7,6	108,54
2023	98.560-106.473	102.010	100,49	7,31 - 7,51	7,33	101,08
2024	94.560-102.473			6,61		

Sumber: BPS, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pencapaian TPT tahun 2023 sebesar 7,33% adalah 101,08% terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2023 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 5,86%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 8,31%.

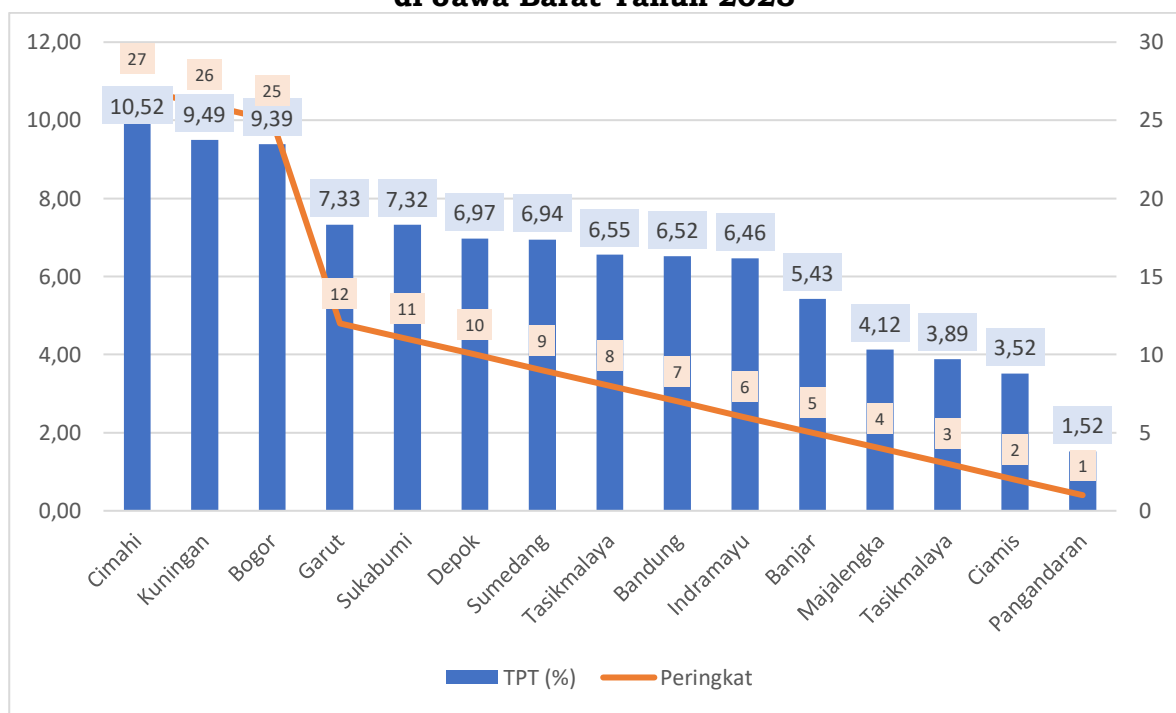
Gambar 2.45.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Garut tahun 2023 berada di peringkat 12. Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi adalah Kota Cimahi sebesar 10,52%, disusul Kuningan dan Kabupaten Bogor, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah kabupaten Pangandaran sebesar 1,56%, disusul Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

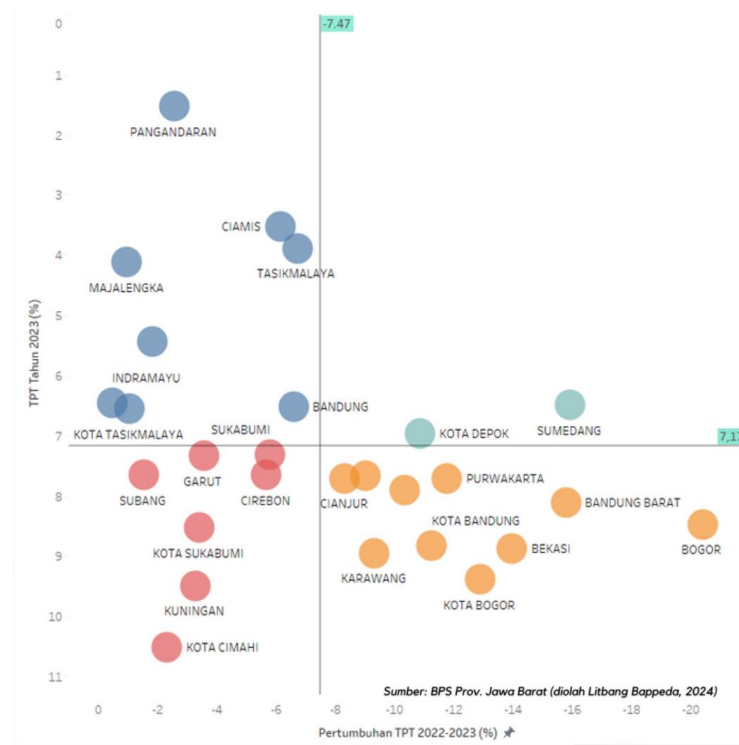
Gambar 2.46.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 Kabupaten Garut berada di kuadran IV dengan angka TPT berada di atas rata-rata Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat dan kinerja penurunan TPT dari tahun 2022 ke 2023 berada di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

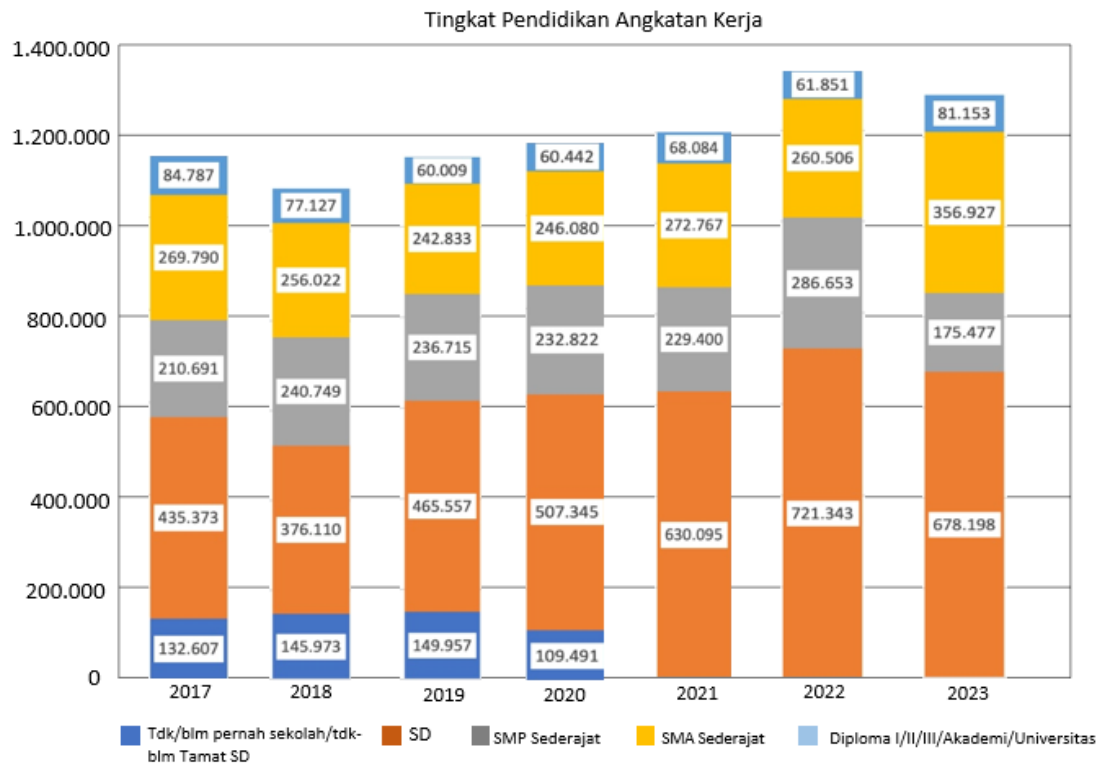
Gambar 2.47.
Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

Kualitas angkatan kerja tahun 2023 masih tampak rendah yang ditunjukkan oleh dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat sebesar 678.198 jiwa atau 48,73% dari total angkatan kerja. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi pergeseran komposisi pendidikan angkatan kerja dimana porsi angkatan kerja dengan pendidikan lulusan SLTA sederajat mengalami kenaikan menjadi 25,65% dan sedangkan lulusan perguruan tinggi mengalami kenaikan menjadi 5,83% total angkatan kerja.

Gambar 2.48.
Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “human capital” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (demand for labour) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial. Capaian kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.51.
Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	28	23	16	21	30
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	28	17	8	14	26
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	9.871	2.362	11.210	9.377	5970
4	Keselamatan dan perlindungan (Kewenangan Provinsi)						
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	31.344	31.559	40.317	50.363	58962
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	1.328	560	1.372	304	32
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	108	656	320	0	176
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	n/a	n/a	100	0	0
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	5,21	5,51	5,96	n/a	n/a

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

(1) Kompetensi Tenaga Kerja.

Pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi di UPT-BLK sebanyak 208 orang.

(2) Pencari Kerja Terdaftar.

Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja. Jumlah pencari kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam tahun 2023 sebanyak 20.195, naik dari tahun 2022 sebanyak 24.315 orang.

(3) Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah perluasan kesempatan tenaga kerja dihitung dari tenaga kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya. Pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sistem padat karya (PKS-PK) berjumlah sebanyak 20.195 HOK. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui padat karya diharapkan dapat memberikan manfaat penambahan pendapatan bagi masyarakat.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu Kualitas Hidup Perempuan; Perlindungan Perempuan; Kualitas Keluarga; Sistem Data Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019 – 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52.
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019–2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	48,30	62	47,28	52,41	52,35
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16	18	18	16	10
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	39,48	54	39,97	77,6	45,74



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
4	Rasio KDRT	%	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,56	2,65	2,65	2,65	2,56
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	43,20	38,73	43,19	34,2	39,53
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100,36	100	50,4	98,73	97,27
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	100,62	93,4	44,63	85,2	77,84
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	107,83	62,4	41,59	42,56	55,83
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	17,89	12,2	53,68	53,66	19,64
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,41	99,36	103	99,56	99,53
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	25,27	35	35	35	35,05

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik sosial, profesi maupun kemasyarakatan serta keagamaan, diantaranya : gabungan organisasi wanita, organisasi wanita persatuan antara lain Dharma Wanita

Persatuan, Persit, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDII). Selain itu, terdapat organisasi wanita di bidang kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Organisasi wanita profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Persistri.

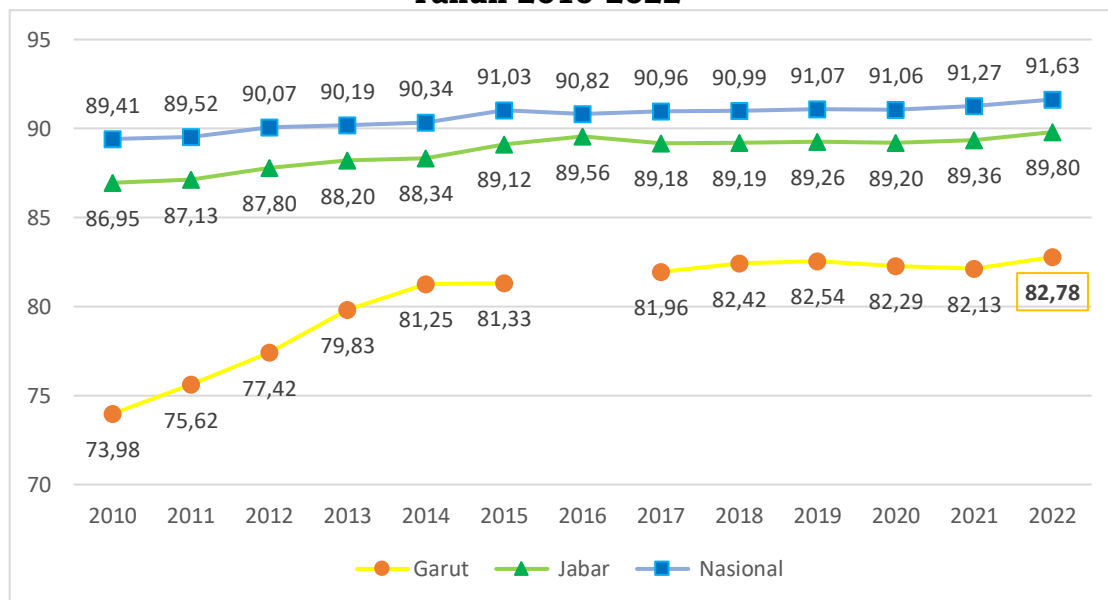
Upaya pencegahan dan penindakan dilakukan Pemerintah, dalam rangka memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani pada tahun 2023 sebesar 100% sesuai target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesadaran bahwa perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yaitu tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah, hal ini merupakan dampak dari sosialisasi tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Prosentase trafficking yang tertangani pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% atau mencapai dari target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga berita atau informasi mengenai kasus kekerasan dapat segera ditangani; terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait (DPPKBPPPA, P2TP2A Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Kepolisian resort Garut, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan lain-lain).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, komponen IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita. Pada Tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender mencapai 82,78 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang berada pada nilai 82,13. Pencapaian IPG Tahun 2022 masih perlu terus ditingkatkan karena masih dibawah IPG Jawa Barat sebesar 89,80 dan Nasional 91,63. Untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, maka upaya pencapaian target sebagaimana telah menjadi kesepakatan dalam SDGs perlu terus ditingkatkan, diantaranya mengakhiri

segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan, dan meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan.

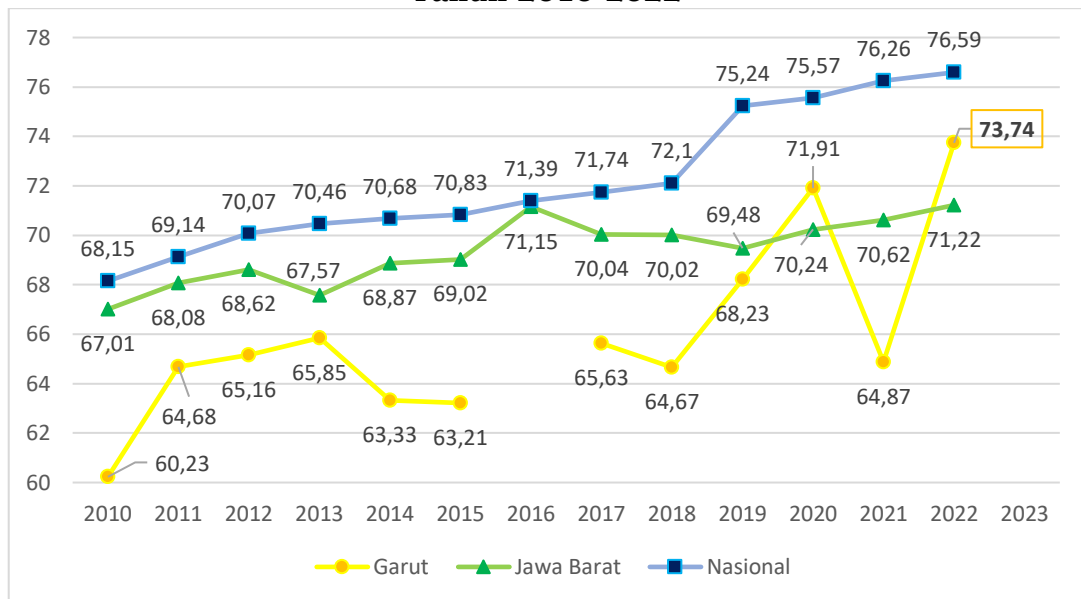
Gambar 2.49.
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Komponen IDG terdiri dari keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Pencapaian IDG tahun 2022 sebesar 73,74 poin, naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 (64,87 poin), dan berada diatas IDG Provinsi Jawa Barat sebesar 71,22 poin dan masih berada dibawah IDG Nasional sebesar 76,59 poin.

Gambar 2.50.
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2023

9. Pangan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian; Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; Penanganan Kerawanan Pangan; dan Keamanan Pangan. Capaian kinerja Urusan Bidang Pangan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Pencapaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	77,20	78,6	79,7	83,1	91,7
2	Penguatan cadangan pangan	%	11,25	50	n/a	85,5	473
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	5,88	6,26	n/a	7,92	9,28
4	Ketersediaan pangan utama	Ton	492.442,2 5	230.702,6 7	459.341,3 2	568.77 0	297.194,1 2
5	Ketersediaan energi dan protein perkapita:						
	Energi per kapita	kkal/kap/h ari	2566	5.909	5.925	5.888	1488,86
	Protein Perkapita	gram/kap/h ari	78	177,4	177,8	176,9	39,9
6	Konsumsi energi dan protein perkapita:						
	Energi per kapita	kkal/kap/h ari	n/a	2.229	2.257	2.268	2.130

No	Bidang Urutan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Protein Perkapita	gram/kap/hari	n/a	59,6	61	61,8	59,78
7	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	%	n/a	<10	<9	<	
8	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	%	n/a	70,3	78,26	83,35	82,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Indikator capaian kinerja urusan pangan salah satu-nya dilihat dari pencapaian skor PPH yang merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Capaian skor PPH Kabupaten Garut tahun 2023 mencapai 91,7 poin. Kelompok pangan yang baru terpenuhi hanya dari padi-padian. Untuk kelompok pangan yang lain, terutama pangan hewani, umbi-umbian, sayur dan buah, masih di bawah PPH maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Garut masih memerlukan peningkatan kualitas konsumsi pangan terutama penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Penyelenggaraan urusan pangan diantaranya juga diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan yang didasarkan pada pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi masyarakat dan menjadi bahan kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat.

Ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Garut pada tahun 2023 mencapai ketersediaan energi 1488,86 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 39,9 gram/kap/hari. Pada tahun 2023, realisasi ketersediaan energi dan protein perkapita cenderung menurun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara penghitungan. Konsumsi energi per kapita cenderung menurun dari tahun 2022 dari semula 2.268 kkal/kap/hari menjadi 2.130 kkal/kap/hari dan namun sudah melampaui dari standar angka kecukupan energi maksimal, yaitu 2.100 kkal/kap/hari

walaupun kecukupan energi tersebut masih belum beragam dan masih tergantung pada padi-padian.

10. Pertanian

Persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2023 mencapai 60,28% . Angka ini naik dari capaian tahun 2022 sebesar 11,27%. Sedangkan jumlah kasus pertanahan yang ditangani pada tahun 2023 mencapai 30 kasus Ringkasan pencapaian kinerja urusan Pertanian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2023

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1	Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	18,36	22,86	28,15	49,01	60,28
2.	Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani	kasus	35	5	8	8	30

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman dan BPKAD Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

11. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan mencapai 66,89 persen cenderung menurun sebesar 3.86 poin dari capaian pada tahun 2022 yakni berada pada nilai 70,75. IKLH dihitung berdasarkan pada Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 47,62 poin dan berada dalam klasifikasi kurang, turun cukup signifikan sebesar 16,75 poin dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 64,37 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) berada dalam klasifikasi Sangat Baik berada pada angka 94,83 poin, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) berada pada nilai 48,32 poin dan masih berada pada klasifikasi Kurang. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2019-2023.

Tabel 2.55.
Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	56,41	56,22	67,82	70,75	66,89
2	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
3	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	1 dok KLHS RPJMD	20	100	100	100
4	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%	n/a	n/a	n/a	100	n/a
5	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	n/a	n/a	25	25	25
6	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%	n/a	n/a	20	20	n/a
7	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,148	0,146	0,164
8	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	22,60	25,27	25,66	29,95	31,48
9	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%	n/a	n/a	4	2	n/a
10	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	n/a	2	n/a

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a data realisasi tahun berkenaan tidak dapat diukur dikarenakan kegiatan pada tahun berkenaan tidak dilaksanakan dan tidak dianggarkan setiap tahun

Jika berdasarkan nilai komponen IKLH dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) turun cukup signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 berikut merupakan beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan indeks kualitas air (IKA) yakni:

1. Penertiban titik-titik pembuangan air limbah melalui mekanisme self purification melalui penguraian zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air Sungai secara alamiah, kualitas air akan semakin membaik jika mencapai hilir;
2. Peningkatan fasilitas pengelolaan cemaran domestik melalui peningkatan pelaksanaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), IPAL komunal;
3. Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk Pemantauan Pemasangan alat pantau real-time pada beberapa titik pemantauan yang dianggap kritis dan memiliki prioritas tinggi sehingga dapat menjadi early warning system agar pengelolaan berbagai bentuk remediasi dapat dilakukan lebih awal.
4. Pengetatan izin pembuangan limbah terkait baku mutu dan pengawasan atas efisiensi pengolahan setiap IPAL industri;

5. Melaksanakan kegiatan pembersih unsur pencemaran dengan fokus pada kegiatan Pipanisasi dan Operasional IPAL 2 SIK Sukaregang dan Revitalisasi IPLT Copong.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Profil Kependudukan. Realisasi capaian Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk tahun 2022 adalah sebesar 72,45 % atau belum dapat mencapai target tahun 2022. Sedangkan realisasi capaian Rasio Bayi berakte kelahiran adalah sebesar 85,62% atau telah melampaui target capaian pada tahun 2022 sebesar 190% sama halnya dengan Rasio pasangan berakte nikah yang mencapai realisasi target sebesar 239,7 % atau berada pada angka 112,7 % penerbitan akte nikah pada tahun 2022. Capaian kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	%	93,01	98,4	98,82	72,45	99,71
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	76,56	80,1	79,03	85,62	92,31
3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	47,79	43,9	100	112,7	84
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada					
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah					
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,93	97,3	96,78	72,60	95
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	60,5	34,9	71,6	90	80,11
8.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	n/a	75	75	75	80
<i>*Indikator permen86 dan permen 18 beririsan dengan permendagri 00096-5384-DUKCAPIL 2023 sehingga untuk tahun 2023 menggunakan perubahan berdasarkan permendagri 5483-disdukcapil</i>							
1	Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	%				Perekaman 98,90% dan Pencetakan 98,08%	n/a
2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%				17,83%	n/a

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%				n/a	n/a
4	Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%				83,17%	n/a
5	Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Kelurahan/Pemukaman Umum/Pemukaman Keluarga yang ada petugasnya	%				n/a	n/a
6	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	%				0	n/a
7	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	%				4	n/a
8	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%				n/a	n/a
9	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	%				Ada	n/a
10	Keluaran/output kinerja pelayanan dokumen lainnya	%				0	n/a

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a belum ada data

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2019-2023 berkaitan dengan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

- (1) Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk tahun 2023 mencapai 99,71% cenderung meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,45%;
- (2) Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2023 mencapai 92,31% meningkat dari tahun 2022 sebesar 85,62%;
- (3) Rasio pasangan berakte nikah tahun 2023 mencapai 84% menurun dari tahun 2022 sebesar 112,7%;
- (4) Ketersediaan database kependudukan tahun 2023 sudah ada;
- (5) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan;
- (6) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2023 mencapai 95% ;
- (7) Cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2023 mencapai 80,11% menurun dari tahun 2022 sebesar 90%;

- (8) Cakupan pemanfaatan data kependudukan mencapai 80% pada tahun 2023.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penataan Desa; Kerjasama Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2019–2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	15	20	30	40	60
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	42
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	442
4	Persentase LSM Aktif	%	n/a	70	72	75	87
5	Persentase LPM Berprestasi	%	6	7	8	9	10
6	Persentase PKK Aktif	%	55	100	70	80	87
7	Persentase Posyandu Aktif	%	55	100	70	80	87
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	65	70	72	75	79
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, keberhasilan program ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga Sejahtera. Adapun capaian Angka Kelahiran Total

(TFR) tahun 2022 mencapai angka 2,45 % kembali meningkat jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021, Angka Kelahiran Total menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 104,2 %, dengan angka 72,39%.

Capaian kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,61	1,1	1,1	0,86	0,84
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,34	2,34	2,3	2,45	2,33
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	4,00	4,05	6,05	8,12	8,3
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Menganalisis Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	20	20	100	100	100
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	0	0	0	-	
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Menganalisis Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	0	0	8	8	
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	2	5	5	5
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,85	2,98	2,77	1,37	2,64
9	Ratio Akseptor KB	%	70,67	71,29	71,96	72,39	73,21
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	70,67	71,29	71,96	72,39	73,21
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	Angka	49/1000	49/1000	49/1000	36/1000	36,36/1000

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,89	3,89	3,44	3,36	3,36
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,5	13,66	13,44	13,13	13,13
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	28,72	29,72	30,93	32,16	24,46
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	70,67	70,67	70,91	71,48	71,49
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	82,32	83,04	84,15	84,32	84,45
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	78,9	78,94	80,74	82,94	82,95
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	75,62	78,24	80,79	79,88	79,9
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	2	2	2	2	4,76
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	50	55	60	78,69	78,7
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	291	291	280	280	53,2
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	84	87	84,92	86,41	86,5
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	442	100	442	442
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	40	67	100	100	90
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	16 orang*	-	
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	45,65	55	60	101	72

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	55,45	65	68	81	81
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,98	19	19,01	19,01	19,09
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	n/a	1,25	2	-	1,2

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Keterangan: * merupakan data total penduduk yang terkena Infeksi Menular Seksual (tidak spesifik berdasarkan kelompok umur remaja) **belum ada data

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi.

15. Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Pelayaran; Penerbangan; dan Perkeretaapian. Capaian kinerja Urusan Bidang Perhubungan pada tahun 2019- 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	0,384	0,385	0,4368	105.82	120.25
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,00081	0,128	0,061	0,082	0,03
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	13.295	8.035	8.662	9.035	12,296
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	13	2	2	2	2
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	38,39	38,5	0,43	0,1026	0,06
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	9,84	13	18,07	29,57	5,97
7	Pemasangan Rambu- Rambu	%	70,02	100	158	158	89,20
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	kend/Km	0,02	0,14	0.062	0.062	0.06

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
9	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Org	150.250	65.340	501.224	1.031.637	341.836
10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Org/Thn	150.250	65.340	501.224	1.031.637	341,836
11	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	%	n/a	n/a	68,29	80,88	90,69
12	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	n/a	n/a	58,64	71,5	85.4
13	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	%	n/a	n/a	65,45	77,13	85.99
14	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	n/a	n/a	50,06	63,85	81.96
15	Persentase Sosialisasi keselamatan perhubungan	%	n/a	n/a	52,08	68,58	85.07
16	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	%	n/a	n/a	83,33	88,s89	94.44

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan urusan perhubungan dititik beratkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah antara lain kegiatan usaha masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui indikator rasio angkutan darat, jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji, prosentase kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar, rambu lalu-lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

16. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Informasi dan Komunikasi Publik; dan Aplikasi Informatika. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika selama tahun 2019– 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023

1	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	%	n/a	3,26	3,25	3,25	3,29
2	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	n/a	37	52	75	82

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Tingkat kematangan aplikasi SPBE Pemkab Garut pada tahun 2023 meningkat 0,04 % dari capaian pada tahun 2022 yakni sebesar 3,29% berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 sedangkan persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat mencapai 82 % cenderung naik dari tahun 2023. Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id) sebagai media pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi manajemen (hukum, kepegawaian, perizinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lain sebagainya serta menjadi media interaksi secara elektronik dengan stakeholder pembangunan untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dan keluhan terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Garut.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup 7 (tujuh) sub urusan yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam; Pengawasan dan pemeriksaan; Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan Pengembangan UMKM. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi Aktif	%	79,19	81	63,06	64,17	66,21

2	Jumlah Koperasi aktif	Angka	1153	1559	980	1.028	1071
3	Jumlah koperasi baru	Angka	18	20	43	48	35
4	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	237	51	50	58	32
5	Jumlah wirausaha	Angka	1401	2019	8299	11.489	
6	Jumlah UKM yang meningkat omsetnya	Angka	2256	720	1.306	1.235	1.291
7	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	n/a	n/a	10,6	7,9	6,2
8	Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	UKM	n/a	n/a	1537	1347	1435
9	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru	%	n/a	n/a	215	48	35
10	Persentase koperasi yang diawasi	%	n/a	n/a	5	6,12	4,29
11	Persentase koperasi sehat	%	n/a	n/a	5	3,74	3,19
12	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	%	n/a	n/a	15	4,9	n/a
13	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%	n/a	n/a	1,36	1,25	2,2
14	Jumlah wirausaha Baru	Wirausaha Baru	n/a	n/a	737	3795	1411
15	Jumlah UKM yang terbina	Pelaku Usaha Mikro	n/a	n/a	975	1689	1141

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2023 persentase koperasi yang berkualitas memang cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni mencapai 6,2%, namun peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha cenderung meningkat 88 UKM yakni mencapai 1435 dan jumlah UKM yang terbina pada tahun 2023 ini mencapai 1141 pelaku usaha mikro, dengan persentase koperasi aktif sebesar 66,21. Pertumbuhan omzet usaha koperasi juga menunjukkan nilai yang positif jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni mencapai 2,2%. Beberapa intervensi yang dilakukan dalam pencapaian berbagai indikator bidang urusan koperasi dan usaha kecil menengah yakni berupa fasilitasi perizinan, pelatihan, fasilitasi UKM naik kelas, pemasaran serta bantuan modal.

18. Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Penanaman Modal selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62.
Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/PMA	4.300	4.426	466	711	146
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	1,3708	1,11	1,29	1,165	n/a
3	Rasio Penanam Modal (PMA-PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	24.081	-	n/a	20	36
4	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	55,85	- 256,99	n/a	33	n/a
5	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	%	n/a	n/a	100	100	100
6	Persentase penyelesaian Perizinan tepat waktu	%	n/a	n/a	100	100	100
7	Persentase data dan informasi perizinan dan non peizinan	%	n/a	n/a	100	100	100
8	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	n/a	n/a	Baik	Baik	Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *belum ada data

Sementara itu, Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp 1,356 triliun, naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 1,165 triliun. Terdapat peningkatan investasi pada sektor tersier pada tahun 2023 menjadi Rp. 905,9 Miliar, peningkatan terbesar berada pada perumahan, kawasan industri dan perkantoran, menjadi 492,98 Miliar meeningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 1.79 Miliar.

Tabel 2.63.
Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2021-2023

No	Sektor	Tahun		
		2021	2022	2023
I	Sektor Primer	131.105.667.771	248.467.608.390	129.445.736.560
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	8.837.900.000	346.500.000	123.999.256.561
2	Peternakan	119.517.767.711	239.850.908.390	-
3	Perikanan	2.500.000.000	8.270.200.000	1.479.999
4	Pertambangan	250.000.000	-	5.205.000.000
II	Sektor Sekunder	709.699.945.420	597.724.131.438	321.344.466.986
1	Industri Makanan	1.615.400.000	11.068.400.000	10.477.600.000
2	Industri Tekstil	10.116.342.177	313.120.887.414	129.144.395.888
3	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	697.898.903.243	272.753.453.688	137.653.274.225
4	Industri Kayu	-	-	38.230.600.000
5	Industri Kertas dan Percetakan	-	200.000	-
6	Industri Karet dan Plastik	-	-	0
7	Industri Mineral dan Non Logam	-	-	-
8	Industri Logam, Mesin & Elektronik	-	100.000.000	-
8	Ind.Kimia dan Farmasi	69.300.000	-	-
9	Industri Lainnya	-	681.190.336	5.838.596.873
III	Sektor Tersier	449.278.377.309	319.048.768.923	905.914.149.245
1	Listrik, Gas dan Air	81.003.137.352	37.569.472.157	101.782.621.244
2	Konstruksi	215.539.000.000	69.670.800.000	127.373.800.000
3	Perdagangan & Reparasi	11.596.239.997	37.799.300.000	61.554.699.736
4	Hotel & Restoran	57.618.419.961	57.580.951.194	44.594.400.000
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	33.500.000	110.014.845.572	4.974.400.000
6	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	78.061.200.000	1.791.000.000	492.981.688.272
7	Jasa Lainnya	5.426.879.999	4.622.400.000	72.652.539.993
Jumlah		1.290.083.990.44	1.165.240.508.751	1.356.704.352.791

Sumber : DPMPT Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPT tahun 2022 melalui OSS-RBA sebanyak 23.210 perizinan, naik signifikan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 815 perizinan. Perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang selama ini dikelola oleh DPMPT dan paling berkontribusi terhadap jumlah perizinan yang diterbitkan DPMPT kewenangannya dilimpahkan kepada Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan.

Tabel 2.64.
Data Jumlah Penerbitan Perizinan di Kabupaten Garut
Tahun 2019-2023

No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Izin Prinsip Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal	2182	-	-	n/a	
2	Izin Prinsip Penanaman Modal Perubahan	-	-	-	n/a	
3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	-		n/a	
4	Izin Lokasi	19	8	6	n/a	
5	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	77	52	39	n/a	
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	441	262		n/a	
7	Izin Gangguan (IG)	-	-	336	n/a	
8	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	215	53	n/a	
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	92	82	n/a	
10	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-		n/a	
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	35	33	15	n/a	
12	Izin Trayek Angkutan Perdesaan/Angkutan Kota	192	178	92	n/a	
13	Izin Usaha Angkutan	-	-		n/a	
14	Izin Reklame	20	20	16	n/a	
15	Izin Mendirikan Klinik	-	-		n/a	
16	Izin Operasional Klinik	30	30	17	n/a	
17	Izin Operasional Rumah Sakit			3	n/a	
18	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	1	-	n/a	
19	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan	2	33	24	n/a	
20	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	8	7	8	n/a	
21	Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah	-	-		n/a	
22	Izin Lingkungan	108	60	-	n/a	
23	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kecuali Minyak Pelumas atau Oli Bekas	-	-		n/a	
24	Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	9	14	17	n/a	
25	Izin Usaha Industri	-	4	9	n/a	
26	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-	4	8	n/a	
27	Izin Usaha Budidaya Perikanan	-	1	2	n/a	
28	Izin Usaha Toko Swalayan	-	-		n/a	
29	Izin Sewa Tanah Dan Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Orang dan Kendaraan, Bangunan rumah, Toko dan Kios yang ada di Bantaran Irigasi	-	3	-	n/a	
30	Izin menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan	19	2	-	n/a	
31	Surat Izin Apotek	40	38	68	n/a	
32	Surat Izin Toko Obat	8	10	11	n/a	
33	Surat Izin Toko Alat Kesehatan			1	n/a	
34	Surat Izin Laboratorium Klinik Umum	-	1	-	n/a	
35	Izin Usaha Budidaya Peternakan	-	2	1	n/a	
36	Tanda daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	-	2	-	n/a	
37	Tanda daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	-	5	2	n/a	

No	Jenis Perizinan	Jumlah Penerbitan Perizinan				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
38	Tanda daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	-	2	3	n/a	
39	Izin Usaha Tanaman Pangan			2	n/a	
40	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	-	730	
Jumlah		3.559	1.079	815	-	

Sumber : DPMPT Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *Tahun 2022 perizinan telah menggunakan OSS-RBA

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Kepemudaan; Keolahragaan; dan Kepramukaan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	30	40,8	60	80	85
2	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	0,50	1,00	n/a	n/a	38
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	25	0	n/a	n/a	82
4	Prosentase nomor cabang olahraga diikuti	%	29	0*	85	100	100
5	Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	%	42	0*	n/a	n/a	
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	5	0*	28,5	51,65	
7	Persentase Wirausaha Muda	%	0,13	1,00	30,91**	32,73	34,45
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	72,45	0*	n/a	n/a	
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	81,25	0*	n/a	n/a	
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	45	0*	n/a	n/a	
11	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	29	0*	n/a	n/a	73
12	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlet	29	0*	n/a	n/a	117
13	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	%	-	-	100	100	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a menjelaskan bahwa indikator ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2019-2024

*event olahraga tidak terlaksana dikarenakan dampak pandemi covid 19

**Formula : Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berusaha di Garut / Jumlah pemuda di Garut

***belum ada data

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Garut setiap tahunnya kian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini dapat terlihat pada banyaknya wirausaha muda yang memulai usaha mikro baik di bidang kreatif fashion, photography, akomodasi dan bidang usaha lainnya.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportifitas, dilakukan fasilitasi kegiatan keolahragaan baik berupa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga maupun Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat.

20. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik mencakup sub urusan statistik sektoral yang secara garis besar pemanfaatannya berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja

urusan statistik selama tahun 2019-2023 antara lain tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Tabel 2.66.
Pencapaian Kinerja Urusan Statititik Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Kategori	n/a	50	69	79	100
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku " Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD.

Urusan Statistik ini lebih fokus terhadap Statistik Sektoral dimana statistik ini pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

21. Persandian

Penyelenggaraan urusan bidang persandian terkait dengan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten secara cepat dan akurat. Pencapaian kinerja urusan persandian selama tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
2	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	Poin	n/a	n/a	n/a	125	450

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Urusan Persandian ini berkaitan erat dengan keamanan informasi, salah satu bentuk aplikasinya adalah penerapan tandatangan elektronik bagi Pejabat tinggi Pratama dan pejabat Administrator di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut agar tidak mudah disalah gunakan maupun dipalsukan. Urusan Persandian juga mengikuti Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif. Era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam supply chain layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis cloud memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan

sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Berkaitan Hal di atas, pada Tahun 2023 Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Garut adalah sebesar 450 Poin.

22. Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kebudayaan selama tahun 2019– 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.68.
Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Pagelaran	5	0	8	15	42
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	CB/ ODCB	20	20	25	20	25
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	5	5	0	3	1
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	CB/ ODCB	5	5	3	4	4
5	Jumlah Karya Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Buah	3	3	3	4	4

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.
Keterangan: *belum ada data

Kabupaten Garut memiliki Karya Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan sebagai WBTB Nasional sejumlah 4 buah yaitu Kesenian Lais, Kesenian Gondang Buhun dan Surak Ibra serta Kesenian Badeng. Adapun Karya Budaya yang sudah memperoleh HAKI masih belum ada.

Pengembangan seni budaya diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival, dan juga pelestarian

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

23. Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perpustakaan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69.
Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	28.849	9.333	6.219	32.112	39.500
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	45.483	59.446	61.326	67.635	74.135
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,1	0	1	1	0,0056
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	1440	480	360	1.020	1920
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	5.854	7.707	8.245	13.039	14.885
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	0	0	0	8	6

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan minat baca masyarakat dengan mendorong pemanfaatan perpustakaan, peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan, peningkatan pembinaan perpustakaan, peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka, dan peningkatan publikasi dan sosialisasi perpustakaan.

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemustaka, hingga anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilaksanakan dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, antara lain :

1. Pemerataan layanan perpustakaan

2. Ketercukupan koleksi perpustakaan
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
5. Perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
6. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
7. Anggota Perpustakaan

Berdasarkan uraian perhitungan masing-masing UPLM, maka diperoleh hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Garut pada tahun 2023 dengan rumus jumlah seluruh capaian UPLM dibagi jumlah seluruh unsur UPLM dikali 100, yaitu $(0,403+0,052+0,635+0,529+ 1,000+0,820+0,633) / 7 * 100 = 58,72$ atau setelah dikonversi menjadi 12,34 dan berada pada kategori Sedang. Adapun untuk nilai IPL nasional tahun 2023 adalah 14.58.

Peningkatan nilai kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Garut pada tahun 2022 diperoleh karena adanya peningkatan pada beberapa indikator, diantaranya ketercukupan koleksi perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, perpustakaan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan) dan keterlibatan masyarakat dalam komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada aktivitas yang dilakukan di perpustakaan. Hal ini menggambarkan bahwa pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan pegiat literasi dan mitra pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum di wilayah Kabupaten Garut.

Secara terinci capaian indikator kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2020-2023, terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.70.
Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Tahun 2020-2023

No	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Pemerataan layanan perpustakaan	n/a	0,002	0,002	0,403
2	Ketercukupan koleksi perpustakaan	0,19	0,15	0,53	0,054
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,002	0,002	0,002	0,716

No	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
4	Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	55,81	79,89	87,49	0,62
5	Perpustakaan berstandar nasional perpustakaan (SNP)	0,84	0,87	1,31	1
6	Keterlibatan masyarakat dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	19,75	23,5	38,17	0,744
7	Anggota perpustakaan	n/a	1,19	1,40	0,574
	Jumlah	76,59	105,604	128,904	58,72
	Nilai IPLM	12,89	15,08	18,41	12,34

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan : *belum ada data

24. Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pengelolaan Arsip; Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; dan Perizinan. Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan penerapan aturan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kearsipan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71.

Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019-2022

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	21,53	30,53	36,15	40,76	47,12
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	2	0,4	6	6	6

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *belum ada data

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.72.

Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Ikan	kg	26,45	25,7	37,5	28,86	30,77
2	Nilai Tukar Nelayan	poin	108,36	108,01	101,5	103,00	105,4
3	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	64.540	60,884	66.442,04	67.933	69056,03
4	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	710	655	764,6	788	832,3
5	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelompok	n/a	n/a	7	12	9

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk dapat meningkatkan produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan dan peningkatan nilai tambah bagi pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan binaan. Konsumsi ikan Kabupaten Garut selama tahun 2022 mencapai 28,86 kg capaian Konsumsi ikan pada tahun 2023 mencapai 30,77 cenderung meningkat cukup signifikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap sesuai potensinya diantaranya adalah:

- 1) Musim yang tidak menentu menyebabkan nelayan sulit melaut sehingga hasil tangkapan menurun;
- 2) Rendahnya keragaman jenis alat tangkap nelayan di Kabupaten Garut menyebabkan keterbatasan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, adapun beberapa alat tangkap yang banyak digunakan diantaranya gillnet dan pancing serta payang namun penggunaan payang masih rendah karena tergolong mahal padahal hasil produksi payang tergolong tinggi;
- 3) Kapal perikanan 5-30 GT sulit keluar masuk pelabuhan yang ada di Kabupaten Garut sehingga beralih ke pelabuhan di wilayah lain seperti Cilacap atau Pelabuhan Ratu yang menyebabkan hasil produksi tidak tercatat di Kabupaten Garut;
- 4) Harga alat tangkap semakin mahal sementara harga ikan tidak banyak berubah sehingga minat nelayan untuk menangkap ikan cenderung menurun;

- 5) Lokasi Fishing Ground makin menjauh dari wilayah pantai sehingga sulit dicapai oleh armada tangkap nelayan yang umumnya masih sederhana.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2022 PAD sektor pariwisata di Kabupaten Garut cenderung meningkat 3 kali lipat dari tahun 2021 menjadi 2.39 M. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pariwisata selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan Wisata	orang	2.880.972	1.489.011	2.152.000	4.406.083	3.874.751
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	n/a	1	2	2	2
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	n/a	755.078.488	781.453.625	2.391.591.411	2.105.327.876

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan citra pariwisata Kabupaten Garut seiring dengan peningkatan citra pariwisata Indonesia, diversifikasi destinasi pariwisata di setiap Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, peningkatan pemasaran pariwisata melalui fortopolio pelanggan dan produk yang berbasis kepada produk wisata alam, produk wisata budaya dan wisata buatan, serta revitalisasi seni budaya, sebagai bagian dari atraksi wisata yang dilakukan melalui pengamanan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan citra pariwisata Indonesia antara lain ditempuh dengan peningkatan jumlah destinasi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola

destinasi (Destination Management Organization/DMO). Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi yang dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekatan proses, sistematis, dan manajerial.

Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Garut pada tahun 2022 naik dua kali lipat menjadi 4,4 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,15 juta orang. Terus terkendalanya angka COVID-19 dan secara resmi pada akhir tahun 2022 status PPKM telah dicabut turut meningkatkan kunjungan pada destinasi wisata di wilayah Kabupaten Garut.

3. Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Sarana Pertanian; Prasarana Pertanian; Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan Perizinan Usaha Pertanian. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pertanian selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	36,75	37,64	37,97	37,35	
2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	67,84	51,51	60,38	61,28	67,89
3	Produktivitas jagung	kw/ha	73,89	74,63	76,21	76,77	76,86
4	Produktivitas kacang tanah	kw/ha	17,62	18	18,4	18,52	18,59
5	Produktivitas ubi jalar	kw/ha	141,77	153,29	143,45	143,85	143,95
6	Produktivitas ubi kayu	kw/ha	239,75	242,15	241,9	242,44	238,61
7	Produksi produk olahan tanaman pangan	Kw	508.465	247.923	499.177	443.477	443.126
8	Produktivitas Kopi	tom/ha	0,95	0,93	9,67	8,13	7,81
9	Produktivitas Teh	ton/ha	1,66	1,72	16,5	15,69	16,01
10	Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya.	ton/ha	1,65	6,217	62,2	62,21	245,00
11	Produktivitas Tanaman Atsiri	ton/ha	0,41	0,38	0,42	0,72	0,44
12	Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	ton/ha	0,33	7,717	77,2	88,3	45,27



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
13	Produksi produk olahan tanaman perkebunan	Ton	16.434	16,445	16.501	18.180	18205,00
14	Produktivitas komoditas Tembakau	ton/ha	0,87	0,807	8,63	8,76	10,88
15	Produktivitas Cabai	kw/ha	148,88	149,94	149,72	151,05	147,87
16	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	98,97	90,72	99,86	99,86	99,73
17	Produktivitas Kentang	kw/ha	232,69	234,04	235,18	235,59	235,61
18	Produktivitas Sayuran Lainnya	kw/ha	186,33	184,57	194,42	204,5	204,73
19	Produktivitas Jahe	kw/ha	2,6	2,66	3,13	2,95	2,96
20	Produktivitas Kunyit	kw/ha	2,75	2,71	2,82	2,96	2,97
21	Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	kw/ha	2	2,87	2,11	3,21	3,33
22	Produktivitas Jeruk	kw/ha	46	36	50,25	50,42	50,51
23	Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	kw/ha	40	32	40,11	40,82	40,91
24	Produktivitas Sedap Malam	Tangkai/m ²	n/a	n/a	724	831	836
25	Produktivitas olahan hasil hortikultura	kw/ha	564.321	355.698	578.032	589.048	589.250
26	Indeks Penanaman	Poin	2,64	1,89	2,65	2,77	2,76
27	Cakupan bina kelompok petani	%	3,72	5	7,25	8,53	9,00
28	Prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	%	20	20	20	20	10,00
29	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	20	20	5	11	11,00
30	prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	10	2	4	5,31	5,00
31	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	0,125	0,108	0,085
32	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	0,102	0,103	0,103
33	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	%	n/a	n/a	10	100	100,00
34	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	n/a	n/a	50	100	100,00
35	Produksi Peternakan dan Olahan Hasil Peternakan (daging, telur, susu)	ton	39,806	42.303	34.992,39	31.816	30.392,32
36	Peningkatan layanan keswan dan kesmavet	%	n/a	n/a	5	5	
37	Jumlah layanan perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan	Layanan	n/a	n/a	8	5	30
38	Peternak dan pelaku usaha yang mendapat Bimbingan dan penyuluhan	Kelompok	n/a	n/a	10	10	10

Sumber : Dinas Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, serta sumber daya manusia pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup sub urusan energi baru terbarukan. Persentase perusahaan yang berizin pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 28,57 %. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
Pencapaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase data kelistrikan yang direkosiliasi	%	19	21,4	n/a	n/a	n/a
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik;	%	88,5	92,66	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Perusahaan yang berizin	%	-	-	18,25	28,57	28,57

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: n/a menjelaskan bahwa indikator ini sudah tidak dipakai

5. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; dan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perdagangan selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.76.
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021*	2022	2023
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP	%	n/a	n/a	2,95	3	3

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021*	2022	2023
	Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	n/a	n/a	35	36	34
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	n/a	n/a	41,4	41,8	38
4	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	n/a	n/a	3	5	1
5	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis	n/a	n/a	10	12	14
6	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha	n/a	n/a	16	18	20
7	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	n/a	n/a	9	10	12
8	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha	n/a	n/a	7	7	7

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *Tahun 2021 dan 2022 menggunakan indikator baru sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

6. Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perindustrian selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77.

Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Target	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertambahan jumlah industri kecil	%	n/a	n/a	1	1,14	4,86
2.	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%	n/a	n/a	39,8	100	100
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	%	n/a	n/a	100	100	100
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	n/a	n/a	100	100	100
5.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut	IKM	n/a	n/a	200	250	705
6.	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	n/a	n/a	50	10	10
7.	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	%	n/a	n/a	0,15	0,18	0,2

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *Tahun 2021 menggunakan indikator baru sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

7. Transmigrasi

Penyelenggaraan Urusan Bidang Transmigrasi mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Perencanaan Kawasan Transmigrasi; Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Transmigrasi selama tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78.
Pencapaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1	Jumlah MoU Antar Daerah dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian	mou	-	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2019-2023 antara lain sebagai berikut.

- (1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024;
- (2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
- (3) Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
- (4) Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan;

- (5) Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- (6) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- (7) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah; dan
- (8) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.79.
Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	97	100	100
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	78,83	82,5	83	84	84

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.80.
Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	6,57	6,73	3,22	5,37	3,78
3	Persentase Belanja Pendidikan (20)	%	32,54	32,33	34,12	33,59	20
4	Persentase Belanja Kesehatan (10)	%	13,99	13,95	14,14	12,81	10
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	47,86	41,00	n/a	n/a	n/a
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	52,14	59,00	n/a	n/a	n/a
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,31	0,32	0,34	0,36	0,35
8	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100
10	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
11	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90	%	90	92	95	95	95
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	72	8	80	85	90
13	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	%	99,99	98,98	99,72	100	
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	%	99,97	100	100,74	101,37	
15	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	%	99,36	98,43	99,58	99,77	
16	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	%	94,59	98,72	98,94	99,62	
17	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	%	99,46	99,05	99,12	100	
18	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	%	98,45	99,23	100	100	
19	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	%	99,70	99,25	100	100	

Sumber : Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*

Keterangan: *belum ada data

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran pencapaian kinerja penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.81.
Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	37	37	39	36	38
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	231	258	250	255	259
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	10.891	10.059	9.463	8.888	8469
4	Kebijakan kepegawaian kabupaten garut yang ditetapkan	Kebijakan	n/a	n/a	5	2	4
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	%	80	80	95,36	97,5	82
6	Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Pegawai	%	80	112	30,30	97,5	82
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui.	%	n/a	98,68	99,13	99,57	97
8	Persentase ASN yang Disiplin	%	99,98	99,9	99,90	99,77	99,96
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	n/a	20	20	20	20
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	n/a	15	n/a	3	3
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	n/a	43	44	46	93
12	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS	%	67	14	82	77	86

Sumber : BKD Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan : Kebijakan yang telah ditetapkan:

1. Perbup No. 132 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
2. Perbup No. 131 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Mutasi PNS
3. Perbup No. 130 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi
4. Perbup No. 129 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta ASN
5. Perbup No. 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier PNS

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.

Pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2019-2023 antara lain tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan, penyusunan dan penerapan roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa).

Tabel 2.82.
Pencapaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	70	75	6,82	56,1	166,7
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	50	50	66,67	51,22	75
Penerapan SiDa:							
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	9,09	9,09	27,27	115,15	100
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	60	60	78,95	36,84	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

5. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat Leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut yang masih berada pada Leveling 2. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.83.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB (74,91)
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	%	48	55	55	65	100
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level	L.3	L.3	L.3	L3	L3
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	%	76	78	82	82	94,54
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	L.3 DC	L.3	L.3	L3	L3
7	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	%	83	92	77,04	93	92
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)*	unit	n/a	n/a	0	0	0

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2.3.4. Urusan Pendukung

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2019-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.84.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD Tahun 2019-2022

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2. Sekretariat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung KDH dan WKDH tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.85.
Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Guru Ngaji Aktif Dalam "Garut Mengaji"	%	68	73	76	80	81
2	Cakupan Magrib Mengaji	%	63	70	80	80	90
3	Rasio Dewan Masjid Indonesia (DMI Tingkat Kabupaten Garut Aktif Mengelola Masjid	%	19	45	45	50	50
4	Persentase Masjid Dalam Kondisi Baik	%	50	63	65	68	68
5	Persentase Pesantren Salafiah Dalam Kondisi Baik	%	20	45	50	60	60
6	Rasio Lembaga Pendidikan Keagamaan Aktif	%	20	45	50	60	94
7	Persentase SKPD Yang Menerapkan Aktifitas Keagamaan Di Lingkungannya	%	80	75	75	80	90
8	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat	%	80	85	90	90	95



NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
9	Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	3,05	3,05	3,05	n/a	—
10	Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	3,09	3,09	3,09	n/a	—
11	Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	4,17	-	4	4	4,02
12	Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Perbankan Dan Non Perbankan Daerah Sebagai Daya Dukung Ekonomi Kerakyatan	%	80	85	85	n/a	95
13	Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
14	Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Produk Hukum	10 Perda, 120 Perbup, 1000 Kepbup	10 Perda, 84 Perbup, 850 Kepbup	10 Perda, 230 Perbup, 850 Kepbup	15 Perda, 219 Perbup, 864 Kepbup	12 Perda, 184 Perbup, 824 Kepbup
15	Prosentase Capaian Kinerja KDH/WKDH	%	80	80	85	90	95

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
16	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	80	80	100	95	95
17	Prosentase Kasus Pertanahan Yang Difasilitasi	%	100	60	50	Dipindah-kan ke Perkim	
18	Nilai LPPD	Angka	n/a	3,5117	3,5117	n/a	Sangat Tinggi (3,4962)
19	Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	100	100	100	100	100
20	Prosentase Kesepakantannya Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	%	100	91	73	100	90
21	Prosentase Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	%	10	n/a	n/a	Dipindah-kan ke DPMD	
22	Prosentase Pelayanan Publik Dan Pembinaan Pegawai	%	80	100	100	100	100
23	Persentase Sarana Dan Prasarana Berkondisi Baik	%	80	95	95	96	80
24	Prosentase Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	%	90	93	93	95	98

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2.3.5 Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diantaranya diarahkan pada upaya pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan dan fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86.

Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	%	66,67	66,67	80	100	100
2	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	%	99,64	99,98	80	100	100
3	Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	88,29	85,94	97,29	100	99,13
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam politik	%	78	n/a	78,91	n/a	79,57
5	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	%	n/a	n/a	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

2.3.6. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil pencapaian kinerja urusan kewilayahan tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.87.

Pencapaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022*	2023
1	Persentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	100		
2	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100	100		
3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	%	n/a	70	70		
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	%	n/a	75	75		
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	n/a	n/a	n/a	82,91	83,19
6	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Nilai	n/a	n/a	n/a	76,35	78,40
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	n/a	n/a	n/a	100	100,00
8	Nilai SAKIP Kecamatan	Kategori	n/a	n/a	n/a	B	B

Sumber : Kantor Kecamatan Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *indikator sudah tidak digunakan

Sebelumnya Urusan Kewilayahan dijelaskan oleh 4 (empat) indikator yaitu indikator Persentase pelaksanaan PATEN sesuai standar pelayanan dan Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan dan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan sudah tidak digunakan karena adanya perubahan Renstra Kecamatan yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2021 sehingga indikator kinerja meliputi Nilai SKM, Nilai Sinergitas Kecamatan, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan serta Nilai SAKIP Kecamatan, realisasi indikator nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pada tahun 2023 berada pada angka 83,19%, sedangkan nilai SAKIP berada pada nilai kategori nilai B.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran pencapaian kinerja penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2019-202 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.88.
Pencapaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	515.095	940.065	503.987	522.212	588.794
2	Nilai tukar petani	Poin	110,93	100,65	98,8	103	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	n/a	41,04	39,36	39,14	43,36
4	Produktivitas total daerah	juta	46,51	36,04	36,47	50,05	n/a
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa*	%					
6	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1,7	1,07	1,98	4,55	n/a
7	Rasio ketergantungan**	Angka	57,72	47,31	47,1	46,97	46,92

Sumber : BPS Kabupaten Garut; Badan Kesbang Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD.

Keterangan: *Kategori swasembada sudah tidak digunakan

**Data 2017-2020 : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut 2022, Data 2022: Hasil Proyeksi penduduk interim

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Konsumsi adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan membelanjakan pendapatan untuk berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lain. Pola konsumsi rumah tangga terbagi atas 2 (dua) yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp. 1.039.588 yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 588.794 (56,64%) dan pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 450.794 (43,36%). Rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan Rp. 181.511 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 858.077.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan dukungan ketersediaan infrastruktur wilayah meliputi beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut.

Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pergerakan ekonomi masyarakat melalui pembangunan panjang jalan baru yang dibangun pada tahun 2023 sepanjang 54,03 km, direkonstruksi

sepanjang 277,14 km, direhabilitasi sepanjang 80,96 km dan pembangunan jembatan sepanjang 2716,79 m. Kemantapan jalan Kabupaten Garut tahun 2023 mencapai 55,25 meningkat 3,83% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yakni mencapai 51,42%. Kondisi jalan yang mantap akan mendukung kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa, dan diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

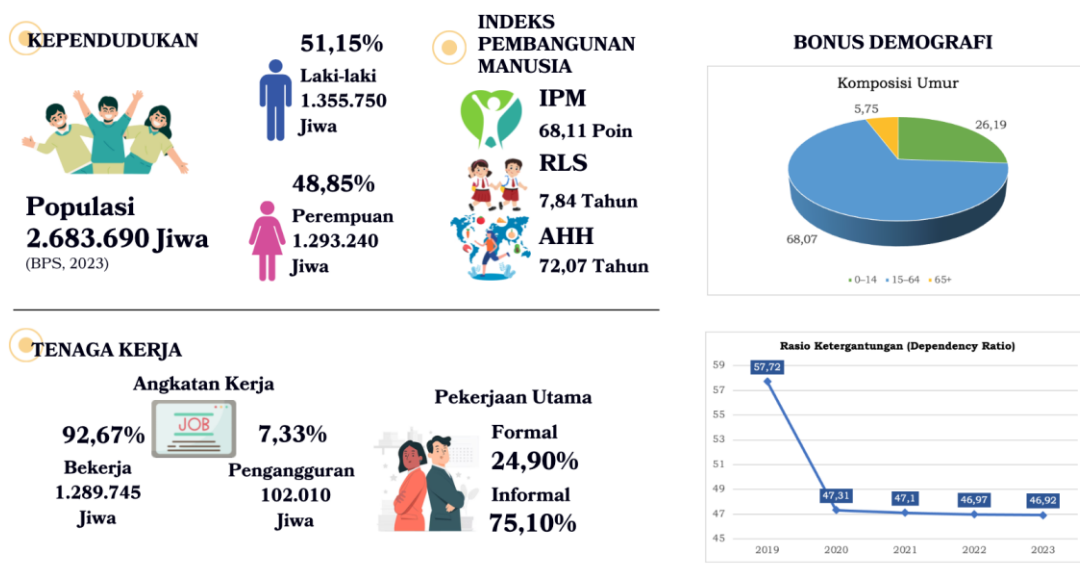
Dalam rangka mendukung iklim berinvestasi, kondisi daya saing daerah dari sisi keamanan daerah merupakan salah satu faktor pendorongnya. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2022 jumlah tindak kriminal sebanyak 605 kasus, naik 89 kasus dibandingkan kondisi tahun 2021 sebanyak 516 kasus. Apabila jumlah kasus kriminal tersebut dibandingkan terhadap jumlah penduduk maka Angka Kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 4,549 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 2 tindak kriminal, kondisi tersebut meningkat dari tahun 2020 sebanyak 1,98 kasus kriminal per 10.000 penduduk. Untuk mendukung kondisi keamanan masyarakat, maka perlu terus didorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Garut masih belum kondusif, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian berusaha, belum adanya kebijakan mengenai Investasi baik skala umum maupun detil, dan kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan Calon Investor serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berkembangnya Investasi.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp 1,165 trilyun, dan kembali meningkat pada tahun 2023 mencapai Rp. 1,356 trilyun.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat diantaranya dari kondisi kualitas tenaga kerja yang diantaranya diukur dari Rasio tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 4,65 % mengalami penurunan 1,02 % dari tahun 2021.

Gambar 2.51.
Sumber Daya Manusia Kabupaten Garut



Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2023 diolah Bappeda

Kabupaten Garut pada tahun 2023 masih mengalami bonus demografi ditunjukkan dengan rasio ketergantungan yang kecil dimana struktur umur penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun lebih banyak dibanding usia tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun dan 65

tahun keatas artinya terjadi perubahan struktur usia penduduk dimana terdapat lebih banyak jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) jika dibandingkan dengan usia tidak produktif yang dipahami dapat membawa keuntungan perekonomian bagi suatu wilayah. Kelompok penduduk ini dapat menjadi motor penggerak dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi sehingga output perekonomian dapat meningkat. Kabupaten Garut pada tahun 2023 memiliki rasio ketergantungan sebesar 46,92% yang berarti bahwa 100 penduduk usia muda menanggung 46 penduduk usia non produktif. Hal ini dapat terlihat dari persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang cukup tinggi mencapai 68,67%, usia non produktif 42,33%. Struktur penduduk tersebut menjadi salah satu potensi modal pembangunan Kabupaten Garut disaat jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Garut masih akan melalui masa bonus demografi yang cukup panjang hingga sampai dengan tahun 2035, sehingga diharapkan banyak tenaga kerja atau faktor produksi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perekonomian.

2.5. Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

Capaian indikator makro menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang perlu dievaluasi secara periodik untuk dapat mengetahui pencapaian kinerja sekaligus menjadi catatan perbaikan bagi perencanaan pada periode selanjutnya. Capaian Indikator makro Kabupaten Garut mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 tersaji pada tabel 2.89 dan dari total 8 (delapan) indikator makro 6 (enam) indikator berpredikat Sangat Tinggi, 1 Indikator dengan predikat sedang yakni indikator makro Persentase penduduk miskin dan 1 indikator belum dapat terukur yakni indikator indeks gini, nilai realisasi kinerja ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 . Adapun berdasarkan pada data yang tersaji pada tabel, dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut semakin baik dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, meskipun belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yakni baru mencapai

98,53 % (68,11 poin) dari target tahun 2023 (68,63-69,62 poin). Meski demikian pertumbuhan IPM Kabupaten Garut Tahun 2023 cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni meningkat 1,45%.

- b. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 cenderung dapat terkendali dan dapat mencapai target yang telah ditentukan yakni laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut Tahun 2023 mencapai 0,84% atau 123,64 % dari target RPJMD tahun 2023.
- c. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut selama kurun waktu 4 tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami perbaikan dan pada tahun 2023 belum mampu mencapai target yang telah ditentukan berada pada angka 4,94 % atau 97,8% dari target tahun 2023 yang telah ditentukan, meskipun sempat berkontraksi pada tahun 2019 hingga mencapai -1,26 % pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Garut mencapai 2,73% dan Sektor kontributor basis PDRB tertinggi yakni ada pada sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan positif dan lebih baik dari tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi yakni mencapai 8,52%.
- d. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Garut yakni berada pada angka 9,77% meskipun masih tergolong tinggi dan belum mampu mencapai target RPJMD yang telah ditentukan yakni berada pada rentang 7,66-7,77 % (73,36%). Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 tergolong turun cukup signifikan sehingga menjadikan angka kemiskinan di Kabupaten Garut kembali kepada 1 digit, adapun penurunan persentase penduduk miskin yakni hanya 0,65% atau penduduk miskin 16.190 jiwa menjadi 260,48 jiwa pada tahun 2023.
- e. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Pendapatan per kapita Kabupaten Garut tahun 2022 berada pada nilai Rp. 25,346 Juta telah dapat melampaui target yang tertera dalam RPJMD sebesar 108,39 %.
- f. Persentase Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni berada pada angka 7,33% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 (7,6%) mengalami

penurunan 0,%. Persentase pengangguran terbuka telah mampu melampaui target yang telah ditentukan dalam RPJMD yakni mencapai 108,54%.'

- g. Indeks Gini Kabupaten Garut cenderung dapat terkendali dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Garut cenderung menurun. Pada tahun 2022 capaian Indeks gini berada pada nilai 0,302 poin dan mampu mencapai target pada tahun 2022 sebesar 116,34%. Namun demikian rendahnya nilai indeks gini rasio dapat menindikasikan Belum meratanya Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan wilayah serta belum terlindunginya pekerja informal di wilayah Kabupaten Garut.
- h. Inflasi Kabupaten Garut Tahun 2023 berada pada nilai 2,84% menurun signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yakni pada nilai 6,65% sempat terganggunya rantai pasok akibat ketegangan dan gejolak geopolitik turut mempengaruhi distribusi barang sehingga meningkatkan harga barang di pasaran yang berakibat kepada meningkatnya nilai inflasi hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Garut pada tahun 2023, pada tahun 2022 inflasi di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Garut yang berpatokan pada nilai Inflasi Tasikmalaya telah dapat terkendali.

Tabel 2.89.
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

No	Indikator Makro	Satuan	2019	2020		2021		2022		2023		2024	Tingkat Capaian 2023(%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja
			Capaian	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,77	66,12	66,41-66,46	66,45	66,85-66,96	67,41	67,52-68,54	68,11	68,63-69,62	69,7-70,68	98,53	X	Sangat Tinggi
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,1	-1,4	1,1	0,72	1,1	0,86	1,1	0,84	1,1	1,1	122,73	V	Sangat Tinggi
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	-1,26	-0,17 - 2,09	3,58	3,39 - 4,37	5,08	4,31 - 5,4	4,94	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57	97,8	X	Sangat Tinggi
4	Persentase Penduduk Miskin	%	8,81	9,98	9,48 - 9,98	10,65	8,98 - 9,48	10,42	8,41 - 8,52	9,77	7,66 - 7,77	6,92 - 7,03	73,36	X	Sedang
5	Pendapatan Per Kapita	Rp (Juta)	21,28	22,01	21,62-22,09	23,356	22,39-22,59	25,346	23,25-23,52	26,914	24,33-24,49	25,43-25,61	110,3	V	Sangat Tinggi
6	Persentase Pengangguran Terbuka	%	6,79	8,96	9,78 - 10,48	8,68	8,96 - 9,46	7,6	8,21 - 8,41	7,33	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	101,08	V	Sangat Tinggi
7	Indeks Gini	Poin	0,36	0,352	0,359-0,361	0,322	0,36 - 0,362	0,302	0,36 - 0,362	n/a	0,36 - 0,362	0,35 - 0,36	n/a	V	n/a
8	Inflasi	%	3,6	1,61	1,12-3,12	1,17	2,5-4,5	6,65	2,5-4,5	2,84	2,5-4,5	2,5-4,5	118,86	X	Sangat Tinggi

Sumber : diolah Bappeda Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 telah memasuki tahun terakhir. Pembangunan tahun pertama (2019) sampai dengan tahun keempat (2023) telah dilaksanakan. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023, diketahui bahwa dari total 23 Indikator terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki predikat sangat tinggi dan 2 (dua) indikator lainnya memiliki predikat Tinggi, 2 (dua) indikator dengan predikat sedang. Dari total 23 indikator sasaran terdapat 17 (sebelas) indikator yang tercapai dan 6 (enam) indikator

yang belum dapat mencapai target. Adapun informasi mengenai capaian IKU tahun 2019 hingga 2023 tersaji pada tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.90.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2019	2020		2021		2022		2023		2024	Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja
			Capaian	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	V	Sangat Tinggi
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,41	71,42 - 71,48	71,59	71,63 - 71,74	71,85	71,76 - 71,89	72,07	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	100,16	V	Sangat Tinggi
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,52	7,53 - 7,54	7,53	7,62 - 7,64	7,83	7,73 - 8,23	7,84	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	94,12	X	Sangat Tinggi
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,91	11,85 - 11,86	12,03	11,98 - 12	12,15	12,01 - 12,09	12,16	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21	100,41	V	Sangat Tinggi
5	Persentase penduduk miskin	%	8,98	9,98	9,48 - 9,98	10,65	8,98 - 9,48	10,42	8,41 - 8,52	9,77	7,66 - 7,77	6,92 - 7,03	73,36	X	Sedang
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,28	8,96	9,78 - 10,48	8,68	8,96 - 9,46	7,6	8,21 - 8,41	7,33	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	101,08	V	Sangat Tinggi
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,61	-1,4	1,1	0,72	1,1	0,86	1,1	0,84	1,1	1,1	123,64	V	Sangat Tinggi
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	V	Sangat Tinggi
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Opini	n/a	B	n/a	B	A	B	A	B(75,701)	A	A	88,84	X	Tinggi
10	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	100	V	Sangat Tinggi
11	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100	V	Sangat Tinggi
12	Persentase kemantapan jalan	%	n/a	n/a	n/a	48,91	49,95	51,42	52,61	55,25	55,27	57,92	99,96	X	Sangat Tinggi

No	Indikator Sasaran	Satuan	2019	2020		2021		2022		2023		2024	Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja
			Capaian	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target			
13	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	86,22	92,4	n/a	100	94,77	100	97,15	100	98,81	100	101,20	X	Sangat Tinggi
14	Cakupan air minum layak	%	80	84,16	84	87,26	88,74	88,51	89,27	90,04	99,15	90,74	90,81	V	Tinggi
15	Cakupan sanitasi layak	%	67	70,76	67,03	67,13	67,27	67,17	67,69	68,11	68,11	68,53	100	V	Sedang
16	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	n/a	n/a	6.392	6.727	6.562	6.825	6.673	6.936	6.784	6.894	102,24	V	Sangat Tinggi
17	Persentase Luas Areal Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	unit	75,1	76,48	n/a	75,23	76,83	82,7	80,7	83,43	84,4	88,04	98,85	X	Sangat Tinggi
18	Persentase penurunan luas genangan air	%	20	n/a	n/a	70	60	60	50	27,5	25	0	120,00	V	Sangat Tinggi
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,41	56,22	56,05	67,82	57,62	70,75	59,18	66,89	60,75	63,21	110,11	V	Sangat Tinggi
20	Indeks Risiko Bencana	Poin	197	205,52	205,52	185	203	164,91	200	147,39	197	194	125,18	V	Sangat Tinggi
21	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	77	78,6	78,6	79,7	79	83,1	80	91,7	81	82	113,21	V	Sangat Tinggi
22	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	21,95	22,01	21,62-22,09	23,356	22,39-22,59	25,346	23,25-23,52	26,914	24,33-24,49	25,43 - 25,61	110,3	V	Sangat Tinggi
23	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp	1,4	1,113	1,4-1,43	1,29	1,45-1,46	1,165	1,46-1,48	1,356	1,26	1,52 - 1,53	107,62	V	Sangat Tinggi

Sumber : diolah Bappeda Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.91.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Dampak/Impact)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,09	-1,26	3,58	5,08	4,94	-0,17- 2,26	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57	97,8	X	Sangat Tinggi	Indikator Makro
2	Laju inflasi	%	3,6	1,61	1,17	6,65	2,84	1,12- 3,12	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	118,86	V	Sangat Tinggi	Indikator Makro
3	PDRB per kapita ADHB	Juta Rp	21,28	22,01	23,35	25,346	26,914	21,62- 22,09	22,39- 22,59	23,25- 23,52	24,33- 24,49	25,43- 25,61	110,3	V	Sangat Tinggi	Indikator Makro
4	Indeks Gini	Poin	0,36	0,352	0,322	0,302	n/a	0,359- 0,361	0,36 - 0,362	0,36 - 0,362	0,36 - 0,362	0,35 - 0,36	n/a	n/a	n/a	Indikator Makro
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	91,19	90,02	89,35	89,58	90,23	90,02- 90,52	90,52- 91,02	91,48- 91,59	92,23- 92,34	92,97- 93,08	97,77	X	Sangat Tinggi	Indikator Makro
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,77	66,12	66,45	67,41	68,11	66,4- 66,46	66,85- 66,96	67,52- 68,54	68,63- 69,62	69,7- 70,68	99,09	X	Sangat Tinggi	Indikator Makro
7	Angka melek huruf	%	99,06	99,58	99,14	99,6	n/a	99,21	99,29	99,37	99,45	99,53	n/a	n/a	n/a	Dinas Pendidikan
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,75	7,52	7,53	7,83	7,84	7,53 - 7,54	7,62 - 7,64	7,73 - 8,23	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	98,12	X	Sangat Tinggi	BPS
9	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,13	11,91	12,03	12,15	12,16	11,85 - 11,86	11,98 - 12	12,01 - 12,09	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21	100,83	V	Sangat Tinggi	BPS
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	71,01	71,41	71,59	71,85	72,07	71,42 - 71,48	71,63 - 71,74	71,76 - 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	100,03	V	Sangat Tinggi	BPS
11	Persentase balita gizi buruk	%	0,04	n/a	0,07	0,094	0,07	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	25	X	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
12	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,95	n/a	2,4	4,24	3,9	2,53	2,12	1,7	1,28	0,86	-104,68	X	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,35	61,11	62,76	68,84	70,1	60,57-60,57	61,64-62,05	62,93-64,09	64,81-65,95	66,96-68,05	108,39	V	Sangat Tinggi	BPS
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,79	8,96	8,68	7,6	7,33	9,78 - 10,48	8,96 - 9,46	8,21 - 8,41	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	101,08	X	Sangat Tinggi	BPS
16	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	84.045	103.607	104.212	101.135	102.010	110.560 - 118.473	106.560 - 114.473	102.560 - 110.473	98.560 - 106.473	94.560 - 102.473	100,49	V	Sangat Tinggi	BPS
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,21	91,04	91,32	92,4	92,67	90,22-89,52	91,04-90,54	91,79-91,59	92,69-92,49	93,59-93,39	100,77	V	Sangat Tinggi	BPS
17	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	54,06	55,47	55,5	54,17	n/a	55,47	58,45	60,76	62,76	64,46	n/a	n/a	n/a	BPS
18	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	56,26	56,62	57,45	56,61	57,31	54,64-54,22	56,12-56,18	57,76-58,7	60,07-61	62,66-63,55	94,67	X	Sangat Tinggi	BPS
19	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	34,21	34,25	35	37,69	n/a	33,71-33,98	32,63-32,24	36,97-35,24	35,69-34,01	34,69-33,08	n/a	n/a	n/a	BPS
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	V	Sangat Tinggi	Setda
21	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,79	15,75	11,97	10,5	11,21	15,75	15,85	16	16,15	16,25	61,91	X	Rendah	Bapenda, BPKAD
22	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	n/a	n/a	Inspektorat
23	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	77	77,5	79,7	83,1	91,7	77,5	78,6	79,5	80,4	81,3	114,0547264	V	Sangat Tinggi	DKP
24	Penguatan cadangan pangan	%	11,25	15	500	427,5	473	15	18	22	26	30	1819,23	V	Sangat Tinggi	DKP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
25	Penanganan daerah rawan pangan	%	5,88	6,26	7,24	7,92	9,28	6,28	7,24	7,92	8,6	9,28	107,9	V	Sangat Tinggi	DKP
26	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	37,64	37,45	37,35	37,38	36,32	37,09-36,83	36,27-36,27	35,81-35,75	35,44-35,31	35-34,92	102,67	V	Sangat Tinggi	BPS
27	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	7,88	8,17	8,49	8,58	8,96	8,02-8,04	8,03-8,03	8,01-8,07	8,04-8,1	8,14-8,12	122,04	V	Sangat Tinggi	BPS
28	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,47	18,5	18,54	18,46	18,54	19,45-19,52	19,66-19,68	19,7-19,76	19,73-19,79	19,74-19,88	111,03	V	Sangat Tinggi	BPS
29	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,52	n/a	3,73	4,15	4,43	3,49-3,51	3,52-3,53	3,56-3,61	3,6-3,66	3,65-3,71	93,83	X	Sangat Tinggi	BPS
30	Pertumbuhan Industri	%	6,13	n/a	5,91	6,29	8,05	-1,9-0,5	3,4-4,3	4-5,5	4-6	6-6,5	161,00	V	Sangat Tinggi	BPS
31	PDRB per kapita ADHK	Juta Rp	14,9	14,64	15,35	15,991	16,428	14,67-15	15,2-15,35	15,79-15,96	16,45-16,6	17,18-17,29	99,41	X	Sangat Tinggi	BPS
ASPEK DAYA SAING DAERAH																
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	515.095	940065	503987	522.212	588.794	568.665	622.236	675.489	728.980	782.472	80,77	X	Tinggi	BPS
2	Nilai tukar petani	Poin	110,93	n/a	98,8	103	n/a	110,97	111,09	111,17	111,26	111,38	n/a	n/a	n/a	Distan
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	342.978	41,04	327115	335.866	43,36	371.979	403.940	427.332	458.001	483.845	98,43	X	Tinggi	BPS
4	Produktivitas total daerah	juta	46,51	n/a	36,47	50,05	n/a	46,57	46,63	46,69	46,75	46,81	n/a	n/a	n/a	BPS
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa*	%														DPMD
6	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1,7	1,07	1,98	4,55	n/a	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	n/a	n/a	n/a	BPS

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
7	Rasio ketergantungan	Angka	57,72	57,5	47,23	47,16	46,92	57,7	56,9	56,85	56,8	56,75	82,61	V	Sangat Tinggi	BPS

Sumber : diolah Bappeda Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Selanjutnya diuraikan Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya. Adapun secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Outcome)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ASPEK PELAYANAN UMUM																
LAYANAN UMUM WAJIB DASAR																
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
	1.01. PENDIDIKAN															
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	74,50%	55,05	85,4	85,4	n/a	75	753	76	77	78	n/a	n/a	n/a	Disdik

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Angka partisipasi kasar															Disdik
1	APK SD sederajat	%	111,11	105,66	98,58	106,54	n/a	110,43	110,93	111,43	111,93	112,43	n/a	n/a	n/a	Disdik
2	APK SMP sederajat	%	99,54%	115,11	79,66	99,6	n/a	106,8	107,6	108,4	109,22	110,04	n/a	n/a	n/a	Disdik
	Angka pendidikan yang ditamatkan															Disdik
1	APT SD sederajat	%	40	40,16	32,63	n/a	n/a	39,92	39,84	39,77	39,69	39,61	n/a	n/a	n/a	Disdik
2	APT SMP sederajat	%	18	18,09	16,6	n/a	n/a	18,08	18,17	18,25	18,34	18,42	n/a	n/a	n/a	Disdik
	Angka Partisipasi Murni															Disdik
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,00 %	99,3	94,45	97,18	92,75	100	100	100	100	100	92,75	X	Sangat Tinggi	Disdik
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	93,37%	98	67,13	83,28	87,9	94,73	95,68	96,64	97,6	98,58	90,06	X	Tinggi	Disdik
	Angka partisipasi sekolah :															Disdik
1	Angka partisipasi sekolah (APS)	%	100	100	85,76	98,49	99,59	100	100	100	100	100	99,59	X	Sangat Tinggi	Disdik

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	SD/MI/Paket A															
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	59,59	95,29	95,77	100	100	100	100	100	95,77	X	Sangat Tinggi	Disdik
	Angka Putus Sekolah:															Disdik
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	poin	0,00003	0,036	0,003	0,1	n/a	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	Disdik
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	poin	0,00015	0,004	0,021	0,5	n/a	0,00011	0,00009	0,00007	0,00005	0,00003	200	n/a	n/a	Disdik
	Angka Kelulusan:														Sangat Rendah	Disdik
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Disdik
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Disdik
	Angka Melanjutkan (AM):															Disdik
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,79	96,67	77,17	80,75	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Disdik
2	Angka Melanjutkan	%	67,30%	80,81	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Disdik

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA															
	Fasilitas Pendidikan:															Disdik
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	77,91%	73	99,26	65,48	n/a	78,2	78,48	78,77	79,05	79,34	n/a	n/a	n/a	Disdik
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	85,67%	83	99,25	70,13	n/a	86,82	87,96	89,11	90,25	91,4	n/a	n/a	n/a	Disdik
3	Rasio ketersediaan sekolah/pendu duk usia sekolah pendidikan dasar	satuan	3,9	n/a	42,52	n/a	n/a	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	n/a	n/a	n/a	Disdik
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Disdik
5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	angka	500,08	23	24	25	n/a	500,08	500,08	500,08	500,08	500,08	n/a	n/a	n/a	Disdik

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	angka	n/a	20	19	19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Disdik
7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	angka	20,5	23	24	25	n/a	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	n/a	n/a	n/a	Disdik
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	angka	20,5	20	19	19	n/a	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	n/a	n/a	n/a	Disdik
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	99,54	100	n/a	n/a	n/a	99,59	99,64	99,69	99,74	99,79	n/a	n/a	n/a	Disdik
10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	100	100	99,9	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Disdik
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,54	99,56	99,66	99,6	n/a	99,6	99,66	99,72	99,78	99,84	n/a	n/a	n/a	Disdik
12	Guru yang memenuhi	%	90,15	95,55	96,49	87,84	n/a	91,03	91,91	92,79	93,67	94,55	n/a	n/a	n/a	Disdik

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	kualifikasi S1/D-IV															
	1.02. KESEHATAN															
1	Persentase pelayanan medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	RSUD dr. Slamet
2	Persentase pelayanan penunjang medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	RSUD dr. Slamet
3	Persentase pelayanan profesi medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	RSUD dr. Slamet
4	Persentase pelayanan keperawatan	%	100	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	RSUD dr. Slamet
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan	%	100	85,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	RSUD dr. Slamet
6	Persentase Capaian SPM (standar pelayanan minimum) yang mencapai target	%	n/a	n/a	70,83	72,07	74,77	92	93	94	95	96	78,71	X	Tinggi	RSUD dr. Slamet
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	orang	45	210	225	334	320*	45	45	45	44	44	n/a	n/a	n/a	Dinkes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
8	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	54752	44778	51175	48178	n/a	54806	54861	54916	54971	55026	n/a	n/a	n/a	Dinkes
9	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	orang	23	7 orang (0,02)	6 orang (0,027)	11	n/a	22	21	19	17	15	n/a	n/a	n/a	Dinkes
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	orang	4,7	196 orang (4,58)	219 orang (4,28)	250	6,5	4,47	4,3	4,1	3,9	3,7	33,33	X	Sangat Rendah	Dinkes
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	orang	148,97	58 orang (135,51)	112 orang (242,3)	48	117,65	148,72	148,47	148,22	147,97	147,72	120,49	V	Sangat Tinggi	Dinkes
12	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	1/100	19360	19360	0,078472222	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	100	V	Sangat Tinggi	Dinkes
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1/38000	1/13.300	1/13.235	1:7.600	n/a	1/37000	1/36000	1/35000	1/34000	1/33000	n/a	n/a	n/a	Dinkes
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	1/500000	1/439440	1/396825	1:382.221	n/a	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	1/416666	n/a	n/a	n/a	Dinkes
15	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1/10000	2215198	1285290	1/11291	1/4770	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	n/a	n/a	n/a	Dinkes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	1/10000	142262	1101573	1973772	1/4285	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	n/a	n/a	n/a	Dinkes
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	rasio	Jan-00	14,46	100	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinkes
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,98	87,05	89,68	94	96	100	100	100	100	100	96	X	Sangat Tinggi	Dinkes
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95	77,6	60,42	90,04	96,28	95	95	95	95	95	101,35	V	Sangat Tinggi	Dinkes
20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinkes
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang	%	100	n/a	n/a	Tidak ada data	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinkes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/h ari)															
22	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95	95	87,71	101,5	96,77	95	95	95	95	95	101,86	V	Sangat Tinggi	Dinkes
23	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	2	42	2,13	2,6	11,35	2	2	2	2	2	-367,50	X	Sangat Renda h	Dinkes
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	71,64	41.19	35,64	63,15	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Dinkes
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	34,69	71,8	120,1	91,86	100	100	100	100	100	91,86	X	Sangat Tinggi	Dinkes
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	124	86	178,2	278,5	281,5	119	114	109	104	99	-70,67	X	Sangat Renda h	Dinkes
27	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	1,01	2,3	2,6	2,2	4,03	0,96	0,91	0,86	0,81	0,76	-297,53	X	Sangat Renda h	Dinkes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
28	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	54,78	34,69	100	100	91,85	100	100	100	100	100	91,85	X	Sangat Tinggi	Dinkes
29	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	57,3	85,8	72,5	84,18	83,82	100	100	100	100	100	83,82	X	Tinggi	Dinkes
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinkes
31	Penderita diare yang ditangani	%	82,51	36	100	89,57	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinkes
32	Angka kejadian Malaria	Kasus/100.000	10	4	0,27	0,34	0,41	10	10	10	10	10	195,90	V	Sangat Tinggi	Dinkes
33	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	V	Sangat Tinggi	Dinkes
34	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	15	0	0	-	0	15	15	15	15	15	0	X	Sangat Rendah	Dinkes
35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti	%	100	0	0	-	0	100	100	100	100	100	0	X	Sangat Rendah	Dinkes

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	malaria yang tepat															
36	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,5	0,025	0,23	0,32	0,38	1	1,5	1,5	1,5	1,5	394,74	V	Sangat Tinggi	Dinkes
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinkes
38	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	15	20	47,23	-	49,1	20	25	25	25	25	196,4	V	Sangat Tinggi	Dinkes
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	3,5	25,75	100	100	n/a	20	20	20	20	20	n/a	n/a	n/a	Dinkes
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	Persentase kemantapan Jalan kabupaten(%)	%	80	n/a	48,91	51,42	55,25	n/a	49,95	52,61	55,27	55,27	99,96	X	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
2	Cakupan air Minum layak (%)	%	80	85,08	87,26	88,51	90,04	82	85	88	90,04	92,5	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas PUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
3	Cakupan sanitasi layak (%)	%	67	67,03	67,13	67,69	68,11	67,03	67,27	67,69	68,11	68,53	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
4	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis (%)	%	75,1	n/a	75,23	82,7	83,43	n/a	76,83	80,7	84,4	88,04	98,85	X	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
5	Persentase penurunan luas genangan air	%	60	n/a	70	60	27,5	n/a	60	50	25	0	90,00	X	Tinggi	Dinas PUPR
6	Persentase tampungan air yang tersedia	%	-	6,93	23,18	34,92	38,1	6,93	30,16	57,14	82,54	100	46,16	X	Sangat Rendah	Dinas PUPR
7	Persentase bangunan yang Layak Teknis (%)	%	0,023	0,05	8,95	9,52	10,31	n/a	8,4	8,92	9,45	9,98	109,10	V	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
8	Persentase Luas Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	%	n/a	n/a	5,2	32,48	32,48	n/a	6	12	20	30	162,40	V	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (%)	%	80,5	82,5	82,74	83,5	83,92	82,5	83	83,5	84	84,5	99,90	X	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
10	Persentase pelaku jasa konstruksi	%	3,2	8,33	17,36	23,73	32,27	8,33	19,64	23,44	27,24	31,04	118,47	V	Sangat Tinggi	Dinas PUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	yang terlatih (%)															
11	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	100	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh (7 + 1)	Ha	24,76	0,87	0	1,3	4,12	19,81	14,86	9,9	4,9	0	84,08	X	Tinggi	Dinas Perkim
2	Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	Ha	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
3	Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Ha	41990	36138	32504	31010	28.936	36071	33800	31530	29260	26990	98,89	X	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
4	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Unit	n/a	n/a	6727	6825	6936	6392	6560,9	6660,7	6765,6	6870,4	102,52	V	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
5	Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi															

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket	
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024					
	1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT																
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	83	80	75	64	n/a	80	75	70	65	60	n/a	n/a	n/a	Satpol PP	
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	40	45	60	75	n/a	45	60	75	85	90	n/a	n/a	n/a	Satpol PP	
3	Rasio Linmas/10.00 0 Penduduk	Per 10.000 pendudu k	45	62	60	62	n/a	53	60	65	75	84	n/a	n/a	n/a	Satpol PP	
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	n/a	n/a	100	100	97	100	100	100	100	100	97	X	Sangat Tinggi	Dinas Damkar	
5	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,36	0.46	0,39	0,65	0,72	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	167,44	V	Sangat Tinggi	Dinas Damkar	
	1.06. SOSIAL																
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	5,4	n/a	39,95	56,73	n/a	6,28	6,95	7,7	8,67	9,8	n/a	n/a	n/a	Dinsos	

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	6,4	n/a	59,77	35,24	70	6,78	7,45	8,2	9,17	10,3	763,36	V	Sangat Tinggi	Dinsos
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,5	n/a	76,82	57,93	77	77	77	77	77	77	100	V	Sangat Tinggi	Dinsos
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	3,5	n/a	6,13	8,02	n/a	3,5	3,6	3,7	3,9	4	n/a	n/a	n/a	Dinsos
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinsos
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	%	60	n/a	75,01	100	100	70	72	75	77	80	129,87	V	Sangat Tinggi	Dinsos

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	prasarana tanggap darurat lengkap															
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0,57	n/a	0,57	1,68	n/a	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	n/a	n/a	n/a	Dinsos
2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
2.01. TENAGA KERJA																
1	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Kasus	30	35	23	16	30	24	22	20	18	16	33,33	X	Sangat Rendah	Disnakertr ans
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	35	17	8	14	26	24	22	20	18	16	144	V	Sangat Tinggi	Disnakertr ans
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	2600	2362	11210	9377	5970	2300	2530	2783	3061	3367	195	V	Sangat Tinggi	Disnakertr ans
4	Keselamatan dan perlindungan	%	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Disnakertr ans

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	125 Perusahaan	31559	40317	-	58962	30000	31000	32000	33000	33000	179	V	Sangat Tinggi	Disnakertr ans
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	35	17	0	0	0	24	22	20	18	16	n/a	n/a	n/a	Disnakertr ans
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	942	560	1372	304	208	528	560	592	624	656	33,33	X	Sangat Rendah	Disnakertr ans
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	64	75	320	0	176	32	48	54	70	86	204	V	Sangat Tinggi	Disnakertr ans
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	64	75	100	0	5970	32	48	64	72	72	8292	V	Sangat Tinggi	Disnakertr ans
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	7,66	5,51	5,96	n/a	n/a	7,75	7,84	7,93	8,02	8,11	n/a	n/a	n/a	Disnakertr ans

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket	
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024					
	2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,34	62	47,28	52,41	52,35	50	50	50	50	50	105	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16	18	18	16	10	16	16	16	16	16	63	X	Renda h	Dinas P2KBP3A	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	39,53	54	39,97	77,6	45,74	41,73	43,93	46,13	48,33	50,53	95	X	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A	
4	Rasio KDRT	%	0,022	0,014	0,014	0,014	0,014	0,021	0,02	0,019	0,018	0,017	122	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A	
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,6	2,65	2,65	2,65	2,56	3,3	3	2,7	2,4	2,1	93	X	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	24,63	38,73	43,19	34,2	39,53	26,63	28,63	30,63	32,63	34,63	121	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A	

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	dalam unit pelayanan terpadu															
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	dan anak korban kekerasan															
14	Rasio APM perempuan/la- ki-laki di SD	%	96,23	100	50,4	98,73	97,27	96,07	96,47	96,87	97,27	97,67	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
15	Rasio APM perempuan/la- ki-laki di SMP	%	76,24	93,4	44,63	85,2	77,84	76,64	77,04	77,44	77,84	78,24	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
16	Rasio APM perempuan/la- ki-laki di SMA	%	54,23	62,4	41,59	42,56	55,83	54,63	55,03	55,43	55,83	56,23	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
17	Rasio APM perempuan/la- ki-laki di Perguruan Tinggi	%	18,04	12,2	53,68	53,66	19,64	18,44	18,84	19,24	19,64	20,04	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,13	99,36	103	99,56	99,53	99,23	99,33	99,43	99,53	99,63	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	26,25	35	35	35	35,05	28,45	30,65	33	35,05	37,25	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
2.03. PANGAN																

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Ketersediaan pangan utama	ton	492.442,25	n/a	459341,32	568770	297.194,12	398.589,81	402.575,94	355.689,51	359.211,19	362.803,01	83	X	Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kcal/kap/hari	2644	n/a	4575,47	n/a		4271,1	4287,5	4387,4	4393,5	4432,3	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketahanan Pangan
3	Energi per kapita	kcal/kap/hari	2566	5909	4455	5888	1488,86	4152	4168	4263	4269	4306	35	X	Sangat Rendah	Dinas Ketahanan Pangan
4	Protein Perkapita	kcal/kap/hari	78	177,4	120,47	176,9	39,9	119,1	119,5	124,4	124,5	126,3	32	X	Sangat Rendah	Dinas Ketahanan Pangan
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	75	n/a	78,76	83,35	82,33	76	77	78	79	80	104	V	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan
2.04. PERTANAHAN																
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%														Setda
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	kasus	35	5	8	8	30	35	35	35	35	35	86	X	Tinggi	Setda
3	Penyelesaian Izin Lokasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Setda
2.05. LINGKUNGAN HIDUP																
1	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam	lokasi		n/a	n/a	2	100		1	1	1	1	10000	V	Sangat Tinggi	Dinas LH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
2	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas LH
3	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%		n/a	4	2	n/a		4	3	3	3	n/a	n/a	n/a	Dinas LH
4	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas LH
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%		56,22	67,82	70,75	66,89	56,05	57,62	59,18	60,75	63,21	110	V	Sangat Tinggi	Dinas LH
6	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%		n/a	n/a	100	n/a		100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Dinas LH
7	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	10	n/a	25	25	n/a			25	25	50	n/a	n/a	n/a	Dinas LH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
8	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%		n/a	20	20	n/a		20	20	20	20	n/a	n/a	n/a	Dinas LH
9	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,148	0,146	0,164	0,115	0,136	0,146	0,156	0,166	105	V	Sangat Tinggi	Dinas LH
10	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	25	25,27	25,66	29,95	31,48	25	25	35	45	55	70	X	Sedang	Dinas LH
2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
1	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	99,8	98,4	98,82	72,45	99,71	99,8	99,8	99,9	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Disdukcapil
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	25	80,1	79,03	85,62	92,31	30	40	45	49	54	188	V	Sangat Tinggi	Disdukcapil
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	40	43,9	100	112,7	84	42	45	47	49	53	171	V	Sangat Tinggi	Disdukcapil
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Disdukcapil
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	100	V	Sangat Tinggi	Disdukcapil
6	Cakupan Penerbitan	%	99,8	97,3	96,78	72,6	95	99,8	99,8	100	100	100	95	X	Sangat Tinggi	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Kartu Tanda Penduduk (KTP)															
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	68	34,9	71,6	90	80,11	69	70	71	72	73	111	V	Sangat Tinggi	Disdukcapil
8	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%			75	75	80	40	50	55	60	65	133	V	Sangat Tinggi	Disdukcapil
2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	15	20	30	40	60	20	30	40	50	60	120	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	100	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	100	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
4	Persentase LSM Aktif	%	65	70	72	75	87	70	72	75	78	80	112	V	Sangat Tinggi	DPMDesa

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
5	Persentase LPM Berprestasi	%	6	7	8	9	10	7	8	9	10	11	100	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
6	Persentase PKK Aktif	%	55	100	70	80	87	65	70	80	85	90	102	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
7	Persentase Posyandu Aktif	%	55	100	70	80	87	65	70	80	85	90	102	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	65	70	72	75	79	70	72	75	78	80	101	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	DPMDesa
2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,1	1,1	0,74	0,86	0,84	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	124	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,35	2,34	2,3	2,45	2,33	2,34	2,33	2,32	2,31	2,3	101	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	46,87	4,05	6,05	8,12	8,3	56,25	62,5	71,87	78,12	87,5	11	X	Sangat Rendah	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	-	0	0	-	n/a	-	-	-	-	1	n/a	n/a	n/a	Dinas P2KBP3A
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan	Sektor	-	0	8	8	n/a	8	8	8	8	8	n/a	n/a	n/a	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Program Pembangunan															
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	2	5	5	5	3	5	5	6	6	83	X	Tinggi	Dinas P2KBP3A
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,83	2,98	2,77	1,37	2,64	2,81	2,77	2,73	2,69	2,65	102	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
9	Ratio Akseptor KB	%	70,44	71,29	71,96	72,39	73,21	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	104	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	70,44	71,29	71,96	72,39	73,21	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	104	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka	49/1000	49/1000	49/1000	36/1000	36/1000	49/1000	49/1000	48.87/1000	48,80/1000	48/1000	74	X	Sedang	Dinas P2KBP3A
12	Cakupan Pasangan Usia	%	3,85	3,89	3,44	3,36	3,36	3,89	3,44	3,18	2,96	2,66	86	X	Tinggi	Dinas P2KBP3A

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun															
1 3	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	12,56	13,66	13,44	13,13	13,13	13,66	13,41	13,16	12,76	12,58	97	X	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
1 4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	29,6	29,72	30,93	32,16	24,46	19,3	20,2	21,1	22	22,09	111	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
1 5	Persentase Tingkat Keberlangsung an Pemakaian Kontrasepsi	%	70,44	70,67	70,91	71,48	71,49	68,02	68,72	69,42	70,12	70,82	102	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
1 6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	79,5	83,04	84,15	84,32	84,45	79,7	79,8	79,9	80	8,5	106	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
1 7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	78,5	78,94	80,74	82,94	82,95	79	79,05	80	80,05	81	104	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
1 8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	77	78,24	80,79	79,88	79,9	77,5	78	78,5	79	79,5	101	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	3	2	2	2	4,76	5	6	7	8	9	60	X	Rendah	Dinas P2KBP3A
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	52	55	60	78,69	78,7	55	57	59	62	65	127	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	291	291	280	280	53,2	291	297	309	311	315	17,10	X	Sangat Rendah	Dinas P2KBP3A
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang	%	86	87	84,92	86,41	86,5	87	88	89	90	91	96,11	X	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Ber-KB Mandiri															
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Keluraha n	%	442	442	100	442	442	442	442	442	442	442	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
25	Persentase Faskes dan Jejarangnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	70	67	100	100	90	71	72	73	74	76	121,6	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Mikro Keluarga di Setiap Desa															
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-	-		-	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	Dinas P2KBP3A
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	50	55	60	101	72	55	60	65	70	75	102,86	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	60	65	68	81	81	65	70	75	80	85	101,25	V	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,98	19	19,01	19,01	19,09	18,99	19,01	19,02	19,03	19,05	99,68470836	X	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
31	Persentase Pembiayaan	%	1,22	1,25	2	-	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	85,71	X	Tinggi	Dinas P2KBP3A

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes															
2.09. PERHUBUNGAN																
1	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	%	n/a	n/a	68,29	80,88	90,69	n/a	70,05	80,65	86,81	90,51	104,47	V	Sangat Tinggi	Dinas Perhubun- gan
2	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	n/a	n/a	58,64	71,5	85,4	n/a	40,51	51,31	63,15	75,68	135,23	V	Sangat Tinggi	Dinas Perhubun- gan
3	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	%	n/a	n/a	65,45	77,13	85,99	n/a	55,43	65,74	73,84	84,15	116,45	V	Sangat Tinggi	Dinas Perhubun- gan
4	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	n/a	n/a	50,06	63,85	81,98	n/a	48,55	63,05	77,55	92,05	105,71	V	Sangat Tinggi	Dinas Perhubun- gan
5	Persentase Sosialisasi keselamatan perhubungan	%	n/a	n/a	52,08	68,58	85,07	n/a	45	58,23	71,46	83,13	119,05	V	Sangat Tinggi	Dinas Perhubun- gan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
6	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	%	n/a	n/a	83,33	88,89	94,44	n/a	77,46	81,9	86,35	90,79	109,37	V	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	Angka	n/a	n/a	3,25	3,25	3,29	0,9	1,02	2,73	3,11	3,87	n/a	n/a	n/a	Diskominfo
2	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	n/a	n/a	52	75	82	37	52	65	82	100	n/a	n/a	n/a	Diskominfo
2.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	80,5	n/a	10,6	7,9	6,2	81	82	83	84	85	7,38	X	Sangat Rendah	Dinas Koperasi dan UKM
2	Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	UKM	3657	n/a	1537	1347	1435	2000	2000	2000	2000	2000	71,75	X	Sedang	Dinas Koperasi dan UKM
3	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru	%	100	n/a	215	48	35	50	12,25	12,25	12,25	12,25	285,71	V	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
4	Persentase koperasi yang diawasi	%	3	n/a	5	6,12	4,29	4	5	5	5,5	5,5	78,00	X	Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
5	Persentase koperasi sehat	%	5	n/a	5	3,74	3,19	5	50	50	50	50	6,38	X	Sangat Rendah	Dinas Koperasi dan UKM
6	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	%	25	n/a	15	4,9	n/a	15	15	15	15	15	n/a	n/a	n/a	Dinas Koperasi dan UKM
7	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%	2,5	n/a	1,36	1,25	2,2	2,5	3	3,5	4	4,5	55,00	X	Rendah	Dinas Koperasi dan UKM
8	Jumlah wirausaha Baru	Wirausaha Baru	1401	n/a	737	3795	1411	500	500	1100	1000	1000	141,10	V	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
9	Jumlah UKM yang terbina	Pelaku Usaha Mikro	2256	n/a	975	1689	1141	500	500	750	1000	1000	114,10	V	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
2.12. PENANAMAN MODAL																
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/PM A	4300	4426	466	711	146	100	100	100	100	100	146	V	Sangat Tinggi	DPMPPT
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp	1,4	1,11	1,29	1,165	n/a	1,54	1,69	1,86	2,05	2,25	n/a	n/a	n/a	DPMPPT
3	Rasio Penanam Modal (PMA - PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	20	n/a	n/a	20	36	20	20	20	20	20	180,00	V	Sangat Tinggi	DPMPPT

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
4	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	33	n/a	n/a	33	n/a	33	33	33	33	33	n/a	n/a	n/a	DPMPPT
5	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	DPMPPT
6	Persentase penyelesaian Perizinan tepat waktu	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	DPMPPT
7	Persentase data dan informasi perizinan dan non peizinan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	DPMPPT
8	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	Baik	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	V	Sangat Tinggi	DPMPPT
2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	25,45	40,8	60	58	85	27,27	29,09	30,91	32,73	34,55	259,70	V	Sangat Tinggi	Dispora
2	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	20,33	1	n/a	Tida Ada	38	21,67	25,5	30	36,78	45	n/a	n/a	n/a	Dispora
3	Persentase Organisasi	%	28,91	0*)	n/a	58	82	29,09	30,91	32,73	34,55	34,55	237,34	V	Sangat Tinggi	Dispora

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Kepemudaan yang dibina															
4	Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti	%	100	0*)	85	100	100	100	100	100	100	100	100,00	V	Sangat Tinggi	Dispora
5	Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	%	19,05	0*)	n/a	n/a	n/a	38,1	57,14	76,19	97,62	100	n/a	n/a	n/a	Dispora
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	10	10	0*)	28,5	n/a	20	40	60	80	90	n/a	n/a	n/a	Dispora
7	Persentase Wirausaha Muda	%	0,12	0,12	1	30,91	34,45	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	21531,25	V	Sangat Tinggi	Dispora
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	71,43	71,43	0*)	n/a	n/a	76,19	80,95	85,71	90,48	95,24	n/a	n/a	n/a	Dispora
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	80,95	80,95	0*)	n/a	n/a	80,95	80,95	85,71	90,48	95,24	n/a	n/a	n/a	Dispora
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	29,2	29,2	0*)	n/a	n/a	30	31	32	33	34	n/a	n/a	n/a	Dispora
11	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	133	133	0*)	n/a	73	135	145	155	165	175	44,24	X	Sangat Rendah	Dispora
12	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlet	15	15	0*)	n/a	117	15	25	30	35	40	334,29	V	Sangat Tinggi	Dispora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
13	Prestasi Organisasi Kepramukaan yang Dibina	%			100	100	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Dispora
2.14. STATISTIK																
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	KategA% ori	n/a	n/a	50	79	100	49	69	79	87	100	114,94	V	Sangat Tinggi	Diskominf o
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	BPS
3	Buku "PDRB"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	BPS
4	Buku " Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Bappeda
2.15. PERSANDIAN																
1	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	Poin	n/a	n/a	n/a	125	450	n/a	250	350	450	550	100	X	Sangat Tinggi	Diskominf o
2.16. KEBUDAYAAN																
1	Penyelenggara an Festival Seni dan Budaya	Pagelaran	5	0	8	15	42	5	5	5	5	5	840	V	Sangat Tinggi	Disparbud

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	CB/ODCB	20	20	25	20	25	20	20	20	20	20	125	V	Sangat Tinggi	Disparbud
3	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Buah	5	5	0	3	1	5	5	5	5	5	20	X	Sangat Rendah	Disparbud
4	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	CB/ODCB	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	80	X	Tinggi	Disparbud
2.17. PERPUSTAKAAN																
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	28.849	9.333	6.219	32.112	39.500	307.095	380.000	450.000	500.000	550.000	7,90	X	Sangat Rendah	Dispupip
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	45.483	59.446	61.326	67.635	74.135	75.483	105.483	135.483	165.483	195.483	44,80	X	Sangat Rendah	Dispupip
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,1	0	1	1	0,0056	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	4,31	X	Sangat Rendah	Dispupip
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	221	167	518	183.322	1920	614	760	900	1.000	1.100	192,00	V	Sangat Tinggi	Dispupip

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	5.854	7.707	8.245	13.039	14.885	6.504	7.204	7.954	8.754	9.704	170,04	V	Sangat Tinggi	Dispusip
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	0	0	0	8	6	10	10	10	10	10	60,00	X	Rendah	Dispusip
2.18. KEARSIPAN																
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	21,53	63,08	63,08	63,08	47,12	46,05	48,68	51,31	53,94	56,67	87,3563 2184	X	Tinggi	Dispusip
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	2	0,4	6	6	6	18	17	17	17	17	35,2941 1765	X	Sangat Rendah	Dispusip
3 URUSAN PILIHAN																
3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN																
1	Konsumsi Ikan	kg	26,45	25,7	37,5	37,5	30,77	26,72	26,98	27,25	27,53	27,8	111,77	V	Sangat Tinggi	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Nilai Tukar Nelayan	poin	108,36	108,01	101,5	101,5	105,4	108,86	109,36	109,86	110,36	110,86	95,51	X	Sangat Tinggi	Dinas Perikanan dan Peternakan

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
3	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	64540	60884	66442,04	66442,04	69056,03	65178	65822	66473	67130	67794	102,87	V	Sangat Tinggi	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	710	655	764,6	764,6	832,3	721	765	788	812	836	102,50	V	Sangat Tinggi	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelompok	5	n/a	7	7	9	5	7	10	12	15	75,00	X	Sedang	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.02. PARIWISATA																
1	Kunjungan Wisata	orang	2.700.000	1489011	2152000	4406083	3.874.751	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	168,47	V	Sangat Tinggi	Disparbud
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	V	Sangat Tinggi	Disparbud
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	973.801.885	755078488	781453625	2391591411	2.105.327.876	645.799.000	678.083.900	710.368.800	742.653.700	774.938.600	283,49	V	Sangat Tinggi	Disparbud
3.03. PERTANIAN																
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	37,64	37,64	37,97	37,35	n/a	37,45	37,26	37,05	36,93	36,81	n/a	n/a	n/a	Dinas Pertanian

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	63,14	51,51	60,38	61,28	67,89	59,71	60,31	60,93	61,52	62,14	110,35	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
3	Produktivitas jagung	kw/ha	70,27	74,63	76,21	76,77	76,86	75,09	75,84	76,61	77,36	78,13	99,35	X	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
4	Produktivitas kacang tanah	kw/ha	18,02	18	18,4	18,52	18,59	18,28	18,54	18,8	19,06	19,32	97,53	X	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
5	Produktivitas ubi jalar	kw/ha	142,02	153,29	143,45	143,85	143,95	142	143	142,7	142,96	143,2	100,69	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
6	Produktivitas ubi kayu	kw/ha	234,94	242,15	241,9	242,44	238,61	236	236	237	237	238	100,68	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
7	produksi produk olahan tanaman pangan	kw	275.594	247923	499177	443477	443.126	419280	423473	427793	431942	436262	102,59	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
8	Produktivitas Kopi	kw/ha	9,3	0,93	9,67	8,13	7,81	9,3	9,32	9,34	9,35	9,5	83,53	X	Tinggi	Dinas Pertanian
9	Produktivitas Teh	kw/ha	17,1	1,72	16,5	15,69	16,01	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	91,49	X	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
10	Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya.	kw/ha	61,99	6,217	62,2	62,21	245	62,17	62,18	62,19	62,2	62,21	393,89	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
11	Produktivitas Tanaman Atsiri	kw/ha	0,38	0,38	0,42	0,72	0,44	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	112,82	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
12	Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	kw/ha	77,1	7,717	77,2	88,3	45,27	77,17	77,18	77,19	77,2	77,21	58,64	X	Rendah	Dinas Pertanian
13	produksi produk olahan	Ton	16.440	16,445	16501	18180	18205	16445	16470	16495	16520	16550	110,20	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	tanaman perkebunan															
14	Produktivitas komoditas Tembakau	kw/ha	8,6	0,807	8,63	8,76	10,88	8,07	8,08	8,09	8,1	8,11	134,32	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
15	Produktivitas Cabai	kw/ha	148,88	149,94	149,72	151,05	147,87	148,99	149,08	149,17	149,29	149,38	99,05	X	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
16	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	98,97	90,72	99,86	99,86	99,73	99,09	99,17	99,31	99,43	99,57	100,30	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
17	Produktivitas Kentang	kw/ha	232,69	234,04	235,18	235,59	235,61	232,71	232,93	233,07	233,16	233,27	101,05	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
18	Produktivitas Sayuran Lainnya	kw/ha	186,33	184,57	194,42	204,5	204,73	186,44	186,52	186,65	186,77	186,92	109,62	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
19	Produktivitas Jahe	kw/ha	2,6	2,66	3,13	2,95	2,96	2,73	2,81	2,96	3,07	3,18	96,42	X	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
20	Produktivitas Kunyit	kw/ha	2,75	2,71	2,82	2,96	2,97	2,94	3,03	3,22	3,35	3,51	88,66	X	Tinggi	Dinas Pertanian
21	Produktivitas Tanaman Obat Lainnya	kw/ha	2	2,87	2,11	3,21	3,33	2	2	2	2	2	166,50	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
22	Produktivitas Jeruk	kw/ha	46	36	50,25	50,42	50,51	47	47	47	48	48	105,23	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
23	Produktivitas Tanaman Buah Lainnya	kw/ha	40	32	40,11	40,82	40,91	40	41	41	41	42	99,78	X	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
24	Produktivitas Sedap Malam	kw/ha	280.222	n/a	724	831	836	560	710	860	1010	1218	82,77	X	Tinggi	Dinas Pertanian
25	Produktivitas olahan hasil hortikultura	kw/ha	564.321	355698	578032	589048	589.250	571785	577446	583107	588768	594430	100,08	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
26	Indeks Penanaman	poin	2	1,89	2,65	2,77	2,76	2	2	2	3	3	92,00	X	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
27	Cakupan bina kelompok petani	%	3,72	5	7,25	8,53	9	5,5	7,27	9,05	10,83	12,61	83,10	X	Tinggi	Dinas Pertanian
28	Prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	%	20	20	20	20	10	20	20	20	20	20	50,00	X	Sangat Rendah	Dinas Pertanian
29	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	20	20	5	11	11	20	20	20	20	20	55,00	X	Rendah	Dinas Pertanian
30	prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	10	2	4	5,31	5	25	25	25	25	25	20,00	X	Sangat Rendah	Dinas Pertanian
31	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	0,125	0,108	0,085	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	68,00	X	Sedang	Dinas Pertanian
32	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	n/a	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,102	0,102	100,98	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
33	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	%	n/a	n/a	10	100	100	10	10	10	10	10	1000,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
34	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	n/a	n/a	50	100	100	50	50	50	50	50	200,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
35	Produksi Peternakan dan Olahan Hasil Peternakan (daging, telur, susu)	ton	39,172	42303	34992,39	31816	n/a	32151	32476	33450	34453	35487	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan dan Peternakan
36	Peningkatan layanan keswan dan kesmavet	%	5	n/a	5	5	n/a	5	5	5	5	5	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan dan Peternakan
37	Jumlah layanan perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan	Layanan	5	n/a	8	5	n/a	5	5	5	5	5	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan dan Peternakan
38	Peternak dan pelaku usaha yang mendapat Bimbingan dan penyuluhan	Kelompok	10	n/a	10	10	n/a	10	10	12	14	15	n/a	n/a	n/a	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
1	Persentase Perusahaan yang berizin	%	19	n/a	18,25	28,57	28,57	21,43	21,43	23,81	26,19	28,57	109,09	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian,

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
																Perdagang an dan ESDM
3.06. PERDAGANGAN																
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	4	n/a	2,95	3	3	3	3	3	3	4	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	34	n/a	35	36	34	35	35	36	36	37	94,44	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah yang berlaku	%	40,5	n/a	41,4	41,8	38	41,4	41,6	41,8	41,9	42	90,69	V	Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
4	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	4	12	3	5	1	4	4	5	4	4	25,00	V	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
5	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis	6	n/a	10	12	14	8	10	12	14	15	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
6	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha	12	n/a	16	18	20	14	16	18	19	20	105,26	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
7	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	7	n/a	9	10	12	8	9	10	12	13	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
8	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha	6	n/a	7	7	7	7	7	7	7	7	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3.07. PERINDUSTRIAN																

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Pertambahan jumlah industri kecil	%	1	n/a	1	1,14	4,86	0.16	0,2	0,3	0,4	1	1215,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%	20	n/a	39,8	100	100	30	40	100	100	100	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	%	40	n/a	100	100	100	40	42	43	44	45	227,27	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	40	n/a	100	100	100	40	42	43	44	45	227,27	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
5	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut	IKM	100	n/a	200	250	705	150	200	250	300	350	235,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
6	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	5	n/a	50	10	10	5	5	10	10	10	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
7	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di	%	1	n/a	0,15	0,18	0,2	1	0,16	0,18	0,2	0,25	100,00	V	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	kabupaten yang masuk dalam SII Nas															
3.08. TRANSMIGRASI																
1	Jumlah MOU Antar Daerah dalam Penyelenggara- an Ketransmigrasi- an	mou	5	0	0	0	0	5	5	5	5	7	0	X	Sangat Renda- h	Disnakertr- ans
4 PENUNJANG URUSAN																
4.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN																
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	BB	BB	BB	BB (74,38)	BB (74,91)	BB	BB	BB	A (80)	A (80)	93,64	X	Sangat Tinggi	Inspektora- t Daerah
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	Persen	75	55	55	65	100	75	80	85	90	95	105,26	V	Sangat Tinggi	Inspektora- t Daerah
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	39	L.3	L3	L3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	100	V	Sangat Tinggi	Inspektora- t Daerah
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persen	72	78	82	82	94,54	75	78	82	85	90	91,76	X	Sangat Tinggi	Inspektora- t Daerah
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Inspektora- t Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	L.3	L.3	L3	L3	L.3	L.3	L.3	L.3	L.3	100	V	Sangat Tinggi	Inspektora t Daerah
7	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	Persen	72	83	77,04	93	92	75	77,5	80	82,5	85	100	V	Sangat Tinggi	Inspektora t Daerah
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)	unit	-	n/a	0	0	0	1	1	1	1	1	100	V	Sangat Tinggi	Inspektora t Daerah
4.02. PERENCANAAN																
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Bappeda

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	PERDA/PERKADA															
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Bappeda
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Bappeda
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Bappeda
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V	Sangat Tinggi	Bappeda
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	78	82,5	83	84	n/a	80	82	84	86	88	n/a	n/a	n/a	Bappeda
4.03. KEUANGAN																
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	V	Sangat Tinggi	BPKAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Peringkat Kinerja	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,82	6,73	3,22	5,37	3,78	3,81	3,8	3,79	3,78	3,77	100,00	X	Sangat Tinggi	BPKAD
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20	32,33	34,12	33,59	20	20	20	20	20	20	100,00	X	Sangat Tinggi	BPKAD
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10	13,95	14,14	12,81	10	10	10	10	10	10	100,00	X	Sangat Tinggi	BPKAD
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	45,81	42,22	37,98	41,98	48,83	44,96	45,32	45,69	46,08	46,48	94,03	n/a	Sangat Tinggi	BPKAD
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	54,19	57,78	62,02	58,11	51,17	55,04	54,68	54,31	53,92	53,52	105,10	n/a	Sangat Tinggi	BPKAD
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,31	0,32	0,34	0,36	0,35	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	100,00	V	Sangat Tinggi	BPKAD
8	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	V	Sangat Tinggi	BPKAD
9	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	V	Sangat Tinggi	BPKAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	dan Sesuai SOP															
10	Presentase SKPD yang Menyampaika n Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	V	Sangat Tinggi	BPKAD
11	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%	90	92	95	95	95	90	95	95	98	100	100,00	V	Sangat Tinggi	BPKAD
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	72	76	80	85	90	75	80	85	90	95	100,00	V	Sangat Tinggi	BPKAD
13	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persen	100	98,98	99,72	100	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Badan Pendapata n Daerah
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan	persen	80,25	100	100,74	101,37	n/a	80,5	80,75	81	81,25	81,5	n/a	n/a	n/a	Badan Pendapata n Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Pendapatan Daerah															
15	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	Persen	100	98,43	99,58	99,77	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Badan Pendapata n Daerah
16	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	Persen	100	98,72	98,94	99,62	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Badan Pendapata n Daerah
17	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	Persen	100	99,05	99,12	100	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Badan Pendapata n Daerah
18	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persen	100	99,23	100	100	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Badan Pendapata n Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
19	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persen	100	99,25	100	100	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Badan Pendapata n Daerah
4.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	37	37	39	36	38	39	39	39	39	39	97,44	X	Sangat Tinggi	BKD
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	231	258	250	255	259	258	258	258	258	258	100,39	V	Sangat Tinggi	BKD
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	10891	10059	9463	8888	8469	10891	10891	10891	10891	10891	77,76	X	Tinggi	BKD
4	Kebijakan kepegawaian kabupaten garut yang ditetapkan	Kebijaka n	2	n/a	4	2	4	3	3	3	3	3	133,33	V	Sangat Tinggi	BKD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	Persen	80	80	95,36	97,5	82	80	82	84	86	88	95,35	X	Sangat Tinggi	BKD
6	Prosentase Terpenuhi-nya Pengadaan Pegawai	Persen	80	112	30,3	97,5	82	80	82	84	86	88	95,35	X	Sangat Tinggi	BKD
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui.	Persen	100	98,68	99,13	99,57	97	100	100	100	100	100	97,00	X	Sangat Tinggi	BKD
8	Peresentase ASN yang Disiplin	Persen	99,9	99,9	99,9	99,77	99,96	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	100,06	V	Sangat Tinggi	BKD
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00	V	Sangat Tinggi	BKD
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	75	15	n/a	3	3	100	100	100	100	100	3,00	X	Sangat Rendah	BKD
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	56	43	44	46	93	100	100	100	100	100	93,00	X	Sangat Tinggi	BKD

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
1 2	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS	%	67	14	82	77	86	80	82	84	86	88	100,00	V	Sangat Tinggi	BKD
4.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.	%	70	n/a	6,82	56,1	56,1	75	80	85	90	95	n/a	n/a	n/a	Bappeda
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	%	65	50	66,67	51,22	51,22	70	75	80	85	90	n/a	n/a	n/a	Bappeda
	Penerapan SIDa:															
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah.	%	35	9,09	27,27	115,15	100	40	50	60	70	80	n/a	n/a	n/a	Bappeda
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah.	%	70	60	78,95	36,84	100	70	75	80	85	90	n/a	n/a	n/a	Bappeda
5 PENDUKUNG																
5.01. PENDUKUNG KDH DAN WKDH																

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Rasio Guru Ngaji Aktif Dalam "Garut Mengaji"	%	0,68	68	76	80	81	68	75	82	88	95	92,05	X	Sangat Tinggi	Setda
2	Cakupan Magrib Mengaji	%	0,63	63	80	80	90	63	72	81	90	99	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda
3	Rasio Dewan Masjid Indonesai (DMI Tingkat Kabupaten Garut Aktif Mengelola Masjid	%	0,19	19	45	50	50	19	19	19	19	19	263,16	V	Sangat Tinggi	Setda
4	Persentase Masjid Dalam Kondisi Baik	%	0,5	50	65	68	68	50	60	70	80	90	85,00	X	Tinggi	Setda
5	Persentase Pesantren Salafiah Dalam Kondisi Baik	%	0,2	20	50	60	60	20	20	20	20	20	300,00	V	Sangat Tinggi	Setda
6	Rasio Lembaga Pendidikan Keagamaan Aktif	%	0,8	80	50	60	94	80	85	90	95	100	98,95	X	Sangat Tinggi	Setda
7	Persentase SKPD Yang Menerapkan Aktifitas Keagamaan Di Lingkungannya	%	0,8	80	75	80	90	80	85	90	95	100	94,74	X	Sangat Tinggi	Setda
8	Prosentase Pelaksanaan	%	0,8	80	90	90	95	80	85	90	95	100	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Kegiatan Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat															
9	Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	3,1	3,59	3,05	n/a	—	3,2	3,3	3,5	4	4,5	n/a	n/a	n/a	Setda
10	Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	3	3,75	3,09	n/a	—	3,5	3,75	4	4,25	4,5	n/a	n/a	n/a	Setda
11	Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	3,93	3,93 (Baik)	4	4	4,02	3,93	4	4,01	4,5	4,51	89,33	X	Tinggi	Setda
12	Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Perbankan Dan Non Perbankan Daerah Sebagai Daya Dukung	%	0,8	0,85	85	n/a	95	80	85	90	95	100	100,00	n/a	Sangat Tinggi	Setda

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	Ekonomi Kerakyatan															
13	Persentase SKPD Yang Menyampaika n Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	%	0,8	0,8	100	100	100	80	85	90	95	100	105,26	V	Sangat Tinggi	Setda
14	Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Produk Hukum	12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup	8 Perda, 12 Perbup , 300 Kepbup	10 Perda, 230 Perbup , 850 Kepbup	15 Perda,25 Perbup,4 25 Kepbup	12 Perda, 184 Perbup, 824 Kepbup	12 Perda, 15 perbup, 375 kepbup	12 Perda, 20 perbup, 400 kepbup	12 Perda, 25 perbup, 425 kepbup	12 Perda, 30 perbup, 450 kepbup	12 Perda, 35 perbup, 475 kepbup	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda
15	Prosentase Capaian Kinerja KDH/WKDH	%	0,8	90	85	90	95	80	85	90	95	95	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda
16	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	0,8	90	100	95	95	80	85	90	95	95	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda
17	Prosentase Kasus Pertanahan Yang Difasilitasi	%	0,35	0			n/a	35	35	35	35	35	n/a	n/a	n/a	Setda
18	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	n/a	Tinggi (3,5117)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,4962)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
19	Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	0,8	100	100	100	100	80	80	80	80	80	125,00	V	Sangat Tinggi	Setda
20	Prosentase Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	%	0,9	91	73	100	90	90	90	90	90	90	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda
21	Prosentase Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	%	0,1	10			n/a	10	10	10	10	10	n/a	n/a	n/a	Setda
22	Prosentase Pelayanan Publik Dan Pembinaan Pegawai	%	0,8	96	100	100	n/a	80	85	90	95	100	105,26	V	Sangat Tinggi	Setda
23	Persentase Sarana Dan Prasarana Berkondisi Baik	%	0,65	90	95	96	n/a	65	70	75	80	85	100,00	V	Sangat Tinggi	Setda
24	Prosentase Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	%	0,75	95	93	95	98	75	80	85	90	95	108,89	V	Sangat Tinggi	Setda
5.02. PENDUKUNG DPRD																

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Setwan
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Setwan
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Setwan

N o.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
	pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD															
4	tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	V	Sangat Tinggi	Setwan
6	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
	6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															
1	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	%	n/a	66,67	80	100	100	75	75	75	75	75	133,33	V	Sangat Tinggi	Bakesban gpol
2	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	%	n/a	99,98	80	100	100	80	80	80	80	80	125,00	V	Sangat Tinggi	Bakesban gpol
3	Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	n/a	85,94	97,29	100	99,13	90	90	90	90	90	110,14	V	Sangat Tinggi	Bakesban gpol
4	tingkat Partisipasi Masyarakat dalam politik	%	70	-	78,91	n/a	79,57	72	72	72	72	72	110,51	V	Sangat Tinggi	Bakesban gpol

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
5	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Baik	n/a	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	n/a	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100	V	Sangat Tinggi	Bakesbangpol
7	KEWILAYAHAN															
	7.01. PEMERINTAHAN															
1	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat kecamatan	%	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (42 Kecamatan)
2	Prosentase pemuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	%	60	70	70	n/a	n/a	70	75	80	85	90	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul)
3	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	%	65	75	75	n/a	n/a	80	85	90	95	100	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul)

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target					Tingkat Capaian 2023 (%)	Interpre- tasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)	Nilai Pering- kat Kinerj a	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024				
4	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (42 Kecamatan)
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Point	100	100	n/a	83	n/a	n/a	n/a	82,15	82,9	83,7	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (42 Kecamatan)
6	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Nilai	100	100	n/a	76,35	n/a	n/a	n/a	78,4	81,19	84,89	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (42 Kecamatan)
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	n/a	100	n/a	n/a	n/a	90,36	94,12	98,15	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (42 Kecamatan)
8	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	100	100	n/a	B	n/a	n/a	n/a	B	B	BB	n/a	n/a	n/a	Kecamatan (42 Kecamatan)

Sumber : diolah Bappeda Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

2.6. Kemiskinan Ekstrem

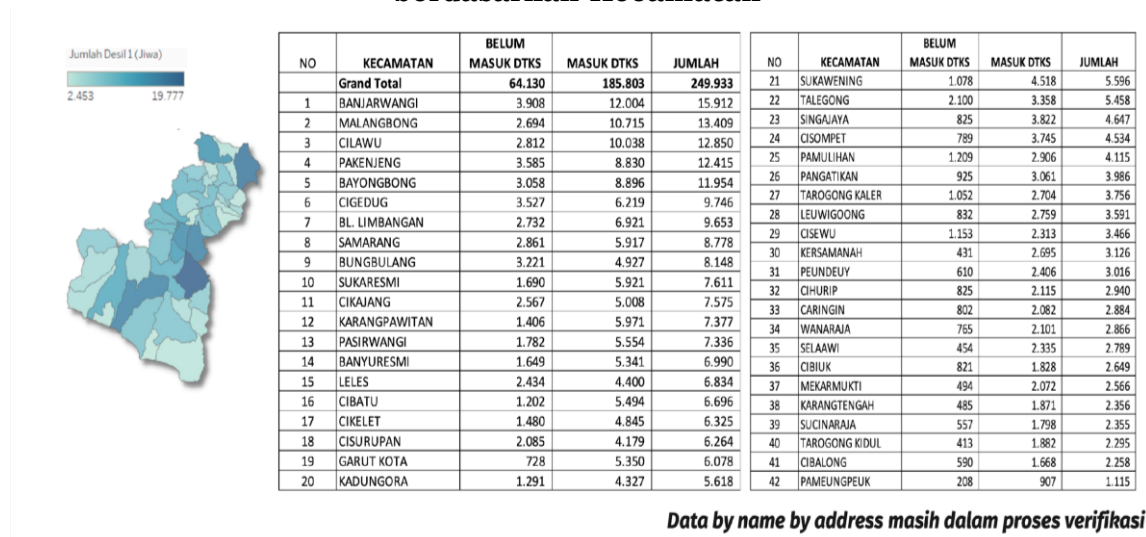
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, para Bupati atau Walikota diinstruksikan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota; menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan; menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address); memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari BPS, sebanyak 82,17 ribu penduduk Kabupaten Garut termasuk kedalam kategori miskin ekstrem. Proses pemetaan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui penggolongan desil kesejahteraan 1 yang di sinkronkan dengan penduduk yang telah memiliki nomor induk kependudukan yang valid, kemudian kembali dilakukan filter dengan menggunakan data penduduk yang termasuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan data yang diperoleh dari data P3KE KemenkoPMK penduduk yang termasuk kedalam golongan desil kesejahteraan 1 sebanyak 318.776 jiwa yang kemudian data tersebut diolah dengan melakukan filter/penyaringan terhadap penduduk yang memiliki NIK valid sehingga diperoleh 249.933 jiwa kemudian di dalam data tersebut telah terdapat 185.803 jiwa yang telah masuk kedalam DTKS.

Upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini ditunjukkan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melalui penyaluran beras dan validasi dan pemadanan data berdasarkan ID P3KE, hal ini dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Garut secara sinergis, adapun jumlah Anggaran pada tahun 2023 yang ditujukan

untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut adalah sebesar Rp. 1.478.444.551.019,-.

Gambar 2.52.
Data Pemetaan Penduduk Sasaran Kemiskinan Ekstrem
berdasarkan Kecamatan



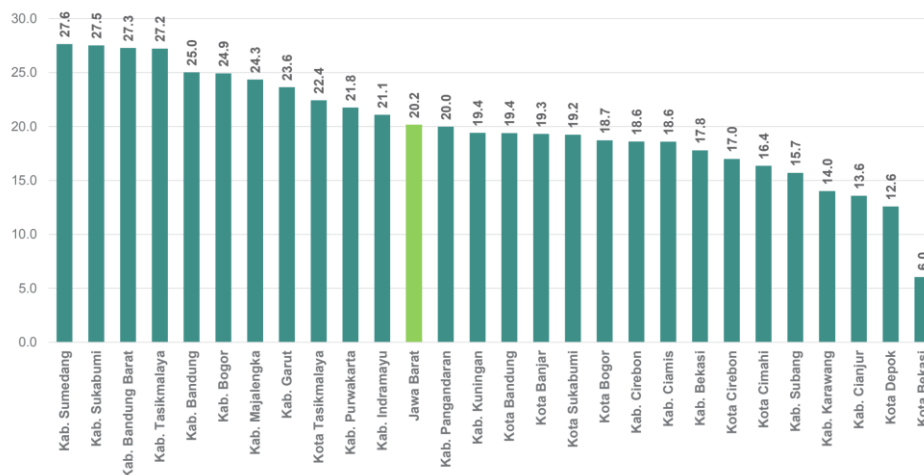
Sumber : diolah Bappeda

2.7. Prevalensi Stunting

Angka prevalensi stunting Kabupaten Garut tahun 2021 mencapai 35,2 % berdasarkan data yang dirilis oleh SSGI Kementerian Kesehatan. Pemerintah Garut memiliki komitmen yang kuat dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting melalui Program TOSS (Temukan Obati Sayangi Balita Stunting) selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Mendukung Program Unggulan Gubernur Jawa Barat Untuk Mewujudkan Jabar New Zero Stunting. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian stunting, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh. Adapun pada tahun 2023 total anggaran yang direncanakan untuk penanganan prevalensi stunting dengan kolaborasi antar OPD termasuk kecamatan adalah sebesar Rp. 1.478.444.551.019,-

Gambar 2.543
Prevalensi Balita Stunting berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat

PREVALENSI BALITA STUNTING (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, SSGI 2022



2.8. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* pada tahun 2015 yang diklaim sukses membawa penduduk dunia khususnya negara dunia ketiga memenuhi kebutuhan dasarnya (kesehatan, pendidikan, Standar Hidup) yang diukur dengan *Human Development Index*, maka United Nation (UN) melalui *Sustainable Development Working Group* mencanangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai sasaran jangka panjang komunitas dunia dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui adanya keseimbangan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas ekonomi harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat dan terjaganya lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi dan salah satu sasaran SDGs untuk mewujudkan keseimbangan ketiga hal tersebut adalah Sustainable and Resilient Infrastructure Development. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, menyepakati *outcome* dokumen SDGs yang berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030 sebagai kerangka kerja pembangunan global baru pengganti *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015.

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 yaitu :

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
- c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g. Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran capaian indikator SDGs Kabupaten Garut tahun 2021-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.93.
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Garut
Tahun 2019-2023

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,98	9,98	10,65	10,42	9,77
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	63,22	73,2	42,3	83,71	
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	75,39	n/a	40317	46.130	
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1,5	5,9	n/a	n/a	
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai	169955	151526	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		bersyarat/Program Keluarga Harapan.					
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,06	79,74	60,24	69,84	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. (*Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI))	88,79	82,6	60,42	90,04	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang	1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	62,37	63,38	86,96	88,51	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	70,98	71,62	67,2	67,69	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	99,3	99,3	94,45	97,18	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat .	98	98	67,13	83,28	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	80,01	n/a	74,08	81,43	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain,	1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	88,5	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	75	133	n/a	n/a	
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	3	2	n/a	n/a	
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	n/a	n/a	100	100	
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap	1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	70	150	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	1	1	n/a	n/a	
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. (Indeks Resiko Bencana)	188,06	131,65	185	164,91	
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	9052,5	n/a	n/a	n/a	
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	ada	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	42 ORANG TKSK, 1 ORANG PEKERJA SOSIAL, 46 ORANG TAGANA,	42 ORANG TKSK, 61 ORANG TAGANA, 2 ORANG PEKERJA SOSIAL	0,3691	32,62%	
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	n/a	n/a	Pengeluaran untuk layanan pokok Rp. 1.729.698.565.535 atau 17,44% dari total belanja (Pendidikan : 7,95% Kesehatan: 8,91% Perlindungan Sosial: 0,58%)	Pengeluaran untuk layanan pokok Rp. 2.524.792.611.545 atau 32,62% dari total belanja (Pendidikan : 20,72% Kesehatan: 11,44% Perlindungan Sosial: 0,46%)	
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	n/a	n/a	n/a	7,74	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (*Prevalensi balita gizi kurang)	3,8	4,3	2,4	4,24	
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	n/a	n/a	n/a	n/a	
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari (*Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari))	n/a	n/a	n/a	n/a	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	4,55	6,4	35,2	23,6	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	menyusui, serta manula.							
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	3,57	4,5	35,2	23,6	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,8	2,7	n/a	n/a	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	11,92	16,71	11,34	7,6	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. (* Bayi mendapatkan ASI Eksklusif)	73,7	77,5	89,96	90,67	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	77,8	78,6	79,7	83,1	
2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	n/a	n/a	199086,7	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). (*Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup)	82 orang	125 orang	112 orang	48 orang	
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	94,06	79,5	60,24	69,84	
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3,88	17,92	6 orang (0,027)	0,05 (11 orang)	
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan jj yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	458,38	429,46	219 orang (4,28)	250 (orang)	
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup)	3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	0,23	0,35	225	7,16 (334 orang)	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	77,79	82,6	92,11	92,68	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,01	0,01	0,23	0,32	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (*Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk))	135	86	178,2	278,5	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang. (Angka kejadian Malaria Kasus/100.000)	0,05 (5/100.000)	0,04 (4/100.000)	0,27	0,34	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit	3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	100	100	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4. (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	n/a	n/a	n/a	n/a	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	n/a	n/a	n/a	n/a	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5. (a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	1	1	n/a	n/a	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5. (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	1	1	n/a	n/a	
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. (*Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok)	n/a	9,1	37,7	38,76	
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga	3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	n/a	28	n/a	10,77	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	n/a	21,8	n/a	n/a	
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	n/a	0,2	n/a	n/a	
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	1	1	n/	n/a	
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	n/a	n/a	n/a	n/a	
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	alkohol yang membahayakan.							
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	67,05	67,1	n/a	n/a	
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	70,67	67,1	71,32	72,39	
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	28,72	29,73	30,93	32,16	
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	49/1000	49/1000	49/1000	36/1000	
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap	3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,85	2,85	2,3	2,45	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	n/a	n/a	n/a	n/a	
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	63,22	73,2	n/a	n/a	
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	63,22	n/a	n/a	n/a	
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan	3.9.3. (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	n/a	9,1	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.							
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	n/a	n/a	37,7	38,76	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluargaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	n/a	n/a	n/a	n/a	
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	n/a	n/a	0,18	1,19	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. (*Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis)	n/a	n/a	98,77	99,28	
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	97,4	n/a	100	100	
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	77	n/a	100	100	
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	105,66	105,66	98,58	106,54	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat .	115,11	115,11	79,66	99,6	
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,51	n/a	7,53	7,83	
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	31,18	n/a	85,4	85,4	
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	n/a	n/a	76.08	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat ; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD = 93,60 % SMP = 74,06 %	n/a	(1) 94,45 (2) 67,13	(1) 97,18 (2) 83,28	
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,56	n/a	99,14	99,6	
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,61	99,56	n/a	n/a	
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
			higienis bagi semua (WASH).					
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	PAUD = 31,60 % SD = 53,70% SMP = 44,80 % SMA = 40 % SMK = 23,70 % SLB = 53,5 %	n/a	61	n/a	
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	n/a	n/a	n/a	n/a	
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	n/a	n/a	0,0106 46	n/a	
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum	5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	100	100	100	100	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		komprehensif. (*Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu)					
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0,66	0,66	n/a	n/a	
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. (*Rata-rata usia kawin pertama wanita)	19	19	19,01	19,01	
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	49/1000	49/1000	49/1000	36/1000	
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	18	20	1,6	1,6	
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	38,32	44,23	n/a	n/a	
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.					
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	13,5	13,48	13,44	13,13	
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	64	64	n/a	n/a	
5.b	Meningkatkan penggunaan	5.b.1*	Proporsi individu yang	66,57	n/a	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.		menguasai/memiliki telepon genggam.					
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	79,84	81,13	77,35	88,51	
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	79,84	81,13	n/a	n/a	
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	66,73	67,32	67,13	67,69	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	n/a	79,19% (350 desa/kel dari total 442 desa/kel).	n/a	n/a	
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	186	192	455	455	
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan	6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	6,53	7,56	67,2	67,69	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1. (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan	6.3.2. (a)	Kualitas air danau.	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1. (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui	6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n/a	Secara khusus, belum dipunyai Rencana Pengelolaan	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kerjasama lintas batas yang tepat.				laan daerah aliran sungai, pelaksanaan pengelolaan dilakukan secara situasional dan kondisional			
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	n/a	n/a	n/a	n/a	
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n/a	Telah terbentuk forum FKPDAS (Forum Komunikasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), kesepakan dan kesepahaman dilakukan Desember 2020 melibatkan stakeholder	n/a	n/a	
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1. (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada	n/a	n/a	
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	88,5	99,84	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1. (a)	Konsumsi listrik per kapita.	n/a	n/a	n/a	n/a	
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2. (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	n/a	n/a	n/a	n/a	
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	n/a	n/a	n/a	n/a	
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita (PDRB per kapita)	8,45	-0,25	3,9	5,08	
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1. (a)	PDB per kapita (PDRB per kapita).	2206911 1	220140 28	23,356	25,346	
8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3,78	2,05	55,5	54,17	
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-	32,79	n/a	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.		pertanian, berdasarkan jenis kelamin.					
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1. (a)	Persentase tenaga kerja formal.	29,47	24,01	32,06	24,52	
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	32,79	n/a	n/a	75,48	
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan	8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	n/a	n/a	n/a	n/a	
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. (*TPT Kabupaten Garut)	7,28	8,96	8,68	7,6	
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran.	n/a	n/a	n/a	n/a	
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	n/a	n/a	n/a	n/a	
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3,78	3,95	3,73	4,15	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	3889	876	n/a	n/a	
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2877083	1396148	2152000	4.406.083	
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	n/a	n/a	n/a	n/a	
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	n/a	n/a	n/a	n/a	
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan,	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	n/a	n/a	n/a	n/a	
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	n/a	n/a	n/a	n/a	
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	n/a	n/a	n/a	n/a	
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.			n/a	19,2 km	
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	8,16	n/a	n/a	n/a	
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	8,94	-0,46	5,91	10,56	
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	28,02	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	n/a	n/a	n/a	n/a	
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	n/a	n/a	n/a	n/a	
9,5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	n/a	n/a	n/a	n/a	
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	n/a	n/a	91,71	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1. (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	66,57	n/a	91,71	n/a	
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	38,47	n/a	n/a	n/a	
10, 1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1. 1*	Koefisien Gini.	0,352	0,352	0,322	0,302	
10, 1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1. 1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,98	9,89	10,65	10,42	
10, 2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2. 1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	99,64	99,98	n/a	n/a	
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	Ada	n/a	n/a	
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	75,39	n/a	n/a	n/a	
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	n/a	87,71% (577.541 unit dari total rumah sebanyak 658.461 unit)	6727	6.825	
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
11, 3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3. 2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	n/a	n/a	n/a	n/a	
11, 4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4. 1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	n/a	n/a	n/a	n/a	
11, 5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5. 1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3,32	n/a	178	855	
11, 5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5. 1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	208.63	208.64	185	164,91	
11, 5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh	11.5. 1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	EWS Gempa 1 Unit	13	13	
						(5 peringatan banjir; 8 peringatan longsor)	(5 peringatan banjir; 8 peringatan longsor)	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11, 5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5. 2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	9052,5	n/a	n/a	n/a	
11, 6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6. 1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	45,33	n/a	55,49	60,48	
11, 6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6. 1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	n/a	n/a	n/a	n/a	
11, 7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7. 1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	49,48	n/a	n/a	n/a	
11. b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial	11.b. 2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	Ada	Ada	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasi kan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.		tingkat daerah. (*Masih dalam proses peneyusunan)					
12, 4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4. 2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	n/a	97,18	n/a	n/a	
12, 5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5. 1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	45,33	n/a	1612,08	340,66	
12, 6	Mendorong perusahaan, terutama	12.6. 1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.		sertifikasi SNI ISO 14001.					
12, 7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7. 1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	n/a	n/a	n/a	n/a	
12, 8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8. 1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	n/a	n/a	n/a	n/a	
13, 1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1. 1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Ada	n/a	n/a	
13, 1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1. 2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3,32	n/a	178	855	
15, 1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan	15.1. 1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	49,48	n/a	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	perjanjian internasional.							
15, 3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3. 1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	27,32	n/a	n/a	n/a	
15, 6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6. 1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada	Ada	n/a	n/a	
15, 9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9. 1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	100	100	n/a	n/a	
16, 1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1. 1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	
16, 1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1. 2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	n/a	n/a	n/a	n/a	
16, 1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1. 3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	
16, 1	Secara signifikan mengurangi segala	16.1. 4*	Proporsi penduduk yang merasa aman	100	100	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.		berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.					
16, 2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2. 1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	80	80	n/a	n/a	
16, 2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2. 1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	80	80	n/a	n/a	
16, 2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2. 3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	80	80	n/a	n/a	
16, 5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5. 1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	n/a	n/a	77,04	93	
16, 6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6. 1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	91,69	n/a	WTP	WTP	
16, 6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6. 1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100	100	WTP	WTP	
16, 6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6. 1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	70,8	n/a	B	B	
16, 6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel,	16.6. 1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan transparan di semua tingkat.		terhadap belanja pengadaan.					
16, 6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6. 1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	65,22	n/a	100	100	
16, 6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6. 2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	88,47	88,47	n/a	n/a	
16, 7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7. 1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	18	20	1,6	1,6	
16, 7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7. 1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	n/a	n/a	13971	Apr-38	
16, 9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9. 1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	76,56	80,1	n/a	n/a	
16, 9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9. 1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	n/a	n/a	69,52	78,29	
16, 9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9. 1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	76,56	80,1	74,08	81,43	
16, 1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan	16.10 .2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kesepakatan internasional.		sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.					
16. b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b. 1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	n/a	n/a	n/a	n/a	
17, 1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1. 1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2,7	n/a	2401024,9	n/a	
17, 1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1. 1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,23	n/a	541997,41	n/a	
17, 1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1. 2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	n/a	n/a	n/a	n/a	
17, 6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan	17.6. 2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17, 6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6. 2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	n/a	n/a	n/a	n/a	
17, 8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada	17.8. 1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	38,47	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17, 17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17 .1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a	n/a	n/a	
17, 17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17 .1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	n/a	n/a	n/a	n/a	
17, 18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18 .1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	97,33	n/a	68,71	95,75	
17, 18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang,	17.18 .1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	92,31	n/a	85,29	91,18	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17, 18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18 .1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	100	n/a	n/a	n/a	
17, 18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau	17.18 .1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17, 19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19 .2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	n/a	n/a	
17, 19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19 .2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	120	n/a	91,43	n/a	
17, 19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung	17.19 .2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	94,02	n/a	94,02	97,06	

No	Target		Indikator	Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							

Sumber: diolah Bappeda Tahun 2023

2.9. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemerintah Kabupaten Garut memiliki 4 BUMD yaitu sebagai berikut :

1. PDAM TIRTA INTAN, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
2. PT BPR Intan Jabar, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas;
3. PD. BPR Garut, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
4. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada BUMD baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal/saham kepada BUMD yang berbentuk Perseroan, atau menyetorkan modalnya kepada Perumda. Realisasi setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada BUMD secara keseluruhan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah mencapai Rp. 62.532.645.000,- dimana dalam pemenuhan setoran modal/saham tersebut dilakukan dengan mempertimbangan Peraturan Daerah terkait dengan Pendirian masing masing BUMD dan Perda terkait Penyertaan

Modal kepada masing-masing BUMD, serta kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal daerah.

Adapun penyertaan modal dan pendapatan yang diterima dalam periode tahun 2019-2023 yakni penyertaan modal yang sudah disetor ke BUMD sebesar Rp. 62.532.645.000,- dan pendapatan yang diterima (dividen) dari BUMD adalah sebesar Rp. 21.416.135.672,-.

2.10. Kerjasama Daerah

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Bahwa Kerja Sama Daerah merupakan Usaha Bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan / atau antara Daerah dan Lembaga / Pemerintah di Luar Negeri, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Mengingat kerja sama antar daerah yang berbatasan bersifat wajib, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan di daerah yang berbatasan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib.

Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. Sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan serta promosi potensi daerah.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melaksanakan 9 (sembilan) bidang kerjasama antar daerah dan 19 (sembilan belas) bidang kerjasama dengan pihak ketiga, meningkat dibandingkan kerjasama yang dilakukan pada tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) bidang kerjasama antar daerah. Dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui kolaborasi stakeholders pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang dilaksanakan pada tahun 2023 berjumlah 55 kerjasama, yaitu:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cab Garut tentang Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Garut;
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Universitas Brawijaya tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Badan Usaha Kepakaran Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Garut Tahun 2023;
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah tentang Program Peningkatan Derajat Kehidupan Perempuan dan Anak;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Garut tentang Program Peningkatan Derajat Kehidupan Perempuan dan Anak;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut;
 8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garut tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Keuangan pada PT. LKM Garut;
 10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Sinergitas Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam Implementasi Tridharma serta Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 11. Kesepakatan Bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dengan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut;
 12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tentang Perdagangan Barang Pokok antar Daerah;
 14. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Program USAID Madani di Kabupaten Garut Tahun 2023;

15. Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Tasikmalaya tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU & BP) yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
16. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Garut;
17. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Garut;
18. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Garut;
19. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut;
20. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut;
21. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut;
22. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut;
 23. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut;
 24. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut;
 25. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
 26. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
 27. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Universitas Krisnadwipayana Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 28. Kesepakatan Bersama Antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut Tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Pembangunan di Kabupaten Garut;

29. Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Novo Nordisk Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pencegahan dan Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2 Secara Komprehensif melalui Program *Affordability Project*;
30. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tentang Kerja Sama Pengembangan Produk Unggulan Bidang Peternakan dan Perikanan;
31. Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pendidikan Kabupaten Garut dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut tentang Informasi dan Solusi Pendidikan di Kabupaten Garut melalui Media Sosial dan Radio Siaran Pemerintah Daerah;
32. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Kerja Sama Daerah;
33. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Universitas Al-Ghifari tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah;
34. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Penggiat Angklung Indonesia tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Angklung di Kabupaten Garut;
35. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
36. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
37. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang

Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut;

38. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut;
39. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut;
40. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
41. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut;
42. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut;
43. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut;

44. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut;
45. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut;
46. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut;
47. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut;
48. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut;
49. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut;
50. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut;
51. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Garut;
 52. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut;
 53. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut tentang Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;
 54. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas Berupa Pembangunan Jalan Lingkar Garut (Ruas Jalan Lingkar Cipanas) di Cagar Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
 55. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut di Kabupaten Garut tentang Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;

2.11. Proyek Prioritas Nasional pada Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan mengamanatkan 170 *project* pengembangan yang terdiri dari 81 *project* di Kawasan Rebana dan 89 *project* di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam hal ini, Kabupaten Garut berperan sebagai penerima manfaat *project* dan pelaksana *project*. Daftar *project* pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai penerima manfaat diantaranya:

1. Jalan Tol GeTaCi Segmen 1;
2. JTS (Jalur Tengah Selatan) segmen timur;
3. Rekonstruksi jalur Bandung - Pengalengan – Rancabuaya;
4. Reaktivasi Rel KA Cibatuh – Cikajang;
5. Pembangunan Daerah Irigasi Candra Goyang;
6. Penanganan banjir (sungai Cipalebuh, sungai Cikaso);
7. PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu);
8. PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Gunung Papandayan;
9. Pembangunan Desa Digital;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun;
11. Pembangunan Kawasan Minapolitan;
12. Pembangunan Rumah Khusus Nelayan;
13. *Breakwater* pantai Rancabuaya.

Adapun daftar *project* pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pelaksana *project* diantaranya:

1. Jalan lingkar Garut;
2. TPA Garut (Pameungpeuk, Caringin, Banjarwangi);
3. Pasar Cikajang.

Hasil identifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat 30 *project* P1 (Prioritas 1) yang telah teridentifikasi siap dilaksanakan di tahun 2023. Terdapat 1 *project* di Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pelaksana yang masuk dalam list 30 *project* tersebut, yaitu Jalan Lingkar Garut. Adapun 2 *project* lainnya diusulkan sebagai *project* tambahan.

A. Jalan Lingkar Garut

Jalan Lingkar Garut tercantum dalam lampiran Perpres 87/2021 halaman 89. Jalan Lingkar Garut memiliki panjang 35,35 KM yang terdiri dari 6 ruas jalan:

1. Jalan Kadungora – Leles;
2. Jalan Lingkar Luar Leles;
3. Jalan Lingkar Cipanas;
4. Jalan *By Pass*;
5. Jalan Tarogong - Gandasari – Cimaragas;
6. Jalan Exit Tol Cimaragas.

Ruas jalan yang diusulkan penanganannya hingga dilaksanakan pembangunan di tahun 2023 yaitu jalan Kadungora – Leles, jalan Lingkar Luar Leles, jalan Lingkar Cipanas, serta jalan *By Pass*. Adapun timeline pelaksanaan sebagai berikut:

2021: Rekonstruksi Jalan Lingkar Cipanas.

2022: Pembangunan jalan Kadungora - Leles segmen 1, rekonstruksi jalan lingkar luar Leles, pembebasan lahan Jalan lingkar Cipanas, rekonstruksi jalan lingkar Cipanas.

2023: Pembangunan jalan Kadungora - Leles segmen 2 dan 3, pembangunan jalan lingkar luar Leles, pembangunan jalan *By Pass*, pembebasan lahan ruas jalan Tarogong - Gandasari - Cimaragas (sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Garut).

2024: Pembangunan jalan Tarogong - Gandasari – Cimaragas.

B. TPA Pameungpeuk

TPA Pameungpeuk merupakan bagian dari project TPA Kabupaten Garut yang tercantum dalam lampiran Perpres 87/2021 halaman 97. Rencana layanan TPA Pameungpeuk seluas 760,92 Km mencakup Kecamatan Cikelet, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cihurip dan Kecamatan Cibalong.

Tabel 2.94. Kebutuhan Sarana dan Prasarana TPA Pameungpeuk

No	Jenis Sarana Prasarana	Volume	Ritasi	Fungsi
1	Motor Sampah	1,5 m3	3 rit/hari	Armada pengumpulan dari sumber permukiman menuju TPS3R kelurahan
2	Kontainer	6 m3	-	Sarana pemindahan sampah
3	Arm Roll Truck	8 m3	2 rit/hari	Armada pengangkutan sampah dari kontainer menuju TPA
4	Dump Truck	6 m3	2 rit/hari	Armada pengangkutan sampah
5	TPS3R Kelurahan	2 ton/hari	-	Sarana pengolahan sampah organik

C. Pasar Cikajang

Pasar Cikajang tercantum dalam lampiran Perpres 87/2021 halaman 111. Pasar Cikajang merupakan pasar yang dinilai strategis karena berlokasi di pengembangan Jalur Tengah Selatan. Perlu dilakukan revitalisasi karena kondisi pasar saat ini tidak layak diakibatkan kerusakan dan beberapa kali kejadian kebakaran. Pasar Cikajang memiliki Luas lahan 34.726 m dengan jumlah kios yang akan dibangun sebanyak 1.393 unit. Adapun *timeline* pelaksanaan sebagai berikut:

2021: Proses perizinan.

2022: Penyelesaian bukti kepemilikan lahan.

2023: Relokasi pedagang (APBD Kabupaten), revitalisasi (APBN).

2024: Pengadaan sarana dan prasarana.

2.12. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan keenam SPM tersebut. Capaian SPM Kabupaten Garut tercapai sebanyak 15 jenis pelayanan dasar dengan tingkat capaian 100 % atau lebih dari 100 % adapun 14 jenis pelayanan dasar belum mampu mencapai target atau masih berada dibawah 100%. Predikat capaian nilai kinerja SPM pelayanan dasar sebanyak 19 jenis pelayanan dasar dengan predikat sangat tinggi, 5 dengan predikat tinggi, 3 dengan predikat sedang dan 2 dengan predikat sangat rendah.

Predikat sangat rendah salah satunya berada pada SPM Bidang pendidikan untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 46,32% capaian ini merupakan capaian terendah jika dibandingkan dengan jenis pelayanan dasar lainnya, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pada dimensi penghitungan peserta didik terhadap jumlah penduduk rentang usia peserta didik yang awalnya peserta didik terhadap jumlah penduduk 0-6 tahun menjadi peserta didik terhadap jumlah penduduk 3-6 tahun. Adapun realisasi dari capaian masing-masing jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 2.95. dibawah ini.

Adapun beberapa permasalahan dalam penerapan SPM masih ditemui diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: permasalahan data jumlah penduduk yang berada di daerah rawan bencana beririsan untuk setiap jenis bencana sehingga akan mendapatkan jumlah penduduk yang melebihi total penduduk kabupaten garut dan kesulitan dalam pemilahan data jumlah penduduk pada daerah rawan bencana yang harus mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana;
2. Perencanaan dan penganggaran: permasalahan penganggaran untuk sub kegiatan spm kurang optimal;

3. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat dan kurang optimalnya sumber daya manusia;
4. Luasnya cakupan daerah layanan penanggulangan bencana dan kurangnya sumber daya aparatur dalam penanggulangan bencana



Tabel 2.95.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)
				2019	2020	2021	2022	2023	
SPM Bidang Pendidikan									
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	98,9	99,27	89,5	97,5	96,03	X
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	n/a	30,54	15,06	81,68	91,1	X
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	97,1	97,3	85,4	46,32	91,55	X
SPM Bidang Kesehatan									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,81	100	100	95,58	95,99	X

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94,38	87,05	94,6	94	91,81	X
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,39	104	100	99,3	94,76	X
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,22	84,96	66,3	92	90,33	X
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	75,76	66,78	46,7	82,99	97,06	X
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	67,16	64,08	42,2	113,95	98,61	X
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	77,1	66,79	58,9	78,89	98,86	X

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)
				2019	2020	2021	2022	2023	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	3,83	25,7	35,71	91,99	100	V
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	7	53,25	39,66	89,1	100	V
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	84	68,7	84,66	100	V
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	45,19	82,74	124,33	98,57	X
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	65	62,6	52,6	100	100	V

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)
				2019	2020	2021	2022	2023	
SPM Bidang Pekerjaan Umum									
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	79,84	81,27	86,97	88,41	90,04	X
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	66,73	67,38	67,2	67,69	68,11	V
SPM Bidang Perumahan Rakyat									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	V
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100	100	V
SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	100	100	100	100	98,86	X
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	82,99	50,05	X
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	41,99	77,26	X
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100	V
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	87,27	X
SPM Bidang Sosial									
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang	100	100	100	100	100	100	V

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi: tercapai (V) tidak tercapai (X)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	telantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti							
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100	100	100	100	100	100	V
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100	100	100	100	V
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100	100	100	100	V
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	V

Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Kabupaten Garut, Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis proyeksi pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 2 (dua) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan didasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD baik klasifikasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan struktur APBD ini dilaksanakan mulai tahun 2021.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Asas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan kinerja keuangan pada 5 (lima) tahun sebelumnya yang dijadikan dasar dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, mengacu pada kinerja keuangan pada periode RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut pada kurun waktu lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 memedomani 2 aturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rincian pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah :
 - Pajak daerah;
 - Retribusi daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan :
 - Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;

- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

- Pendapatan Hibah;
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Langsung:

- Belanja pegawai;
- Belanja barang dan jasa;
- Belanja modal

2. Belanja Tidak Langsung:

- Belanja pegawai;
- Belanja bunga;
- Belanja subsidi;
- Belanja hibah;
- Belanja bantuan sosial;
- Belanja bagi hasil;
- Belanja bantuan keuangan;
- Belanja tidak terduga

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- Penerimaan pinjaman daerah;
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- Pencairan dana cadangan;
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Penerimaan piutang daerah

2. Pengeluaran pembiayaan

- Pembentukan dana cadangan;
- Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah;

- Pembayaran pokok utang;
- Pemberian pinjaman daerah

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur rincian pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah menjadi sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - Pendapatan Hibah;
 - Dana Darurat; dan
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Hibah; dan
 - Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - Belanja Bagi Hasil; dan

- Belanja Bantuan Keuangan

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan;
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Penerimaan Pinjaman Daerah;
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan;
- Penyertaan Modal Daerah;
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rincian objek dari masing-masing pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah, sehingga memungkinkan untuk tidak digunakan seluruhnya. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut periode sebelumnya menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Secara umum, kinerja APBD Tahun 2019-2024 dibagi berdasarkan pedoman perundangundangan yaitu tahun 2019-2020 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 2021-2023 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan sebagai berikut :

A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara akumulasi, pendapatan daerah Kabupaten Garut selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 berada pada posisi terendah. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Garut. Pada rentang waktu tahun 2019-2020, pertumbuhan pendapatan tertinggi yang terjadi pada tahun

anggaran 2020 terdapat pada rincian objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Periode 2021-2023 adalah masa dimana pandemi COVID-19 mulai mereda. Hal ini menyebabkan perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kabupaten Garut mulai pulih dan berangsur tumbuh kembali. Realisasi pendapatan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,05%. Rendahnya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir disebabkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada komponen Lain-lain PAD yang Sah sebesar 69,91%.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 1,56%, walaupun tingkat pertumbuhan Pajak Daerah meningkat sebesar 17,43%, pendapatan Retribusi Daerah meningkat sebesar 18,14%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat sebesar 6,64%, sementara itu Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan sebesar 8,39%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Kabupaten Garut
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
1	PENDAPATAN	4.794.836.329.500,00	4.496.835.424.032,00	-6,22
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	486.565.326.730,00	474.636.531.982,00	-2,45
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	131.675.124.090,00	116.413.508.912,00	-11,59
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	17.001.093.720,00	11.970.216.330,00	-29,59
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.679.619.287,00	7.059.036.226,00	24,29
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	332.209.489.633,00	339.193.770.514,00	2,10
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.843.353.809.646,00	2.533.357.077.529,00	-10,90
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	288.321.148.971,00	191.255.229.849,00	-33,67
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.837.050.436.000,00	1.663.193.753.000,00	-9,46
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	717.982.224.675,00	678.908.094.680,00	-5,44
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.464.917.193.124,00	1.488.841.814.521,00	1,63
1.3.1.	Pendapatan Hibah	296.337.644.761,00	323.750.659.964,00	9,25
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	209.827.893.837,00	211.395.791.683,00	0,75
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya	527.950.673.084,00	567.652.838.863,00	7,52
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	430.800.981.442,00	386.042.524.011,00	-10,39

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2020

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023*	
4.	PENDAPATAN	4.684.404.923.196,61	4.626.954.746.948,10	4.780.493.867.959	1,05
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	560.783.376.918,61	486.038.766.410,10	535.681.310.300	(1,56)
4.1.01.	Pajak Daerah	126.527.804.958,00	157.569.982.468,00	173.835.653.663	17,43
4.1.02.	Retribusi Daerah	15.259.959.070,00	15.711.817.595,00	20.948.150.084	18,14
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.455.066.625,00	7.044.369.160,00	7.336.469.580	6,64
4.1.04.	Lain - Lain PAD yang Sah	412.540.546.265,61	305.712.597.187,10	333.561.036.973	(8,39)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.784.572.413.274,00	4.081.264.360.586,00	4.219.412.786.728	5,61
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.261.973.058.051,00	3.413.296.605.794,00	3.595.898.907.785	4,99
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	522.599.355.223	667.967.754.792	623.513.878.943	10,58
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	339.049.133.004,00	59.651.619.952,00	25.399.770.931	(69,91)
4.3.01.	Pendapatan Hibah	20.133.542.423,00	46.365.278.610,00	10.507.849.500	26,48
4.3.03.	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	318.915.590.581,00	13.286.341.342,00	14.891.921.431	(41,87)

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2023

*) data realisasi sementara APBD TA. 2023

B. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Selama tahun 2019-2023 anggaran belanja daerah Kabupaten Garut relatif mengalami pertumbuhan, namun lonjakan signifikan terdapat pada rincian objek Belanja Tidak Terduga di tahun 2020. Hal ini dipicu oleh adanya pandemi COVID-19 yang terjadi secara nasional.

Pada periode 2021-2023 pasca pandemi COVID-19, belanja daerah mulai kembali meningkat mengalami pertumbuhan sebesar 1,74%. Rata-rata pertumbuhan tersebut ditunjang oleh beberapa komponen yang mengalami peningkatan disamping ada beberapa komponen juga yang penurunan yang cukup signifikan. Belanja bantuan sosial mengalami peningkatan signifikan sebesar 81,45% sedangkan Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 53,27%.

Realisasi belanja daerah mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
2	BELANJA	4.594.611.035.095	4.573.907.976.515	-0,45
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.489.883.192.579	2.642.720.297.365	6,14
2.1.1	Belanja Pegawai	1.658.485.079.270	1.570.103.614.714	-5,33
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	72.006.550.000	91.202.497.202	26,66
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.531.779.920	12.107.400.000	-50,65
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes	15.006.628.795	15.517.586.117	3,40
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes.	718.678.870.844	785.860.032.845	9,35
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.174.283.750	167.929.166.487	14200,56
2.2	Belanja Langsung	2.104.727.842.516	1.931.187.679.150	-8,25
2.2.1	Belanja Pegawai	135.788.589.350	185.791.658.941	36,82
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.855.453.941	1.282.353.337.243	-9,43
2.2.3	Belanja Modal	553.083.799.225	463.042.682.966	-16,28

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2020

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023*	
5.	BELANJA DAERAH	4.649.602.155.581	4.688.455.777.826	4.812.711.649.050	1,74
5.1.	Belanja Operasi	3.289.003.496.580	3.228.017.251.870	3.409.431.021.272	1,88
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.711.698.801.354	1.678.298.468.729	1.623.923.894.714	(2,60)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.088.825.013.582	1.142.669.871.121	1.324.307.932.451	10,42
5.1.04.	Belanja Subsidi		951.000.000	1.111.000.000	16,82
5.1.05.	Belanja Hibah	477.437.424.029	380.223.522.021	426.821.073.357	(4,05)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	11.042.257.615	25.874.389.999	33.267.120.750	81,45
5.2.	Belanja Modal	558.797.286.428	700.943.778.898	680.967.695.485	11,29
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	34.923.261.221	21.374.678.883	17.710.354.017	(27,97)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.413.219.545	115.797.914.649	164.947.127.598	21,83
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.878.310.049	149.847.397.573	290.110.589.529	33,37
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.540.470.291	394.817.632.912	191.233.976.444	31,19
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.042.025.322	19.106.154.881	16.965.647.897	(7,94)
5.3.	Belanja Tidak Terduga	39.452.922.903	28.771.620.642	5.907.754.376	(53,27)
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	39.452.922.903	28.771.620.642	5.907.754.376	(53,27)
5.4.	Belanja Transfer	762.348.449.670	730.723.126.416	716.405.177.917	(3,05)
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	13.045.583.078	17.422.666.527	19.333.448.767	22,26
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	749.302.866.592	713.300.459.889	697.071.729.150	(3,54)

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2023

*) data realisasi sementara APBD TA. 2023

C. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada kurun waktu 2019-2023, rata-rata pertumbuhan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 10,51 %. Adapun penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah terhadap BUMD dan pembentukan Dana Cadangan dalam rangka menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Bupati pada tahun 2024. Pembiayaan daerah diharapkan dapat menutup defisit anggaran, sebagai akibat lebih besarnya rencana belanja daerah dibandingkan dengan target pendapatan daerah.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
3	PEMBIAYAAN	129.047.109.819	317.706.863.724	146,19
3.1	Penerimaan Pembiayaan	157.817.037.741	331.619.863.724	110,13
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.817.037.741	331.619.863.724	110,13
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	28.769.927.922	13.913.000.000	-51,64
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.347.459.500	13.913.000.000	34,46
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	18.422.468.422	-	-100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	329.272.404.224	240.634.311.241	-26,92

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2020

Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	2021	2022	2023*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
6.	PEMBIAYAAN	229.484.311.241	249.287.079.237	175.366.405.182	(10,51)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182	(9,54)
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182	(9,54)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	8,93
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	8,93
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	264.287.078.857	187.786.048.359	175.366.405.182	(25,69)

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2023

*) data realisasi sementara APBD TA. 2023

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada periode tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Garut serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

A. Aset

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,9 %. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara Aset lancar yang pertumbuhannya cukup signifikan yaitu sebesar 11,09 %, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,95 %, dan Aset lainnya sebesar 26,29%, sementara itu Investasi Jangka Panjang mengalami pertumbuhan rata-rata 9,11 %.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan kenaikan cukup signifikan pada tahun 2021, akan tetapi kembali menurun signifikan pada tahun berikutnya, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 19,62 %.

Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Garut dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	299.061.794.344,00	215.181.873.738,00	171.361.576.205,00	154.118.430.385,00	123.001.909.957,00	-19,67
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.020.710.748,00	148.585.994,00	26.229.764,00	146.404.697,00	165.697.335,00	75,89
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Kas di BLUD	15.998.139.163,02	25.099.517.088,29	92.846.454.662,90	33.493.270.003,00	33.529.522.702,00	65,75
	Kas di Bendahara BOS		292.911.433,00	52.818.225,00	108.300.097,00	33.555.087,00	-15,31
	Kas di Bendahara JKN (Non BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	58.668.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Kas Lainnya	15.539.219.469,00	631.400.862,00	181.893.584,00	84.662.280,00	96.594.390,00	-51,62
	Piutang Pajak dan Retribusi	18.439.118.482,00	26.672.273.139,26	33.301.987.250,26	40.871.481.540,26	41.547.285.600,26	23,47
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	34.084.404.069,00	11.349.648.984,00	11.966.283.727,56	19.902.476.862,58	20.902.485.865,58	2,52
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	6.830.570.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Daerah	8.692.328.166,00	7.211.994.803,00	14.898.229.979,00	17.607.906.445,00	15.807.906.500,00	24,38
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-13.205.834.221,54	-16.032.722.299,74	-21.439.742.326,90	-29.756.383.635,62	-30.237.885.854,57	23,89
	Beban Dibayar Dimuka	17.585.158.983,51	7.142.319.007,92	453.822.101,37	31.216.707.809,52	28.216.707.997,53	1654,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Piutang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Piutang Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00		-

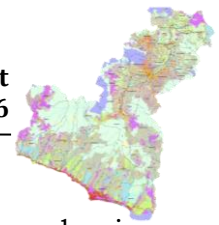
No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Piutang Lain-Lain / Bank Jabar	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Piutang Lain-Lain / Restitusi Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Persediaan	26.190.554.379,73	32.874.133.868,23	44.491.642.946,08	322.841.804.929,17	300.997.880.947,17	169,93
	Jumlah Aset Lancar	430.294.832.126,71	310.571.936.617,96	348.141.196.118,27	590.635.061.412,91	534.061.660.526,97	11,09
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						
	Dana Bergulir	1.302.948.050,00	1.302.948.050,00	1.302.948.050,00	1.302.948.050,00	1.302.948.050,00	0,00
	Penyisihan Dana Bergulir	-1.302.948.050,00	-1.302.948.050,00	-1.302.948.050,00	-1.302.948.050,00	-1.302.948.050,00	0,00
	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	99.096.398.832,70	124.733.136.460,36	122.970.043.852,73	131.444.400.447,72	138.345.004.450,71	9,15
	Jumlah Investasi Permanen	99.096.398.832,70	124.733.136.460,36	122.970.043.852,73	131.444.400.447,72	138.345.004.450,71	9,15
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	99.096.398.832,70	124.733.136.460,36	122.970.043.852,73	131.444.400.447,72	138.345.004.450,71	9,15
1.3	ASET TETAP						
	Tanah	844.332.009.669,02	878.053.906.763,26	913.245.248.469,55	935.732.588.575,55	953.442.942.592,55	3,09
	Peralatan dan Mesin	839.781.712.605,56	1.015.944.481.525,01	1.133.254.213.793,12	1.236.770.587.536,39	1.401.717.715.134,39	13,75
	Gedung dan Bangunan	1.701.188.773.766,80	1.817.782.528.483,29	1.972.306.275.177,09	2.120.888.626.215,82	2.410.999.215.744,82	9,14
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.176.240.062.850,20	1.320.942.045.325,65	1.549.985.889.907,39	1.967.498.635.786,12	2.158.732.612.230,12	16,57
	Aset Tetap Lainnya	294.925.100.838,92	307.448.913.105,48	327.386.193.182,25	328.340.495.624,81	345.306.143.521,81	4,05
	Konstruksi dalam Pengerjaan	48.407.916.719,89	77.592.989.046,53	119.536.041.613,76	131.453.014.072,78	262.906.028.145,56	56,08
	Akumulasi Penyusutan	-1.556.854.111.948,34	-1.799.038.400.642,41	-1.998.249.206.088,86	-3.128.651.380.856,56	-3.248.655.380.987,27	21,76
	Jumlah Aset Tetap	3.348.021.464.502,05	3.618.726.463.606,81	4.017.464.656.054,30	3.592.032.566.954,91	4.284.449.276.381,98	6,95
1.4	DANA CADANGAN						

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Dana Cadangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	14.978.884.044,00	12.789.440.899,00	12.989.440.899,00	2,94
	Jumlah Dana Cadangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	14.978.884.044,00	12.789.440.899,00	12.989.440.899,00	2,94
1.5	ASET LAINNYA						
	Tagihan Penjualan Angsuran	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00
	Tuntutan Ganti Rugi	503.324.500,00	498.229.500,00	489.829.500,00	486.629.500,00	486.629.500,00	-0,84
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	0,00
	Aset Tak Berwujud	9.364.001.506,22	10.773.587.528,48	11.345.093.604,48	13.024.898.638,48	13.024.898.638,48	8,79
	Piutang pada PD. BPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Penyertaan Modal Terarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Piutang Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Aktiva Tidak Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-5.896.762.127,50	-8.042.812.664,12	-9.257.727.399,68	-10.329.281.263,72	-10.329.281.263,72	15,77
	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	22.061.002.709,00	51.062.003.700,00	131,46
	Aset lain-lain	928.555.926.314,76	308.033.397.509,01	310.024.284.132,53	57.098.908.833,85	57.098.908.833,85	-36,94
	Jumlah Aset Lainnya	937.625.296.363,48	316.361.208.043,37	317.700.286.007,33	87.440.964.587,61	116.441.965.578,61	-26,29
	JUMLAH ASET	4.827.037.991.824,94	4.382.392.744.728,50	4.821.255.066.076,63	4.414.342.434.302,15	5.086.287.347.837,27	1,90
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga (PFK)	0,00	495.220.848,00	171.633.101,00	60.135.484,00	60.135.484,00	-43,43
	Bagian Lancar Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	2.102.043.374,00	1.524.668.336,68	1.660.584.342,01	2.409.880.371,34	1.665.270.360,00	-1,08
	Utang Belanja	23.303.889.516,00	21.542.148.166,00	59.911.711.173,55	10.868.397.704,00	11.896.754.527,00	24,54
	Utang Jangka Pendek Lainnya :						

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Utang Kepada Pihak Ketiga	122.516.075,00	122.516.075,00	534.226.462,00	122.516.075,00	0,00	39,74
	Utang Kepada Pemerintah Provinsi	0,00	7.579.340,00	0,00	0,00	0	-
	Utang Kepada PT. ASKES / BPJS Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Utang Kepada PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	25.528.448.965,00	23.692.132.765,68	62.278.155.078,56	13.460.929.634,34	13.622.160.371,00	19,62
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Utang Dana Talangan Bank Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.528.448.965,00	23.692.132.765,68	62.278.155.078,56	13.460.929.634,34	13.622.160.371,00	19,62
2.3	EKUITAS DANA						
	EKUITAS DANA LANCAR						
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Pendapatan yang ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Cadangan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Cadangan Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Dana yang harus disediakan untuk :						-
	Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar :	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	EKUITAS DANA INVESTASI						
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Diinvestasikan Dalam Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Dana yang harus disediakan untuk :						
	Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi :	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
	JUMLAH EKUITAS DANA :	4.801.509.542.859,94	4.358.700.611.962,82	4.758.976.910.998,07	4.400.881.504.667,81	5.072.665.187.466,27	1,93
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.827.037.991.824,94	4.382.392.744.728,50	4.821.255.066.076,63	4.414.342.434.302,15	5.086.287.347.837,27	1,90

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2023



Aset Pemerintah Kabupaten Garut selama tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,9%. Apabila dirinci untuk masing-masing jenis aset, rata-rata pertumbuhan untuk aset lancar sebesar 11,09%, aset tetap sebesar 6,95 %, dan investasi tumbuh sebesar 9,11 %. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Garut selama periode tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 19,62 %, yang dikontribusikan dari kewajiban jangka pendek.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah yang digambarkan dari APBD, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipergunakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik melalui kebijakan belanja daerah untuk berbagai prioritas pembangunan daerah sesuai sumber daya pendanaan yang tersedia baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah maupun skema transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan menjadi faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Garut periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah selama Periode Tahun Anggaran 2019-2024, terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- b) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan

Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
 - a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - b. Perbaikan basis data perpajakan;
 - c. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - e. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - g. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
 - i. Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/



retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan Pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan;

- j. Modernisasi pelayanan perpajakan;
- k. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD Penghasil;
- l. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
- m. Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah
- n. Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum ;
- o. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.

2) Dana Perimbangan :

- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat *disharing* dengan daerah (PPh Perseorangan, PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak;
- b. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- d. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi;
- e. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan kabupaten lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari provinsi. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Kebijakan Belanja

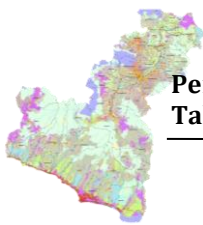
Kebijakan pengelolaan belanja daerah :

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- b. Memenuhi pelaksanaan program pencapaian standar pelayanan minimal dan operasional;
- c. Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. Melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's), pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah, anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji, pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan pemenuhan belanja lainnya yang sudah diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang diaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
- g. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah meliputi :

- a. Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya pinjaman daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang);



- b. Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh kebijakan peningkatan transfer ke dana cadangan dan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah.

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah selama periode Tahun 2019-2023, secara keseluruhan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp. 129.047.109.819 pada tahun 2019 menjadi Rp. 175.366.405.182 pada tahun 2023 dan secara rata-rata meningkat 42,35 %. Setelah ditambah pengeluaran pembiayaan, maka defisit riil anggaran cenderung bertambah.

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut
Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Realisasi Defisit Riil Anggaran				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.794.836.329.500	4.496.835.424.030	4.684.404.923.197	4.626.954.746.948	4.780.493.867.959
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	4.594.611.035.095	4.573.907.976.515	4.649.602.155.581	4.688.455.777.826	4.812.711.649.050
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	28.769.927.922	13.913.000.000	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000
A	Defisit riil	171.455.366.483	-90.985.552.485	23.652.767.616	-76.501.030.498	-44.717.781.091

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2023

Untuk menutup total pengeluaran yang ada, maka defisit riil ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut
Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Realisasi Defisit Riil Anggaran				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	157.817.037.741	331.619.863.724	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	157.817.037.741	331.619.863.724	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	329.272.404.224	240.634.311.241	264.287.078.857	187.786.048.359	143.148.624.091

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2023

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Garut
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023*	
		Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	329,29	100	240,63	100	264,28	100	187,78	100	143,148	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	329,29	100	240,63	100	264,28	100	187,78	100	143,148	100

Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2019 s.d. 2023

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendapatan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan asumsi realisasi pendapatan dan belanja daerah pada periode tahun 2019-2023, maka dilakukan proyeksi untuk pendapatan dan belanja daerah tahun 2024-2026.

A. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Adanya perubahan regulasi seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerbitan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan penyesuaian peraturan di tingkat daerah tentu akan berpengaruh terhadap target PAD untuk tahun anggaran 2025 maupun 2026. Beberapa penyesuaian yang dilakukan selama tahun 2023 atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diantaranya:

1. Penetapan Perda Nomor 3 Tahun 2022 - Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
2. Penetapan Perbup Nomor 13 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Masa Transisi;
3. Penetapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Sektor Kesehatan;

4. Penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
5. Penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Selain itu, sebagai tindaklanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.63-Hukham/2017, ditetapkan pula Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Adapun sebagai upaya tindak lanjut atas Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, rencananya akan dilakukan penyesuaian atas beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- f. Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD *on line*, *e-PAD*, *Tapping Box* serta kerjasama pembayaran *on line* dengan toko modern;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Garut dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;

- j. Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (*Tax Clearance*) yang mengajukan perizinan ke DPMPTSP Kabupaten Garut;
- k. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- l. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.
- m. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal intensifikasi pendapatan Pajak Daerah;
- n. Pengadaan kendaraan pelayanan keliling pajak daerah secara *mobile*;
- o. Penguatan/peningkatan sistem secara *online*;
- p. Mengadakan sensus Pajak daerah;
- q. Kerjasama dengan BPN;
- r. Penyesuaian NJOP;
- s. Peningkatan batas minimal PBB secara bertahap;
- t. Pengelolaan aset daerah secara profesional;
- u. Peningkatan kualitas penyusunan potensi dan rencana pendapatan pajak melalui kerja sama dengan unsur akademis

Sementara itu Pendapatan Transfer Pusat pada tahun 2025-2026 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari transfer pusat bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengelolaan dan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- 2) Peningkatan pengelolaan dan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tabel 3.10
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026

Kode	Uraian	Realisasi		Pertumbuhan (%)	Target 2024	Proyeksi	
		2022	2023			2025	2026
1.	PENDAPATAN	4.626.954.746.948	4.780.493.867.959,00	3,32	4.626.276.404.520	4.678.540.534.348	4.784.808.223.843
1.1	Pendapatan Asli Daerah	486.038.766.410	535.681.310.300,00	10,21	519.625.237.734	903.127.173.922	947.960.028.853
1.1.1	Pajak Daerah	157.569.982.468	173.835.653.663,00	10,32	180.000.000.000	542.600.000.000	569.730.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	15.711.817.595	20.948.150.084,00	33,33	215.856.827.388	230.946.140.560	242.545.741.324
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.044.369.160	7.336.469.580,00	4,15	7.515.950.023	7.515.950.023	7.515.950.023
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	305.712.597.187	333.561.036.973,00	9,11	116.252.460.323	122.065.083.339	128.168.337.506
1.2	Pendapatan Transfer	4.081.264.360.586	4.219.412.786.728,00	3,38	4.091.889.534.786	3.775.413.360.426	3.836.848.194.990
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.413.296.605.794	3.595.898.907.785,00	5,35	3.786.082.401.000	3.579.962.319.255	3.628.512.465.752
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	667.967.754.792	623.513.878.943,00	(6,66)	305.807.133.786	195.451.041.171	208.335.729.238
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	59.651.619.952	25.399.770.931,00	(57,42)	14.761.632.000	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	46.365.278.610	10.507.849.500,00	(77,34)	14.761.632.000	0	0
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.286.341.342	14.891.921.431,00	12,08	-	0	0

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, 2023

B. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD 2025-2026 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain :

- 1) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
- 2) Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan operasional;
- 3) Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
- 4) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Pokok – pokok Pikiran DPRD;
- 5) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
- 7) Memenuhi pelaksanaan program daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, dituangkan dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Target dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022-2026

Kode	Uraian	Realisasi		Target 2024	Pertumbuhan (%)	Proyeksi	
		2022	2023			2025	2026
5	BELANJA	4.688.455.777.826	4.809.766.556.000,00	4.773.238.404.520	2,65	4.718.540.534.348	4.824.808.223.843
5.1	Belanja Operasi	3.228.017.251.870	3.406.485.928.222,00	3.617.740.508.604	5,62	3.545.045.027.684	3.640.177.016.188
5.1.1	Belanja Pegawai	1.678.298.468.729	1.620.978.801.664,00	2.135.655.823.171	(3,24)	2.092.741.599.009	2.148.900.736.110
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.142.669.871.121	1.324.307.932.451,00	980.096.918.420	15,90	960.402.687.542	986.175.284.707
5.1.3	Belanja Bunga					0	0
5.1.4	Belanja Subsidi	951.000.000	1.111.000.000,00	-	16,82	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	380.223.522.021	426.821.073.357,00	483.558.367.013	12,26	473.841.664.569	486.557.299.895
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	25.874.389.999	33.267.120.750,00	18.429.400.000	28,57	18.059.076.564	18.543.695.476
5.2	Belanja Modal	700.943.778.898	680.967.695.485,00	374.080.508.174	(2,85)	366.563.672.077	376.400.481.135
5.2.1	Belanja Modal Tanah	21.374.678.883	17.710.354.017,00	9.549.606.200	(17,14)		
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.797.914.649	164.947.127.598,00	118.780.838.536	42,44		
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.847.397.573	290.110.589.529,00	172.804.578.911	93,60		
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	394.817.632.912	191.233.976.444,00	56.342.070.350	(51,56)		
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.106.154.881	16.965.647.897,00	16.548.414.177	(11,20)		
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		1.111.000.000,00	55.000.000			
5.3	Belanja Tidak Terduga	28.771.620.642	5.907.754.376,00	58.051.096.244	(79,47)	25.000.000.000	25.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	28.771.620.642	5.907.754.376,00	58.051.096.244	(79,47)	25.000.000.000	25.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	730.723.126.416	716.405.177.917,00	723.366.291.498	(1,96)	781.931.834.588	783.230.726.521
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	17.422.666.527	19.333.448.767,00	19.827.720.898	10,97	85.090.075.462	89.350.331.546
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	713.300.459.889	697.071.729.150,00	703.538.570.600	(2,28)	696.841.759.126	693.880.394.975

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2023

Untuk tahun 2025, belanja diproyeksikan mencapai Rp. 4.718.540.534.348,00 meliputi komponen Belanja Operasi sebesar Rp. 3.545.045.027.684,00 Belanja Modal sebesar Rp. 366.563.672.077,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 781.931.834.588,00. Sedangkan untuk tahun 2026, belanja diproyeksikan mencapai Rp. 4.824.808.223.843,00 meliputi komponen Belanja Operasi sebesar Rp. 3.640.177.016.188,00 Belanja Modal sebesar Rp. 3.640.177.016.188,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 783.230.726.521,00.

Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025-2026, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2025-2026 meliputi :

- a) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- b) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025-2026 adalah:

Tabel 3.12
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026

Kode	Uraian	Realisasi		Target 2024	Pertumbuhan (%)	Proyeksi	
		2022	2023			2025	2026
6.	PEMBIAYAAN						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	264.287.078.857	187.866.405.182	159.962.000.000	(28,92)	50.000.000.000	50.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	264.287.078.857	187.866.405.182	159.962.000.000	(28,92)	50.000.000.000	50.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah						
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	14.999.999.620	12.500.000.000	13.000.000.000	(16,67)	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	14.999.999.620	12.500.000.000	13.000.000.000	(16,67)	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo						
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
	Pembiayaan Neto	249.287.079.237	175.366.405.182	146.962.000.000	-	-	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	187.786.048.359	143.148.624.091,00	0	(23,77)	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2023

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Kabupaten Garut periode tahun 2021-2024 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2021-2024

Tahun	SiLPA (Rp)
2022	187.786.048.359
2023	143.148.624.091
2024	159.962.000.000
2025	50.000.000.000
2026	50.000.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2023

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Pengeluaran wajib dan mengikat merupakan kegiatan yang diatur secara khusus melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, proyeksi belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan belanja 5 tahun sebelumnya yaitu 2019-2024.

c. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, merupakan gambaran kemampuan pendanaan prioritas pembangunan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Realisasi		Target 2024	Pertumbuhan (%)	Proyeksi	
		2022	2023			2025	2026
1	Pendapatan	4.626.954.746.948	4.780.493.867.959	4.626.276.404.520	3,32	4.756.049.685.729	4.864.248.653.412
2	Pencairan cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	264.287.078.857	187.866.405.182	159.962.000.000	(28,92)	50.000.000.000	50.000.000.000
	Total Penerimaan	4.891.241.825.805	4.968.360.273.141	4.786.238.404.520	0,46	4.806.049.685.729	4.914.248.653.412
	Dikurangi:						
4	Belanja Pegawai	1.678.298.468.729	1.623.923.894.714	2.135.655.823.171	-3,24	2.092.741.599.009	2.148.900.736.110
5	Pengeluaran Pembiayaan	14.999.999.620	12.500.000.000	13.000.000.000	-16,67	10.000.000.000	10.000.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	3.197.943.357.456	3.331.936.378.427	2.637.582.581.349	2,57	2.703.308.086.720	2.755.347.917.302

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2023

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dialokasikan kedalam 3 (tiga) kelompok prioritas alokasi yaitu :

1. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Uraian	Proyeksi (Milyar Rupiah)		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.840,60	3.056,99	3.302,29
Prioritas I	882,79	933,90	1.001,98
Belanja langsung wajib dan mengikat	166,28	173,05	180,09
SPM	716,51	760,85	821,89
Prioritas II	1.957,81	2.123,09	2.300,31

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2021

Kerangka pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, disamping dari jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang ada, juga mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat terutama terkait pemenuhan Program Janji Gubernur Jawa Barat, serta Prioritas Pembangunan Nasional.

3.3.3. Sumber Pendanaan Lainnya

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut, selain bersumber dari APBD Kabupaten Garut dan APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) berupa Tugas

Pembantuan dan Urusan Bersama serta program kemitraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tugas pembantuan yang bersumber dari APBN adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Pengalokasian dana APBN dalam bentuk dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Selama periode tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Garut mendapatkan Tugas Pembantuan dari Kementerian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional di daerah.

Tabel 3.17
Pendanaan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

Tahun	Jenis APBN		Jumlah APBN
	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama	
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

Sumber : Laporan APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Garut

b. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah dan menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, lingkungan, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, dan program lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan data Tim Fasilitas CSR Jawa Barat, rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Perusahaan Mitra CSR di Kabupaten Garut Tahun 2019 s.d 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di
Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi	Perusahaan
2019	1.664.248.110	Perumda BPR Garut
		PT Bio Farma (Persero)
		PT Indonesia Power UP Kamojang
		PT Pos Indonesia (Persero)
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
		Perumda BPR Garut
		PT Bio Farma (Persero)
2020	323.248.351	BIJ
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
2021	4.643.332.492	Dexa Medica Groups
		Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Indocement Tunggul Prakarsa (Palimanan-Cirebon) Tbk
		PT Jasa Sarana
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat

Tahun	Realisasi	Perusahaan
2022	3.768.171.000	PT Pos Indonesia (Persero)
		PT Tirta Gemah Ripah
		Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Badjatex
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pupuk Kujang Cikampek
		PT TD Automotive Compressor Indonesia
		Star Energy Group
2023	4.154.010.000	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Bank Jabar Banten Syariah
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pupuk Kujang Cikampek
		Star Energy Group
JUMLAH	14.553.009.953	

Sumber : Tim Fasilitas CSR Jawa Barat

c. Kolaborasi APBD Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Garut dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat dalam kerangka mewujudkan visi “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga antara provinsi dan kabupaten dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;

- c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*).
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment/AP* Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu:

- 1) infrastruktur transportasi;
- 2) infrastruktur jalan;
- 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- 4) infrastruktur air minum;
- 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;

- 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan;
- 10) infrastruktur konservasi energi;
- 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan;
- 12) infrastruktur kawasan;
- 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center);
- 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya;
- 16) infrastruktur kesehatan;
- 17) infrastruktur pemasyarakatan;
- 18) infrastruktur perumahan rakyat;
- 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/ *technopark*, kesehatan).

BAB IV

PERMASALAHAN

DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam penyusunan RPD dilakukan berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Analisis isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan isu strategis perangkat daerah, sehingga harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab II yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan berat yang harus di hadapi Kabupaten Garut. Masih tingginya angka kemiskinan pada tahun 2023 yang berada pada angka 9,77% masih belum mampu mencapai target yang telah di tentukan pada RPJMD Tahun 2019-2024, baru dapat mencapai 73,36% dari target yang telah ditetapkan. Dari segi jumlah penduduk miskin Kabupaten Garut masih memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak yakni 260.480 jiwa realisasi ini hanya mampu mencapai 76,36% target pada tahun 2023. Garis kemiskinan (GRK) Kabupaten Garut masih menjadi yang terendah dibandingkan Kabupaten / Kota lainnya di Jawa Barat yakni berada pada nilai Rp 367.681,- per kapita per bulan pada tahun 2023

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada tahun 2024. Kabupaten Garut memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang perlu di intervensi sejumlah lebih dari 82,17 ribu penduduk (berdasarkan data BPS).

Dalam bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut Tahun 2023 masih berada pada angka 7,33% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 hanya mengalami penurunan sebesar 0,27% saja (7,6%).

2. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk berkehidupan layak yang memiliki target 100% disetiap jenis pelayanan. Sampai tahun 2022, Capaian pelayanan dasar SPM Pendidikan masih dibawah standar yang ditetapkan. Seluruh jenis pelayanan pada bidang pendidikan seharusnya mencapai 100 tidak dapat mencapai target tersebut, diantaranya jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebesar 46,32% hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pada dimensi penghitungan peserta didik terhadap jumlah penduduk rentang usia

peserta didik yang awalnya peserta didik terhadap jumlah penduduk 0-6 tahun menjadi peserta didik terhadap jumlah penduduk 3-6 tahun, kemudian untuk indikator jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru dapat mencapai 81,68% dan untuk indikator jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/SMP) sebesar 97,50 %.

Mayoritas Capaian pelayanan dasar SPM kesehatan pada tahun 2022 belum mampu mencapai target, kisaran pencapaian pelayanan dasar berada pada rentang 80 % hingga 90 % dan terdapat satu jenis pelayanan yakni pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang hanya mampu mencapai 78,89% hal ini disebabkan target cakupan lansia tinggi, belum mampu diimbangi oleh dukungan lintas program dan lintas sektor, dukungan sarana dan kebijakan yang kurang optimal untuk mendukung kegiatan lansia serta SDM yang masih kurang dalam pengelolaan lansia. Permasalahan kesehatan lainnya yakni masih tingginya angka kematian bayi yang justru semakin meningkat pada tahun 2022 yakni mencapai 334 kasus kematian bahkan jika dibandingkan dengan kejadian di tahun 2021 telah bertambah lebih dari 100 kasus kematian sama dengan angka kematian balita dan neonatal yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Masih tingginya tingkat prevalensi tuberkulosis dan tingkat kematian akibat tuberkulosis menjadi suatu permasalahan yang harus memperoleh perhatian yang serius.

Capaian pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum pada tahun 2023, masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni cakupan sanitasi layak yang baru mencapai 68,11 % Kabupaten Garut masih menghadapi permasalahan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah yang masih rendah dan belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan dan cakupan air minum layak yang baru mampu mencapai 90,04 % masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan belum mampunya indikator cakupan air minum layak mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

Persoalan lain terkait dengan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang yakni persentase kemantapan jalan kabupaten yang baru mencapai 55,25% hal ini terjadi akibat kelengkapan jalan seperti drainase yang masih belum optimal, pemeliharaan jalan dan masih rendahnya kualitas konstruksi, permasalahan jalan yang belum mantap masih ditemui di area perkotaan dan perdesaan. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya di wilayah perkotaan mengakibatkan genangan hingga terjadinya banjir di wilayah perkotaan, hal ini diakibatkan oleh pembangunan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Pembangunan yang tidak diiringi oleh perbaikan saluran drainase, pengelolaan sampah serta keterbangunan ruang terbuka hijau menjadikan aliran *run off* bahkan banjir tidak dapat terhindarkan ketika terjadinya hujan.

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut yakni 23.071 unit dan kawasan kumuh perkotaan maupun perdesaan (86,75 Ha) serta kawasan permukiman yang masih belum dilengkapi dengan PSU. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau juga masih rendah hanya mencapai 12,3%.

Permasalahan sosial yang masih di hadapi oleh Kabupaten Garut yakni Program perlindungan sosial khususnya program jaminan kesehatan nasional (JKN) belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin maupun masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Validitas data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Garut masih belum optimal.

3. Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya

Kabupaten Garut berada di peringkat 25 atau 2 terbawah dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat indeks pengeluaran Kabupaten Garut berada pada nilai 65,83 pada tahun 2023, berada jauh dari capaian Provinsi Jawa Barat (74,92) dan Nasional (74,45). Pencapaian pengeluaran per kapita tahun 2023 sebesar Rp 8,685 juta. Capaian

pengeluaran per kapita tahun 2023 masih terpaut Rp 3,10 juta dari capaian Jawa Barat (Rp 11,695 juta) dan masih terpaut Rp 3,214 juta dari capaian Nasional (Rp 11,899 juta).

Meskipun sektor pertanian menjadi kontributor tertinggi terhadap PDRB Lapangan usaha Kabupaten Garut yakni sebesar 37,35% namun masih ditemui berbagai permasalahan diantaranya nilai tambah pertanian pada level petani masih rendah, harga komoditas pertanian di Kabupaten Garut tidak stabil dan kurangnya kepastian pasar produk pertanian dan konsumsi produk pertanian oleh masyarakat lokal masih cenderung kurang. Masih rendahnya nilai tambah pada sektor perikanan dan peternakan diantaranya dilatarbelakangi oleh usaha perikanan dan peternakan masih dikelola sebagai usaha sampingan, intensifikasi budidaya mina padi belum dikelola dengan baik, masih rendahnya akses permodalan untuk kelompok peternak, hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak.

Nilai tambah ekonomi sektor pariwisata masih terbentur dengan karakteristik atraksi pariwisata yang masih homogen, kurangnya promosi pariwisata, aksesibilitas relatif kurang memadai, durasi tinggal wisatawan masih singkat, dan moda transportasi untuk mencapai objek wisata masih minim, serta masih minimnya sarana prasarana pariwisata dan pemahaman wisata di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.

4. Pembangunan antar wilayah belum merata

Dengan jumlah wilayah mencapai 3.107,05 km², dan secara administratif terbagi menjadi 42 kecamatan. Dalam bidang infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2023 mencapai 55,25% dengan kondisi jalan mantap sepanjang 2.155,86 Km jalan rusak ringan sepanjang 745,66 Km dan rusak berat 1.000,48 Km dan mayoritas panjang jalan rusak baik ringan maupun berat di dominasi oleh jalan desa, berdasarkan data pada tahun 2023 terdapat 1000,48 Km jalan desa dengan kondisi rusak berat dan 709,85 dengan kondisi rusak ringan.

Cakupan rumah tinggal bersanitasi layak sebesar 68,11 dan cakupan air minum layak sebesar 90. Belum terlayannya seluruh luas areal pertanian oleh irigasi teknis di Kabupaten Garut baru mencapai 83,43 %.

Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas secara merata untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah, terlebih lagi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, strategi untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan salah satunya adalah melalui penyediaan infrastruktur daerah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

5. Tingginya angka kriminalitas, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lunturnya kultur sosial.

Pada tahun 2022 jumlah tindak kriminal sebanyak 605 kasus, naik 89 kasus dibandingkan kondisi tahun 2021 sebanyak 516 kasus. Angka kekerasan pada perempuan di Kabupaten Garut terus bertambah setiap tahun nya, pada tahun 2022 angka kekerasan pada perempuan mencapai 73 kasus naik 10 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2021, kekerasan terhadap perempuan di dominasi oleh kekerasan seksual yakni 47 kasus, dan untuk angka kekerasan terhadap anak laki-laki terdapat 1 kasus kekerasan psikis, sedangkan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat 1 korban perempuan pada tahun 2022 dan 4 korban pada tahun 2021.

Seiring perkembangan globalisasi, telah mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Globalisasi telah membawa dampak positif pada kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, maupun ekonomi masyarakat. Namun pada sisi lain, terjadi pula dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan mulai pudarnya budaya Indonesia dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Terjadi pula dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan mulai pudarnya budaya Indonesia dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Seiring masuknya budaya asing, beberapa kasus dampak negatif perubahan sosial budaya masyarakat diantaranya menurunnya budaya gotong royong yang saat ini mulai luntur digantikan dengan budaya “individualis”, maraknya tawuran, kekerasan, dan rusaknya moral generasi muda. Meningkatnya persaingan hidup dan menurunnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, mendorong menurunnya nilai kemanusiaan gotong royong, rasa kesetiakawanan sosial dan meningkatnya kesenjangan sosial.

Kemudahan akses ke dalam berbagai platform media sosial dengan menggunakan handphone maupun komputer, membuat berbagai tayangan atau konten yang memberikan dampak buruk mudah sekali diakses, pembatasan dan pengawasan penggunaan media sosial belum dilaksanakan dengan baik utamanya pembatasan bagi pengguna di bawah umur. Maraknya berbagai kasus perundungan juga tidak dapat dihindarkan.

6. Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan mencapai 66,89 poin, capaian ini menurun cukup signifikan dari capaian pada tahun 2022 yang mencapai 70,75 hal ini menunjukkan terdapat penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Garut pada Indeks Kualitas Air (IKA) 47,62. Sementara itu, dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan

kinerja pelayanan pengelolaan persampahan dihadapkan pada permasalahan Tingkat Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang baru mencapai 31,48%. Dalam hal pengelolaan sampah ini, Kabupaten Garut baru memiliki 1 (satu) TPA yang beroperasi yaitu TPA Pasir Bajing yang berada di Kecamatan Banyuresmi baru 9 Kecamatan di wilayah perkotaan yang terlayani oleh penanganan persampahan, dan sampah yang berasal dari pasar-pasar di wilayah garut selatan dan utara masuk di TPA Pasir Bajing. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle), terbatasnya kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan, perlunya penataan areal TPA Pasir Bajing serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2023 telah mencapai 83,92%. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pemanfaatan fungsi tata ruang adalah seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perizinan.

Sementara itu, Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah (terdiri

dari kawasan yang berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah dengan luas kurang lebih 37.629 hektar dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dengan luas kurang lebih 7.207 hektar, terletak di seluruh kecamatan), kawasan rawan bencana gunung api (terdiri dari KRB III Bahaya Jatuhan dan Bahaya Aliran dengan luas kurang lebih 1.090 hektar, KRB II Bahaya Aliran yang berada pada KRB II Bahaya Jatuhan dengan luas kurang lebih 493 hektar, dan KRB I Bahaya Aliran dengan luas kurang lebih 1.384 hektar), dan kawasan rawan bencana banjir (terdiri dari kawasan terdampak banjir bandang dengan luas kurang lebih 63 hektar).

7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 nilai indeks Reformasi Birokrasi cenderung mengalami penurunan 0,49 poin menjadi 68,50 Poin. Berikut merupakan catatan pada evaluasi RB tahun 2023 meliputi RB General dan RB Tematik :

1) RB General

- a) Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023);
- b) Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama;
- c) Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai;
- d) Terdapat Sasaran strategis dan indikator kinerjanya tidak berorientasi hasil, Terdapat Indikator Program, Kegiatan tidak berorientasi hasil, Indikator output pada Sub Kegiatan tidak tepat, Implementasi belum sesuai dengan kebijakan;
- e) Kinerja penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional, strategis OPD dan Strategis Pemda secara memadai;
- f) Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai, Struktur MR belum berjalan optimal, Efektivitas RTP belum dilakukan penilaian Pembelajaran anti

korupsi belum dilaksanakan secara terjadwal dan belum dilakukan di seluruh OPD, Laporan Audit Investigatif belum ada perbaikan pengendalian, Identifikasi Risiko Kecurangan belum;

- g) Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 0% (Cukup) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 5 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 3 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit yang diusulkan: 5 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Informasi lebih rinci terkait catatan setiap unit kerja dapat dilihat pada LHE ZI Instansi Pemerintah;
- h) Penjenjangan/ cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional;
- i) Pelaksanaan Reformasi Hukum sangat baik;

2) RB Tematik

- a) Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan;
- b) Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
- c) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah;
- d) Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi;
- e) Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.
- f) Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
- g) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah;

- h) Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi;
- i) Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.

8. Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah.

Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap perekonomian yang menyebabkan pengusaha menahan untuk berinvestasi dan lebih fokus pada mempertahankan usahanya. Tercatat realisasi investasi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yakni berada pada angka Rp 1,165 trilyun. Belum tersedianya Rencana detil tata ruang yang telah memiliki aspek legal, iklim investasi yang kurang kondusif, belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi serta belum adanya detail kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi.

4.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya:

1. Pertumbuhan PDRB Masih Lambat

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022 meningkat sebesar 5,08 % selama periode 2020-2022, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, yang terlihat dari besarnya perannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 37,38 % pada tahun 2022 dan mengalami penurunan 0,03 % dari Tahun 2021 sebesar 37,35 %. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian.

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2022 selain sektor pertanian, adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 18,46% dan sektor industri pengolahan sebesar 8,58 %.

Pada periode 2022, kinerja perekonomian Kabupaten Garut sebesar 5,08% masih berada dibawah capaian LPE Provinsi Jawa Barat (5,45%) dan Nasional (5,3%).

2. PDRB Perkapita Masih Rendah

Pada tahun 2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berada pada nilai Rp 25,35 juta pada tahun 2022. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata. dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, berada di peringkat 22 dari 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat sama dengan peringkat dari tahun sebelumnya di bawah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Barat (Rp. 49,038 juta) PDRB Per Kapita Kabupaten Garut masih jauh tertinggal (Rp 25,35 juta) pada tahun 2022.

3. Masih ditemui Ketimpangan

Pencapaian gini rasio tahun 2022 berada pada level menengah dengan besaran 0,302 dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,417 dan Nasional sebesar 0,381. Pada tahun 2022, capaian indeks gini dibandingkan kabupaten dan kota di Jawa Barat berada pada tahun 2022 Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 di bawah kabupaten Pangandaran dan kabupaten Indramayu. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Namun demikian hal ini juga menggambarkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan wilayah

serta belum terlindunginya pekerja informal dimana sebagian besar pekerjaan masyarakat di Kabupaten Garut berada pada sektor pertanian tercatat sepanjang tahun 2022 terdapat 345.547 pekerja.

4. Penduduk Miskin Masih Tinggi

Pada tahun 2023, Garis Kemiskinan di Kabupaten Garut mengalami terus mengalami peningkatan semenjak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan Rp. 32.547 per kapita per bulan menjadi Rp. 367.681 per kapita per bulan. Meskipun mengalami penurunan pada persentase penduduk miskin pada tahun 2022 yakni berada pada angka 9,77% nyatanya angka ini masih sangat tinggi dan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sama halnya dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut yang meskipun sudah turun namun jumlah nya masih banyak yakni tercatat 260.480 jiwa merupakan penduduk miskin di Kabupaten Garut.

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,77% pada tahun 2023, berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 7,62 % dan Nasional sebesar 9,36 %. Hal ini perlu menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Garut. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut berada dalam urutan 10 besar kabupaten/kota persentase penduduk miskin terbanyak.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masih Rendah

Status pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 68,11. Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak yang diukur dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli. Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai IPM sebesar 68,11 poin Kabupaten Garut masih berada pada peringkat ke-25 sama

dengan capaian pada tahun sebelumnya, Kabupaten Garut masih menjadi Kabupaten dengan capaian IPM 3 terendah di Provinsi Jawa Barat dan terpaut cukup jauh dengan IPM Jawa Barat dan Nasional.

Dari dimensi pendidikan, pencapaian Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS tahun 2023 sebesar 7,84 tahun atau setara dengan kelas VII hanya meningkat 0,01. Pencapaian RLS tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yaitu masing masing terpaut 0,99 tahun dan 0,93 tahun. Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai RLS berada pada peringkat ke-21 jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hal inilah yang menyebabkan gap capaian RLS Kabupaten Garut dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional semakin besar setiap tahunnya.

Sedangkan pencapaian Harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2023 sebesar 12,16 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,16 tahun atau hampir setara lulusan SMA. Indeks Pendidikan Kabupaten Garut tahun 2023 baru mampu mencapai 59,91 poin. Capaian HLS tahun 2023 masih terpaut 0,52 tahun dari HLS Jawa Barat (12,68 tahun) dan masih terpaut 0,99 tahun dari HLS Nasional (13,15 tahun). Kondisi tahun 2023, capaian HLS berada pada peringkat ke-24 jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jawa Barat, peringkat HLS Kabupaten Garut menurun 2 peringkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada peringkat 22.

Dari dimensi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir (AHH) pada tahun 2023 sebesar 72,07 tahun. Selama periode 2019-2023, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 1,19%. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Dari sisi nilai Indeks Kesehatan sebesar 80,11 poin berada pada peringkat ke-20 sama dengan capaian pada tahun 2022.

Dari dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita penduduk Garut tahun 2023 mencapai Rp. 8,685 juta per kapita per tahun. Namun demikian, capaian pengeluaran per kapita tahun 2023 masih terpaut Rp 3,01 juta dari capaian Jawa Barat (Rp 11,695 juta) dan masih terpaut Rp 3,214 juta dari capaian Nasional (Rp 11,899 juta). Kondisi tahun 2023, dari sisi nilai pengeluaran per kapita berada pada peringkat ke-25. Kondisi tahun 2022, dari sisi nilai Indeks Pengeluaran berada pada peringkat ke-25. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut masih berada di peringkat 3 terbawah jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Jawa Barat.

6. Pengendalian Inflasi belum optimal

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pada tahun 2022, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya sebesar 6,65 persen, dengan IHK sebesar 111,78 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 4,86 persen dengan IHK sebesar 110,32, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang kurang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 6,65%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 5,48%. Kondisi inflasi pada tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga gangguan pasokan domestik akibat cuaca. Hal ini menyebabkan kenaikan inflasi hampir di seluruh wilayah termasuk inflasi Jawa Barat sebesar 6,04% dan Nasional sebesar 5,51%. Sedangkan pada tahun 2023 inflasi mencapai 2,84 %.

4.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Identifikasi permasalahan pada Aspek Daya Saing Daerah diantaranya :

1. **Pengeluaran konsumsi pangan dan konsumsi non pangan rumah tangga per kapita masih rendah**

Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp. 858.078 yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 522.212 (60,86%) dan pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 335.866 (39,14%). Jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut termasuk ke dalam 3 (tiga) terendah dalam pengeluaran konsumsi pangan dan konsumsi non pangan rumah tangga per kapita.

2. **Angka Kriminalitas masih tinggi**

Pada tahun 2022 jumlah tindak kriminal sebanyak 605 kasus, naik 89 kasus dibandingkan kondisi tahun 2021 sebanyak 516 kasus. Apabila jumlah kasus kriminal tersebut dibandingkan terhadap jumlah penduduk maka Angka Kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 4,549 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 4 tindak kriminal, kondisi tersebut meningkat dari tahun 2020 sebanyak 1,98 kasus kriminal per 10.000 penduduk. Untuk mendukung kondisi keamanan masyarakat, maka perlu terus didorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.1.4 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut

Dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Garut dilaksanakan pula analisis terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1.0 1	Pendidikan					
	Aksesibilitas, mutu dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah masih belum optimal/rendah	1	Masih belum memadainya jumlah, kompetensi dan sebaran tenaga pendidik	1	Terbatasnya jumlah guru yang mengajar sesuai kompetensi	Optimalisasi akses, mutu dan tata kelola pendidikan
				2	Rasio guru dan murid masih belum sesuai standar	
				3	Belum meratanya distribusi guru	
		2	Belum optimalnya pencapaian SPM Pendidikan	1	Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah	
				2	Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah	
		3	Keterbatasan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan	1	Sebaran fasilitas pendidikan belum merata	
				2	Daya tampung sekolah terbatas	
				3	Tingkat kemiskinan masyarakat	
		1.0 2	Kesehatan			

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
	Derajat Kesehatan masyarakat masih rendah	1	Tingginya angka AKB dan AKI	1	Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sesuai standar	Peningkatan akses layanan kesehatan ibu hamil dan bayi
				2	Belum optimalnya pengelolaan Puskesmas mampu PONED	
		2	Tingginya angka prevalensi stunting	1	Persentase balita gizi buruk masih tinggi (0,094) dan Prevalensi balita gizi kurang masih tinggi (4,24)	Peningkatan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu prima
				2	Masih belum optimalnya kolaborasi dengan SKPD terkait	
		3	Masih kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat	1	Keterbatasan sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, anggaran) terkait STBM	Pemberdayaan masyarakat
				2	Masih belum optimalnya kolaborasi dengan SKPD terkait	
		4	Peningkatan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular	1	Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Multiple Burden Disease
				2	Perubahan gaya hidup	
				3	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi	Aksesibilitas Pelayanan kesehatan sesuai standar
				4	Ketersediaan vaksin masih belum optimal	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
	Pelayanan Kesehatan belum memadai	1	Kuantitas SDM Kesehatan belum sesuai dengan standar	1	Masih kurang serasinya antara kebutuhan dengan pengadaan berbagai jenis SDM Kesehatan	Ketersediaan 9 jenis SDM Kesehatan prioritas terbatas
				2	Kurangnya Pemerataan dalam distribusi SDM kesehatan	
		2	Belum optimalnya kompetensi Tenaga Kesehatan	1	Masih rendahnya anggaran yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan dan non kesehatan	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan masih kurang
		3	Belum terpenuhinya aspek penerima layanan dan aspek mutu minimal layanan dasar pada SPM	1	Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung capaian mutu layanan dasar SPM	Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal
				2	Belum optimalnya capaian aspek penerima layanan dasar	
		4	Belum Optimalnya Edukasi dan Pengawasan Keamanan pada Obat dan Makanan	1	terbatasnya Sumber daya baik SDM , Alat dan Anggaran terkait pengawasan obat dan makanan	Keamanan Obat dan Makanan
		5	Fragmentasi data; Kesulitan dalam manajemn dan keamanan	1	Masil belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan di tingkat puskesmas dan perangkat daerah	Transformasi Teknologi Kesehatan

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		6	Pembiayaan kesehatan yang tidak memadai	1	Keterbatasan sumber daya (anggaran)	Jaminan Kesehatan Semesta
				2	Belum semua Masyarakat Miskin sebagai peserta program JKN	
1.0 3	Pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah dan pengendalian penataan ruang	1	Rendahnya Kualitas dan kapasitas jalan / kemantapan jalan belum optimal (51,42%)	1	Kerusakan kembali jalan akibat bencana alam dan/atau habisnya umur rencana jalan	Konektivitas antar wilayah dan kemantapan jalan
				2	Kelengkapan jalan seperti drainase belum tersedia dan/ atau belum berfungsi secara optimal pada seluruh ruas jalan	
				3	pemeliharaan jalan belum dilakukan secara menyeluruh	
	2	Masih rendahnya dukungan sektor irigasi	1	Kualitas konstruksi, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Dampak pengelolaan irigasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian	
			2	Kinerja OP irigasi belum maksimal		
			3	Ketersediaan air (debit air andalan) semakin menurun		

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				4	Pengendalian ruang yang masih rendah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian	
				5	Masyarakat petani pemakai air belum dilibatkan secara optimal dalam pengelolaan jaringan irigasi	
		3	Tingkat pengelolaan air minum masih rendah	1	Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat, keterbatasan/ ketersediaan air yang semakin menurun, belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan pasca pembangunan, perlindungan sumber-sumber air belum dilakukan secara maksimal	Pemenuhan layanan kebutuhan air minum dengan target <i>universal acces</i> sebesar 100%
		4	Sanitasi layak bagi masyarakat belum optimal	1	Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat (angka BABS masih tinggi), pengelolaan pasca pembangunan belum dilakukan, masih belum dilakukan pengelolaan air limbah berskala kawasan, belum terdapat unit-unit kerja khusus dalam pengelolaan air limbah	Pemenuhan layanan pengolahan air limbah domestik dengan target <i>universal acces</i> sebesar 100%

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		5	Genangan air dan Banjir di kawasan perkotaan dan permukiman	1	Kapasitas drainase yang sudah tidak sesuai kondisi debit air akibat <i>run off</i> pada kawasan terbangun semakin tinggi, kawasan/daerah resapan air semakin sempit, masterplan pengendalian banjir belum update secara berkala dan penanganan (rehabilitasi atau pembangunan) sistem drainase belum dilakukan secara menyeluruh baru dilakukan per bagian-bagian (parsial)	Optimalisasi pengelolaan sistem drainase
1.0 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Kualitas kawasan perumahan dan permukiman masih rendah	1	Masih banyaknya rumah tidak layak huni	1	Taraf hidup masyarakat di Kabupaten Garut masih rendah	Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
		2	Rendahnya kualitas lingkungan permukiman	1	Kebijakan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal	
				2	Semakin tinggi pertumbuhan penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				3	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan pasca konstruksi setelah serah terima dilakukan	
				4	Adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, atau antar kelompok masyarakat	
1.0 5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat					
	Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda dan perkara yang masih rendah	1	Masih terdapat banyak kasus pelanggaran Perda dan perkara di lingkungan masyarakat	1	Belum <i>intensnya</i> pelaksanaan patroli keamanan dan ketertiban ke seluruh jangkauan wilayah	Optimalisasi penegakan perda dan perkara

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Masih banyaknya kasus penyakit masyarakat	1 Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya	1 Belum optimalnya media sosialisasi penegakkan perda dan perkara	Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Rasio Sumber daya Satpol PP dilihat dari segi kualitas dan kuantitas belum sebanding dengan jumlah penduduk;	1 Belum optimalnya pengamanan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	1 Keterbatasan jumlah kuantitas dan kualitas SDM serta belum adanya penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam mengatasi keterbatasan tersebut	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		2	Belum adanya regulasi khusus terkait kebijakan kepegawaian anggota SATPOL PP yang berstatus non PNS (TKK & TKS)	1	Masih banyaknya anggota SATPOL PP yang berstatus non PNS (TKK & TKS)	
	Belum optimalnya penegakkan trantibum yang beririsan antara tugas SATPOL PP dengan instansi lainnya	1	Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	1	Belum adanya SOP mengenai keterkaitan pelaksanaan penegakan trantibum yang bercrosscutting antara tusi SATPOL PP dengan instansi lainnya	Optimalisasi koordinasi dalam penegakkan trantibum antarstakehol der terkait
	Belum optimalnya pencegahan dan penanganan bencana serta kebakaran	1	Masih tingginya resiko bencana di Kab. Garut	1	Karakteristik geografis dan geologis Kab. Garut yang memiliki kerentanan tinggi terhadap resiko bencana	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kejadian bencana serta kebakaran
2				Keterbatasan dalam penyediaan peralatan dan alat penanggulangan bencana yang dapat menghambat respon cepat dan efektif		
3				Belum optimalnya sistem peringatan dini		
2		Belum optimalnya pendekatan pentaheliks dalam penvelenggaraan	1	Kurangnya Integrasi Informasi dan Komunikasi dalam penanganan		

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		penanggulangan bencana		bencana antarstakeholder
			2	Belum optimalnya penggunaan dana desa dan sumber pendanaan lainnya dalam penanggulangan bencana
		3 Belum Optimalnya Pendidikan Kesiapsiagaan bencana	1	Pendidikan dan Kesadaran Kesiapsiagaan bencana dengan keterlibatan langsung masyarakat belum optimal
			2	Kurang menyeluruhnya pendidikan kesiapsiagaan bencana yang disebabkan karena penyesuaian dengan kapasitas anggaran
		4 Belum optimalnya sistem informasi kebencanaan	1	Terdapat beberapa aplikasi informasi kebencanaan tetapi terpisah dalam pengaksesan nya
			2	Belum terintegrasinya sistem informasi kebencanaan
		5 Belum optimalnya manajemen pra bencana	1	Belum tersedianya dokumen kebencanaan baik data rawan bencana maupun peta rawan bencana berdasarkan jenis bencana
		6 Belum optimalnya penanganan	1	Kurangnya koordinasi dan kolaborasi di

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		pasca bencana di 5 sektor	1 antara sektor-sektor terkait	
			2 Belum optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	
		7 Belum tercapainya respon cepat pemadam kebakaran	1 Jarak tempuh/jangkauan dari pos pemadam ke kejadian kebakaran	
			2 Belum optimalnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar)	
		8 Masih rendahnya kapasitas/ pengetahuan/ kemampuan masyarakat dalam upaya penanganan bencana kebakaran	1 Belum optimalnya penyuluhan/ sosialisasi dan pembentukan relawan kebakaran (Redkar) di lingkungan masyarakat	
			2 Kurangnya pendidikan, sumber daya, akses terhadap peralatan keamanan, serta keterbatasan partisipasi komunitas dan dukungan pemerintah	
		9 Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi kebakaran terpadu (SIKARDU) dalam pemadam kebakaran	1 Kurangnya Fleksibilitas dan Kontrol Internal terkait SIKARDU, biaya berkala cukup tinggi serta Kurangnya Kendali terhadap Pembaruan dan Peningkatan Sistem	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				2	Otoritas pengelolaan sistem masih dimiliki oleh pihak ke 3 dan perlu dilakukan pembayaran secara berkala	
		10	Belum optimalnya pemenuhan serta pemeliharaan alat kelengkapan pemadam kebakaran	1	Masih kurangnya sarana prasarana yang berkaitan dengan alat-alat pemadam/ alat pelindung diri & bahan bakar pada saat operasional (mobilitas tinggi) serta pemeliharaan unit	
				2	Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	
1.0 6	Sosial					
	Kemiskinan/ PMKS atau PPKS dan PSKS	1	Tingginya jumlah penduduk miskin dan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS)	1	Adanya kesenjangan sosial ekonomi yang besar pada penduduk miskin dan kelompok rentan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin dan kelompok rentan.	Penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS)
		1	Penurunan kualitas layanan sosial	1	Keterbatasan sumber daya, termasuk dana, personel, dan fasilitas	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
2.0 1	Tenaga Kerja			
		Masih banyak LPK yang belum melaksanakan Akreditasi serta terbatasnya bantuan pelatihan untuk Masyarakat miskin yang diselenggarakan di LPK	Pelaksanaan Pembinaan LPK melalui bimtek Akreditasi LPK, Pemberian Program Pelatihan LPK sesuai kejuruan untuk masyarakat miskin	Akreditasi LPK dan pelatihan LPK untuk masyarakat miskin
	Masih rendahnya pencari kerja yang bekerja	Keterbatasan peluang pekerjaan di sektor formal dan informal	Permodalan usaha dan fasilitas dan peralatan pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri	Peluang dan permodalan usaha, serta upgrade skill usaha
			Kurangnya mendapatkan pembinaan dan pelatihan bagi purna PMI	
		Tidak seimbangnya antara jumlah kelulusan dengan peluang kesempatan kerja	1 Jurusan kelulusan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja,	Ketidakseimbangan kesempatan kerja dan jumlah lulusan
			2 Pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	
		Rendahnya pencari kerja yang bekerja di luar kabupaten	3 Rendahnya keberanian pencari kerja untuk bekerja di luar kabupaten	Ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kesempatan kerja

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			Kurangnya informasi terkait peluang kesempatan kerja ke Luar Negeri	Pemahaman terhadap pekerjaan di luar negeri
			Rendahnya pemahaman pencari kerja terkait prosedur bekerja di Luar Negeri	
	Kesadaran satuan pendidikan untuk mendirikan BKK masih rendah, Kurangnya memahami Tugas Pokok dan Fungsi BKK	Kurang optimalnya dukungan dari kepala satuan pendidikan atas pendirian BKK di sekolahnya masing-masing, Sarana dan prasarana BKK kurang memadai, Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Instansi terkait terhadap kinerja BKK	Keinginan dan kesadaran dari Satuan Pendidikan untuk mendirikan BKK harus didorong dan ditingkatkan	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Masih kurangnya kompetensi dan keahlian tenaga kerja di Kabupaten Garut yang siap masuk ke dunia kerja sehingga beberapa jabatan tertentu yang berada di level middle manajemen sampai top manajemen di perusahaan besar ditempati oleh tenaga kerja dari luar Kabupaten Garut. Prosentase tenaga kerja perempuan yang masuk ke industri lebih banyak daripada tenaga kerja laki-laki, dikarenakan kurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja laki-laki di dunia industri yang ada di Kabupaten Garut.	a. Pendidikan. Tenaga Kerja masih didominasi oleh lulusan SMK dan sederajat karena kebutuhan industri di Kabupaten Garut sebagian besar mengakomodasi lulusan SMA sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. b. Kualifikasi Kesempatan kerja yang ada di dunia industri lebih banyak tersedia bagi tenaga kerja dengan lulusan sekolah setingkat SMA dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi, sehingga seringkali tenaga kerja menduduki jabatan di Perusahaan yang tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. c. Usia Sebagian besar tenaga kerja merupakan usia muda dan fresh graduate (baru lulus) yang langsung memasuki dunia kerja dengan pengalaman yang minimal sehingga seringkali kurang memiliki daya juang dan daya saing dalam bekerja.	a. Kondisi dimana tenaga kerja tidak memiliki posisi tawar seringkali menyebabkan pekerja ditempatkan dalam jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi. b. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan regulasi ketenagakerjaan menyebabkan banyak pekerja yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan dalam bekerja. c. Kurangnya kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kebijakan pengupahan sesuai dengan ketentuan menyebabkan tidak terjaminnya kesejahteraan pekerja.	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	a. Upah yang dilaporkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja sehingga iuran yang dibayarkan tidak sesuai dengan upah yang diterima b. Masih kurangnya pemahaman pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja sehingga perusahaan dalam memasukan pekerja menjadi peserta BPJS masih dibedakan berdasarkan status pekerja apakah PKWT atau PKWTT. c. Pekerja kurang memahami hak dan kewajiban dalam mendapatkan jaminan sosial sehingga tidak menyadari pentingnya menjadi peserta BPJS untuk melindungi dirinya dan tidak berani meminta haknya kepada pemberi kerja.	a. Masih adanya perusahaan yang termasuk kedalam kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) baik itu program maupun kepesertaan pekerja. b. Masih banyak pekerja yang belum mendapat jaminan sosial tenaga kerja selama bekerja sehingga pada saat terjadi kasus kecelakaan, kematian atau sakit serta kondisi tidak dapat lagi bekerja pekerja tidak mendapat manfaat jaminan.	Masih kurangnya pemahaman baik pemberi kerja maupun pekerja terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja sebagai wujud perlindungan terhadap tenaga kerja.	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	a. Fungsi pembinaan yang belum berjalan maksimal terhadap perusahaan untuk dapat menjalankan peraturan ketenagakerjaan. b. Kurang optimalnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan peraturan ketenagakerjaan terutama hak-hak normatif bagi pekerja.	a. Terbatasnya SDM Mediator Hubungan Industrial b. Kurangnya pemahaman para pihak yang berselisih terhadap ketentuan peraturan ketenagakerjaan c. Perusahaan yang tidak menjalankan peraturan ketenagakerjaan d. Pengusaha maupun pekerja tidak memahami mekanisme penyelesaian PHI dan tidak memiliki kemampuan untuk negosiasi.	Adanya pemisahan kewenangan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan serta tidak seimbangnya SDM teknis dengan jumlah perusahaan yang ada.	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Kurangnya pemahaman pemberi kerja terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan terutama pemenuhan ketentuan mengenai Sarana Hubungan Industrial di perusahaan.	a. Tidak adanya Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama menyebabkan pekerja dan pengusaha tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial, baik itu perselisihan hak, PHK, antar serikat di satu perusahaan maupun perselisihan kepentingan. b. Komunikasi antara pengusaha dan pekerja tidak berjalan efektif karena tidak adanya forum komunikasi berupa Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi dari pekerja. c. Pelaksanaan pengupahan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagai akibat tidak adanya pedoman pengupahan yang tertuang dalam Struktur dan Skala Upah	Perusahaan tidak melaksanakan peraturan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	a. Pengusaha belum memahami peran dan fungsi asosiasi pengusaha bagi perkembangan perusahaan. b. Kurangnya sosialisasi peran dan fungsi Asosiasi Pengusaha yang dilakukan oleh Apindo kepada pengusaha	a. Kurangnya minat pengusaha menjadi anggota Asosiasi Pengusaha b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak mendapat data dan laporan program kerja yang dilaksanakan Asosiasi Pengusaha	Pelaksanaan peran dan fungsi asosiasi pengusaha yang belum berjalan optimal	
	Masih kurangnya pemahaman pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	a. Timbulnya perselisihan mengenai keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di satu perusahaan. b. Kurangnya pembinaan mengenai fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari pengurus kepada anggotanya.	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan dan diterapkan oleh pengusaha yang menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerja.	
	Regulasi tentang kebijakan pengupahan yang senantiasa mengalami perubahan sehingga formulasi perhitungan penyesuaian upah berganti setiap tahun.	a. Adanya perbedaan kepentingan yang disampaikan oleh masing-masing unsur anggota Dewan Pengupahan Kabupaten. b. Perbedaan pemahaman dan persepsi dalam implementasi peraturan perundangan.	Peran Dewan Pengupahan Kabupaten hanya sebagai pelaksana kebijakan pengupahan yang diterbitkan oleh pusat.	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	a. Masih adanya pengusaha yang membayar pekerja dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). b. Belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan kebijakan UMK.	a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi UMK sehingga pelaksanaan pengupahan tidak sesuai dengan ketentuan. b. Di Kabupaten Garut perbandingan kategori usaha lebih banyak jenis usaha mikro dan kecil dimana peraturan mengenai UMK harusnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur kategori perusahaan. c. Kenaikan upah bagi pekerja tidak mempertimbangkan masa kerja sehingga tetap dikenakan upah sesuai kenaikan UMK	Kurangnya pemahaman pengusaha dalam melaksanakan kebijakan pengupahan sehingga penerapan upah tidak berjalan sesuai ketentuan	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
	Belum optimalnya peran LKS Tripartit dikarenakan masih kurangnya kesepahaman dari masing-masing unsur keanggotaan dalam menjalankan fungsinya dimana yang berperan aktif dalam perumusan program kerja masih didominasi oleh unsur pemerintah.		a. Penyusunan program kerja hanya diusulkan oleh unsur pemerintah dengan memperhatikan dukungan anggaran operasional. b. Kurang aktifnya unsur anggota yang lain dalam melaksanakan program kerja. c. LKS Tripartit Kabupaten Garut belum menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan peran dan fungsinya.		Kesadaran dan pemahaman masing-masing unsur yang mewakili keanggotaan terhadap peran dan fungsi LKS Tripartit Kabupaten Garut.	
2.0 2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Kesetaraan gender belum optimal	1	Pengarustamaan gender dan keberdayaan perempuan belum optimal	1	Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik	Peningkatan kesetaraan gender
	Pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak belum optimal	1	Penanganan pengaduan, trafficking, kekerasan dan sarana prasarana terhadap perlindungan korban anak dan perempuan belum optimal			Optimalisasi pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
		2	Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak			
		3	Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak			

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		4	Belum optimalnya penerapan regulasi pro gender dan perlindungan anak			
		5	Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat			
2.0 3	Pangan					
	Distribusi Pangan belum optimal	1	Masih terdapat daerah rentan rawan pangan	1	Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan, pemantauan, pengendalian produktifitas pangan dan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rentan rawan pangan
	Tingkat produktivitas pangan rendah	1	Terdapat beberapa komoditi pangan penting yang masih didatangkan dari luar	1	Ketersediaan pangan masih tergantung pada komoditi pangan dari import/luar daerah	
		2	Tingginya alih fungsi lahan untuk tanaman pangan	1	Masih lemahnya aturan tata ruang untuk mendukung ketahanan pangan daerah	
		3	Terbatasnya sumber daya manusia di sektor pangan	1	Nilai usaha pangan masih tergolong rendah sehingga minat untuk bekerja di sektor ini rendah	
	Diversifikasi jenis pangan	1	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan sumber gizi alternatif	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Belum tercapainya skor pola pangan harapan yang ideal	1 Masih rendahnya konsumsi pangan beragam an pangan masyarakat	1 Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman	Peningkatan diversifikasi pangan sumber daya lokal non beras non terigu
			2 Masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (Stunting)	Peningkatan pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA
	Masih kurangnya ketersediaan pangan dalam mencapai skor PPH tingkat ketersediaan untuk dikonsumsi perkapita perhari	1 Belum mencukupi nya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk	1 Belum meratanya distribusi pangan strategis	Peningkatam sistem logistik pangan dalam pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan strategis dari wilayah surplus ke wilayah defisit
	Belum optimalnya penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat	1 Masih ditemukannya pangan segar asal tumbuhan yang terindikasi tidak aman dari cemaran	1 Kurangnya pengawasan peredaran pangan asal tumbuhan di masyarakat	Peningkatan sertifikasi dan registrasi PSAT, kesadaran masyarakat serta peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan
			2 Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	

No	Masalah Pokok		Permasalahan		Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Minimnya anggaran dan keterbatasan kewenangan DKP berdasarkan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021, jika dibandingkan dengan indikator yang perlu diintervensi dalam pembangunan ketahanan pangan dan subsistemnya	1	Kurangnya kesadaran dari SKPD terkait untuk menggunakan konsep ketahanan pangan sebagai dasar dalam melaksanakan program/kegiatan	1	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi tentang pilar ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan dengan stakeholder terkait	Integrasi perencanaan pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait ketahanan pangan (crosscutting)
2.0 4	Pertanahan					
	Belum Optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan guna mendukung kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Garut	1	Terdapatnya sengketa dan konflik pertanahan	1	kesulitan dalam memperoleh informasi, mengelola dan mengawasi sengketa dan konflik pertanahan	Optimalisasi Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
		2	Masih minimnya kepemilikan dan legalisasi aset pada masyarakat	1	Belum optimalnya penataan aset dan akses Objek Reforma Agraria di kabupaten Garut	Peningkatan Penataan Aset dan Akses Pertanahan
		3	Belum optimalnya sistem pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1	Belum optimalnya pemahaman, koordinasi dan anggaran dalam penyelenggaraan pengadaan tanah	Peningkatan pemahaman, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran
2.0 5	Lingkungan Hidup					
	Kualitas Lingkungan Hidup Rendah	1	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	Lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kualitas Tutupan Lahan dan Hutan, Kualitas Air, dan Kualitas Udara)
				2	Meningkatnya alih fungsi lahan dan meningkatnya lahan kritis dan kerusakan lingkungan	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			3 Pengelolaan lahan pertanian tidak mempertimbangkan metode konservasi air dan tanah	
			4 Menurunnya kualitas lingkungan pada wilayah hulu DAS Cimanuk dan DAS Cilaki	
			5 Masih tingginya pencemaran pada badan-badan air (sungai, situ/danau, dan lain-lain), terutama Sungai Cimanuk, baik dari limbah industri, usaha/kegiatan, maupun rumah tangga	
			6 Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor	
			7 Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah	
			8 Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan	
			9 Masih kurangnya kuantitas dan belum optimalnya fungsi ruang terbuka hijau	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			10 11 12 13	
		2	1 2	Pengelolaan Persampahan

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				3	Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)	
				4	Masih rendahnya upaya pengurangan sampah pada sumbernya	
				5	Belum tersedianya regulasi (peraturan bupati) mengenai persampahan	
2.0 6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Cakupan Kesertaan KB MKJP	1	Kualitas kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah	1	Kurangnya informasi dan motivasi bagi calon akseptor sehingga banyak pasangan usia subur (PUS) tidak ikut program KB	Peningkatan Kesertaan KB MKJP
				2	Masih banyak calon akseptor yang menentukan pemilihan kontrasepsi non MKJP	
				3	Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah	
	Problematika angka kelahiran, angka harapan hidup, kepadatan penduduk	1	Jumlah Kelahiran dan Pertumbuhan Penduduk Masih Tinggi	1	Kelahiran (Fertilitas) angka kelahiran berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk	Optimalisasi penduduk produktif
				2	Kematian (Mortalitas), angka kematian berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan penduduk	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			3 Perpindahan Penduduk (Migrasi)	
	Belum optimalnya sinergi kebijakan antara pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah provinsi/instansi vertikal lainnya	1 Belum optimalnya koordinasi pelayanan adminduk dengan instansi vertikal/diluar kewenangan pemerintah daerah kabupaten (Misal. layanan adminduk ke SMA/SMK/MA karena kewenangannya berada pada pemerintah daerah provinsi dan kementerian agama, sehingga kesulitan dalam disposisi layanan adminduk ke sekolah tersebut)	1 Kewenangan yang diambil alih oleh instansi vertikal/instansi lainnya diluar kewenangan pemerintah daerah kabupaten mempersempit ruang gerak kebijakan pemerintah daerah kabupaten dalam berbagai urusan yang dimiliki	Belum adanya kesepakatan/ MOU antara pemerintah daerah dan instansi pemerintah/vertikal lainnya dalam hal koordinasi pelayanan adminduk diluar kewenangan pemerintah daerah kabupaten
		2 Belum optimalnya penyediaan sarana prasana pendukung alat rekam kependudukan terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana	2 Tidak adanya rencana pengembangan bersama atau kesepakatan jangka panjang antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam pelayanan pelayanan adminduk	
		3 Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan	3 Peristiwa penduduk (mutasi, perubahan elemen data, dll) dan kepemilikan akta pencatatan sipil belum terdata dengan baik	
	Pelayanan adminduk belum memadai	1 Belum dilakukan perubahan/penyesuaian SOP penerbitan dokumen kependudukan	1 Petugas/operator pelayanan belum memahami dengan benar, begitu juga masyarakat pengguna layanan	Peningkatan pelayanan adminduk

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		2	Belum dilakukan perubahan/penyuaian SOP alur Pelayanan	2	Pelayanan baik secara online maupun manual yang belum memenuhi harapan semua pihak	
		3	Tidak tersampainya berbagai informasi mengenai kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan	3	Tidak tercapainya target dalam pencapaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	
		4	Keterbatasan SDM	4	Jumlah pengguna layanan yang terus meningkat tidak sebanding dengan petugas layanan	
		5	Keterbatasan blanko KTP el	5	Terhambatnya penduduk dalam memiliki KTP el	
		6	pemeliharaan alat perekaman	6	Peralatan dan perlengkapan layanan adminduk kurang optimal	
		7	Tidak meratanya ketersediaan alat perekaman adminduk di setiap kecamatan	7	Beberapa wilayah/kecamatan tidak dapat melakukan pelayanan dengan baik	
		8	Belum tersedianya saspras arsip hasil pelayanan adminduk secara digital (Permendagri 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan)	8	Penyelenggaraan dan penataan dokumen, berkas, data hasil pelayanan adminduk belum tertata dengan baik yang berpotensi pencarian dokumen terhambat.	
2.0 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan	1	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di Desa	Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana serta infrastruktur di perdesaan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		2	Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa	Peningkatan pendidikan dan pelatihan kapasitas aparatur desa, masyarakat dan kelompok usaha ekonomi pedesaan
			1	
			2	
			3	
		3	Rendahnya kemampuan masyarakat Desa dalam mengakses kesempatan berusaha	
			1	
			2	
		4	Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	
			1	
			2	
2.08	Perhubungan			
	Layanan Transportasi belum tertata dan terkoneksi secara optimal	1	Merebaknya lokasi parkir illegal	Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
			1	
			2	
			3	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		2 Kemacetan di lokasi terminal bayangan (ruas jalan yang digunakan untuk aktifitas bongkar muat penumpang di jalan)	1 Terminal tipe c tidak tersedia di lokasi tujuan trayek kecamatan 2 Aktifitas terminal baik pada daerah kerja maupun daerah pengawasan terminal masih bergabung dengan aktifitas lainnya (pasar)	Pengelolaan terminal penumpang type c
		3 Akreditasi pelayanan PKB	1 Terbatasnya sarana prasarana pelayanan PKB 2 Kurangnya kesadaran para operator kendaraan untuk melakukan pengujian berkala	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
		4 Tidak optimalnya kinerja angkutan penumpang/ barang (beresiko gagal sistem operasional/rawan kecelakaan)	1 Terbatasnya kegiatan pengawasan/ operasi angkutan umum (PPNS dan Polri). 2 Kurangnya penindakan pelanggaran terhadap kelengkapan administrasi/ teknis kendaraan demi keselamatan bersama.	Optimalisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap angkutan penumpang dan barang
		5 Belum efektifnya system pelayanan angkutan umum	1 Belum adanya pendataan load factor kendaraan pada setiap trayek 2 Tidak tersedia anggaran untuk melibatkan pihak ke-3 3 Belum optimalnya pemahaman petugas.	Strategi penataan konektivitas berupa jaringan trayek dan simpul

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			4 Kegiatan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 5 Belum terciptanya harmonisasi kegiatan antar pemangku kewenangan di Bidang Infrastruktur Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6 Tidak pernah ada survey.	
		6 Pelaksanaan manajemen lalu lintas belum optimal	1 Belum maksimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan. 2 Hambatan samping 3 Kapasitas jalan terbatas/rendah. 4 Terjadinya kecelakaan lalu lintas. 5 Kemacetan 6 Kinerja jaringan jalan menurun	Optimalisasi pelaksanaan manajemen lalu lintas
		7 Pemenuhan alat keselamatan dan kelengkapan jalan belum lengkap	1 Terbatasnya pendanaan untuk pengadaan peralatan keselamatan dan kelengkapan jalan 2 Mayoritas perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut belum dilengkapi oleh alat keselamatan.	Penyediaan perlengkapan jalan dan alat keselamatan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			3 Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat perlengkapan jalan	
2.0 9	Komunikasi dan Informatika			
	Belum optimalnya updating dan validasi data sektoral	1 Faktor Pendukung: Penerapan Regulasi SDI di Pemerintah Daerah. Adapun Faktor penghambatnya yakni belum maksimalnya pelaksanaan pelaksanaan Forum Data	1 Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral pada setiap perangkat daerah	Implementasi satu data di tingkat Kabupaten Garut dalam mendukung Satu data Jabar dan Satu Data Indonesia
	Penyebaran luasan informasi publik belum menjangkau seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Garut	1 Kominfo masih terbatas di penggunaan media sosial, media massa, dan media luar ruang	1 Rentang kendali penyebarluasan belum optimal disebabkan kondisi geografis Kabupaten Garut yang luas tidak berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang ada	Optimalisasi keterbukaan informasi publik
	Aspek penerapan manajemen SPBE dan penilaian audit TIK masih rendah,	1 penanggung jawab pemenuhan nilai SPBE tidak hanya bertumpu kepada Dinas Kominfo, tetapi harus dipenuhi oleh seluruh SKPD Kabupaten Garut	1 kurangnya komitmen perangkat daerah untuk mendukung pencapaian indeks SPBE	SPBE merupakan IKU kepala daerah yang harus dipenuhi oleh seluruh SKPD
	Aspek penerapan sistem manajemen keamanan informasi masih rendah	1 Penerapan sistem keamanan informasi sesuai SNI/ISO 27001 :2022 belum diterapkan secara optimal	1 Perlu penerapan dan audit Keamanan Informasi sesuai klausul dalam SNI/ISO 27001 : 2022	Indeks Keamanan Informasi merupakan parameter penerapan keamanan informasi yang didasarkan parameter Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2.1 0	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
	Belum optimalnya Daya Saing UKM	1	Terbatasnya akses pembiayaan dan permodalan usaha	1	Mayoritas UKM masih berstatus informal dan belum memiliki skema bisnis yang bankable	Peningkatan keterbukaan akses pembiayaan dan permodalan
				2	Akses dan literasi terkait dengan permodalan usaha mikro yang terbatas, sehingga menghambat dalam pengembangan usaha	
		2	Kurang efektifnya bantuan/ fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah	1	Dinamisnya objek data UKM	Peningkatan kualitas fasilitasi pemerintah daerah
				2	Sensitivitas tinggi pelaku usaha terhadap pendataan	
				3	Kurang bersinerginya bantuan/ fasilitas kepada pelaku usaha yang diberikan dari berbagai instansi	
				4	Minimnya pengawasan usaha pasca pemberian izin melalui OSS	
				5	Belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi pasca pemberian bantuan/ fasilitas dari pemerintah	
				6	Belum optimalnya proposal pemberian modal usaha yang disusun oleh pelaku usaha	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		3	Belum Optimalnya Kebijakan Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Daerah	1	Belum optimalnya kebijakan P3DN	Optimalisasi kebijakan perlindungan pelaku usaha dalam daerah
				2	Masih adanya pelaku usaha yang belum terdaftar di e-katalog	
				3	Masih bergantungnya masyarakat kepada produk-produk luar daerah	
				4	Belum rampungnya kebijakan-kebijakan terkait kepastian berusaha	
		4	Belum Optimalnya Produktivitas Usaha UKM	1	Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kurang Memadai	Optimalisasi produktivitas Usaha UKM
				2	produk barang/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Garut tidak dapat bersaing secara harga, karena kurang efisien dalam hal biaya produksi dan pemenuhan kebutuhan pasar	
				3	Diversifikasi Produk UKM masih kurang optimal	
		5	Manajemen Pengelolaan UKM	1	Pelaku usaha mikro menjalankan kegiatan usahanya mulai dari produksi, pemasaran sampai dengan pengelolaan keuangan hanya individu	Peningkatan manajemen pengelolaan UKM
				6	Belum optimalnya	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		pemasaran produk UKM	2 Belum Optimalnya Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam pemasaran produk UKM	Digitalisasi Usaha
	Belum optimalnya kualitas Koperasi	1 Masih sedikitnya Koperasi yang memiliki jenis usaha sektor riil (Produsen/ jasa)	1 Terbatasnya persepsi masyarakat terhadap Koperasi sebagai usaha simpan pinjam	Kebijakan Pengembangan Koperasi pada Sektor Riil
			2 Terbatasnya kualitas SDM pengelola Koperasi	
			3 Terbatasnya akses permodalan	
		2 Peningkatan kuantitas kelembagaan koperasi tidak diimbangi dengan kualitas koperasi	1 Menurunnya minat masyarakat terhadap Koperasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi
			2 Masih adanya koperasi yang tidak melakukan dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan, terutama untuk koperasi baru	
			3 Masih banyaknya Koperasi yang belum menerapkan prinsip dan nilai koperasi	
			4 Orientasi pendirian koperasi yang hanya untuk mengharapkan bantuan semata, atau menggunakan badan hukum koperasi hanya sebagai wadah untuk menampung program/ bantuan untuk kepentingan pribadi	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				5	Koperasi belum menerapkan prinsip dan nilai koperasi	
				6	Koperasi belum melaksanakan aturan aturan perkoperasian sesuai dengan peraturan perundang undangan	
		3	Belum Optimalnya Kebijakan Perlindungan Koperasi Dalam Daerah	1	Tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah yang sudah berhasil dijalankan oleh Koperasi	Perlindungan usaha Koperasi
		4	Belum optimalnya kualitas usaha koperasi	1	Kurangnya kesadaran Anggota Koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal koperasi dan memajukan usaha koperasi	Optimalisasi kualitas usaha koperasi
				2	Kurangnya kapasitas Koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan dan layanan bagi anggota	
				3	Pembinaan koperasi belum berorientasi pengembangan usaha	
				4	Belum optimalnya proses kemitraan untuk mendorong kerjasama usaha	
				5	Minimnya akses permodalan koperasi terhadap Perbankan karena tidak Bankable	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				6	Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran	Optimalisasi kapasitas SDM Kopeasi
		5	Belum optimalnya kapasitas SDM Koperasi	1	Terbatasnya kapasitas SDM Aparatur	
				2	Cakupan demografi yang belum diimbangi dengan pembagian SDM yang merata dalam pembinaan koperasi	
				3	Pembinaan koperasi belum secara optimal menggali potensi usaha koperasi	
		6	Belum optimalnya tatakelola dan pemanfaatan data keragaan Koperasi	1	Kesesuaian data keragaan belum tervalidasi	Penguatan Basis Data Koperasi
				2	Terbatasnya waktu serta SDM untuk proses pendataan	Penguatan Basis Data Koperasi
2.1 1	Penanaman modal					
	Kurang Optimalnya Investasi Penanaman Modal	1	Iklim Investasi belum kondusif	1	Belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian berusaha	Optimalisasi Investasi Penanaman Modal
				2	Belum adanya kebijakan mengenai Investasi baik skala umum maupun detil	
				3	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan Calon Investor	
				4	Keberterimaan masyarakat terhadap Investasi	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
		2	Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal belum optimal	
			1	Belum adanya skema reward and punishment terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal
			2	Pelaporan kegiatan penanaman modal masih belum terjamin keakuratannya
		3	Belum Optimalnya Pelaksanaan Promosi Investasi	
			1	Belum adanya dokumen peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada calon investor
			2	Pelaksanaan Promosi masih berbasis output
2.1 2	Kepemudaan dan Olahraga			
	Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga	1	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	Optimalisasi sarana prasarana olahraga, kapasitas SDM dan pelaksanaan kompetisi
			1	Belum optimalnya sarana prasarana olahraga
			2	Belum optimalnya manajemen dan kapasitas SDM keolahragaan
			3	Belum optimalnya penyelenggaraan kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan
	Belum optimalnya wirausaha pemuda	1	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
			1	Belum optimalnya peningkatan kapasitas pemuda
			2	Belum optimalnya pengembangan organisasi kepemudaan
			3	Belum optimalnya pelibatan pemuda dalam organisasi kepramukaan

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				4	Masih rendahnya penyelenggaraan event-event olahraga di Kab. Garut	
				5	Belum adanya regulasi mengenai kepramukaan (Perda)	
				6	Belum optimalnya bumi perkemahan (Status)	
				7	Belum adanya kampung pramukan (rintisan pendidikan)	
				8	Belum adanya legalitas standing untuk pembina (belum adanya instruktur pembina pramuka)	
				9	Kondisi lapangan terbuka di Kecamatan belum tersentuh oleh pembangunan representatif	
				10	Belum optimalnya SOP peminjaman sarana olahraga bagi berbagai pihak	
				11	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	
2.1 3	Statistik					
	Belum optimalnya kesiapan penyelenggaraan satu data Indonesia	1	Tata kelola pemanfaatan data belum optimal	1	Kesadaran akan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan masih rendah	Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
						kewenangan urusan daerah;
				2	Pembaharuan data tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia penyelenggaraan urusan statistik;
		2	Belum optimalnya implementasi pembagian peran kelembagaan penyelenggaraan statistik	1	Pengelolaan database masih dilakukan secara manual	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan statistik;
						Membangun e-database sebagai bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
2.1 4	Persandian					
	Belum optimalnya keamanan informasi	1	Kerangka kerja keamanan informasi belum maksimal	1	Belum optimalnya tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;	Optimalisasi keamanan informasi
		2	Kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi belum diterapkan dengan baik	1	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya persandian	
				2	Belum optimalnya operasional pengamanan persandian;	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				3	Belum optimalnya pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah.	
2.1 5	Kebudayaan					
	Kurangnya pemberdayaan budaya seni daerah	1	Kurangnya media pelaku budaya seni daerah untuk melestarikan, memajukan, memanfaatkan kebudayaan daerah	1	Terbatasnya event-event besar sebagai media prosesi seni, helaran, dan pagelaran sen	Promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah
		2	Situs Cagar Budaya daerah yang pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatannya belum optimal	1	Kurangnya pengamanan dan penataan cagar budaya	
				2	Pembinaan terhadap para seniman masih kurang	
		3	Kualitas SDM rendah	1	Apresiasi dan perlindungan terhadap seni tradisional belum optimal	
2.1 6	Perpustakaan					
	Masih rendahnya kunjungan perpustakaan dan minat membaca masyarakat	1	Masih rendahnya pengembangan literasi	1	Perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka masih terbatas;	Peningkatan budaya gemar membaca dan penerapan literasi informasi
					Belum optimalnya promosi dan publikasi dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;	
					Kurangnya sosialisasi minat baca masyarakat	
		2	Kurangnya koleksi bahan pustaka baik cetak maupun digital	1	Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			2 Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan
			3 Kuantitas dan kualitas serta jenis koleksi bahan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan
			4 Perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka masih terbatas	Peningkatan budaya gemar membaca dan penerapan literasi informasi
			5 Akses layanan perpustakaan belum optimal.	
2.1 7	Kearsipan			
	Belum adanya sarana prasarana pelayanan yang representatif	1	1 Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola kearsipan
			2 Rendahnya kepedulian pengelolaan kearsipan	Peningkatan kepedulian pengelolaan kearsipan
		2	1 Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan
			2 Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi kearsipan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
3	URUSAN PILIHAN			
3.0	Kelautan dan Perikanan			
1	Belum optimalnya produksi perikanan	1 Peningkatan produksi hasil tangkapan tidak optimal 2 Kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dan wanita nelayan 3 Tidak Jalannya proses pelelangan ikan di TPI 4 Nelayan banyak yang terjerat pinjaman kepada para bakul 5 Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut belum optimal	1 Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan dan sarana pemasaran hasil perikanan 1 Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan bagi nelayan dan wanita nelayan 1 Adanya para bakul yang memberikan modal awal penangkapan ikan kepada nelayan sehingga semua hasil tangkapan nelayan langsung dijual ke bakul tersebut dengan harga yang ditentukan bakul, bukan hasil kesepakatan nelayan dan bakul 1 Belum adanya fasilitasi akses permodalan pada lembaga keuangan 1 Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan	Optimalisasi produksi dan produktivitas perikanan
	Alih fungsi lahan kolam dan kualitas sumberdaya yang menurun	1 Usaha perikanan budidaya pada umumnya masih dikelola secara tradisional sebagai usaha tani sampingan	1 Belum semua petani/pembudi daya ikan memahami potensi usaha di sektor perikanan	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan	
3.0 2		2	Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan dari lahan usaha tani budidaya perikanan menjadi lahan untuk kepentingan lainnya.	1	Pembangunan area pemukiman/ industri yang tidak terencana		
		3	Semakin menurunnya kualitas perairan dan daya dukung sumberdaya perairan	1	Terjadinya proses kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai.		
	Transfer ilmu dan teknologi belum optimal	1	Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan sebagai wadah belajar bersama serta unit usaha bersama belum dapat berjalan secara optimal.	1	Kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok usaha masih belum optimal		
		2	Belum optimalnya proses alih teknologi terapan dalam mendorong peningkatan produksi di sektor perikanan	1	Terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan.		
		3	Masih rendahnya kemampuan aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga hasil perikanan.	1	Terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan.		
		4	Angka konsumsi ikan di Kabupaten Garut relatif masih rendah dibanding rata-rata Jawa Barat dan Nasional	1	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan untuk peningkatan gizi, rendahnya daya beli		
	3.0 2	Pariwisata					

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Jumlah Kunjungan dan Lama tinggal wisatawan masih rendah	1 Daya saing Destinasi Pariwisata unggulan masih rendah	1 Kurangnya atraksi yang bisa ditawarkan kepada pengunjung di destinasi pariwisata unggulan Daerah 2 Belum meratanya amenities pendukung pariwisata 3 Kelembagaan Pariwisata destinasi pariwisata yang belum diberdayakan 4 Belum tumbuhnya kesadaran wisata bagi masyarakat sekitar destinasi pariwisata unggulan daerah 5 Belum lengkapnya atau belum operasionalnya Infrastruktur Ekonomi Kreatif untuk mendukung Ekosistem Kreatif 6 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sumberdaya Insan Kreatif yang masih belum optimal 7 Masih sulitnya aksesibilitas ke destinasi pariwisata unggulan daerah 8 Belum terdapat payung hukum yang dapat menjadi pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut	Kesiapan atraksi, amenities, aksesibilitas dari destinasi wisata

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		2	Promosi pariwisata belum optimal	1	Belum adanya Kalender Event Tahunan yang dapat dipromosikan	Promosi wisata dan budaya berbasis kalender event dan citra daerah
				2	Belum terbentuknya Branding/ Citra Daerah sebagai identitas khas pariwisata Garut	
		3	Pelaporan kunjungan wisatawan belum optimal	1	Data kunjungan wisatawan masih belum digital	Optimalisasi pendataan dan pelaporan kunjungan wisata
				2	Terdapat Potensi namun belum terpetakan – Data mengenai Ekonomi Kreatif sangat minim - Minimnya data akan berpengaruh terhadap perencanaan	
3.0 3	Pertanian					
	Peningkatan Produksi/ Peningkatan Harga Komoditas Pertanian tidak sebanding dengan Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	Mayoritas masyarakat yang berprofesi "Petani" adalah buruh tani (tidak memiliki lahan pertanian)	1	Harga lahan Pertanian yang tidak terjangkau	Optimalisasi produksi dan produktivitas pertanian
				2	Sulitnya akses keuangan bagi Petani	
				3	Minimnya pengetahuan Petani tentang pembiayaan di sektor pertanian	
				4	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	
		2	Rantai pasok komoditas pertanian yang terlalu panjang	1	Sulitnya akses langsung ke pasar/ konsumen komoditas pertanian	
				2	Terikatnya komitmen produk Petani ke pihak penghubung ke Pasar	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan	
	Kurang optimalnya produksi komoditas Pertanian Strategis dan Unggulan	1	Terbatasnya subsidi pupuk ke masyarakat	1	Ketergantungan petani terhadap subsidi pupuk		
				2	Mahalnya pupuk		
		2	Adanya Potensi gagal panen/ tanam	1	Perubahan iklim/ cuaca		
				2	Terbatasnya jangkauan pelayanan irigasi/ perpipaan		
		3	Mahalnya biaya produksi pertanian	1	Sulitnya akses ke Lahan Pertanian		
	Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian	1	Peningkatan aksesibilitas ke Lahan Pertanian tanpa dibarengi kebijakan pengendalian pembangunan	1	Tidak adanya peraturan mengenai pengendalian pembangunan		
				2	Tidak adanya penegakan peraturan mengenai pengendalian pembangunan		
	Belum Optimalnya produksi dan produktivitas ternak	1	Perumusan kebijakan belum optimal dan tepat sasaran	1	Data sebagai dasar perumusan kebijakan belum dapat menggambarkan potensi secara keseluruhan		Optimalisasi produksi dan produktivitas ternak
				2	Tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan rendah		
				3	Fasilitasi sarana dan prasarana peternakan, produksi dan pengembangan usaha yang yang tidak tepat sasaran		

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		4	Pengelolaan bantuan oleh kelompok tidak optimal	1	Kurang matangnya dalam verifikasi CPCL dan kurangnya pengawasan terhadap kelompok	
		5	Ketersediaan lahan hijauan pakan yang semakin berkurang	1	Alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman	
				2	Ketersediaan sumber pakan hijauan belum dikelola secara intensif dan terpadu	
				3	Peternak belum terbiasa menanam HPT secara khusus	
		6	Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi masih terbatas	1	Alat dan mesin penunjang peternakan masih merupakan hal baru bagi peternak	
		7	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular	1	Belum optimalnya penyuluhan terhadap peternak	
		8	Pelayanan kesehatan hewan dan penanganan wabah penyakit hewan menular belum optimal	1	Keterbatasan Sumberdaya manusia dan Sarana Prasarana pelayanan kesehatan hewan	
		9	Pengawasan peredaran hewan dan produk hasil peternakan belum optimal	1	Kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat pentingnya kesehatan ternak	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
		10	Masih ditemukan produk hewan di masyarakat yang belum memenuhi standar mutu	1	Pelaku usaha belum menerapkan Nilai Kontrol Veteriner (NKV), fasilitas sarana prasarana penunjang produk peternakan belum memenuhi standar yang diterapkan dan belum memiliki kesadaran akan pemenuhan standar pemenuhan mutu produk	
3.0 4	Energi dan Sumberdaya Mineral					
	Pemanfaatan Langsung Panas Bumi belum optimal	1	Perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi belum memiliki izin pemanfaatan	1	Keterbatasan wewenang dalam penerbitan izin	Penyelesaian izin pemanfaatan ESDM
				2	Belum rampungnya kebijakan terkait perizinan pemanfaatan langsung panas bumi	
3.0 5	Perdagangan					
	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan	1	Rendahnya daya saing Sarana Distribusi Perdagangan	1	Masih terbatasnya kemampuan manajemen pengelola pasar	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan
				2	Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern	
				3	Belum optimalnya sarana	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
					prasarana perdagangan	
				4	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data pergudangan	
		2	Rendahnya nilai ekspor	1	Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen	Perlindungan terhadap hak-hak konsumen
		3	Tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	1	Masih tingginya biaya distribusi barang terutama di wilayah Garut Selatan	Stabilisasi biaya transport
3.0 6	Perindustrian					
	Masih rendahnya kontribusi industri Kecil Menengah	1	Rendahnya daya saing industri kecil menengah daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan database industri kecil menengah daerah	Peningkatan daya saing Industri Kecil Menengah
				2	Sulitnya akses logistik untuk perindustrian	
				3	Masih adanya pelaku usaha yang belum terdaftar di e-katalog	
				4	Masih adanya industri yang belum memiliki sertifikasi TKDN pada produknya	
				5	SDM masih belum sesuai kebutuhan industri	
		2	Rendahnya pertumbuhan industri kecil menengah	1	Belum rampungnya kebijakan-kebijakan terkait kepastian berusaha	Peningkatan pertumbuhan Industri Kecil Menengah
				2	Belum tersedianya kawasan industri	
				3	Terbatasnya kawasan peruntukkan industri	
3.0 7	Transmigrasi					

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Untuk pemberangkatan yang menentukan adalah pemerintah pusat dalam bentuk SK Menteri dimana daerah tujuannya	1 Pemberangkatan dan penempatan transmigran yang tidak dapat dipastikan dapat dilaksanakan setiap tahun	1 Pemberangkatan dan penempatan transmigran oleh pemerintah pusat	Optimalisasi pemberangkatan dan penempatan transmigrasi
4	PENUNJANG URUSAN			
4.0	Pembinaan dan Pengawasan			
1	Peran dan layanan audit intern sebagian besar berupa audit ketaatan	1 Kompetensi APIP terkait pengawasan substantif masih kurang	1 Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklat audit kinerja dan pengawasan substantif masih terbatas	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme aparatur pengawasan secara berkelanjutan
	Program strategis Pemerintah Daerah belum dijadikan sebagai fokus pengawasan intern	1 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan belum memperhatikan cascading isu strategis pemerintah daerah	1 Penetapan sasaran audit dalam PKPT belum ditetapkan berdasarkan hasil penilaian risiko yang memadai	Implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko
	Akses untuk mendapatkan data dan dokumen yang diperlukan memerlukan waktu yang lama	1 Belum terintegrasinya data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan intern	1 Aplikasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum tersedia	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern
	Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kelemahan organisasi	1 Sistem Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dievaluasi secara berkala	1 Peran manajemen sebagai lini pertama dan lini kedua dalam melaksanakan pengendalian intern masih kurang	Peningkatan Implementasi SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Tindaklanjut atas hasil pengawasan eksternal belum seluruhnya sesuai rekomendasi	1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal belum efektif	1 Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh manajemen belum sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal secara berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
	Pelaksanaan pembangunan oleh penyedia jasa dan pengelolaan keuangan Desa belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	1 APIP tidak mampu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan daerah dan desa	1 Jumlah kegiatan pembangunan dan jumlah pemerintah Desa yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah aparatur yang tersedia	Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang efisien dan efektif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta Sinergitas Pengawasan bersama Aparat Penegakan Hukum
	Road Map Reformasi Birokrasi belum seluruhnya dilaksanakan	1 Rencana aksi reformasi birokrasi belum seluruhnya dilaksanakan	1 APIP belum mampu mengawal proses Reformasi Birokrasi	Peningkatan peran APIP dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi
	Perangkat Daerah/Unit Kerja belum memenuhi standar/kriteria ZI/WBK/WBBM	1 Rekomendasi hasil evaluasi belum seluruhnya ditindaklanjuti	1 APIP belum mampu mengawal terwujudnya ZI/WBK dan WBBM	Peningkatan Kepatuhan dan pengembangan budaya integritas
4.0 2	Perencanaan			
	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pembangunan	1 Kurangnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja	1 Kesulitan dalam mengelola dan mengawasi proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, serta redundansi dan inkonsistensi data karena sistem perencanaan, penanggaran dan informasi kinerja baik manual maupun terkomputerisasi belum terintegrasi secara optimal.	Penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, dengan ruang lingkup integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, kemudahan implementasi tahap perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			2 Kurangnya kesadaran dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi.	
		2 Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat.	1 Rendahnya kualitas hasil analisis kebutuhan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ke depan yang berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat
			2 Rendahnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi karena tidak lengkap, tidak akurat, tidak mutakhir, dan tidak relevan.	
		3 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.	1 Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			2 Kurangnya pemahaman, penerapan, kapasitas, kompetensi, keterlibatan, pemberdayaan, sinergi, dan harmonisasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi hasil.	
		4 Kurangnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal.	1 Rendahnya profesionalisme dan integritas sumber daya perencana dalam menjalankan tugasnya.	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal.
			2 Rendahnya pemahaman dan penerapan core values ASN BerAKHLAK oleh sumber daya manusia perencana.	
		5 Masih adanya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara rencana pembangunan nasional, sektoral, dan daerah.	1 Kurangnya kualitas sumber daya manusia perencana, baik di pemerintah pusat maupun daerah, dalam melakukan analisis, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan yang berbasis data, fakta, dan evidensi.	Implementasi penyelarasan perencanaan antara daerah, provinsi dan pusat serta antar sektor tingkat pemerintahan.

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				2	Kurangnya pemahaman dan penerapan konsep dan prinsip perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, sinergis, harmonis, konsisten, dan berorientasi hasil.	
4.0 3	Keuangan					
	Pengelolaan aset dan keuangan daerah belum optimal	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	1	Rendahnya tingkat sertifikasi aset milik pemerintah daerah	
		2	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1	Belum optimalnya penetapan target PAD dan retribusi daerah	
				2	Masih kurangnya sertifikasi pemeriksa wajib pajak	
				3	Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi pengelolaan pajak daerah serta belum terintegrasi	
				4	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				5	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD penghasil retribusi daerah serta perlu adanya rasionalisasi terkait penetapan target retribusi	
4.0 4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
	Belum optimalnya proses sistem dan layanan kepegawaian	1	Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;	1	Kurangnya pengembangan potensi ASN	Optimalisasi Profesionalisme ASN dan Peningkatan Sistem Merit Manajemen Asn
		2	Sistem kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja	1	Belum terbangunnya manajemen talenta sesuai permenpan 3 tahun 2020	
				2	Belum terupdate nya database kepegawaian	
				3	Belum adanya kejelasan kebijakan/undang-undang terkait penataan tenaga honorir	
4.0 5	Penelitian dan Pengembangan					
	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	1	Hasil Kelitbangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah	1	Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan	Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan litbang daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
						Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kualitas perencanaan dan evaluasi program kelitbangan
						Penguatan basis data dan diseminasi hasil kelitbangan
		2	Belum optimalnya penyelenggaraan inovasi daerah	1	Belum tersedianya SDM Peneliti	Peningkatan kebijakan inovasi daerah, fasilitasi inovasi daerah, dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)
				2	Belum adanya tim pengelola inovasi daerah	
5	PENDUKUNG					
5.0 1	Pendukung KDH dan WKDH					
	Belum optimalnya kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan prinsip <i>good governance</i>	1	Belum idealnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terukur dan tepat fungsi;	1	Belum tersedianya database penyaluran hibah	Optimalisasi kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan prinsip <i>good governance</i>
				2	Rendahnya ketaatan terhadap regulasi yang menjadi dasar dalam proses permohonan bantuan	
				3	Belum optimalnya laporan kinerja dalam bentuk data, berkas, dokumentasi sebagai bahan pelaporan aksi HAM dan bahan penilaian “Kabupaten/kota peduli HAM”	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan	Isu Strategis Urusan
			4 Belum optimalnya kerjasama anantara pemda dengan lembaga/badan dalam negeri dan luar negeri serta CSR dalam pembangunan daerah	
		2 Belum idealnya standar pelayanan dalam rangka menghadapi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.	1 Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar / landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga berpotensi menjadi permasalahan hukum	
			2 Pelayanan publik belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat.	
5.0 2	Pendukung DPRD			
	Masih rendahnya Raperda inisiatif DPRD	1 Belum tersedianya grand desain tentang pembuatan program legislasi daerah	1 Belum adanya pemahaman yang terintegrasi berkenaan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah	Optimalisasi penyusunan Raperda inisiatif DPRD
6.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
06. 01	Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Masih rendahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta tingginya angka konflik sosial	1 Menurunnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat	1 Masih perlunya peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat	Penguatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
			2 Kuatnya arus globalisasi negatif di generasi muda	

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
				3	Masih tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba	
		2	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	1	Belum optimalnya pembinaan budaya politik masyarakat	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
		3	Masih adanya Ormas Destruktif	1	Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Optimalisasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1	Belum optimalnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		1	Belum optimalnya kerukunan antar umat beragama	1	Masih adanya penyebaran paham-paham intoleransi dan radikalisme	Penanggulang an Penyebaran Paham Intoleransi dan Radikalisme untuk Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama
		1	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan terhadap gangguan stabilitas wilayah	1	Belum optimalnya kerjasama intelijen	Peningkatan Deteksi Dini dan Kewaspadaan terhadap Gangguan Stabilitas Wilayah untuk Menurunkan Angka Konflik Sosial
7	KEWILAYAHAN					
7.0 1	Pemerintahan					
	Trantibum masih rendah	1	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1	Rendahnya dukungan dari pemangku kepentingan	Optimalisasi pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa

No	Masalah Pokok	Permasalahan		Akar Permasalahan		Isu Strategis Urusan
	Pemberdayaan Desa belum optimal	1	Penguatan Pemberdayaan kelompok rentan	1	Kurang optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	
	Profesionalisme Aparatur masih rendah	1	Tata kelola organisasi dan manajemen ASN belum optimal	1	Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat	

Sumber data : Bappeda diolah Tahun 2023

4.2 Isu Strategis

4.2.1. Telaah Isu Nasional

Isu Strategis Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan pemerintahan pasca Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Ekonomi inklusif dan berkeadilan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan;
4. Daya saing dan keamanan digital;
5. Peningkatan kualitas SDM;
6. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
7. Ketahanan air, pangan, dan energi;
8. Masyarakat inklusif dan berbudaya;
9. Tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif.

Tahun 2025 termasuk kedalam Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yakni Penguatan Fondasi Transformasi, tahap ini meliputi :

1. Transformasi Sosial: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi SDA serta penguatan rise inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan

publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

4.2.2. Telaah Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat empat isu strategis yang dapat diidentifikasi untuk tahun 2024, yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Keempat isu tersebut, diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan menengah dan khusus, serta Pendidikan informal dan inklusi;
 - b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat;
 - c. Penerapan *zero new stunting* dan penanganan AIDS, tuberculosis dan malaria;
 - d. Pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
 - e. Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
 - f. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam hal :
 - a. Penerapan pertanian ekologis;

- b. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan;
 - c. Pembentukan sentra pertanian, perikanan dan UMKM;
 - d. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
 - e. Penerapan UMKM dan industri hijau;
 - f. Percepatan digitalisasi ekonomi;
 - g. Percepatan circular ekonomi;
 - h. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan;
 - i. Penerapan link and match industri kecil, industri besar
 - j. Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar, memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam hal:
- a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir
 - b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat;
 - c. Pengembangan dan pembangunan Kawasan industri rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkapur, dan Kawasan cekungan Bandung;
 - d. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah;
 - e. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah;
 - f. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestic;
 - h. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - i. Penyediaan transportasi massal perkotaan.
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dalam hal:
- a. Penerapan tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional;
 - b. Deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum;

- c. Penataan dan penguatan organisasi;
- d. Penataan tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi;
- e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
- f. Penguatan akuntabilitas;
- g. Penguatan pengawasan;
- h. Kualitas pelayanan publik;
- i. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.2.3. Penelaahan Isu Strategis Wilayah Berbatasan

Penelaahan isu strategis wilayah perbatasan dilakukan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan wilayah perbatasan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun isu strategis wilayah perbatasan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.2
Isu Strategis Berbatasan

Nama Kabupaten Wilayah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Sumber
1. Kabupaten Bandung	Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
	Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan	
	Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing	
	Belum meratanya pembangunan wilayah dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan	
	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	

Nama Kabupaten Wilayah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Sumber
	Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.	
2. Kabupaten Tasikmalaya	Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi	
	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah	
	Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19	
	Recovery Ekonomi Dampak Pandemi Covid -19	
	Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas	
	Memperluas jejaring Kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan	
	Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional, dan global	
	Penanganan Masalah Kemiskinan	
	Penanganan pengangguran	
	Penurunan angka stunting, AKI dan AKB	
	Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya	
3. Kabupaten Cianjur	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang	

Nama Kabupaten Wilayah Berbatasan	Isu Strategis Pembangunan	Sumber
	cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta perluasan Kesempatan Kerja	
	Daya Saing dan kemandirian ekonomi daerah	
	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang didukung infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	
	Sumberdaya Alam, Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup	
	Tata Kelola Pemerintahan dan Penerapan Reformasi Birokrasi	
	Penataan Daerah	
4. Kabupaten Sumedang	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026
	Pertumbuhan ekonomi	
	Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	

Sumber : RPD dan RPJMD Kabupaten yang Berbatasan

4.2.4. Telaahan RPJPD Kabupaten Garut Tahap IV

Penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 mempedomani RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010. Pembangunan daerah Tahun 2025-2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap IV.

1) Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
2. Sarana dan prasarana, SDM, kualitas pelayanan dan pemerataan;
3. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan pemerataan
4. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
5. Masih belum optimalnya pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran;
7. Masih rendahnya tingkat daya saing wilayah dalam pembangunan investasi daerah;
8. Masih tingginya tingkat kerusakan lingkungan dan konversi lahan;
9. Belum berjalannya reformasi birokrasi dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

2) Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 memiliki makna sebagai berikut:

1. **Maju;** ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
2. **Adil;** diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran- serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya

mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.

3. **Sejahtera;** dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
4. **Berwawasan Lingkungan;** ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai tahun 2025.

1. **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. **Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;** adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal yang berdaya saing global serta berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan fokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan dengan memperhatikan kearifan lokal

untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif, disertai dengan kemampuan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan;** adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.



3) Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut Tahap IV

Adapun sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut Tahap IV diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Sandingan Sasaran dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupatn Garut Tahap IV

MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, dan berwawasan ilmu dan teknologi.				
Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama, dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.	Sosial, Budaya Dan Agama	Peningkatan human investment melalui peningkatan pendidikan dimulai sejak usia dini sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi agar terbentuk anak, remaja dan masyarakat Kabupaten Garut yang unggul dan berwawasan luas dengan penguasaan teknologi informasi dan Bahasa Asing serta pemanfaatan dan pengembangan IPTEK di berbagai bidang menuju masyarakat yang berbudaya produktif.	Pendidikan	• Pemantapan pendidikan anak usia dini; • Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; • Pengembangan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar; • Pengembangan Sekolah Berstandar International (SBI); • Pengembangan dan inovasi kelembagaan pendidikan; • Terpenuhinya kompetensi tenaga pengajar; • Pengembangan Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar; serta • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
		Pembangunan keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercapai suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.	Kesehatan	• Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan; • Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, desa sehat, serta desa siaga. • Upaya memberdayakan masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan melalui polindes wahana kesahatan dasar, santri raksa desa dan gerakan sayang ibu. • Perkuatan sistem kesehatan melauai kemandirian masyarakat pada pelayanan kesehatan, sasaran-sasaran akses pelayanan, kewaspadaan dini terhadap penyakit dan kesadaran hidup sehat dan bersih. • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, • Peningkatan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui penempatan dokter dan bidan desa atau



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil, • Peningkatan promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. Meningkatkan manajemen pembangunan kesehatan
		Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia melalui penguatan lembaga jaminan sosial.	Sosial Dan Keagamaan	• Penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Garut • Peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah pemuka agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. • Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pemahaman agama dalam bidang kehidupan politik. • Peningkatan bidang keagamaan melalui perubahan paradigma agama sebagai etos pembangunan dan motivasi sebagai asset pembangunan pemerintah. • Peningkatan bidang keagamaan melalui perubahan paradigma agama sebagai etos pembangunan, sehingga agama dapat diyakini dan dihayati oleh masyarakat.
		Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	Kependudukan Dan Keluarga Berencana	Mempertahankan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga yang diprioritaskan pada: • Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pengendalian kehamilan serta meningkatkan jumlah cakupan peserta KB; • Peningkatan pemahaman kesehatan terutama ibu dan anak; dan • Peningkatan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat
		Peningkatan keahlian dan perlindungan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia melalui	Sosial	Mempertahankan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang diprioritaskan pada: • Peningkatan penggalian potensi, kemauan, kemampuan



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penguatan lembaga jaminan sosial.		dan keterampilan serta sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; • Peningkatan partisipasi sosial masyarakat; • Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Peningkatan penggalan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial PMKS
		Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah	Sosial Dan Budaya	Mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah melalui : • Pengembangan, pengelolaan kekayaan budaya daerah; • Penataan sistem nilai budaya sunda yang berbudi luhur yang aplikasinya di masyarakat melalui pemasyarakatan nilai-nilai budi pekerti sunda disamping bahasa dan sastra sunda • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah dan • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional
		Peningkatan kualitas tenaga kerja lebih diarahkan kepada aspek profesionalisme dan kredibilitas sesuai dengan keahlian sehingga memiliki kemandirian, bertalenta tinggi dan merupakan Brand Image kinerja tersendiri yang lebih produktif dalam berkarya yang menjadi keunggulan dari SDM Kabupaten Garut.	Ketenagakerjaan	Pemantapan kompetensi dan daya saing, yang diprioritaskan pada: • Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja; • Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja; • Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. • Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja
		Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan lebih memperhatikan upah kerja yang memadai, keselamatan kerja dan	Ketenagakerjaan	• Peningkatan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran • Pelayanan antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja On Line; • Pemberdayaan Bursa Kerja swasta; dan • Pengembangan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perlindungan yang layak bagi tenaga kerja.		
		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, didukung dengan penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan jaminan perlindungan anak baik bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	• Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, • Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, • Pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak • Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
		Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.	Pemuda Dan Olahraga	• Peningkatan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Pengembangan sistem pembibitan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah; • Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; • Peningkatan peran dan kemampuan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba • Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dalam Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga • Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan • Pembinaan Olahraga dan Seni Pelajar
	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik IPTEK untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan keunggulan daerah	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	• Pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; • Pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung masyarakat berwawasan ilmu dan teknologi; • perwujudan layanan pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi • Pengembangan dan penerapan teknologi industri melalui: • Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI II: Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan				
Mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.	Ekonomi	Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing pada skala regional dan nasional, dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan skala lokal, regional dan nasional yang kokoh.	Industri Dan Perdagangan	Pembinaan dan Pengembangan SDM industri • Pemantapan Kemampuan Industri Kecil dan Menengah • Penguatan klaster industri potensial • Penerapan IPTEK dalam Sistem Produksi • Standarisasi industri manufaktur • Penguatan Struktur Industri
		Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik	Investasi Dan Penanaman Modal	• Pemantapan sistim dan jaringan informasi potensi peluang investasi • Penguatan Sarana dan prasarana daerah yang mendukung investasi; • Peningkatan iklim investasi yang kondusif • Penguatan investasi daerah • Peningkatan promosi dan kerjasama investasi pemerintah daerah dengan swasta. • Perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus/kawasan investasi, serta • Penguatan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.
		Pembangunan sektor pertanian yang didorong untuk mengarah pada pengembangan agroindustri dan agribisnis dengan tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian sebagai salah satu	Pertanian	• Mempertahankan lahan abadi pertanian • Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. • Pemantapan peran dan kesejahteraan petani • Pemantapan infrastruktur pendukung pertanian, • Penguatan sistem agribisnis secara tepat guna dalam



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ruang terbuka kota serta peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian		meningkatkan nilai tambah produk pertanian • Pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan • Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian,
		Peningkatan hasil peternakan, pemasaran, dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung usaha peternakan	Pertanian (Peeternakan)	• Pemantapan peran dan kesejahteraan peternak • Penguatan kualitas dan kuantitas produksi hasil peternakan • Peningkatan kualitas pelayanan pasar produksi hasil peternakan • Penguatan pemasaran hasil produksi peternakan • Penerapan teknologi peternakan; • Pengembangan kapasitas kawasan peternakan • Peningkatan rasa aman masyarakat terhadap usaha dan produk peternakan
		Pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar yang kompetitif	Kukm	• Pemantapan usaha UMKM • Pemantapan sistem pendukung usaha bagi UMKM • Peningkatan kemampuan akses pasar bagi UMKM • Pemantapan kemitraan usaha antara antara UMKM dengan Usaha Besar
		Pemberdayaan Koperasi didorong untuk berkembang secara luas.	Kukm	• Penguatan peran koperasi dalam perekonomian daerah • Peningkatan kualitas kelembagaan, kapasitas, produktifitas dan efisiensi usaha Koperasi • Penguatan lembaga BUMD dan Lembaga Keuangan non perbankan
		Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja	Pariwisata Dan Budaya	• Optimalisasi sumber daya Koperasi yang produktif dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna • Pemantapan kualitas destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; • Pemantapan kemitraan, promosi dan pemasaran pariwisata;



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				• Pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah • Peningkatan apresiasi seni budaya daerah sebagai aset wisata • Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional • Pengembangan potensi wisata religius
		Kelautan dan perikanan dikembangkan untuk meningkatkan optimalitas pengelolaan kelautan dan perikanan dalam upaya pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil kelutan dan perikanan.	Kelautan Dan Perikanan	• . Pengembangan pariwisata yang berakar pada alam dan budaya daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Garut. • Penguatan aktifitas ekonomi masyarakat pesisir • Peningkatan produksi, penanganan, pengolahan dan peningkatan mutu produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan • Penguatan usaha diversifikasi produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan; • Pengembangan pasar komoditi di wilayah pesisir; • Penguatan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; • Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan • Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah pesisir
		Pembangunan kehutanan serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kehutanan	• Pemantapan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan • Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil kehutanan • Peningkatan Pemanfaatan potensi lahan di sekitar hutan • Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan • Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan • Peningkatan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; • Peningkatan penanganan lahan kritis dan fungsi kawasan lindung;



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				• Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana • Pembinaan dan Pengembangan SDM industri • Pemantapan Kemampuan Industri Kecil dan Menengah • Penguatan klaster industri potensial • Penerapan IPTEK dalam Sistem Produksi • Standarisasi industri manufaktur • Penguatan Struktur Industri • Pemantapan Perlindungan terhadap konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Peningkatan pelayanan operasional Unit kemetrollogian Daerah • Pemantapan sistem dan jaringan informasi perdagangan • Penguatan klaster produk ekspor • Pembinaan pedagang kakilima dan asongan • Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur perdagangan;
MISI III : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang				
mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal, yang	Sarana Dan Prasarana (Infrastruktur)	Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan wilayah	Pekerjaan Umum	• Penyusunan data dan Informasi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Jalan • Peningkatan jalan dan jembatan pada jalur-jalur produksi, kawasan strategis. • Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi; dan pusat pelayanan • Peningkatan dan pemantapan infrastruktur perdesaan • Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan • Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak • Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi • Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok di wilayah rawan air, rawan defisit air, desa tertinggal dan wilayah padat pemukiman; • Meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengelolaan



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari, dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.				daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah;
		Pembangunan infrastruktur transportasi dan perhubungan dalam meningkatkan pelayanan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Perhubungan	• Pemantapan dan peningkatan infrastruktur transportasi, terminal serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan • Peningkatan sumber daya aparatur perhubungan yang profesional • Penyediaan prasarana & sarana perhubungan • Peningkatan pelayanan perijinan dan jasa perhubungan • Pembangunan pelabuhan laut dan transportasi udara • Operasionalisasi pelabuhan dan terminal baru serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan;
		Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh	Perumahan Dan Permukiman	• Mempertahankan dan memantapkan penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau • Memantapkan pengembangan perumahan dan permukiman; • Mempertahankan sistem pemberdayaan komunitas permukiman • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan • Peningkatan kualitas konstruksi bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat • Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan Air limbah perkotaan • Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perdesaan • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan • Peningkatan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan
		Pembangunan energi dan sumber daya mineral guna terpenuhinya pasokan energi yang handal, efisien, dan berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan energi menuju	Energi Dan Sumberdaya Mineral	• Pemantapan daya dukung lingkungan dalam pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, • Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah • Mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat • Penguatan sistem penegakan hukum dan pemerintahan



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		desa mandiri energi yang berkelanjutan.		yang baik secara adil dan konsisten • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, • Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup • Pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana
	Wilayah Dan Tata Ruang	Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi antar sektor secara sinergis, serasi dan berkelanjutan	Tata Ruang	Mempertahankan keseimbangan tata ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan memadai untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas masyarakat dengan kawasan konservasi, dengan prioritas: • Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang; • Perencanaan tata ruang untuk kawasan-kawasan khusus dan strategis • Pengembangan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi • Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang • Peningkatan dan pemantapan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut • Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; • Perlunya pemantapan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung • Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya • Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan proporsi Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya sesuai rencana tata ruang • Implementasi lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, secara konsisten



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)	Lingkungan Hidup	• Pemantapan daya dukung lingkungan dalam pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, • Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah • Mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat • Penguatan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik secara adil dan konsisten • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, • Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup • Pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan				
mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap	Pemerintahan Dan Aparatur	Birokrasi yang profesional diarahkan pada membangun aparatur pemerintah Kabupaten Garut yang memahami etika birokrasi dan budaya kerja, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta penerapan komitmen percepatan pemberantasan KKN	Otonomi Daerah Dan Perintahan Umum	• Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur • Penerapan teknologi informasi dalam database pegawai • Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi • Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima; • Pemantapan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem, prosedur dan standardisasi kualitas pelayanan; • Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. • Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing; • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik; • Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha;



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasnya masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah.				• Fasilitasi pemantapan regulasi dan kebijakan otonomi daerah dalam berbagai aspek • Pemantapan sistem kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan pada daerah otonomi baru • Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan atau pemangku kepentingan lainnya
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan	• Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis IT (Information Technology) • Pengendalian perencanaan pembangunan • Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan • Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan • Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan pihak lain dalam pembangunan
		Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD dan pengawasan masyarakat	Pengawasan	• Mempertahankan pengendalian sistem pengendalian internal dan mengembangkan sistem pengawasan; • Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. • Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. • Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan • Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah diarahkan pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan.	Keuangan Daerah	• Pemantapan pengelolaan keuangan pemerintah, diprioritaskan pada: • Peningkatan pendapatan daerah yang tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya • Peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, • Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi • Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil • Optimalisasi penggalan sumber- sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi yang ada dengan tidak membebankan



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				terhadap masyarakat disertai pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya • Peningkatan aspek kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan • Optimalisasi Aset melalui pemantapan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang terkandung dalam aset tersebut. • Identifikasi dan pengelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor- sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang
		Mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum melalui pembangunan hukum yang diarahkan pada pembinaan aparatur sehingga makin terwujudnya pemahaman hukum yang mantap oleh semua aparatur	Hukum	Pemantapan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diprioritaskan pada: • Pembangunan materi hukum, struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, • Perlindungan hukum, kesadaran hukum dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, teratur dan lancar • Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat. • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ; • Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan
		Memantapkan kehidupan demokrasi, kelembagaan dan semangat kebangsaan, yang lebih kokoh, melaksanakan reformasi struktur politik dan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan dan nilai- nilai toleransi	Politik	Pemantapan pembangunan politik dalam memantapkan kehidupan demokrasi diprioritaskan pada: • Pemantapan kehidupan demokrasi, • Pemantapan semangat kebangsaan, • Peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, • Penguatan peran masyarakat madani (civil society), • Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal,



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				• Perluasan akses partisipasi publik; • Pengembangan budaya politik kewargaan; • Penataan daerah otonom dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali; • Pengembangan kerja sama antar daerah • Peningkatan kapasitas pemimpin dan anggota DPRD sebagai optimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD
		Pembangunan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan demokratisasi yang harmonis, sehingga diperlukan peran aktif pers dan media informasi	Informatika	Pemantapan bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada: • Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika • Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi • Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika • Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika untuk Masyarakat • Fasilitasi, Koordinasi dan Pengembangan Piranti Keras dan Lunak Sistem Informasi Daerah yang terintegrasi • Peningkatan perangkat Persandian dan Telekomunikasi Daerah • Peningkatan SDM Persandian dan Telekomunikasi • Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
		Pembangunan pada sektor keamanan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan	Keamanan Dan Ketertiban	Pemantapan bidang ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, diprioritaskan pada: • Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan; • Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; • Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia • Peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan



MISI / SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	FOKUS PEMBANGUNAN	ARAH PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban		masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; • Peningkatan pemahaman demokrasi dan penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik • Peningkatan peran dan fungsi organisasi masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban

Sumber : Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut 2005 -2025

4.2.5. Perumusan Isu Strategis RPD Kabupaten Garut Tahun 2026-2026

Setelah melakukan telaah terhadap berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, isu strategis aktual yang berkembang, dan sasaran serta arah kebijakan RPJPD Kabupaten Garut Tahap IV serta isu strategis pembangunan provinsi dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026 serta isu strategis wilayah perbatasan, maka didapatkan rancangan isu strategis dalam RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, yaitu :

1. Kualitas sumber daya manusia;
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif;
3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Berikut merupakan penjabaran masing-masing isu strategis Kabupaten Garut.

1. Kualitas sumber daya manusia

- a. Peningkatan moral, etika, dan tanggung jawab sosial.
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- d. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan masyarakat;
- e. Penanganan kemiskinan;
- f. Penanganan pengangguran;
- g. Pengendalian pertumbuhan penduduk;
- h. Peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan pembangunan pemuda.

2. Pembangunan ekonomi yang inklusif;

- a. Peningkatan nilai investasi;
- b. Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM;
- c. Peningkatan daya beli masyarakat;
- d. Peningkatan ketahanan pangan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan

- a. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah;
- b. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar secara merata;
- c. Penyediaan hunian layak huni;
- d. Pemerataan akses terhadap air minum dan sanitasi layak;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana;
- g. Pemerataan pembangunan perdesaan.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

- a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
- b. Penguatan akuntabilitas dan pengawasan;
- c. Penataan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik/digital
- d. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.

Dalam menentukan prioritas isu strategis daerah dilaksanakan penilaian atau pembobotan berdasarkan kriteria di bawah ini

Tabel 4.4 Kriteria Untuk Prioritas Isu-Isu Strategis

N o	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

Sehingga setelah melalui penilaian dan pembobotan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Peringkat Isu Strategis

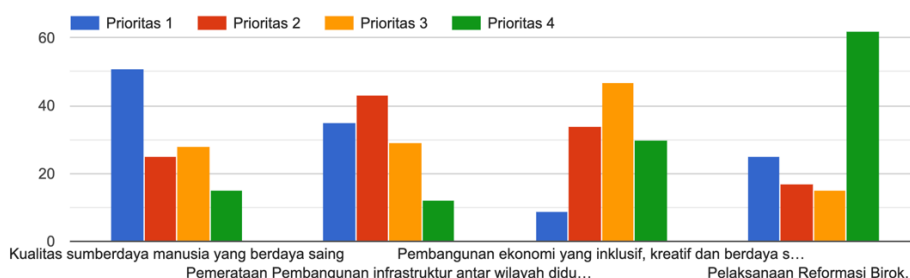
No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total	Peringkat
		1	2	3	4	5	6		
1	Kualitas sumberdaya manusia	20	13	18	15	8	20	94	1
2	Pembangunan ekonomi yang inklusif	20	13	19	15	8	18	93	2
3	Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	18	13	18	15	8	20	92	3
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan	15	15	19	12	8	17	86	4

Sumber : diolah Bappeda 2023

Selain melalui pembobotan dilaksanakan pemrioritasan isu strategis melalui penjaringan aspirasi *stakeholder* melalui Forum Konsultasi Publik, Kelima isu strategis Kabupaten Garut kemudian di bobotkan untuk mengetahui isu mana yang dinilai paling krusial dan perlu dijadikan prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Garut. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan penilaian oleh *stakeholder* meliputi:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap penilaian isu strategis Kabupaten Garut diperoleh informasi bahwa isu strateegis yang dianggap paling krusial adalah isu Kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas. Hasil pembobotan isu strategis Kabupaten Garut ditampilkan pada Gambar berikut.

Gambar 4.1 Hasil Kuesioner Pemrioritasan Isu Strategis


Sumber : Bappeeda 2023

Adapun, keterkaitan isu-isu strategis Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan isu-isu strategis Kabupaten Garut tahun 2025-2026, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.6 Keterkaitan Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026

Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	Isu Strategis Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar 4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.	1. Kualitas sumberdaya manusia 2. Pembangunan ekonomi yang inklusif 3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Sumber : RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, disandingkan

Keterkaitan agenda Pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Keterkaitan Isu Strategis Nasional dan Kabupaten Garut
Tahun 2025-2026**

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026
1. Stabilitas politik dan pemerintahan pasca Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024; 2. Ekonomi inklusif dan berkeadilan; 3. Percepatan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan; 4. Daya saing dan keamanan digital; 5. Peningkatan kualitas SDM; 6. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; 7. Ketahanan air, pangan, dan energi; 8. Masyarakat inklusif dan berbudaya; 9. Tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif.	1. Kualitas sumberdaya manusia 2. Pembangunan ekonomi yang inklusif 3. Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.

Sumber : Perkembangan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029, disandingkan

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 akan segera berakhir, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 Kabupaten Garut Harus menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 merupakan dokumen yang disusun untuk menjembatani perencanaan pembangunan yang disusun disaat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD tidak didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih namun didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan target capaian kinerja pembangunan pada level tertinggi yang bersifat strategis, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan daerah, sera memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran pembangunan daerah menunjukkan fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, yaitu "**Mewujudkan Kabupaten Garut Yang Maju, Sejahtera, Adil Dan Berwawasan Lingkungan**" melalui perwujudan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi, peningkatan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dilakukan berdasarkan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Garut tahun 2005-2025. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, juga dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 pada tahap keempat.

1. Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
2. Mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta kluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
3. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antarmasyarakat dan antarwilayah.
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram.



Sasaran pada RPJPD tahap keempat menjadi pdoman dalam penentuan isu strategis pembangunan yang selanjutnya dirumuskan dalam tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dengan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 disajikan pada tabel 5.1.



Tabel 5.1

Keterkaitan Sasaran RPJPD 2005-2025 dengan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

No	SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	INDIKATOR	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN		
1	Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama, dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.	(1) Indeks Pembangunan Manusia*	82,36 (Metode Lama)	1	Kualitas sumber daya manusia	1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Nilai
								2. Indeks Kesehatan	Poin
								3. Indeks Pendidikan	Poin
								4. Persentae Penduduk Miskin	%
				a	Peningkatan moral, etika, dan tanggung jawab sosial	1.1	Meningkatnya Kesalehan Sosial	1. Indeks Kesalehan Sosial	Kategori
		b	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun		
		c	Penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi						
		d	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan masyarakat	1.3	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun		
						2. Harapan Lama Sekolah			
		(2) Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.035.625	e	Penanganan kemiskinan	1.4	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	1. Jumlah penduduk miskin	Tahun
(3) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,53	f	Penanganan pengangguran	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
(4) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	241.944	g	Pengendalian pertumbuhan penduduk	1.5	Terkendalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%		



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 - 2026

No	SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	INDIKATOR	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN
		(5) Ketenagakerjaan	7,97				
				h Peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan pembangunan pemuda	1.6 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin
						2. Indeks Pembangunan Gender	Poin
2	Mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.	(1) Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rp)	95.423.378	2 Pembangunan ekonomi yang inklusif	2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Pengeluaran / Indeks Daya Beli	% Poin
		(2) Konsumsi Pemerintah (Juta Rp)	15.803.186	a Peningkatan nilai investasi	2.1 Meningkatkan realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.
		(3) LPE (%)	5,48	b Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM	2.2 Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian 2. Laju pertumbuhan sektor perdagangan 3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata 4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	% % % %
		(4) PDRB Perkapita (Rp)	45.203.524				
		(5) Investasi (Miliar)	20.146,54	c Peningkatan daya beli masyarakat	2.3 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. 000
		(6) Laju Investasi (%)	13,02	d Peningkatan ketahanan pangan daerah	2.4 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin



No	SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	INDIKATOR	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN
3	Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal, yang didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari, dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.	(1) Pertanian	34,05	3 Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Indeks Daya Saing Infrastruktur	Poin Poin
		(2) Pertambangan dan Bahan Galian	0,11				
		(3) Industri Pengolahan	17,99	a Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	3.1 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kemantapan jalan kabupaten dan poros desa	%
		(4) Listrik, Gas dan Air Bersih	0,48	b Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar secara merata		Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%
		(5) Bangunan (Konstruksi)	2,77	c Penyediaan hunian layak huni		Persentase kawasan permukiman layak huni	%
		(6) Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,21	d Pemerataan akses terhadap air minum dan sanitasi layak		Cakupan air minum layak	%
		(7) Angkutan dan Komunikasi	4,02			Cakupan sanitasi layak	%
		(8) Keuangan dan Persewaan	3,29	e Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.2 Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
		(9) Jasa-jasa Lainnya	10,07	f Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	3.3 Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin
				g Pemerataan pembangunan perdesaan	3.4 Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%



No	SASARAN RPJPD KABUPATEN GARUT TAHAP IV	INDIKATOR	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasnya masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah.	(1) Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)**	BB	4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.	4 Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	
		(2) Indeks Kepuasan Masyarakat (Kategori)**	Baik	a Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;	4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	
		(3) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Kategori)**	A	b Penguatan akuntabilitas dan pengawasan		2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	
		(4) Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori)**	A	c Penataan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik/digital d Penataan sistem manajemen SDM aparatur		3. Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	
		(5) Nilai Evaluasi LPPD (Kategori)**	Tinggi			4. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	
						5. Indeks SPBE	Nilai	
						6. Indeks Sistem merit	Nilai	
						7. Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Nilai	
						8. Indeks Inovasi Daerah	Nilai	

Sumber : diolah Bappeda 2023

Tujuan pertama RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 adalah **Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas** diarahkan untuk menjawab isu strategis sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Pembangunan Karakter dan Budaya SDM; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 3) Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan; 4) Penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi; 5) Pengendalian pertumbuhan penduduk; 5) Penanganan Kemiskinan; 6) Kesetaraan gender, hak anak, dan pembangunan pemuda; dan. Tujuan ini memiliki 6 (enam) sasaran meliputi: 1) Meningkatnya Kesalehan Sosial; 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; 2) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat; 4) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat; 5) Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk; dan 6) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda.

Tujuan Kedua adalah **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Nilai Investasi; 2) Sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM; 3) Daya Beli Masyarakat; 4) Ketahanan Pangan. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran meliputi: 1) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha; 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM; 3) Meningkatnya daya beli masyarakat; 4) Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Tujuan Ketiga adalah **Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** untuk menjawab isu strategis Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah; 2) Infrastruktur dasar; 3) Hunian layak; 4) Akses terhadap air minum dan sanitasi layak; 5) Kualitas lingkungan hidup, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan 6) Ketangguhan terhadap bencana; serta 7) Pemerataan pembangunan perdesaan. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran meliputi: 1) Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi; 2) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) Menurunnya risiko bencana; 4) Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan.

Tujuan Keempat adalah **Terwujudnya Pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih** untuk menjawab isu strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) kualitas dan akses pelayanan publik; 2) akuntabilitas dan pengawasan; 3) tata kelola pemerintahan berbasis elektronik/digital; dan 4) Sistem manajemen SDM aparatur. Tujuan ini memiliki 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsifs.

Untuk setiap rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Target indikator kinerja sasaran RPJPD Kabupaten Garut pada akhir periode tidak seluruhnya sama persis dengan target akhir RPD pada tahun 2026 sebab adanya penyesuaian terhadap kondisi terkini. Penyusunan target indikator kinerja pembangunan juga ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian hingga tahun 2023 yang digunakan sebagai dasar atau *baseline*. Penentuan target disusun secara realistis dan diharapkan tetap mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan Kabupaten Garut.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2025-2026

ISU STRATEGIS		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN				TARGET KONDISI AKHIR S/D 2026
						2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Kualitas sumber daya manusia	1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1. Indeks kesalehan sosial masyarakat	Nilai	Baik	83,56 (Baik)	84,49 (Baik)	Baik	Baik	84,89 (Baik)	85,40 (Baik)	85,40 (Baik)
				2. Indeks Kesehatan	Poin	79,37	79,77	79,77	79,83 - 80,03	80,04 - 80,24	80,79	81,11	81,11
				3. Indeks Pendidikan	Poin	58,52	59,85	59,85	60,46 - 62,35	61,79 - 63,68	61,2	61,61	61,61
				4. Persentase Penduduk Miskin	%	10,65	10,42	10,42	7,66 - 7,77	6,92-7,03	9,21	8,96	8,96
a	Peningkatan moral, etika, dan tanggung jawab sosial	1.1	Meningkatnya Kesalehan Sosial	1. Indeks Kesalehan Sosial	Nilai	Baik	83,56 (Baik)	84,49 (Baik)	Baik	Baik	84,89 (Baik)	85,40 (Baik)	85,40 (Baik)
b	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,59	71,85	72,07	71,89 - 72,01	72,03 - 72,1	72,51	72,72	72,72
c	Penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi												
d	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan masyarakat	1.3	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,83	7,84	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	7,94	7,98	7,98
				2. Harapan Lama Sekolah		12,03	12,15	12,16	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21	12,32	12,45	12,45

ISU STRATEGIS		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN				TARGET KONDISI AKHIR S/D 2026
						2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
e	Penanganan kemiskinan	1.4	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	1. Jumlah penduduk miskin	Tahun	281,36	276,67	260,48	209,17-212,17	190,67-193,67	253,13	249,19	249,19
f	Penanganan Pengangguran			2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	8,68	7,6	7,33	7,31 - 7,50	6,41-6,61	7,03	6,89	6,89
g	Pengendalian pertumbuhan penduduk	1.5	Terkendalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,72	0,86	0,84	1,1	1,1	1,09	1,05	1,05
h	Peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan pembangunan pemuda	1.6	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,87	73,74	n/a			73,82	73,9	73,9
				Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,13	82,78	n/a			82	82,98	82,98
2	Pembangunan ekonomi yang inklusif	2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,58	5,08	n/a	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57	5,00	4,66	4,66
				2. Indeks Pengeluaran / Indeks Daya Beli	Poin	63,17	64,17	65,83	66,96-67,63	68,45-69,09	67,94	68,92	68,92
a	Peningkatan nilai investasi	2.1	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,29	1,165	1,356	2,12-2,13	1,52 - 1,53	1,30	1,32	1,32
b	Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ekonomi dan	2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian	%	3,61	4,43	n/a			4,29	3,61	3,61
				2. Laju pertumbuhan	%	3,08	4,53	n/a			4,71	4,55	4,55

ISU STRATEGIS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN				TARGET KONDISI AKHIR S/D 2026
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
			industri kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM									
			sektor perdagangan									
			3. Laju pertumbuhan sektor pariwisata	%	0,25	17,02	n/a			11,7	10,45	10,45
			4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,91	6,29	n/a			6,3	6,1	6,1
c	Peningkatan daya beli masyarakat	2.3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. 000	7961	8.227	8.685	9.012,50 - 9.212,50	9.305,82	9.609,80	9.609,80
d	Peningkatan ketahanan pangan daerah	2.4	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	79,7	83,1	91,7	81	82	90	90
3	Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin			63,66		51,55	63,17	65,16
a	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	3.1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kemandapan jalan kabupaten dan poros desa	%	48,91	51,42	55,25	55,27	57,92	60,42	62,5
b	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar secara merata			Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	75,23	82,7	83,43	84,4	88,04	91,25	93,55

ISU STRATEGIS		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN				TARGET KONDISI AKHIR S/D 2026
						2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
				Persentase kawasan permukiman layak huni	%			35,66	25	36,02	36,59	37,16	37,16
c	Penyediaan hunian layak huni			Cakupan air minum layak	%	87,26	88,51	90,04	90,04	90,74	91,25	93	93
d	Pemerataan akses terhadap air minum dan sanitasi layak			Cakupan sanitasi layak	%	67,13	67,17	68,11	68,11	68,53	69,05	70	70
e	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.2	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,82	69,25	90,04	60,75	63,21	62,33	62,74	62,74
f	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	3.3	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	185	164,91	147,39	197	194	150	145	145
g	Pemerataan pembangunan perdesaan	3.4	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	30,17	34,91	39,67			75,77	79,33	79,33
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan	4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	66,25 (B)	68,89 (B)	68,50 (B)	BB	BB	71 (BB)	72 (BB)	72 (BB)

ISU STRATEGIS		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN& SASARAN	SATUAN	REALISASI			TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN				TARGET KONDISI AKHIR S/D 2026
						2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
a	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;	4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,3 (Baik)	82,91 (Baik)	83,8 (Baik)	Baik	Baik	84,00 (Baik)	85,00 (Baik)	85,00 (Baik)
b	Penguatan akuntabilitas dan pengawasan			2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	B	75,701 (B)	77,829 (B)	A	A	73,2 (B)	75,1(B)	75,1(B)
				3. Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	74,28 (BB)	74,38 (BB)	74,91 (BB)	BB	A	75 (BB)	75,5 (BB)	75,5 (BB)
				4. Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	Tinggi (3,5117)	Tinggi	Tinggi (3,4962)	Tinggi	Tinggi	Tinggi (3,1)	Tinggi (3,1)	Tinggi (3,1)
c	Penataan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik/digital			5. Indeks SPBE	Nilai	3,25	3,25	3,29	3,11	3,87	3,35	3,40	3,40
d	Penataan sistem manajemen SDM aparatur			6. Indeks Sistem merit	Nilai	266 (Baik)	Baik (259,5)	328,5 (Sangat Baik)	311.6 (Sangat Baik)	328 (Sangat Baik)	329 (Sangat Baik)	329 (Sangat Baik)	329 (Sangat Baik)
				7. Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Nilai			68,76 (Baik)			73,2 (Baik)	75,1 (Baik)	75,1 (Baik)
				8. Indeks Inovasi Daerah	Nilai		54,13 (Inovatif)	42,96 (Inovatif)			40,15 (Inovatif)	52,35 (Inovatif)	52,35 (Inovatif)

Sumber : Bappeda Kab. Garut , *) Data realisasi awal berdasarkan Inarisk ; **) Pemutakhiran Data Realisasi, berdasarkan Publikasi IRBI Tahun 2022

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2025-2026 secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 berdasarkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan secara Holistik, Tematik dan Integratif disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya Kesalehan Sosial	Pembangunan iklim kehidupan masyarakat yang beragama, demokratis, toleran dan berbudaya	1. Penguatan organisasi/lembaga kemasyarakatan	Bakesbangpol	Setda
			2. Penguatan peran partai politik	Bakesbangpol	Setda, Setwan
			3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi Forkopimda	Bakesbangpol	Setda
			4. Pemetaan, pembinaan dan pengendalian kerawanan konflik	Bakesbangpol	Setda, Satpol PP, Bakesbangpol
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Transformasi sistem kesehatan masyarakat	1. Perluasan cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer	Dinas Kesehatan	DPMD, DP2KBP3A,
			2. Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan unggulan sesuai dengan kebutuhan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi, Sekretariat Daerah
			3. Ketersediaan sektor farmasi dan alat kesehatan serta kesiapsiagaan krisis kesehatan	Dinas Kesehatan	BPBD, PMI
			4. Penyusunan rencana kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	BKD, Sekretariat Daerah, BPKAD
			5. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, BPKAD, UOBK Blud RSUD dr. Slamet
			6. Integrasi sistem informasi kesehatan	Dinas Kesehatan	Diskominfo, RSUD dr. Slamet
			7. Intervensi spesifik penurunan stunting	Dinas Kesehatan	DPMD, Kewilayahan, DKP, Dinas Pertanian,
			8. Intervensi sensitif penurunan stunting	DP2KBP3A	Dinas PUPR, Dinas Perkim
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Transformasi sistem pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan PAUD/TK, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial, Dispusip, Dishub, Dinas PUPR, Disperkim

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang merata	Dinas Pendidikan	BKD
			3. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Pendidikan, Diskominfo
			4. Meningkatkan penyiapan pembibitan atlet yang menjadi lingkup kewenangan dunia pendidikan	Dispora	Disdik, KONI
			5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/aktivitas untuk siswa/remaja/pemuda	Dispora	Disdik, KNPI, Kwarcab, Kesbangpol
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Peningkatan taraf hidup masyarakat	1. Penyediaan akses terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat	Disnakertrans	Diskop UKM Disperindag ESDM Disdik Diskanak Distan Disparbud
			2. Perluasan kesempatan kerja dan peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas	Disnakertrans	Diskop UKM Disperindag ESDM Disdik Diskanak Distan Disparbud DPMPSTSP
			3. Penyediaan kemudahan akses permodalan usaha dan upgrade skill usaha	DiskopUKM	Disperindag ESDM, Diskanak, Distan, Disnaker
			4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	Dinsos	Dinkes, Disdik, Diskop UMKM, Distan, DKP, Disnakertrans, Disparbud, Dinas PUPR, Disperkim, Disdukcapil, Disperindag
			5. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan	Dinsos	Dinkes, Disdik, Diskop UMKM, Distan, DKP, Disnakertrans, Disparbud, Dinas PUPR, Disperkim, Disdukcapil, Disperindag

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	Penyelenggaraan pengendalian penduduk	1. Peningkatan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana	DP2KBP3A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMD, Kewilayahan
			2. Optimalisasi pemanfaatan data Keluarga	DP2KBP3A	Disdukcapil, Dinsos, Diskominfo, Kewilayahan
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan	DP2KBP3A	Dinsos, Disdik, Dinkes, Setda, Satpol PP
			2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak	DP2KBP3A	Dinsos, Disdik, Dinkes, Setda, Satpol PP
			3. Pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	DP2KBP3A	Diskop UMKM, Disperindag, DPMD, Dinkes
			4. Pengembangan dan Perluasan Kampung KB	DP2KBP3A	DPMD, Dinkes, Disperkim
			5. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda	Dispora	Diskop UMKM, Disperindag, Disparbud, DPMD, Dinsos, Disnakertrans
	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Peningkatan promosi dan iklim investasi daerah	1. Perluasan Penyebaran Informasi Potensi, Promosi, dan Peluang Investasi	DPMPTSP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Disperindag ESDM, Diskop UKM, Disnaker, Disparbud
			2. Penyederhanaan pelayanan dan Kemudahan berusaha dan berinvestasi	DPMPTSP	
			3. Skema reward and punishment terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	DPMPTSP	
			4. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	DPMPTSP	
			5. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana produksi dan pascapanen	Distan, Diskanak	
			2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Distan, Diskanak	
			3. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Distan, Diskanak	BPBD
			4. Pengendalian kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan hewani	Distan, Diskanak	
			5. Perluasan Pasar Hasil Pertanian	Distan, Diskanak	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan	1. Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen perikanan	Diskannak	
			2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Diskannak	
			3. Perluasan Pasar Hasil Perikanan	Diskannak	
			4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diskannak	
		Peningkatan kontribusi sektor perdagangan	1. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	DisperindagESDM	
			2. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan	DisperindagESDM	
			3. Perlindungan dan Penggunaan Produk Dalam Daerah	DisperindagESDM	
			4. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil	DiskopUKM	
			5. Peningkatan Kinerja Koperasi	DiskopUKM	
		Peningkatan kontribusi sektor pariwisata	1. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata	Disparbud	
			2. Peningkatan pemasaran pariwisata	Disparbud	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			3. Peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah	Disparbud	
			4. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata	Disparbud	
			5. Peningkatan pemanfaatan kebudayaan	Disparbud	
		Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	1. Pengembangan Kawasan Industri	DisperindagESDM	
			2. Pengelolaan Sistem Informasi Industrial	DisperindagESDM	
			3. Promosi Produk Industri Lokal	DisperindagESDM	
			4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Industri	DisperindagESDM	Disnakertrans
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Keterjangkauan Harga Komoditas Kebutuhan Pokok	1. Peningkatan sarana distribusi perdagangan	DisperindagESDM	
			2. Stabilisasi harga dan penguatan rantai pasok barang pokok	DisperindagESDM	
			3. Perlindungan terhadap hak konsumen	DisperindagESDM	
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	1. Peningkatan, pemantauan, pengendalian ketersediaan pangan	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, BPS, Disperindag ESDM
			2. Peningkatan, pemantauan, dan pengendalian sistem logistik pangan (Silopang)	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Disperindag ESDM, BULOG
			3. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Disperindag ESDM, Diskop UKM
			4. Peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan	DKP	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
					Disperindag ESDM, Dinas Kesehatan
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah	1. Peningkatan pemantapan jalan dan jembatan	Dinas PUPR	Dinas Perhubungan
			2. Pemerataan infrastruktur dasar	Dinas PUPR	Disperkim, DLH
			3. Penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan	Dinas PUPR	Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup
			4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas PUPR
			5. Peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan
			6. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM	Dinas PUPR	
		Penyediaan kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Disperkim	
			2. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman	Disperkim	
			3. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman	Disperkim	
			4. Pembangunan dan peningkatan kualitas RUTILAHU	Disperkim	Dinsos Disdukcapil
			5. Penyediaan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)	Disperkim	DPMPTSP
	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengendalian pencemaran air dan udara	1. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3	DLH	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
			2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	DLH	
			3. Penurunan beban pencemaran air	DLH	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
			4. Pengendalian sumber emisi	DLH	Dishub
		Peningkatan tutupan vegetasi lahan	Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau	DLH	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
		Peningkatan pengelolaan sampah	1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup	DLH	
			2. Pengurangan timbulan sampah	DLH	
			3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH	
			4. Revitalisasi fungsi TPA	DLH	
		Perencanaan Penataan ruang dan pengembangan kawasan terbangun strategis	1. Perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Dinas PUPR	DLH
			2. Penataan Bangunan Sesuai Standar Melalui Layanan Sertifikat Laik Fungsi	Dinas PUPR	
			3. Penataan Kawasan strategis Kabupaten	Dinas PUPR	Disparbud, DLH
			4. Pengelolaan dan pengawasan jasa konstruksi yang sesuai standar	Dinas PUPR	
	Menurunnya risiko bencana	Peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana	1. Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana	BPBD	Dinas PUPR, Setda, Bappeda, Disperkim, DPMPT, Dinkes, Disdik, Disdamkar, Satpol PP, Dinsos, DPMD, DKP, Distan, Diskanak, Kewilayahan, Desa
			2. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana	BPBD	Dinas PUPR, Setda, Bappeda, Disperkim, DPMPT, Dinkes, Disdik, Disdamkar, Satpol PP, Dinsos, DPMD, DKP, Distan, Diskanak, Kewilayahan, Desa
	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Percepatan pembangunan desa mandiri dan maju	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	DPMD	Diskop UMKM, Disperindag, Dinsos, DKP
			2. Peningkatan dan penguatan sarana prasarana serta infrastruktur perdesaan	DPMD	Disperkim, Dinas PUPR, Distan, Diskominfo

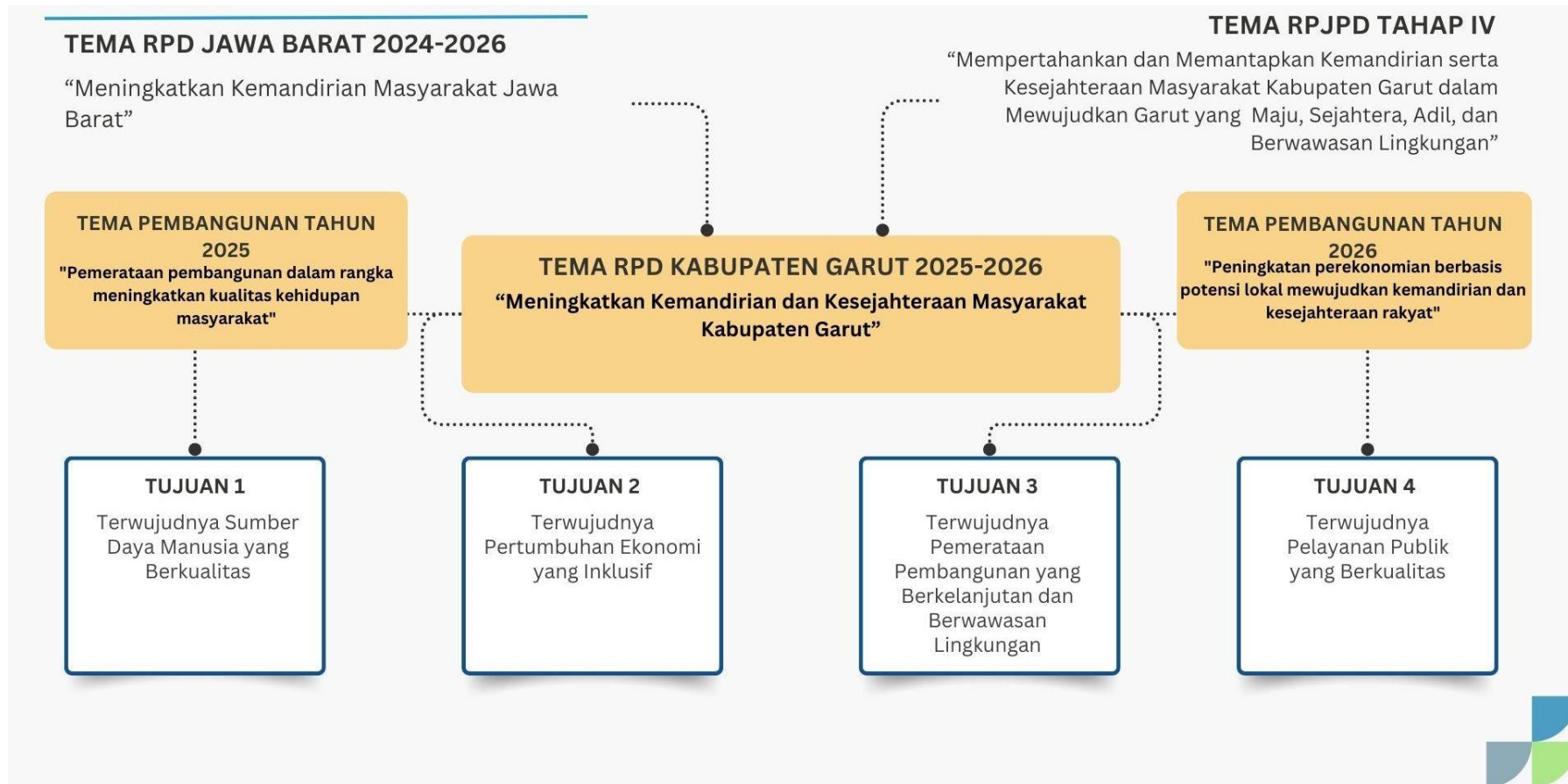
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
			3. Penguatan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa serta kerjasama antar desa	DPMD	Setda, Inspektorat, BPKAD
			4. Mendorong pengembangan pariwisata desa	DPMD	Disparbud, Disperkim, Dinas PUPR, Diskop UMKM, Disperindag, Diskominfo
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
			2. Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
			3. Optimalisasi penerapan SOP dan standar pelayanan publik	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
		Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan publik	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPPTSP, Disdukcapil, Disdamkar	Seluruh perangkat daerah
			2. Penerapan reward and punishment pelayanan publik		Seluruh perangkat daerah
		Pemantapan Penerapan Reformasi birokrasi	1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Sekretariat Daerah	Seluruh perangkat daerah
			2. Penguatan dan penataan organisasi	Sekretariat Daerah	Seluruh perangkat daerah
			3. Optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten	BKD	Seluruh perangkat daerah
			4. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel	Bappeda, BPKAD, Inspektorat	Seluruh perangkat daerah
		Peningkatan inovasi daerah dalam rangka	1. Pelaksanaan satu instansi, satu inovasi (<i>One Agency One Innovation</i>)	Bappeda	Seluruh perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
		pelayanan publik dan pembangunan daerah	2. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat Daerah, Diskominfo, DPMPTSP, Disdukcapil	Seluruh perangkat daerah

Sumber: diolah Bappeda 2023

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dikemas ke dalam tema pembangunan tahunan yang secara simultan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 adalah **“Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Garut”**, yang dijabarkan kedalam tema tahunan mulai untuk tahun 2025 dan 2026. Adapun rumusan tema pembangunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 tersaji pada **Gambar 6.1**.

Gambar 6.1 Tema Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026



Sumber : diolah Bappeda 2023

Tema Pembangunan Kabupaten Garut tahun 2025-2026 mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dari periode pembangunan sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tema pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk melanjutkan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan lebih meningkatkan perluasan dan pemerataan pembangunan dan cakupan pelayanan ke seluruh wilayah di Kabupaten Garut utamanya daerah-daerah yang masih memiliki akses dan konektivitas terbatas akibat kondisi topografi termasuk memperbaiki aksesibilitas desa untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan ekonomi Kabupaten Garut diarahkan kepada sektor-sektor unggulan pertanian, perikanan, dan kelautan, industri perdagangan hingga industri pengolahan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pemerataan pembangunan ini diharapkan dapat mendukung penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran Kabupaten Garut yang masih tinggi sehingga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Pembangunan tahun 2026 difokuskan untuk mencapai target akhir RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 yang diarahkan pada peningkatan perekonomian berbasis potensi lokal Kabupaten Garut yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat. Fokus pembangunan ekonomi masih kepada sektor unggulan pertanian hingga ekonomi kreatif yang tentunya diharapkan dapat terus berkembang tumbuh dan berkelanjutan mewujudkan masyarakat Kabupaten Garut yang mandiri dan sejahtera.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Kewilayahan

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dilakukan dengan pendekatan kewilayahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Pengintegrasian RTRW ke dalam RPD dilakukan dengan memuat program/kegiatan yang mengakomodir penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW (Rencana Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang), Program Perwujudan Struktur Ruang (sistem

perkotaan dan jaringan prasarana), dan Program Perwujudan Pola Ruang (kawasan lindung dan budidaya).

Arah kebijakan kewilayahan di Kabupaten Garut dirumuskan berdasarkan pendekatan top-down maupun pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down dilakukan dengan mengadaptasi kebijakan Pembangunan kewilayahan untuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) lingkup Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Rencana Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi 6 (enam) kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Keenam kabupaten tersebut merupakan titik pengembangan yang akan dikembangkan di Kawasan tersebut.

Konsep yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam. Konsep pengembangan wilayah terpadu diharapkan dapat menghasilkan *spread-effect* yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah dengan memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yaitu agribisnis, perikanan dan pariwisata. Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan, diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 mengamanatkan 170 *project* pengembangan yang terdiri dari 81 *project* di Kawasan Rebana dan 89 *project* di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam hal ini, Kabupaten Garut berperan sebagai penerima manfaat *project* dan pelaksana *project*. Daftar *project* pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai penerima manfaat diantaranya:

1. Jalan Tol GeTaCi Segmen 1;
2. JTS (Jalur Tengah Selatan) segmen timur;
3. Rekonstruksi jalur Bandung - Pengalengan – Rancabuaya;
4. Reaktivasi Rel KA Cibatuh – Cikajang;
5. Pembangunan Daerah Irigasi Candra Goyang;
6. Penanganan banjir (sungai Cipalebuh, sungai Cikaso);
7. PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu);

8. PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Gunung Papandayan;
9. Pembangunan Desa Digital;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun;
11. Pembangunan Kawasan Minapolitan;
12. Pembangunan Rumah Khusus Nelayan;
13. *Breakwater* pantai Rancabuaya.

Adapun daftar *project* pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pelaksana *project* diantaranya:

1. Jalan lingkar Garut;
2. TPA Garut (Pameungpeuk, Caringin, Banjarwangi);
3. Pasar Cikajang.

Selanjutnya, ditinjau dari pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan regional Jawa Barat, maka fungsi RTRW merupakan matra spasial RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan kebijakan dan strategi terkait pola ruang dalam peraturan tersebut terdapat target ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dengan target pencapaian tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sinkronisasi perumusan rencana pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD (dalam hal ini RPD) dengan program pemanfaatan ruang dalam RTRW dilakukan melalui instrumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Dalam hal ini, maka penyelarasan prioritas pembangunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 juga mengacu terhadap instrumen tersebut. Adapun beberapa strategi penataan ruang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 yang memuat strategi yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketentuan Kawasan yang dikendalikan

perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:

- a) menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan
 - b) meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/ jasa: dan
 - c) meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:
- a) mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
 - b) mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan pedesaan;
 - c) mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan pedesaan;
 - d) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
 - e) mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk. perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;

- f) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
 - g) meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
3. Strategi untuk Kebijakan perlindungan dan peningkatan Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
- a) meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b) membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c) meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budidaya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan Khusus;
 - d) mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
 - e) mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f) meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h) mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat Kritis;
 - i) meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j) meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;

- k) mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l) mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada diluar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
4. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
- a) merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b) mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c) pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
 - d) mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
 - e) mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Strategi untuk Kebijakan optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a) meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b) menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c) mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan.

Disamping strategi di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2022-2042 telah ditetapkan kebijakan perairan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Strategi 12 mil perairan bertujuan untuk mengelola wilayah perairan di sekitar pesisir atau pantai, untuk memastikan ekosistem perairan termasuk keseimbangan ekologi dan pengelolaan sumber daya perikanan, serta untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah perairan seperti pariwisata bahari, sumber energi minyak dan gas alam, serta transportasi laut yang tentunya berpengaruh terhadap pola penataan ruang perairan di Kabupaten Garut yang memiliki wilayah pantai di bagian selatan Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031, kebijakan pembangunan kewilayahan ditinjau dari penataan ruang Kabupaten Garut, lebih diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan konsepsi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut baik eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan yang dilintasi jalur tersebut karena adanya peningkatan aksesibilitas.
- 2) Adanya pengembangan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan – Palimanan yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah bagian Utara Kabupaten Garut seperti Kecamatan Malangbong, Selaawi, dan Limbangan karena adanya peningkatan aksesibilitas.
- 3) Adanya rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Jawa Barat, yaitu jalan tol Cigatas di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.
- 4) Adanya rencana reaktivasi jalur Kereta Api Cibatuan – Garut – Cikajang;
- 5) Adanya rencana pengembangan pelabuhan samudera yang melayani angkutan barang untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat peran dan kedudukan Kabupaten Garut dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 6) Adanya kebijakan penetapan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat akan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang secara luas di wilayah Kabupaten Garut. Target alokasi luasan Kawasan Lindung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031 mencapai sebesar 50,65% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

- 7) Adanya rencana pengembangan kawasan andalan Priangan Timur di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya telah membuka peluang bagi wilayah Kabupaten Garut untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan terutama agribisnis dan pariwisata.
- 8) Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 9) Keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam usaha memacu pembangunan wilayah Kabupaten Garut dengan memperhatikan implikasi keruangan yang didasarkan atas komplementari antar sektor-sektor yang terpilih dalam wilayah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan saling ketergantungan antar wilayah yang dalam jangka waktu jangka panjang dapat membentuk satu kesatuan ekonomi wilayah.
- 10) Keterkaitan antara kawasan yang berkembang pesat dan sektor-sektor pengembangan utama dengan kawasan yang terisolir dan tertinggal pertumbuhannya. Dimaksudkan agar terjadi penyebaran dan penyaluran pertumbuhan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut.

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Penjelasan atas tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi: kenyataannya wilayah Kabupaten Garut sebagian besar wilayahnya berdasarkan kriteria fisik (Keppres 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung) berfungsi lindung. Namun demikian, kawasan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya pemanfaatan lahannya harus memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap Kabupaten Garut. sebagai kabupaten yang dapat mengelola sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya dengan segala potensi sumber daya alam yang ada.
2. Agribisnis: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha rakyat di bidang pertanian, memiliki daya saing, berbasis kerakyatan dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sesuai prinsip *sustainable development* bahwa pemanfaatan sumberdaya selain memenuhi kebutuhan sekarang juga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang.
3. Pariwisata: mengembangkan orientasi ekonomi yang berbasis wisata alam dan wisata budaya yang memanfaatkan panorama alam, sumber daya alam dan budaya dalam rangka menunjang perekonomian daerah.
4. Kelautan: adalah mengembangkan ekonomi yang berbasis kelautan baik itu di sektor pariwisata maupun perikanan dan hasil laut lainnya.
5. Industri yang berkelanjutan: adalah pengembangan industri yang dapat menjamin kelestarian sumber daya, terkendali, lestari, ecoefisiensi dan memperhatikan kelanjutan ekosistem.
6. Berbasis Mitigasi Bencana: Penataan ruang Kabupaten Garut yang memuat pengurangan resiko bencana sebagai dasar dalam alokasi pemanfaatan ruang bagi pembangunan. Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya bencana, sehingga mampu berkontribusi dalam pengurangan resiko bencana.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
2. Peningkatan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan pada kawasan lindung;
3. Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal;
5. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;

6. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
7. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
8. Pengembangan pusat kegiatan;
9. Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana;
10. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
11. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Garut diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan fungsi pelestarian Kawasan lindung, meliputi:
 - a) mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b) meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - c) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi ekosistem;
 - d) meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang sesuai dengan kaidah konservasi dengan memperhatikan kualitas fungsi ekosistem dan jasa lingkungan;
 - e) mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata; dan
 - f) meningkatkan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan.
2. Strategi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan, meliputi:
 - a) meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
 - b) mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - c) mengembangkan budi daya peternakan pada kawasan permukiman perdesaan yang ramah lingkungan;
 - d) mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan;
 - e) mengembangkan kawasan perikanan budidaya;
 - f) mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi; dan
 - g) mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan dan objek wisata.
3. Strategi pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, meliputi:
 - a) mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata alam, budaya dan buatan;
 - b) mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - c) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;

- d) meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
 - e) meningkatkan pengembangan agrowisata.
4. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan, meliputi:
- a) mengembangkan perikanan tangkap;
 - b) mengembangkan budidaya perikanan;
 - c) mengoptimalkan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan hutan mangrove;
 - d) mengembangkan budidaya laut yang ramah lingkungan;
 - e) mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan
 - f) merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan perlindungan bencana pesisir.
5. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, dan berkelanjutan, meliputi:
- a) membangun dan menata kawasan industri yang terpadu, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - b) mengembangkan dan menata industri kecil dan menengah serta sentra industri;
 - c) meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan
 - d) mengembangkan ruang terbuka, baik hijau dan non hijau, sebagai area penyangga antara kawasan industri dengan kawasan lain di sekitarnya.
6. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah, meliputi:
- a) mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan pedesaan, antar perkotaan, antar pedesaan dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;
 - b) reaktivasi dan mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;
 - c) mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
 - d) mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - e) mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil berbasis energi setempat;
 - f) meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - g) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan air limbah, sistem pelayanan air minum, sistem pelayanan drainase; dan
 - h) mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah.
7. Strategi pengembangan pusat kegiatan, meliputi:

- a) mengembangkan PKL di wilayah utara dengan fungsi utama jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman perkotaan;
 - b) mengembangkan kawasan PKL di wilayah selatan dengan fungsi utama agribisnis, kelautan, permukiman, pariwisata dan konservasi;
 - c) mengembangkan PPK secara seimbang dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan wilayah;
 - d) mengembangkan PPL yang memiliki skala pelayanan PKL - PPL dan menunjang PPK; dan
 - e) mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan.
8. Strategi peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) memanfaatkan teknologi mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini;
 - b) mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 - c) menetapkan tempat evakuasi bencana;
 - d) menyiapkan lahan-lahan alternatif untuk tempat relokasi pasca bencana; dan
 - e) meningkatkan infrastruktur mitigasi pada kawasan rawan bencana.
9. Strategi pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) mengendalikan dan membatasi pemanfaatan ruang, khususnya pembangunan fisik dan pengembangan kawasan budidaya, pada kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunungapi, gempabumi, dan tsunami;
 - b) membangun ketangguhan terhadap bencana di kawasan budi daya dari bahaya gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami; dan
 - c) mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk pengendalian pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana.
10. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
- a) mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pengembangan sistem perkotaan/ permukiman di wilayah Kabupaten Garut didasarkan pada :

1. Pemerataan pembangunan di setiap wilayah dengan mengembangkan peran dan fungsi masing-masing pusat kegiatan;
2. Mengembangkan sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang mendukung struktur yang direncanakan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain untuk mengurangi ketergantungan kepada wilayah lain;
3. Mengintegrasikan fungsi perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah; dan
4. Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang.

Konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Garut maka rencana pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. PKL merupakan Kawasan yang berperan sebagai kawasan perkotaan yang melayani beberapa kecamatan atau perkotaan tersebut dan merupakan pusat kegiatan pada kawasan strategis kabupaten, dengan kriteria:
 - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau;
 - Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Adapun PKL di Kabupaten Garut berdasarkan kriteria dan dasar pertimbangan kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. Perkotaan Garut
- b. Perkotaan Pameungpeuk
- c. Perkotaan Cikajang
- d. Perkotaan Rancabuaya
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa terdapat 35 pusat, yaitu : Perkotaan Cisewu; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pakenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisirupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan

Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; Perkotaan Selaawi. Perkotaan Singajaya; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibat; dan Perkotaan Kadungora.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diemban oleh 39 desa, diantaranya: Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu; Desa Sukarame Kecamatan Caringin; Desa Sukamulya Kecamatan Talegong; Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti; Desa Pananjung Kecamatan Pamulihan; Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng; Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet; Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang; Desa Sancang Kecamatan Cibalung; Desa Depok Kecamatan Cisompet; Desa Toblong Kecamatan Peundeuy; Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk; Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip; Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi; Desa Ciudian Kecamatan Singajaya; Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu; Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong; Desa Barusuda Kecamatan Cigedug; Desa Cidatar Kecamatan Cisirupan; Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi; Desa Cibodas Kecamatan Cikajang; Desa Sukakarya Kecamatan Samarang; Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi; Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan; Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja; Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan; Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja; Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening; Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah; Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi; Desa Cangkuang Kecamatan Leles; Desa Talagasari Kecamatan Kadungora; Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong; Desa Keresek Kecamatan Cibat; Desa Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah; Desa Majasari Kecamatan Cibiuk; Desa Galihpakuwon Kecamatan Balubur Limbangan; Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi; dan Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong. Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu;

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)** Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

A. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :

1. **Kawasan Perkotaan Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan di fokuskan pada :
 - 1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
 - 2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
 - 3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
 - 4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
 - 5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
 - 6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
 - 7) Rehabilitasi *drainase* perkotaan;
 - 8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
 - 9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olah Raga (SOR);
 - 10) Pembangunan dan Pengembangan Art Centre;
 - 11) Pengembangan Islamic Centre;
 - 12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
 - 13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 14) Pengembangan industri kreatif;
 - 15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;
 - 16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;
 - 17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;
2. **Kawasan Koridor Kadungora - Leles - Garut**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :

- 1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;
- 3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;
- 4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora;
- 5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 6) Pengembangan industri kreatif;

3. Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong), dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara difokuskan pada :

- 1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;
- 2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
- 4) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
- 5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung *trade centre* di Bl. Limbangan;
- 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 8) Pengembangan industri kreatif;
- 9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut
- 10) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Utara;
- 11) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong;
- 12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi;
- 13) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
- 14) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
- 15) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.

4. **Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya),** dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur difokuskan pada :
 - 1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
 - 2) Elektrifikasi rumah tangga;
 - 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
 - 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
 - 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
 - 6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
 - 7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - 8) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 9) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
 - 10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
 - 12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
 - 13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.
5. **Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin - Cisewu - Talegong),** dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung.

Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat difokuskan pada :

- 1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
- 5) Elektrifikasi rumah tangga;
- 6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
- 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- 9) Pengembangan desa mandiri pangan;
- 10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
- 11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.

6. Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya difokuskan pada :

- 1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
- 3) Elektrifikasi rumah tangga;
- 4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 5) Pengembangan industri kreatif;
- 6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
- 7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
- 8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
- 9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- 10) Pengembangan desa mandiri pangan;
- 11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;

- 12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
 - 13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
 - 14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
 - 15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;
7. **Kawasan Minapolitan**, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada:
- 1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan-Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;
 - 2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
 - 3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
 - 4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
 - 5) Pengembangan desa mandiri pangan;
 - 6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
 - 7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
 - 8) Pengembangan industri kreatif;
8. **Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan**, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :

- 1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
- 2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
- 3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
- 4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- 5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
- 6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
- 7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
- 8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- 9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
- 10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
- 11) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
- 12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

B. Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :

- 1) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh.** Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Dukuh terletak di Kecamatan Cikelet merupakan desa dengan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufisme pada Mazhab Imam Syafi'i. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa tersebut serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dari tembok dan atap genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatarbelakangi alasan bahwa hal yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di kampung ini tidak diperkenankan adanya listrik dan barang-barang elektronik lainnya

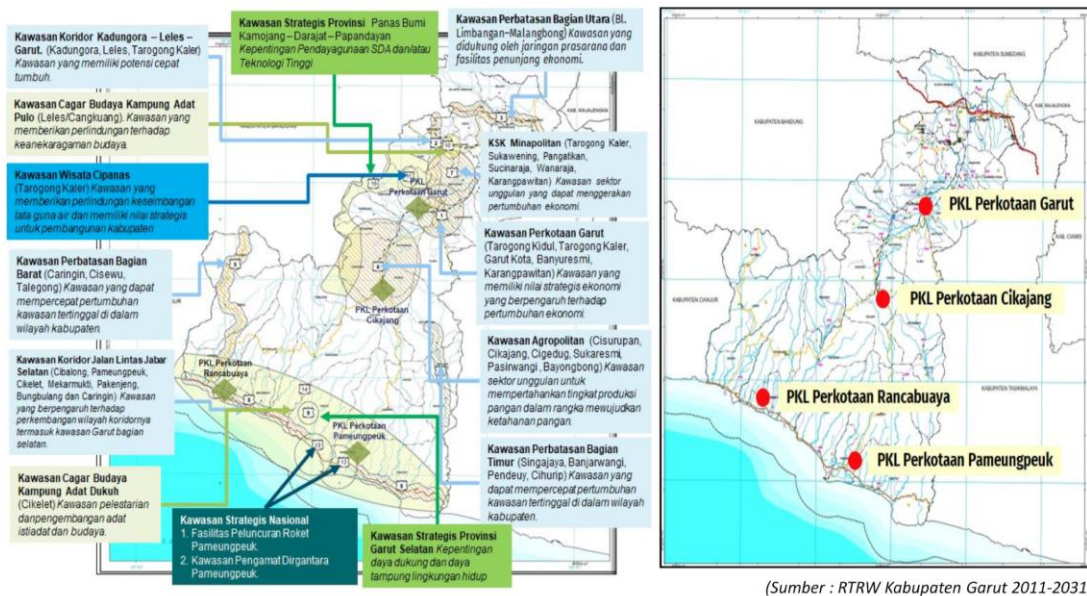
yang dipercaya selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan kemudharatan yang tinggi pula. Alat makan yang dianjurkan terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya bambu batok kelapa dan kayu lainnya. Material tersebut dipercaya lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran.

- 2) **Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo Canguang** sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Kampung Adat Pulo yang masih memegang teguh adat istiadat karuhunnya berada pada kompleks Danau/Situ Canguang Kecamatan Leles yang dikelilingi oleh pemandangan alam pegunungan yang tepat pada tengahnya terdapat pulau yang didalamnya berdiri sebuah Candi Hindu peninggalan abad ke XVII. Untuk mencapai Candi dan Kampung Adat tersebut wisatawan dapat menyewa rakit yang mempunyai daya tampung sampai 30 orang, terdapat pula sebuah museum yang menyimpan berbagai jenis benda peninggalan dari masa Hindu dan Islam.

C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah **Kawasan Wisata Cipanas**, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya.

Gambar 6.2 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut



Indikasi Program Perairan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 yang berlokasi di Kabupaten Garut, meliputi :

1. Pelabuhan Perikanan PPP Cilauteureun;
2. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap;
3. Sentra Kegiatan Budidaya Perikanan;
4. Pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
5. Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Regional di Kabupaten Garut (Pelabuhan Pameungpeuk, Pakenjeng, Caringin);
6. Pelaksanaan Penggelaran, Pengoperasian, Perbaikan, dan Perawatan Kabel Bawah Laut;
7. Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Ekosistem Mangrove;
8. Perikanan Tangkap Laut;
9. Perikanan Budidaya Laut;
10. Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut;

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

Program pembangunan Daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional serta dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai

sasaran RPD yang akan menjadi Program Prioritas yang bersifat strategis, inovatif, kolaboratif, integratif, dan implementatif dalam upaya Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2026 pembangunan Kabupaten Garut diprioritaskan pada:

1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja;
2. Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;
3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik dan demokrasi;
4. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial;
7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah tersebut diwujudkan melalui serangkaian Program Pembangunan Daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026. Berikut merupakan tabel sanding keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Tabel 6.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025-2026

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2025-2026	
PPP. 1	Pertumbuhan Ekonomi berbasis inovasi penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata	PPD. 1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja [PPP.1]
PPP. 2	Pengembangan reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama	PPD. 2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda [PPP.2, PPP3]
PPP. 3	Penguatan sistem kesehatan daerah	PPD. 3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi [PPP.2]
PPP. 4	Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	PPD. 4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan [PPP.1]
PPP. 5	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengembangan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa	PPD. 5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan [PPP.5]
PPP. 6	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	PPD. 6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial [PPP.4, PPP.5]
		PPD. 7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif [PPP.6]

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2025-2026 disajikan dalam berikut.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Garut Tahun 2025-2026

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
			[TUJUAN] 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Kesalehan Sosial	Baik	Baik (84,89 Poin)	Baik (85,40 Poin)	Baik (85,40 Poin)			
				Indeks Kesehatan	84,14 Poin	80,79 Poin	81,11 Poin	80,11 Poin			
				Indeks Pendidikan	62,74 Poin	61,2 Poin	61,61 Poin	61,61 Poin			
				Persentase Penduduk Miskin	6,98 %	9,21 %	8,96 %	8,96 %			
			[SASARAN] 1.1 Meningkatnya Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial	Baik	Baik (84,89 Poin)	Baik (85,40 Poin)	Baik (85,40 Poin)			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	95 %	96 %	97 %	97 %	39.807.497.421	43.788.247.163	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Koordinasi Pemerintahan	97 %	97 %	98 %	98 %	2.218.141.681	2.439.955.849	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	97 %	98 %	98 %	98 %	4.165.101.280	4.251.611.408	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang terfasilitasi	n/a Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	980.724.900	1.078.797.390	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih yang mengikuti pendidikan politik	n/a Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.345.084.200	4.779.592.620	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	n/a Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.010.392.200	3.311.431.420	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang terfasilitasi	n/a Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	971.547.400	1.068.702.140	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani	n/a Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.820.000.000	7.502.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	98 %	98 %	99 %	99 %	70.027.639.865	78.514.194.776	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
			[SASARAN] 1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,07 Tahun	72,51 Tahun	72,72 Tahun	72,72 Tahun			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Standar Pelayanan Minimal Siklus Hidup	94 %	96 %	98 %	98 %	1.917.651.000	2.109.417.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase akses sanitasi layak	50 %	60 %	65 %	65 %	5.853.252.900	6.438.578.190	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM penyakit	98 %	100 %	100 %	100 %	10.439.513.000	11.483.464.000	Dinas Kesehatan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian UHC	88 %	90 %	92 %	92 %	151.136.783.000	166.250.461.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Imunisasi dasar lengkap	97 %	100 %	100 %	100 %	3.882.435.600	4.260.678.760	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas dengan ketersediaan dengan obat, bahan habis pakai dan vaksin essensial	96 %	96 %	96 %	96 %	16.405.572.940	18.046.130.234	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	presentase fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah sesuai standar	88% %	94% %	100% %	100% %	180.191.468.631	98.775.008.357	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Balita Gizi kurang	4 %	3,9 %	3,8 %	3,8 %	7.547.468.500	8.302.215.350	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah daerah dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	20 %	25 %	30 %	30 %	6.678.157.000	7.365.972.750	Dinas Kesehatan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	70 %	75 %	80 %	80 %	330.347.600	363.382.360	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase produk pangan yang diawasi	5 %	7 %	10 %	10 %	521.880.700	574.068.770	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang diawasi memenuhi syarat	65 %	70 %	75 %	75 %	322.865.400	355.151.940	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarkat (UKBM) aktif	92 %	96 %	100 %	100 %	568.185.000	625.003.500	Dinas Kesehatan
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan Layanan Kepemudaan	60 %	65 %	70 %	70 %	2.600.776.103	3.120.931.323	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	1.700.000.000	2.000.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indek Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	63,23 %	65,23 %	66,48 %	66,48 %	1.606.723.670	1.928.068.404	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	30 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	10.760.610.029	12.912.732.034	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Prasarana Keolahragaan	168 Unit	189 Unit	210 Unit	210 Unit	52.790.239.602	69.348.287.523	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase SDM Kepramukaan yang telah mendapatkan pendidikan dasar kepramukaan	86,98 %	89,3 %	91,62 %	91,62 %	2.911.942.475	3.794.330.970	Dinas Pemuda dan Olah Raga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik SKPD	84 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	311.484.900.603	342.633.390.663	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UOBK RSUD dr Slamet	88 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	188.426.602.856	194.079.400.941	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UOBK RSUD Malangbong	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	9.960.960.000	10.674.270.000	Dinas Kesehatan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Puskesmas dan Labkesda	84 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	86 Nilai	138.208.920.012	145.119.366.013	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	82 Poin	83 Poin	84 Poin	84 Poin	275.000.100	302.500.110	Dinas Kesehatan
			[SASARAN] 1.3 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,17 Tahun	12,32 Tahun	12,45 Tahun	12,45 Tahun			
				Rata-Rata Lama Sekolah	8,68 Tahun	7,94 Tahun	7,98 Tahun	7,98 Tahun			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	61,26 %	65,76 %	68,26 %	68,26 %	74.591.000.000	77.666.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	77,06 %	82,56 %	82,06 %	85,06 %	185.262.622.724	194.156.394.448	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,61 %	96,61 %	97,31 %	97,31 %	337.880.169.568	368.673.309.480	Dinas Pendidikan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-24 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	84 %	84 %	85 %	85 %	44.439.700.000	45.489.700.000	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan yang menetapkan kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	100 %	100 %	450.000.000	500.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	100 %	100 %	650.000.000	700.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43,46 %	43,46 %	46,46 %	46,46 %	42.600.000.000	49.500.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan satuan pendidikan yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %	450.000.000	450.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan satuan Pendidikan yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %	300.000.000	350.000.000	Dinas Pendidikan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	30 %	30 %	35 %	35 %	775.000.000	775.000.000	Dinas Pendidikan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka)	41000 Orang	42000 Orang	43000 Orang	43000 Orang	1.554.205.910	1.713.654.501	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			SASARAN 1.4 Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Jumlah penduduk miskin	192,17 Ribu jiwa	253,13 Ribu jiwa	249,19 Ribu jiwa	249,19 Ribu jiwa			
				Tingkat Pengangguran Terbuka	6,51 %	7,03 %	6,89 %	6,89 %			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelatihan	50 %	80 %	85 %	85 %	4.451.000.000	4.645.000.000	Dinas Sosial
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Tertangani warga negara migran korban tindakan kekerasan	52,29 %	70 %	75 %	75 %	310.000.000	333.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	69,38 %	80 %	85 %	85 %	9.675.000.000	10.642.500.000	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kelompok rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	54,15 %	80 %	85 %	85 %	3.044.000.000	3.601.900.000	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	3.825.000.000	4.140.000.000	Dinas Sosial

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	75,5 %	75,8 %	80 %	80 %	510.000.000	549.000.000	Dinas Sosial
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	1,03 Persen	5,32 Persen	7,22 Persen	7,22 Persen	6.008.000.000	8.150.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	10,8 %	15 %	20 %	20 %	2.280.000.000	2.630.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	65,7 %	72,27 %	79,50 %	79,50 %	875.000.000	975.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Peningkatan Keterampilan Calon Transmigran	0 Orang	32 Orang	48 Orang	48 Orang	200.000.000	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			[SASARAN 1.5 Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,1 %	1,09 %	1,05 %	1,05 %			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi Program Bangga Kencana dan PPPA	100 %	100 %	100 %	100 %	8.100.000.000	8.220.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan ber KB (CU/PUS)	72,9 %	72,18 %	72,3 %	72,3 %	14.255.425.000	14.334.700.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	75 %	75,25 %	75,6 %	75,6 %	8.570.300.000	8.570.300.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			[SASARAN] 1.6 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	82,78 Poin	82 Poin	82,98 Poin	82,98 Poin			
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,74 Poin	73,82 Poin	73,9 Poin	73,9 Poin			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	75 %	75 %	75 %	963.000.000	965.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	100 %	100 %	100 %	100 %	649.479.000	655.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Desa Yang Berkategori DRPPA	16 Jumlah	25 Jumlah	30 Jumlah	30 Jumlah	320.000.000	350.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengolahan dan Analisis dan Penyajian Data	75 %	75 %	80 %	80 %	150.000.000	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	75 %	80 %	85 %	85 %	1.670.000.000	1.700.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Mengenai Perlindungan Khusus Anak	85 %	85 %	90 %	90 %	2.130.000.000	2.130.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			[TUJUAN] 2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Indeks Pengeluaran/Indeks Daya Beli	68,77 Poin	67,94 Poin	68,92 Poin	68,92 Poin			
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,22 %	5,10 %	4,66 %	4,66 %			
			[SASARAN] 2.1 Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Investasi Nasional (PMDN/ PMA)	1,525 Triliun Rp.	1,71 Triliun Rp.	1,91 Triliun Rp.	1,91 Triliun Rp.			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	10 %	20 %	1.175.000.000	1.075.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi	4 Investor	4 Investor	5 Investor	9 Investor	600.000.000	725.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal/LKPM	0 %	30 %	30 %	30 %	785.000.000	815.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			[SASARAN] 2.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	4,53 %	4,85 %	4,55 %	4,55 %			
				Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	6,29 %	6,3 %	6,1 %	6,1 %			
				Laju pertumbuhan sektor pariwisata	17,02 %	12,5 %	10,45 %	10,45 %			
				Laju pertumbuhan sektor pertanian	4,43 %	4,31 %	3,61 %	3,61 %			
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/ USP Berizin	0 %	3 %	3 %	6 %	50.000.000	51.500.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang undangan	n/a %	7,5 %	7,5 %	15 %	300.000.000	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Bersertifikat Kesehatan Koperasi	n/a %	5,3 %	8 %	8 %	310.000.000	350.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase SDM Koperasi yang	n/a %	10,3 %	10,3 %	20,6 %	385.000.000	396.550.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
			LATIHAN PERKOPERASIAN	ditingkatkan Kompetensinya							
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	n/a %	2,52 %	2,86 %	5,38 %	800.000.000	890.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Formal	n/a %	2,32 %	2,34 %	4,69 %	1.802.555.400	1.802.555.400	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan Usaha	n/a %	1,18 %	1,18 %	2,37 %	1.450.000.000	1.450.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase minat masyarakat yang diberikan penyuluhan terhadap pendirian koperasi	n/a %	50 %	50 %	50 %	177.000.000	182.310.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dimanfaatkan dan dikembangkan	27 %	70 %	70 %	70 %	3.700.000.000	4.600.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	2 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	500.000.000	570.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah lokal yang terdokumentasikan	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	700.000.000	860.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	1.150.000.000	2.240.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
			PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kepuasan Pengunjung Museum (Persentase)	75 %	80 %	80 %	80 %	700.000.000	810.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	10	PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	Jumlah Pelaku Perfilman yang terbina	n/a Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	950.000.000	1.150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Jumlah Prasarana dan sarana Perikanan Tangkap	7.518 Unit/Tahun	25 Unit/Tahun	25 Unit/Tahun	50 Unit/Tahun	16.250.000.000	17.875.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi perikanan tangkap	n/a Ton/Tahun	64 Ton/Tahun	64 Ton/Tahun	128 Ton/Tahun	4.150.000.000	4.565.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan SDM Perikanan Tangkap	7 Kelompok/Tahun	3 Kelompok/Tahun	4 Kelompok/Tahun	7 Kelompok/Tahun	2.750.000.000	3.025.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan/luas lahan budidaya	0 kg/m2	1 kg/m2	1 kg/m2	4 kg/m2	9.100.000.000	10.010.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	peningkatan produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun	0 Ton/Tahun	316 Ton/Tahun	316 Ton/Tahun	732 Ton/Tahun	8.300.000.000	9.130.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan SDM Perikanan Budidaya	10 Kelompok/Tahun	5 Kelompok/Tahun	5 Kelompok/Tahun	10 Kelompok/Tahun	2.550.000.000	2.805.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rasio Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	25 %	25 %	25 %	25 %	2.000.000.000	2.200.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2 %	3 %	3 %	6 %	6.200.000.000	6.820.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kepuasan Wisatawan	5 %	5 %	5 %	10 %	7.400.000.000	9.030.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media yang digunakan	65 %	85 %	85 %	85 %	2.200.000.000	2.520.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi	n/a %	1 %	1 %	2 %	6.300.000.000	6.500.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kepuasan Konsumen Produk Ekonomi Kreatif (persentase)	n/a %	29 %	29 %	29 %	4.350.000.000	6.130.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	0,125 poin	0,085 poin	0,085 poin	0,085 poin	17.912.076.000	18.592.679.000	Dinas Pertanian
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan populasi ternak dalam satu tahun	0,5 %	0,5 %	0,5 %	1 %	11.650.000.000	12.815.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi hasil peternakan dalam satu tahun	1776 Ton/Tahun	1776 Ton/Tahun	1883 Ton/Tahun	1883 Ton/Tahun	3.750.000.000	3.455.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0,103 poin	0,103 poin	0,103 poin	0,103 poin	49.432.500.000	50.652.500.000	Dinas Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	30 Persen	30 Persen	30 Persen	30 Persen	21.850.000.000	24.035.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan	n/a %	20 %	20 %	40 %	7.950.000.000	8.745.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pelayanan kesehatan masyarakat vetriner	n/a %	10 %	10 %	20 %	1.950.000.000	2.145.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah pengendalian dan penanggulangan bencana	n/a Wilayah	5 Wilayah	5 Wilayah	10 Wilayah	1.200.000.000	1.320.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasiliatsi Penaggulangan Bencana	10 %	10 %	10 %	10 %	1.068.000.000	1.116.000.000	Dinas Pertanian
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	n/a %	3 %	3 %	6 %	1.800.000.000	1.980.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	5 %	5 %	5 %	5 %	340.000.000	430.000.000	Dinas Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	10 %	10 %	10 %	20 %	600.000.000	660.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan SDM penyuluh melalui pelatihan	10 %	10 %	10 %	10 %	6.375.000.000	6.625.000.000	Dinas Pertanian
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan yang berizin	26 %	27 %	27 %	27 %	160.000.000	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	20 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	320.000.000	340.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	4 Unit	3 Unit	3 Unit	6 Unit	104.050.000.000	104.050.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	13 %	15 %	15 %	15 %	2.240.000.000	2.240.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Sektor Usaha	7 Sektor Usaha	7 Sektor Usaha	7 Sektor Usaha	5.000.000.000	5.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	42 %	43 %	44 %	44 %	500.000.000	575.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	jumlah produk yg dipromosikan	15 Jenis	16 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	993.000.000	1.150.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil	1 %	1 %	1 %	1 %	13.350.000.000	5.350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	"Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait"	10 IKM	10 IKM	10 IKM	20 IKM	115.000.000	120.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	0,25 %	0,35 %	0,50 %	0,50 %	100.000.000	120.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
			[SASARAN 2.3 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.562,5 Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.305,82 Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.609,80 Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.609,80 Ribu Rupiah/Orang/Tahun			
			[SASARAN 2.4 Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	82 Poin	90 Poin	90 Poin	90 Poin			
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan energi perkapita	2520 kkal/kap/hari	2520 kkal/kap/hari	2640 kkal/kap/hari	2640 kkal/kap/hari	1.594.111.350	1.763.522.485	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	CV Harga Beras	5 %	5 %	5 %	5 %	4.888.473.160	5.375.320.476	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi Protein Perkapita	57 gr/kap/hari	57 gr/kap/hari	57 gr/kap/hari	57 gr/kap/hari	1.311.937.715	1.443.131.487	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	9,95 %	9,95 %	10,63 %	10,63 %	518.712.550	530.583.805	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	81 %	81 %	82 %	82 %	625.803.844	688.384.228	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
			[TUJUAN 3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	51,55 Poin	63,17 Poin	65,16 Poin	65,16 Poin			
			[SASARAN 3.1 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Cakupan Air Minum Layak	90,74 %	91,25 %	93 %	93 %			
				Cakupan Sanitasi Layak	68,53 %	69,05 %	70 %	70 %			
				Persentase kawasan permukiman layak huni	36,02 %	36,59 %	37,16 %	37,16 %			
				Persentase kemantapan jalan kabupaten dan poros desa	57,92 %	60,42 %	62,5 %	62,5 %			
				Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	83,04 %	91,25 %	93,55 %	93,55 %			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	89 %	90 %	94 %	94 %	60.500.000.000	72.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya yang Terbangun	38,1 %	47 %	58 %	58 %	11.100.000.000	21.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jiwa yang Mendapat Akses Air Minum melalui SPAM	90,74 %	91,25 %	93 %	93 %	30.100.000.000	35.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	68,53 %	68,73 %	70 %	70 %	12.800.000.000	17.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	50 %	55 %	60 %	60 %	21.500.000.000	19.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase permukaan jalan dalam kondisi baik dan sedang	57,92 %	60,42 %	62,5 %	62,5 %	188.600.000.000	232.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase penanganan rumah koban bencana dan terdampak program pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	5.985.000.000	6.405.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	81,482 ha	75,482 ha	69,482 ha	69,482 ha	8.300.000.000	8.100.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah yang Tertangani	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	7.500.000.000	7.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	111 ha	222 ha	333 ha	333 ha	100.700.000.000	100.700.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Data Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	300.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	60 %	60 %	60 %	60 %	175.000.000	175.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN DAN TANAH ABSENTEE	Prosentase Tanah Obyek Landrefom (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 %	100 %	100 %	100 %	600.000.000	600.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Prosentase Penetapan Tanah Ulayat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	90,51 %	95,27 %	97,65 %	97,65 %	6.150.000.000	7.435.000.000	Dinas Perhubungan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sosialisasi Keselamatan Perhubungan	83,13 %	87,89 %	90,27 %	90,27 %	550.000.000	600.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi	92,05 %	96,81 %	99,19 %	99,19 %	1.275.000.000	575.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	84,15 %	88,91 %	91,29 %	91,29 %	13.074.200.000	13.674.830.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	90,79 %	95,55 %	97,93 %	97,93 %	200.000.000	250.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Sarana Prasarana Perkeretaapian	94,44 %	94,44 %	96,82 %	96,82 %	2.450.000.000	3.150.000.000	Dinas Perhubungan
			[SASARAN] 3.2 Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,31 Poin	62,33 Poin	62,74 Poin	62,74 Poin			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki PBG dan Sertifikat Laik Fungsi	11,31 %	12,32 %	13,33 %	13,33 %	10.700.000.000	12.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan, Lingkungan dan Kawasan Strategis yang Tertata	0 %	0 %	17 %	17 %	6.750.000.000	8.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	38 %	58 %	58 %	100 %	300.000.000	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi	34 %	40,8 %	49,35 %	49,35 %	1.900.000.000	1.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang	84,5 %	85 %	85,5 %	85,5 %	4.400.000.000	4.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.740.000.000	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,31 poin	62,33 poin	62,74 poin	62,74 poin	9.339.800.000	9.164.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,166 persen	0,188 persen	0,188 persen	0,188 persen	8.996.500.000	1.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan Limbah B3	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	150.000.000	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PPLH	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.215.000.000	615.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah status masyarakat hukum adat di kabupaten/ kota	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100.000.000	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	20 %	20 %	20 %	20 %	225.000.000	225.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	200.000.000	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100.000.000	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat Pengelolaan Sampah	55 persen	35 persen	38 persen	38 persen	77.200.000.000	47.546.961.600	Dinas Lingkungan Hidup
			[SASARAN] 3.3 Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	194 Poin	145 Poin	140 Poin	140 Poin			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	3.456.000.000	3.801.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	225.000.000	247.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	3.597.940.000	3.957.734.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			[SASARAN] 3.4 Meningkatkan pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	72,71 %	75,772 %	79,335 %	79,335 %			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	20 %	25 %	30 %	30 %	900.000.000	900.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	3,9 %	6,41 %	7,6 %	7,6 %	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	12.408.776.000	10.718.776.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	21.200.000.000	21.700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			[TUJUAN] 4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB Kategori	BB Kategori (71)	BB Kategori (72)	BB Kategori (72)			
			[SASARAN] 4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Indeks Inovasi Daerah	n/a Kategori	Sangat Inovatif Kategori (60,01)	Sangat Inovatif Kategori (61,7)	Sangat Inovatif Kategori (61,7)			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Nilai	84 (Baik) Nilai	85 (Baik) Nilai	85 (Baik) Nilai			
				Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Baik Nilai	73,2 (Baik) Nilai	75,1 (Baik) Nilai	75,1 (Baik) Nilai			
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B Nilai	86,38 (A) Nilai	89,23 (A) Nilai	89,23 (A) Nilai			
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,87 Nilai	3,35 Nilai	3,4 Nilai	3,4 Nilai			
				Nilai Evaluasi LPPD	Tinggi Nilai	3,4966 (Tinggi) Nilai	3,497 (Tinggi) Nilai	3,497 (Tinggi) Nilai			
				Nilai SAKIP	A Nilai	80,05 (A) Nilai	81,05 (A) Nilai	81,05 (A) Nilai			

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
				Sistem Merit	328,5 (Sangat Baik) Nilai	329 (Sangat Baik) Nilai	329 (Sangat Baik) Nilai	329 (Sangat Baik) Nilai			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	5.700.061.200	6.270.067.320	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan penegakan perda dan perkara yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	571.718.800	628.890.680	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase anggota satpol pp dan PPNS yang mendapat pelatihan	40 Jumlah	43 Jumlah	45 Jumlah	45 Jumlah	605.355.200	665.890.720	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pemberdayaan satgas linmas dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	32 %	33 %	34 %	34 %	1.868.421.500	3.493.163.650	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	24 %	26 %	28 %	29 %	8.883.188.485	9.822.077.291	Dinas Pemadam Kebakaran
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	16 Persen	25 Persen	35 Persen	35 Persen	54.094.000	59.503.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40 Persen	50 Persen	60 Persen	60 Persen	2.088.461.220	2.297.307.342	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	99 Persen	99,4 Persen	99,5 Persen	100 Persen	3.854.598.840	4.240.058.724	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Kelurahan/Pe makaman Umum/Pemakaman Keluarga yang ada petugasnya	60 Persen	75 Persen	76 Persen	76 Persen	309.002.000	339.902.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen	324.573.344	357.030.678	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	562.981.200	619.180.320	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Mitra yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA	3 Mitra	3 Mitra	6 Mitra	6 Mitra	112.351.800	123.586.980	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 Dokumen	15 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	112.351.800	123.586.980	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai dengan Kewajiban	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.968.053.700	3.264.859.070	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Pelaporan penyajian data kependudukan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	384.650.000	423.115.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang didesiminasikasikan kepada masyarakat	80 %	90 %	100 %	100 %	3.020.275.000	3.020.275.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,63 Poin	1,35 Poin	1,5 Poin	1,5 Poin	10.200.000.000	10.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	875.000.000	950.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %	100 %	100 %	489.200.000	350.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,8 Poin	3 Poin	3,05 Poin	3,05 Poin	1.150.000.000	1.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	350 Angka	400 Angka	450 Angka	450 Angka	1.500.000.000	1.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	9 %	22 %	38 %	38 %	1.250.000.000	1.550.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip Dinamis, Arsip Statis dan Simpul JIKN Kabupaten/Kota yang dikelola	75 Arsip	84 Arsip	94 Arsip	94 Arsip	883.276.345	971.603.979	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	20 %	20 %	20 %	20 %	285.000.000	335.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	88,33 Nilai	88,55 Nilai	88,75 Nilai	88,75 Nilai	49.053.882.280	53.959.270.508	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	375.199.000	412.718.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	93,75 %	100 %	100 %	100 %	2.718.028.040	298.830.844	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	80,00 %	80,30 %	80,40 %	80,40 %	1.028.017.650,00	1.130.819.415,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	62,50 %	62,80 %	62,90 %	62,90 %	393.133.180,00	432.446.498,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	"Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkontribusi pada Meningkatnya	40,32 %	40,60 %	40,70 %	40,70 %	609.225.650,00	670.148.215,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah"	56,45 %	56,70 %	56,80 %	56,80 %	584.364.990,00	642.801.489,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	470.434.250,00	517.477.675,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	87,50 %	87,80 %	87,90 %	87,70 %	468.069.800,00	514.876.780,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	752.986.000.000	789.313.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	5.185.000.000	5.443.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung SKM	100 %	100 %	100 %	100 %	709.423.000	780.365.300	Badan Pendapatan Daerah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	10.982.437.900	12.080.681.690	Badan Pendapatan Daerah
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penerapan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	100 %	100 %	100 %	100 %	6.105.280.032	6.309.321.153	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	70 %	70 %	70 %	70 %	11.060.285.150	12.166.313.665	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	1.942.306.000	1.942.306.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	NILAI KAPABILITAS APIP ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	1 Poin	1,1 Poin	1,15 Poin	1,15 Poin	11.833.298.875	14.199.958.650	Inspektorat Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Maturitas SPIP Pada Penetapan Dan Pencapaian Tujuan	3 Poin	3,1 Poin	3,15 Poin	3,15 Poin	2.498.637.875	2.998.365.450	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Integritas Pencegahan Korupsi	69,57 Poin	69,6 Poin	69,7 Poin	69,7 Poin	239.896.650	275.881.147	Inspektorat Daerah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas APIP pada Elemen Praktik Profesional	0,4 Level	0,45 Level	0,5 Level	0,5 Level	1.055.705.150	1.214.060.922	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian MCP KPK	92 %	93 %	94 %	94 %	1.048.810.875	1.206.132.506	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a %	3,3 %	3,4 %	3,4 %	270.858.000	311.486.700	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Unit yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	8 %	20 %	40 %	40 %	385.185.000	442.962.750	Inspektorat Daerah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Caringin
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Samarang

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Wanaraja
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	250.000.000	250.000.000	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Talegong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Sukawening

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Singajaya
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Selaawi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Peundeuy

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Pangatikan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Pamulihan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Pakenjeng

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Malangbong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Leles
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Kersamanah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	250.000.000	250.000.000	Kecamatan Karangpawitan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	604.775.100	604.775.100	Kecamatan Garut Kota
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cisarupan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cisompet
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cisewu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Cilawu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cikelet

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Cikajang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cihurip
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cigedug
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cibiuk

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cibat
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Cibalong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Bungbulang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Balubur Limbangan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	365.000.000	365.000.000	Kecamatan Banyuresmi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	190.000.000	190.000.000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Leles
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Banjarwangi

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Banyuwesmi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Balubur Limbangan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Bungbulang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Caringin
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cibalong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cibat

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cibiuk
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cigedug
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cihurip
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cikajang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cilawu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cisewu

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cisompet
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Cisurupan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.025.595.170	15.025.595.170	Kecamatan Garut Kota
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	4.953.055.200	4.953.055.200	Kecamatan Karangpawitan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Kersamanah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Leuwigoong

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Malangbong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Pamulihan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Pangatikan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Pasirwangi

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Samarang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Selaawi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Singajaya
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Sukawening

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Talegong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	1.448.229.800	1.448.229.800	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	6.623.255.200	6.623.255.200	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Wanaraja
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	188.800.000	188.800.000	Kecamatan Sukawening
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	124.000.000	124.000.000	Kecamatan Talegong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	74.800.000	74.800.000	Kecamatan Wanaraja

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	99.400.000	99.400.000	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	185.200.000	185.200.000	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	112.800.000	112.800.000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	115.600.000	115.600.000	Kecamatan Banyuresmi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	55.800.000	55.800.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	98.000.000	98.000.000	Kecamatan Balubur Limbangan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	202.800.000	202.800.000	Kecamatan Bungbulang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	212.000.000	212.000.000	Kecamatan Caringin
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	72.000.000	72.000.000	Kecamatan Cibalong

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	129.000.000	129.000.000	Kecamatan Cibatu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	34.000.000	34.000.000	Kecamatan Cibiuk
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	55.800.000	55.800.000	Kecamatan Cigedug
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	53.000.000	53.000.000	Kecamatan Cihurip
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	55.800.000	55.800.000	Kecamatan Cikajang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	118.400.000	118.400.000	Kecamatan Cikelet
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	80.400.000	80.400.000	Kecamatan Cilawu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	131.800.000	131.800.000	Kecamatan Cisewu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	77.600.000	77.600.000	Kecamatan Cisompet

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	36.800.000	36.800.000	Kecamatan Cisarupan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	185.200.000	185.200.000	Kecamatan Garut Kota
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	159.200.000	159.200.000	Kecamatan Kadungora
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	72.000.000	72.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	53.000.000	53.000.000	Kecamatan Karangpawitan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	129.000.000	129.000.000	Kecamatan Kersamanah
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	140.200.000	140.200.000	Kecamatan Leles
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	140.200.000	140.200.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	72.000.000	72.000.000	Kecamatan Malangbong

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	169.800.000	169.800.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	115.600.000	115.600.000	Kecamatan Pamulihan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	110.000.000	110.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	115.600.000	115.600.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	91.000.000	91.000.000	Kecamatan Pangatikan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	91.000.000	91.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	93.800.000	93.800.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	96.600.000	96.600.000	Kecamatan Samarang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	91.000.000	91.000.000	Kecamatan Selaawi

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	167.000.000	167.000.000	Kecamatan Singajaya
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	79.000.000	79.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Wanaraja

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Talegong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Sukawening
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Sucinaraja

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Singajaya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Selaawi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Samarang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Pamulihan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Pakenjeng
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Malangbong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Leles
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Kersamanah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Pangatikan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Karangpawitan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Garut Kota
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Cisewu

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Cilawu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Cikajang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Cisurupan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Cihurip
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Cisompet

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Cigedug
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Cibiuk
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Cibatut
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Cibalong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	130.000.000	130.000.000	Kecamatan Caringin
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Bungbulang

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Balubur Limbangan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	230.000.000	230.000.000	Kecamatan Banyuresmi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Talegong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cikelet
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cilawu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Banyuresmi

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Bayongbong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Balubur Limbangan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Bungbulang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Caringin
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cibalong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cibatut
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cibiuk
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cigedug

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
			PEMERINTAHAN DESA								
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cihurip
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cikajang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cisewu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cisompet
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Cisarupan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	Kecamatan Garut Kota
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Kadungora

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Karangtengah
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	Kecamatan Karangpawitan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Kersamanah
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Leles
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Malangbong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Mekarmukti
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Pakenjeng

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
			PEMERINTAHAN DESA								
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Pamulihan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Pangatikan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Pasirwangi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Samarang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Selaawi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Singajaya

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Sucinaraja
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Sukaresmi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Sukawening
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Wanaraja
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	Kecamatan Banjarwangi

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %	87 %	88 %	88 %	9.309.138.774	11.170.966.529	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP	Baik/A Nilai	Baik/A Nilai	Baik/A Nilai	Baik/A Nilai	39.201.000.000	41.438.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.877.563.301	2.077.563.301	Kecamatan Karangtengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	16.936.121.617	14.403.621.617	Kecamatan Garut Kota
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.122.431.458	2.122.431.458	Kecamatan Pamulihan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.327.123.354	2.327.123.354	Kecamatan Pakenjeng
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	5.008.635.811	2.208.635.811	Kecamatan Kersamanah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.090.552.621	2.090.552.621	Kecamatan Cisewu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.167.887.435	3.167.887.435	Kecamatan Wanaraja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	11.903.206.616	9.370.706.616	Kecamatan Tarogong Kidul

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	4.284.156.411	4.251.656.411	Kecamatan Tarogong Kaler
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.646.935.271	2.646.935.271	Kecamatan Talegong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.190.422.775	2.190.422.775	Kecamatan Sukawening
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	4.602.347.455	2.402.347.455	Kecamatan Sukaresmi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.796.151.395	2.796.151.395	Kecamatan Kadungora

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.397.643.778	2.397.643.778	Kecamatan Sucinaraja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.566.944.459	2.566.944.459	Kecamatan Singajaya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.992.537.384	2.992.537.384	Kecamatan Samarang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.380.113.491	3.380.113.491	Kecamatan Pasirwangi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	4.750.123.234	2.350.123.234	Kecamatan Pangatikan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.181.402.374	2.181.402.374	Kecamatan Pameungpeuk
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.999.468.339	2.199.468.339	Kecamatan Mekarmukti
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.283.356.709	2.283.356.709	Kecamatan Leuwigoong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	9.920.195.643	9.687.695.643	Kecamatan Karangpawitan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.485.003.867	4.125.003.867	Kecamatan Peundeuy

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.455.678.869	2.455.678.869	Kecamatan Cilawu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.544.574.127	2.544.574.127	Kecamatan Cisirupan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.106.078.792	2.106.078.792	Kecamatan Banjarwangi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.500.220.770	2.500.220.770	Kecamatan Banyuresmi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.970.827.232	2.970.827.232	Kecamatan Cisompet

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.799.490.152	2.897.490.152	Kecamatan Leles
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	4.123.980.537	2.423.980.537	Kecamatan Selaawi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	7.787.498.009	2.987.498.009	Kecamatan Malangbong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.251.023.620	2.251.023.620	Kecamatan Cibalong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.477.290.702	2.477.290.702	Kecamatan Cibatut

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	4.083.672.468	4.083.672.468	Kecamatan Cibiuk
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	3.996.976.592	2.296.976.592	Kecamatan Cigedug
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.070.077.566	2.070.077.566	Kecamatan Cihurip
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.410.143.682	2.410.143.682	Kecamatan Cikajang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	2.140.899.014	2.140.899.014	Kecamatan Cikelet

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat	19.152.180.462	20.863.959.323	Dinas Pemuda dan Olah Raga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Bapenda	100 %	100 %	100 %	100 %	31.418.275.808	29.084.336.839	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Bappeda	86,1 poin	86,2 poin	86,3 poin	86,3 poin	12.134.905.040	13.348.395.544	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BPBD	A kategori	A kategori	A kategori	A kategori	5.179.257.713	5.697.183.485	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BPKAD	100 %	100 %	100 %	100 %	12.288.000.000	12.728.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja DPMD	A Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat	9.383.061.843	9.383.061.843	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin	80 poin	80 poin	80 poin	11.786.000.000	9.271.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai PK APIP pada unsur akuntabilitas manajemen dan kinerja, pengelolaan SDM, budaya dan hubungan organisasi serta tata kelola APIP	1,6 Poin	1,7 Poin	1,8 Poin	1,8 Poin	28.066.247.400	36.486.121.620	Inspektorat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	1.275.340.702.698	1.332.911.552.272	Dinas Pendidikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat	108.425.493.319	62.249.542.650	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80,61 Nilai	80,63 Nilai	80,65 Nilai	80,65 Nilai	15.646.822.968	17.211.505.265	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	A Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat	8.137.330.044	8.951.063.048	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	5.259.637.735	5.785.601.508	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	9.857.500.000	10.257.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	9.821.500.000	10.102.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas penunjang layanan adminduk.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.579.828.123	14.937.810.935	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pelayanan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	7.562.031.891	8.330.085.079	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi penunjang	100 %	100 %	100 %	100 %	8.671.981.160	8.671.981.160	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	14.725.000.000	14.821.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	75 %	80 %	80 %	80 %	25.215.000.000	27.690.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100% %	100% %	100% %	100% %	14.725.000.000	14.821.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100% %	100% %	100% %	100% %	21.047.127.000	21.057.127.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95 %	95 %	95 %	95 %	19.795.000.000	21.769.500.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan BKD	98 %	98 %	98 %	98 %	20.656.000.376	26.750.252.678	Badan Kepegawaian dan Diklat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	1.856.018.263	1.856.018.263	Kecamatan Caringin

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	2.644.588.857	2.644.588.857	Kecamatan Bayongbong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	3.748.985.329	2.168.985.329	Kecamatan Balubur Limbangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	2.172.489.766	2.172.489.766	Kecamatan Bungbulang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	7.692.873.561	8.002.537.001	Dinas Pemadam Kebakaran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	35.330.276.000	37.113.998.000	Dinas Pertanian

Kode			Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target				Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	2025	2026	Akhir	2025	2026	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	14.495.677.621	8.872.277.621	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	27.193.794.780	29.465.910.524	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Masyarakat	81,71 Kategori	84,2 Kategori	88,35 Kategori	88,35 Kategori	3.934.635.605	4.328.099.165	Dinas Pendidikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Penunjang Pelayanan Administrasi, SDM dan Keuangan.	100 %	100 %	100 %	100 %	52.511.871.090	49.807.215.990	Dinas Perhubungan
									6.002.514.668.296	6.190.161.200.153	

Sumber: diolah Bappeda 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Selain program prioritas yang diturunkan dari tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan tabel diatas, terdapat program prioritas daerah yang bersifat *crosscutting* atau dipetakan keterkaitannya melalui *logframe* diantaranya: *Logframe* Kesehatan, penanganan *stunting*, penanganan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), *logframe* penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta ketahanan pangan.

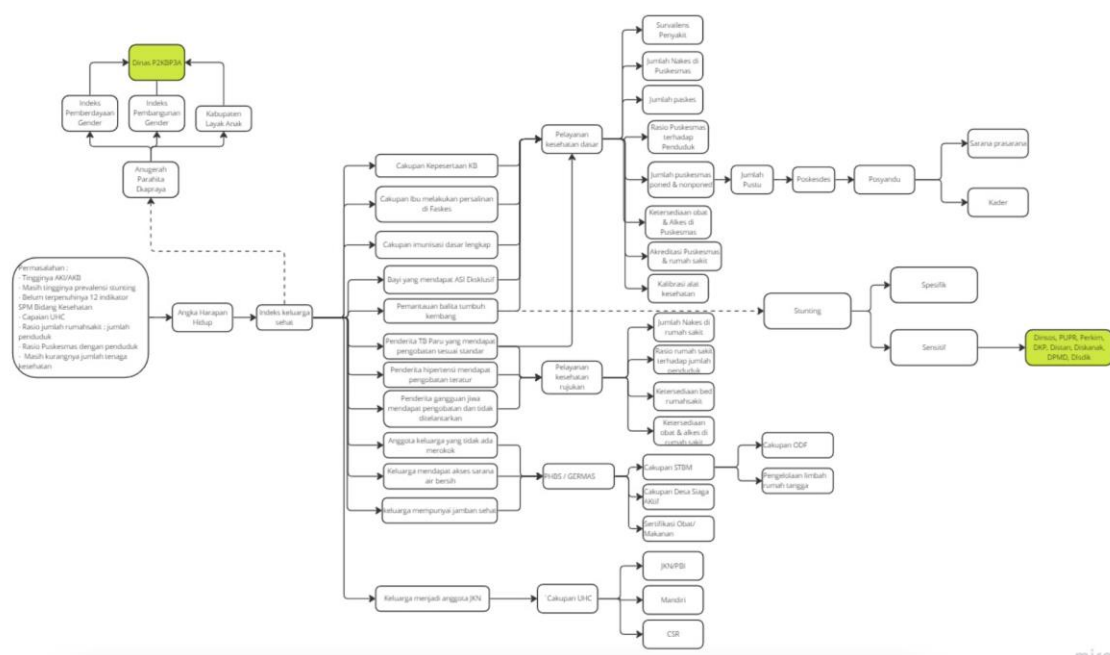
1. Logframe Kesehatan

Dalam urusan kesehatan diuraikan dan dipetakan melalui logframe kesehatan, diantaranya dilatarbelakangi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- Masih tingginya angka prevalensi stunting;
- Belum terpnuhnya 12 indikator SPM Bidang kesehatan;
- Capaian *Universal Healts Coverage* (UHC);
- Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk;
- Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk;
- Masih Kurangnya jumlah tenaga kesehatan.

Adapun *logframe* kesehatan secara lebih terperinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.3 *Logframe* Kesehatan



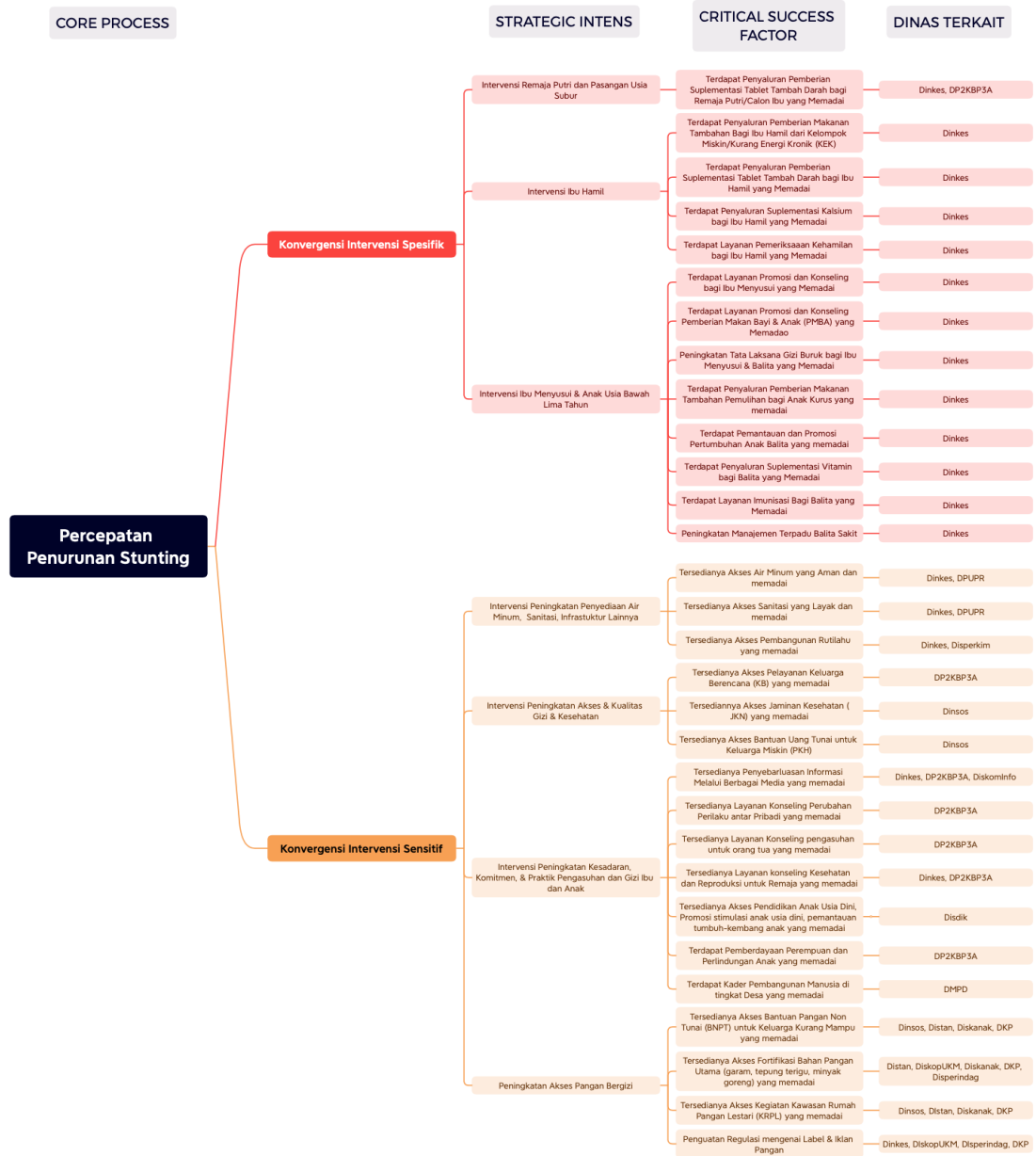
Sumber: diolah Bappeda 2023.

Adapun langkah-langkah yang dikerjakan sesuai Surat Edaran Bupati Garut No. 04.03/2166/Kesra Tentang Gerakan Bersama Pencarian Balita Stunting adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Tim Pelaksana Kegiatan di Posyandu dengan Melibatkan Tim Linsek Kecamatan, Toma, Toga Desa/Kelurahan, Nakes, PKK, Kader Posyandu;
- b. Refreshing Pengukuran dan Penimbangan bagi Nakes dan Kader dengan Menggunakan Alat Ukur/Antropometri yang Standar Survei;
- c. Inventarisir Antropometri Standar Survei, Cek dan Kalibrasi
- d. Sosialisasi Kegiatan ke Masyarakat dengan berbagai Media (Spanduk, Medsos, Pengajian dll).
- e. Penggerakan Sasaran Ibu Hamil dan Balita Usia (0-59 bulan) oleh Lintas Sektor, jika tidak hadir dijemput;
- f. Bagi sasaran balita yang tidak hadir karena bepergian, disarankan untuk dibawa ke puskesmas/bidan desa;
- g. Pelaksanaan Pengukuran dan Penimbangan dilaksanakan oleh Nakes Bersama Kader Posyandu;
- h. Data Pengukuran dan Penimbangan dilaporkan secara berjenjang dari posyandu – desa – puskesmas- kecamatan- kabupaten (sesuai format terlampir salam SE Bupati) dan entri Aplikasi EPPGBM.

Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Garut dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Adapun *Crosscutting* penanganan stunting dapat dilihat pada gambar 6.4.

Gambar 6.4 Crosscutting Penanganan Stunting



Sumber: diolah Bappeda 2023.

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi di Kabupaten Garut dipetakan melalui *Crosscutting* penurunan AKI dan AKB yang mengikutsertakan kolaborasi antar *stakeholder*, adapun secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.5 Crosscutting Penurunan AKI dan AKB



Sumber: diolah Bappeda 2023.

2. Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Garut terakhir tercatat data pada tahun 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik mencatatkan Persentase penduduk miskin Kabupaten Garut masih berada pada angka 9,77%, meskipun telah kembali berada dibawah dua digit namun nilai ini masih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Jawa Barat.

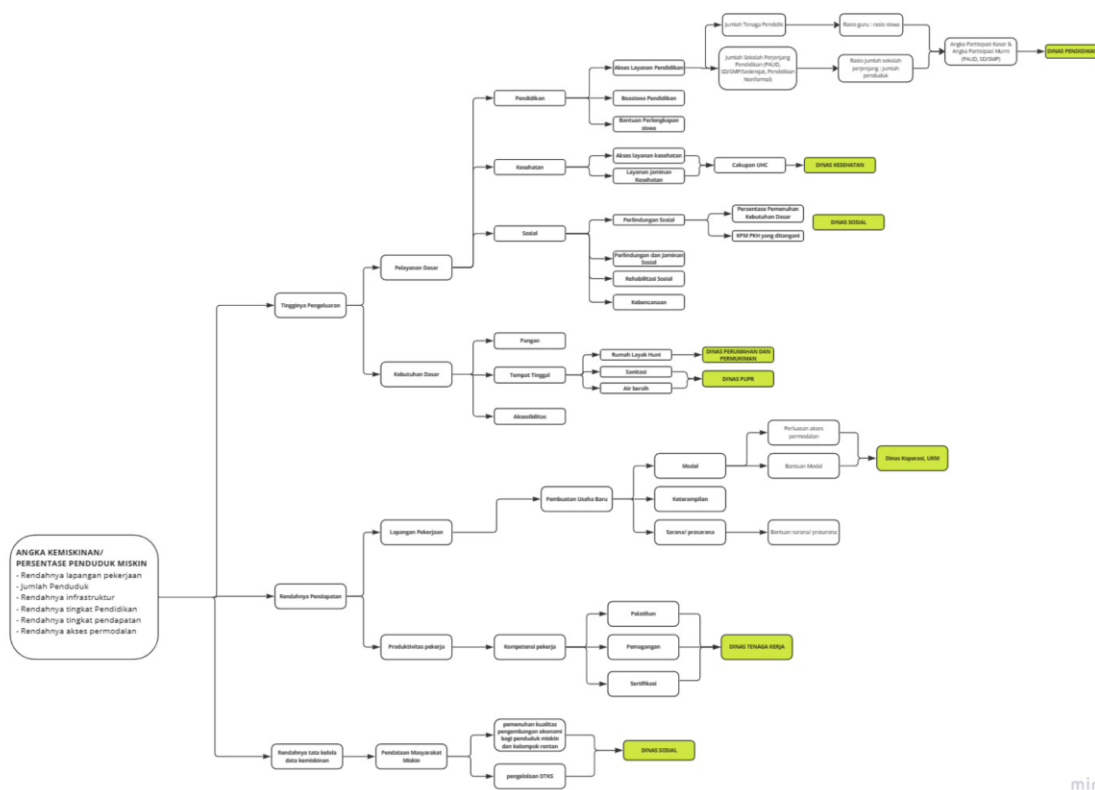
Upaya penanganan ini dipetakan berdasarkan permasalahan yang mendasari mulai dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kualitas infrastruktur hingga lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Sehingga dipetakan upaya dalam penanganan angka kemiskinan sebagai berikut:

- a. Pelayanan dasar:** Dinas Pendidikan melalui penanganan dan peningkatan akses layanan pendidikan, Dinas Kesehatan melalui akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan sebagai upaya meningkatkan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC), Dinas Sosial melalui perlindungan sosial;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar:** Pemenuhan kebutuhan dasar melalui rumah layak huni dibawah Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pemenuhan sanitasi dan air bersih di bawah Dinas PUPR
- c. Peningkatan kompetensi pekerja:** melalui pelatihan dan pemagangan serta sertifikasi yang disediakan dan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- d. Upaya perluasan lapangan kerja:** melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya dengan penyebaran informasi lowongan kerja serta *link and match* pasar kerja, didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM diantaranya dengan peningkatan kemudahan akses modal dan pembuatan usaha baru;
- e. Penguatan Data Kemiskinan:** melalui pemenuhan kualitas pengembangan ekonomi dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Adapun secara lebih lengkap dan terperinci *Crosscutting* penanganan kemiskinan tersaji pada gambar berikut.

Gambar 6.6 Crosscutting Penanganan Angka Kemiskinan



Sumber: diolah Bappeda 2023.

3. Pendidikan

Logframe pendidikan menggambarkan upaya penanganan permasalahan bidang pendidikan yang meliputi jumlah *drop out* Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih rendahnya tingkat

Tujuan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026	17 Tujuan SDGs	Perangkat Daerah
	Tujuan 5 Kesetaraan Gender (<i>gender equality</i>)	
	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi (<i>decent work and economic growth</i>)	
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan (<i>No-poverty</i>)	Dinsos, Dinkes, Disnakertrans, Dinas PUPR, Disdik, Disdukcapil, Dinstan, Diskop UKM, Disparbud, Disperindag, DLH, Diskominfo, DPMD, Bapenda, Bappeda, PUPR, Dishub, BPKAD, DPMPSTP
	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan (<i>No-hunger</i>)	
	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau (<i>affordable and clean energy</i>)	
	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi (<i>decent work and economic growth</i>)	
	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation and Infrastructure</i>)	
	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (<i>Reduced Inequality</i>)	
	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible consumption and production</i>)	
	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>Partnerships for the goals</i>)	
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak (<i>Clean Water and Sanitation</i>)	DLH, DISPERINDAG, BPBD, Disperkim, Dinas PUPR, DPMD, Dinsos, Diskominfo, Disparbud, Diskop UKM, Disnakertrans, Dinkes
	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi (<i>decent work and economic growth</i>)	
	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation and Infrastructure</i>)	

Tujuan Kabupaten Garut Tahun 2025-2026	17 Tujuan SDGs	Perangkat Daerah
	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (<i>Reduced Inequality</i>)	
	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	
	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible consumption and production</i>)	
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Tujuan 16 Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (<i>Peace, justice, and strong institutions</i>)	BAPPEDA, BPKAD, DP2KBP3A, BKD, Disdukcapil, Diskominfo, BAPENDA, DPMPSTP, Dishub, Dinas PUPR Seluruh perangkat Daerah
	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>Partnerships for the goals</i>)	

sumber: Diolah Bappeda 2023

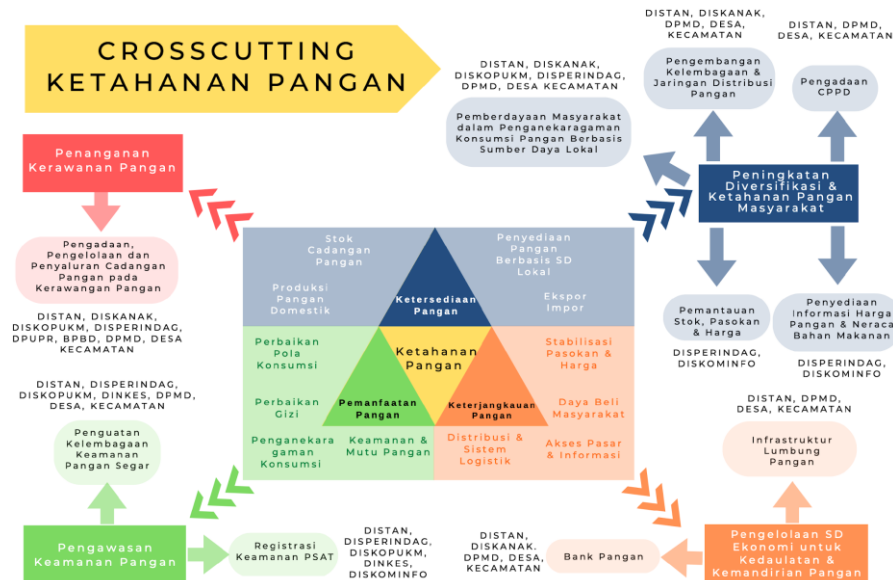
5. Logframe Kebencanaan

Kabupaten Garut memiliki topografi yang beragam mulai dari wilayah pegunungan hingga wilayah pesisir pantai, daerah pegunungan di sisi selatan wilayah Kabupaten Garut memiliki kemiringan yang cukup curam. Karakteristik Alam Kabupaten Garut memang memberikan potensi alam yang beragam, namun kemudian Kabupaten Garut dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam yang seringkali terjadi mulai dari tanah bergerak, tanah longsor, bencana banjir hingga ancaman bencana tsunami di pesisir selatan maupun ancaman Gunung Api yang masih aktif. Tahun 2022 tercatat indeks risiko bencana Kabupaten Garut berada pada nilai 164,91 dengan kategori tinggi. Oleh sebab itu Kabupaten Garut harus senantiasa siaga dan menjadi Kabupaten yang tangguh bencana. Adapun secara lebih terperinci logframe kebencanaan dapat dilihat pada gambar berikut.

- d. Penanganan kerawanan pangan melalui pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan

Adapun secara terperinci *crosscutting* ketahanan pangan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.9 Crosscutting Ketahanan Pangan



Sumber: diolah Bappeda 2023.

6.4. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.5
Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2025-2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
1. SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
		layanan kesehatan			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
5. SPM TRANTIBUM LINMAS					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	PROGRAM
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana
6. SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial	Program Perlindungan Jaminan Sosial

Sumber: diolah Bappeda Tahun 2023

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024-2026 yang akan disusun harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penyusunan kerangka pendanaan tersebut akan mempengaruhi pada pencapaian target pelaksanaan tujuan daerah yang dijabarkan dalam indikator-indikator tujuan dan sasaran, serta bermuara pada penetapan program-program pembangunan daerah yang strategis serta mencakup seluruh program perangkat daerah.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menginformasikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan seluruh program pembangunan daerah Kabupaten Garut hingga akhir periode tahun 2026. Hal mendasar yang perlu dipetakan adalah kemampuan dan kekuatan pendapatan daerah untuk dibelanjakan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kemampuan keuangan daerah tergambar dari kondisi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah yang dibutuhkan untuk menutupi defisit belanja. Proyeksi pada 2025-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2025-2026

Kode	Uraian	Proyeksi	
		2025	2026
4.	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	903.127.173.922	947.960.028.853
4.1.01	Pajak Daerah	542.600.000.000	569.730.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	230.946.140.560	242.545.741.324
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.515.950.023	7.515.950.023
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	122.065.083.339	128.168.337.506
4.2	Pendapatan Transfer	3.775.413.360.426	3.836.848.194.990
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.579.962.319.255	3.628.512.465.752
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	195.451.041.171	208.335.729.238
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
	Jumlah Pendapatan	4.678.540.534.348	4.784.808.223.843
5.	Belanja		
5.1	Belanja Operasi	3.545.045.027.684	3.640.177.016.188
5.1.01	Belanja Pegawai	2.092.741.599.009	2.148.900.736.110
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.402.687.542	986.175.284.707
5.1.03	Belanja Bunga	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	473.841.664.569	486.557.299.895
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.059.076.564	18.543.695.476
5.2	Belanja Modal	366.563.672.077	376.400.481.135
5.3	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	781.931.834.588	783.230.726.521
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	85.090.075.462	89.350.331.546
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	696.841.759.126	693.880.394.975

Kode	Uraian	Proyeksi	
		2025	2026
	Jumlah Belanja	4.718.540.534.348	4.824.808.223.843
	Surplus / (Defisit)	-40.000.000.000	-40.000.000.000
6.	PEMBIAYAAN	40.000.000.000	40.000.000.000
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000	50.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan		10.000.000.000	10.000.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2023.

Berdasarkan target pendapatan tahun 2025-2026, diharapkan pendapatan mengalami pertumbuhan, mengingat kondisi perekonomian daerah yang mulai kembali berangsur normal. Di sisi lain, belanja tetap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan wajib pelayanan dasar, pencapaian target kinerja daerah, serta pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kewenangan daerah, baik bersifat operasional rutin maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pembiayaan daerah akan dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD serta pemanfaatan dana cadangan dalam rangka mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Adapun SiLPA diharapkan dapat ditekan secara maksimal, dengan mengupayakan pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat kelola. Dengan demikian, diharapkan pembiayaan dapat menutup defisit belanja secara logis, sesuai kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Perumusan sumber pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa. Namun, di luar kerangka pendanaan yang telah direncanakan, Pemerintah Kabupaten Garut akan tetap mengupayakan pengajuan pengusulan dana dari berbagai sumber, antara lain : (1) Pengusulan pendanaan bersumber dana APBN, (2) Pengusulan

pendanaan bersumber dana APBD Provinsi, (3) Sumber-sumber pendanaan lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan dan arahan kebijakan nasional.

7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program perangkat daerah secara umum menggambarkan keseluruhan program, baik yang secara strategis mendukung pencapaian target kinerja daerah, maupun program yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah. Penerapan program perangkat daerah telah mengacu pada konsep penerapan kinerja *outcome*, atau dengan kata lain berorientasi pada hasil yang diharapkan dengan pertimbangan jumlah program yang efektif dan efisien sesuai pembakuan yang dilakukan secara nasional.

Pemilihan program perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) Pencapaian tujuan dan sasaran daerah, serta strategi dan arah kebijakan; (2) Pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk menunjang optimalnya pelaksanaan kinerja perangkat daerah; (3) Upaya penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah, terutama yang menjadi prioritas pembangunan hingga tahun 2026; (4) Upaya pencapaian target pelayanan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah. Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel-tabel berikut ini.



Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Garut Tahun 2025-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
				K	Rp	K	Rp		K		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	61,26 %	65,76 %	74.591.000.000,00	68,26 %	77.666.000.000,00	68,26 %	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	77,06 %	82,56 %	185.262.622.724,00	82,06 %	194.156.394.448,00	85,06 %	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,61 %	96,61 %	337.880.169.568,00	97,31 %	368.673.309.480,00	97,31 %	Dinas Pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-24tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	84 %	84 %	44.439.700.000,00	85 %	45.489.700.000,00	85 %	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan yang menetapkan kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	450.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	650.000.000,00	100 %	700.000.000,00	100 %	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43,46 %	43,46 %	42.600.000.000,00	46,46 %	49.500.000.000,00	46,46 %	Dinas Pendidikan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan satuan pendidikan yang diterbitkan	100 %	100 %	450.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100 %	Dinas Pendidikan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan satuan Pendidikan yang diterbitkan	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	Dinas Pendidikan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	30 %	30 %	775.000.000,00	35 %	775.000.000,00	35 %	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Standar Pelayanan Minimal Siklus Hidup	94 %	96 %	1.917.651.000,00	98 %	2.109.417.000,00	98 %	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase akses sanitasi layak	50 %	60 %	5.853.252.900,00	65 %	6.438.578.190,00	65 %	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM penyakit	98 %	100 %	10.439.513.000,00	100 %	11.483.464.000,00	100 %	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian UHC	88 %	90 %	151.136.783.000,00	92 %	166.250.461.000,00	92 %	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Imunisasi dasar lengkap	97 %	100 %	3.882.435.600,00	100 %	4.260.678.760,00	100 %	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas dengan ketersediaan dengan obat, bahan habis pakai dan vaksin essensial	96 %	96 %	16.405.572.940,00	96 %	18.046.130.234,00	96 %	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	presentase fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah sesuai standar	88% %	94% %	180.191.468.631,00	100% %	98.775.008.357,00	100% %	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Balita Gizi kurang	4 %	3,9 %	7.547.468.500,00	3,8 %	8.302.215.350,00	3,8 %	Dinas Kesehatan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah daerah dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	20 %	25 %	6.678.157.000,00	30 %	7.365.972.750,00	30 %	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	70 %	75 %	330.347.600,00	80 %	363.382.360,00	80 %	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase produk pangan yang diawasi	5 %	7 %	521.880.700,00	10 %	574.068.770,00	10 %	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang diawasi memenuhi syarat	65 %	70 %	322.865.400,00	75 %	355.151.940,00	75 %	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	92 %	96 %	568.185.000,00	100 %	625.003.500,00	100 %	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya yang Terbangun	38,1 %	47 %	11.100.000.000,00	58 %	21.400.000.000,00	58 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	89 %	90 %	60.500.000.000,00	94 %	72.500.000.000,00	94 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jiwa yang Mendapat Akses Air Minum melalui SPAM	90,74 %	91,25 %	30.100.000.000,00	93 %	35.600.000.000,00	93 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	68,53 %	68,73 %	12.800.000.000,00	70 %	17.200.000.000,00	70 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	50 %	55 %	21.500.000.000,00	60 %	19.500.000.000,00	60 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Permukaan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	57,92 %	60,42 %	188.600.000.000,00	62,5 %	232.100.000.000,00	62,5 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki PBG dan Sertifikat Laik Fungsi	11,31 %	12,32 %	10.700.000.000,00	13,33 %	12.800.000.000,00	13,33 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan, Lingkungan dan Kawasan Strategis yang Tertata	0 %	17 %	6.750.000.000,00	17 %	8.750.000.000,00	33 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi	34 %	40,8 %	1.900.000.000,00	49,35 %	1.900.000.000,00	49,35 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	38 %	58 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang	84,5 %	85 %	4.400.000.000,00	85,5 %	4.300.000.000,00	85,5 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase penanganan rumah koban bencana dan terdampak program pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	5.985.000.000,00	100 Persentase	6.405.000.000,00	100 Persentase	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	81,482 ha	75,482 ha	8.300.000.000,00	69,482 ha	8.100.000.000,00	69,482 ha	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah yang Tertangani	500 Unit	500 Unit	7.500.000.000,00	500 Unit	7.500.000.000,00	500 Unit	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	111 ha	222 ha	100.700.000.000,00	333 ha	100.700.000.000,00	333 ha	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	100 %	100 %	3.456.000.000,00	100 %	3.801.600.000,00	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 %	100 %	225.000.000,00	100 %	247.500.000,00	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	100 %	100 %	3.597.940.000,00	100 %	3.957.734.000,00	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	5.700.061.200,00	100 %	6.270.067.320,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan penegakan perda dan perkara yang terselesaikan	100 %	100 %	571.718.800,00	100 %	628.890.680,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase anggota satpol pp dan PPNS yang mendapat pelatihan	40 Jumlah	43 Jumlah	605.355.200,00	45 Jumlah	665.890.720,00	45 Jumlah	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pemberdayaan satgas linmas dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	32 %	33 %	1.868.421.500,00	34 %	3.493.163.650,00	34 %	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	24 %	26 %	8.883.188.485,00	28 %	9.822.077.291,00	29 %	Dinas Pemadam Kebakaran
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelatihan	50 %	80 %	4.451.000.000,00	85 %	4.645.000.000,00	85 %	Dinas Sosial
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Tertangani warga negara migran korban tindakan kekerasan	52,29 %	70 %	310.000.000,00	75 %	333.000.000,00	75 %	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	69,38 %	80 %	9.675.000.000,00	85 %	10.642.500.000,00	85 %	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kelompok rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	54,15 %	80 %	3.044.000.000,00	85 %	3.601.900.000,00	85 %	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100 %	100 %	3.825.000.000,00	100 %	4.140.000.000,00	100 %	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	75,5 %	75,8 %	510.000.000,00	80 %	549.000.000,00	80 %	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	103 Persen	532 Persen	6.008.000.000,00	722 Persen	8.150.000.000,00	722 Persen	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	108%	15 %	2.280.000.000,00	20 %	2.630.000.000,00	20 %	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	657%	7227%	875.000.000,00	7950%	975.000.000,00	7950%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	75 %	963.000.000,00	75 %	965.000.000,00	75 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	100 %	100 %	649.479.000,00	100 %	655.000.000,00	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Desa Yang Berkategori DRPPA	16 Jumlah	25 Jumlah	320.000.000,00	30 Jumlah	350.000.000,00	30 Jumlah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengolahan dan Analisis dan Penyajian Data ANAK	75 %	75 %	150.000.000,00	80 %	150.000.000,00	80 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	75 %	80 %	1.670.000.000,00	85 %	1.700.000.000,00	85 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Mengenai Perlindungan Khusus Anak	85 %	85 %	2.130.000.000,00	90 %	2.130.000.000,00	90 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan energi perkapita	2520 kkal/kap/ha ri	2520 kka l/kap/h ari	1.594.111.350,00	2640 kka l/kap/h ari	1.763.522.485,00	2640 kkal/kap/ha ri	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	CV Harga Beras	5 %	5 %	4.888.473.160,00	5 %	5.375.320.476,00	5 %	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi Protein Perkapita	57 gr/kap/hari	57 gr/kap /hari	1.311.937.715,00	57 gr/kap /hari	1.443.131.487,00	57 gr/kap/hari	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	9,95 %	9,95 %	518.712.550,00	10,63 %	530.583.805,00	10,63 %	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	81 %	81 %	625.803.844,00	82 %	688.384.228,00	82 %	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Data Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	60 %	60 %	175.000.000,00	60 %	175.000.000,00	60 %	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Prosentase Tanah Obyek Landrefom (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 %	100 %	600.000.000,00	100 %	600.000.000,00	100 %	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Prosentase Penetapan Tanah Ulayat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	100 %	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	Dinas Perumahan dan Permukiman



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	100 Persen	100 Persen	1.740.000.000,00	100 Persen	700.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,31 poin	62,33 poin	9.339.800.000,00	62,74 poin	9.164.800.000,00	62,74 poin	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,166 persen	0,188 persen	8.996.500.000,00	0,188 persen	1.850.000.000,00	0,188 persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan Limbah B3	100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	100 Persen	220.000.000,00	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PPLH	5 Dokumen	2 Dokum en	1.215.000.000,00	2 Dokum en	615.000.000,00	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah status masyarakat hukum adat di kabupaten/ kota	2 lokasi	2 lokasi	100.000.000,00	2 lokasi	100.000.000,00	2 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	20 %	20 %	225.000.000,00	20 %	225.000.000,00	20 %	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	20 persen	20 persen	200.000.000,00	20 persen	200.000.000,00	20 persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100 persen	100 persen	100.000.000,00	100 persen	100.000.000,00	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat Pengelolaan Sampah	55 persen	35 persen	77.200.000.000,00	38 persen	47.546.961.600,00	38 persen	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	16 Persen	25 Persen	54.094.000,00	35 Persen	59.503.400,00	35 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40 Persen	50 Persen	2.088.461.220,00	60 Persen	2.297.307.342,00	60 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	99 Persen	99,4 Persen	3.854.598.840,00	99,5 Persen	4.240.058.724,00	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Keluar ahan/Pemakaman Umum/Pemakaman Keluarga yang ada petugasnya	60 Persen	75 Persen	309.002.000,00	76 Persen	339.902.200,00	76 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	97 Persen	98 Persen	324.573.344,00	99 Persen	357.030.678,00	99 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	15 Dokumen	15 Doku men	562.981.200,00	15 Doku men	619.180.320,00	15 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Mitra yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA	3 Mitra	3 Mitra	112.351.800,00	6 Mitra	123.586.980,00	6 Mitra	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 Dokumen	15 Doku men	112.351.800,00	20 Doku men	123.586.980,00	20 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai dengan Kewajiban	100 Persen	100 Persen	2.968.053.700,00	100 Persen	3.264.859.070,00	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Pelaporan penyajian data kependudukan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	384.650.000,00	2 Laporan	423.115.000,00	2 Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	20 %	25 %	900.000.000,00	30 %	900.000.000,00	30 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	3,9 %	6,41 %	1.500.000.000,00	7,6 %	1.500.000.000,00	7,6 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	100 %	100 %	12.408.776.000,00	100 %	10.718.776.000,00	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	100 %	21.200.000.000,00	100 %	21.700.000.000,00	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi Program Bangga Kencana dan PPPA	100 %	100 %	8.100.000.000,00	100 %	8.220.000.000,00	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan ber KB (CU/PUS)	72,9 %	72,18 %	14.255.425.000,00	72,3 %	14.334.700.000,00	72,3 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	75 %	75,25 %	8.570.300.000,00	75,6 %	8.570.300.000,00	75,6 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	90,51 %	95,27 %	6.150.000.000,00	97,65 %	7.435.000.000,00	97,65 %	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sosialisasi Keselamatan Perhubungan	83,13 %	87,89 %	550.000.000,00	90,27 %	600.000.000,00	90,27 %	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi	92,05 %	96,81 %	1.275.000.000,00	99,19 %	575.000.000,00	99,19 %	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	84,15 %	88,91 %	13.074.200.000,00	91,29 %	13.674.830.000,00	91,29 %	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	90,79 %	95,55 %	200.000.000,00	97,93 %	250.000.000,00	97,93 %	Dinas Perhubungan
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Sarana Prasarana Perkeretaapian	94,44 %	94,44 %	2.450.000.000,00	96,82 %	3.150.000.000,00	96,82 %	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat	80 %	90 %	3.020.275.000,00	100 %	3.020.275.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,63 Poin	1,35 Poin	10.200.000.000,00	1,5 Poin	10.200.000.000,00	1,5 Poin	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/ USP Berizin	0 %	3 %	50.000.000,00	3 %	51.500.000,00	6 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang undangan	n/a %	7,5 %	300.000.000,00	7,5 %	300.000.000,00	15 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Bersertifikat Kesehatan Koperasi	n/a %	5,3 %	310.000.000,00	8 %	350.000.000,00	8 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang ditingkatkan Kompetensinya	n/a %	103%	385.000.000,00	103%	396.550.000,00	206%	Dinas Koperasi dan Usaha



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
											Kecil dan Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	n/a %	252%	800.000.000,00	286%	890.000.000,00	538%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Formal	n/a %	232%	1.802.555.400,00	234%	1.802.555.400,00	469%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan Usaha	n/a %	1,18 %	1.450.000.000,00	1,18 %	1.450.000.000,00	2,37 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	17	09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase minat masyarakat yang diberikan penyuluhan terhadap pendirian koperasi	n/a %	50 %	177.000.000,00	50 %	182.310.000,00	50 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	10 %	10 %	1.175.000.000,00	10 %	1.075.000.000,00	20 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi	4 Investor	4 Investor	600.000.000,00	5 Investor	725.000.000,00	9 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal/LKPM	0 %	30 %	785.000.000,00	30 %	815.000.000,00	30 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	100 %	100 %	875.000.000,00	100 %	950.000.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %	489.200.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan Layanan Kepemudaan	60 %	65 %	2.600.776.103,00	70 %	3.120.931.323,00	70 %	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100 %	100 %	1.700.000.000,00	100 %	2.000.000.000,00	100 %	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indek Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	63,23 %	65,23 %	1.606.723.670,00	66,48 %	1.928.068.404,00	66,48 %	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	30 Orang	40 Orang	10.760.610.029,00	40 Orang	12.912.732.034,00	40 Orang	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Prasarana Keolahragaan	168 Unit	189 Unit	52.790.239.602,00	210 Unit	69.348.287.523,00	210 Unit	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase SDM Kepramukaan yang telah mendapatkan pendidikan dasar kepramukaan	86,98 %	89,3 %	2.911.942.475,00	91,62 %	3.794.330.970,00	91,62 %	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,8 Poin	3 Poin	1.150.000.000,00	3,05 Poin	1.200.000.000,00	3,05 Poin	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	350 Angka	400 Angka	1.500.000.000,00	450 Angka	1.600.000.000,00	450 Angka	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dimanfaatkan dan dikembangkan	27 %	70 %	3.700.000.000,00	70 %	4.600.000.000,00	70 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	2 Jenis	5 Jenis	500.000.000,00	5 Jenis	570.000.000,00	5 Jenis	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah lokal yang terdokumentasikan	2 Jenis	3 Jenis	700.000.000,00	3 Jenis	860.000.000,00	3 Jenis	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	3 Buah	3 Buah	1.150.000.000,00	3 Buah	2.240.000.000,00	3 Buah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kepuasan Pengunjung Museum (Persentase)	75 %	80 %	700.000.000,00	80 %	810.000.000,00	80 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	10	PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	Jumlah Pelaku Perfilman yang terbina	n/a Jenis	3 Jenis	950.000.000,00	3 Jenis	1.150.000.000,00	3 Jenis	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka)	41000 Orang	42000 Orang	1.554.205.910,00	43000 Orang	1.713.654.501,00	43000 Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	9 %	22 %	1.250.000.000,00	38 %	1.550.000.000,00	38 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip Dinamis, Arsip Statis dan Simpul JIKN Kabupaten/Kota yang dikelola	75 Arsip	84 Arsip	883.276.345,00	94 Arsip	971.603.979,00	94 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	20 %	20 %	285.000.000,00	20 %	335.000.000,00	20 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Jumlah Prasarana dan sarana Perikanan Tangkap	7518 Unit/Tahun	25 Unit/Tahun	16.250.000.000,00	25 Unit/Tahun	17.875.000.000,00	50 Unit/Tahun	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi perikanan tangkap	n/a Ton/Tahun	64 Ton/Tahun	4.150.000.000,00	64 Ton/Tahun	4.565.000.000,00	128 Ton/Tahun	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan SDM Perikanan Tangkap	7 Kelompok/Tahun	3 Kelompok/Tahun	2.750.000.000,00	4 Kelompok/Tahun	3.025.000.000,00	7 Kelompok/Tahun	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan/luas lahan budidaya	0 kg/m2	1 kg/m2	9.100.000.000,00	1 kg/m2	10.010.000.000,00	4 kg/m2	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	peningkatan produksi perikanan budiaya dalam 1 tahun	0 Ton/Tahun	316 Ton/Tahun	8.300.000.000,00	316 Ton/Tahun	9.130.000.000,00	732 Ton/Tahun	Dinas Perikanan dan Peternakan



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan SDM Perikanan Budidaya	10 Kelompok /Tahun	5 Kelom pok/Tah u n	2.550.000.000,00	5 Kelom pok/Tah u n	2.805.000.000,00	10 Kelompok/T ahun	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rasio Lokasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	25 %	25 %	2.000.000.000,00	25 %	2.200.000.000,00	25 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2 %	3 %	6.200.000.000,00	3 %	6.820.000.000,00	6 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kepuasan Wisatawan	5 %	5 %	7.400.000.000,00	5 %	9.030.000.000,00	10 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media yang digunakan	65 %	85 %	2.200.000.000,00	85 %	2.520.000.000,00	85 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi	n/a %	1 %	6.300.000.000,00	1 %	6.500.000.000,00	2 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kepuasan Konsumen Produk Ekonomi Kreatif (persentase)	n/a %	29 %	4.350.000.000,00	29 %	6.130.000.000,00	29 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	0,125 poin	0,085 poin	17.912.076.000,00	0,085 poin	18.592.679.000,00	0,085 poin	Dinas Pertanian
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan populasi ternak dalam satu tahun	5%	5%	11.650.000.000,00	5%	12.815.000.000,00	1 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi hasil peternakan dalam satu tahun	1776 Ton/Tahun	1776 Ton /Tahun	3.750.000.000,00	1883 Ton /Tahun	3.455.000.000,00	1883 Ton/Tahun	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0,103 poin	0,103 poin	49.432.500.000,00	0,103 poin	50.652.500.000,00	0,103 poin	Dinas Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	30 Persen	30 Persen	21.850.000.000,00	30 Persen	24.035.000.000,00	30 Persen	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan	n/a %	20 %	7.950.000.000,00	20 %	8.745.000.000,00	40 %	Dinas Perikanan dan Peternakan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp		
			KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pelayanan kesehatan masyarakat vetriner	n/a %	10 %	1.950.000.000,00	10 %	2.145.000.000,00	20 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah pengendalian dan penanggulangan bencana	n/a Wilayah	5 Wilayah	1.200.000.000,00	5 Wilayah	1.320.000.000,00	10 Wilayah	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penaggulangan Bencana	10 %	10 %	1.068.000.000,00	10 %	1.116.000.000,00	10 %	Dinas Pertanian
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	n/a %	3 %	1.800.000.000,00	3 %	1.980.000.000,00	6 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	5 %	5 %	340.000.000,00	5 %	430.000.000,00	5 %	Dinas Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	10 %	10 %	600.000.000,00	10 %	660.000.000,00	20 %	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan SDM penyuluh melalui pelatihan	10 %	10 %	6.375.000.000,00	10 %	6.625.000.000,00	10 %	Dinas Pertanian
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan yang berizin	26 %	27 %	160.000.000,00	27 %	160.000.000,00	27 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	20 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	320.000.000,00	25 Pelaku Usaha	340.000.000,00	25 Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	4 Unit	3 Unit	104.050.000.000,00	3 Unit	104.050.000.000,00	6 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Dava Mineral



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	13 %	15 %	2.240.000.000,00	15 %	2.240.000.000,00	15 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Sektor Usaha	7 Sektor Usaha	5.000.000.000,00	7 Sektor Usaha	5.000.000.000,00	7 Sektor Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	42 %	43 %	500.000.000,00	44 %	575.000.000,00	44 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	jumlah produk yg dipromosikan	15 Jenis	16 Jenis	993.000.000,00	17 Jenis	1.150.000.000,00	17 Jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil	1 %	1 %	13.350.000.000,00	1 %	5.350.000.000,00	1 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	"Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait"	10 IKM	10 IKM	115.000.000,00	10 IKM	120.000.000,00	20 IKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	0,25 %	0,35 %	100.000.000,00	0,50 %	120.000.000,00	0,50 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Peningkatan Keterampilan Calon Transmigran	0 Orang	32 Orang	200.000.000,00	48 Orang	200.000.000,00	48 Orang	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01		SEKRETARIAT DAERAH								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	95 %	96 %	39.807.497.421,00	97 %	43.788.247.163,00	97 %	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Koordinasi Pemerintahan	97 %	97 %	2.218.141.681,00	98 %	2.439.955.849,00	98 %	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	97 %	98 %	4.165.101.280,00	98 %	4.251.611.408,00	98 %	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
4	02		SEKRETARIAT DPRD								
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	88,33 Nilai	88,55 Nilai	49.053.882.280,00	88,75 Nilai	53.959.270.508,00	88,75 Nilai	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01		PERENCANAAN								
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	100 %	100 %	375.199.000,00	100 %	412.718.900,00	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	93,75 %	100 %	2.718.028.040,00	100 %	298.830.844,00	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	80,00 %	80,30 %	1.028.017.650,00	80,40 %	1.130.819.415,00	80,40 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	62,50 %	62,80 %	393.133.180,00	62,90 %	432.446.498,00	62,90 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	40,32 %	40,60 %	609.225.650,00	40,70 %	670.148.215,00	40,70 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	56,45 %	56,70 %	584.364.990,00	56,80 %	642.801.489,00	56,80 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	100 %	100 %	470.434.250,00	100 %	517.477.675,00	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	87,50 %	87,80 %	468.069.800,00	87,90 %	514.876.780,00	87,70 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02		KEUANGAN								
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	752.986.000.000,00	100 %	789.313.000.000,00	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	5.185.000.000,00	100 %	5.443.000.000,00	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketersediaan Laporan Pelayanan Pajak Daerah sebagai pendukung SKM	100 %	100 %	709.423.000,00	100 %	780.365.300,00	100 %	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah	100 %	100 %	10.982.437.900,00	100 %	12.080.681.690,00	100 %	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penerapan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	100 %	100 %	6.105.280.032,00	100 %	6.309.321.153,00	100 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi	70 %	70 %	11.060.285.150,00	70 %	12.166.313.665,00	70 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Berkontribusi pada Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	85 %	100 %	1.942.306.000,00	100 %	1.942.306.000,00	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01		INSPEKTORAT DAERAH								
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	NILAI KAPABILITAS APIP ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	1 Poin	1,1 Poin	11.833.298.875,00	1,15 Poin	14.199.958.650,00	1,15 Poin	Inspektorat Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Maturitas SPIP Pada Penetapan Dan Pencapaian Tujuan	3 Poin	3,1 Poin	2.498.637.875,00	3,15 Poin	2.998.365.450,00	3,15 Poin	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Integritas Pencegahan Korupsi	69,57 Poin	69,6 Poin	239.896.650,00	69,7 Poin	275.881.147,00	69,7 Poin	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas APIP pada Eleman Praktik Profesional	0,4 Level	0,45 Level	1.055.705.150,00	0,5 Level	1.214.060.922,00	0,5 Level	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian MCP KPK	92 %	93 %	1.048.810.875,00	94 %	1.206.132.506,00	94 %	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a %	3,3 %	270.858.000,00	3,4 %	311.486.700,00	3,4 %	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Unit Pelayanan yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	8 %	20 %	385.185.000,00	40 %	442.962.750,00	40 %	Inspektorat Daerah
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01		KECAMATAN								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Selaawi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Peundeuy
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Pasirwangi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Pangatikan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Pamulihan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Pakjeng
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Mekarmukti
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Malangbong



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Leuwigoong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Leles
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Kersamanah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	250.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangpawitan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangtengah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Kadungora
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	604.775.100,00	100 %	604.775.100,00	100 %	Kecamatan Garut Kota
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisurupan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisompet



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisewu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Cilawu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikelet
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikajang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cihurip
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cigedug
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibiuk
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibatu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibalong



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Banyuresmi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Caringin
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Bungbulang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Banjarwangi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Bayongbong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Balubur Limbangan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Samarang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	365.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	Kecamatan Wanaraja
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kidul



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	250.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Talegong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukawening
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukaesmi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Sucinaraja
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	100 %	190.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	Kecamatan Singajaya
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Malangbong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Banjarwangi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Banyuresmi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Bayongbong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Balubur Limbangan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Bungbulang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Caringin
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibalong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibatut
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibiuk
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cigedug
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cihurip
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikajang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikelet
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cilawu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisewu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisompet
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisarupan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.025.595.170,00	100 %	15.025.595.170,00	100 %	Kecamatan Garut Kota
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangtengah



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	4.953.055.200,00	100 %	4.953.055.200,00	100 %	Kecamatan Karangpawitan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Kersamanah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Leles
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Mekarmukti
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Pakenjeng
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Pamulihan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Pangatikan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Pasirwangi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Peundeuy
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Samarang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Selaawi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Singajaya
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Sucinaraja



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukaresmi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukawening
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Talegong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	1.448.229.800,00	100 %	1.448.229.800,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	6.623.255.200,00	100 %	6.623.255.200,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Wanaraja
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Kadungora
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	74.800.000,00	100 %	74.800.000,00	100 %	Kecamatan Wanaraja
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	112.800.000,00	100 %	112.800.000,00	100 %	Kecamatan Banjarwangi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	115.600.000,00	100 %	115.600.000,00	100 %	Kecamatan Banyuresmi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	55.800.000,00	100 %	55.800.000,00	100 %	Kecamatan Bayongbong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	98.000.000,00	100 %	98.000.000,00	100 %	Kecamatan Balubur Limbangan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	202.800.000,00	100 %	202.800.000,00	100 %	Kecamatan Bungbulang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	212.000.000,00	100 %	212.000.000,00	100 %	Kecamatan Caringin
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	72.000.000,00	100 %	72.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibalong



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	129.000.000,00	100 %	129.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibatu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	34.000.000,00	100 %	34.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibiuk
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	55.800.000,00	100 %	55.800.000,00	100 %	Kecamatan Cigedug
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	Kecamatan Cihurip
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	55.800.000,00	100 %	55.800.000,00	100 %	Kecamatan Cikajang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	118.400.000,00	100 %	118.400.000,00	100 %	Kecamatan Cikelet
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	80.400.000,00	100 %	80.400.000,00	100 %	Kecamatan Cilawu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	131.800.000,00	100 %	131.800.000,00	100 %	Kecamatan Cisewu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	77.600.000,00	100 %	77.600.000,00	100 %	Kecamatan Cisompet
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	36.800.000,00	100 %	36.800.000,00	100 %	Kecamatan Cisurupan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	185.200.000,00	100 %	185.200.000,00	100 %	Kecamatan Garut Kota
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	159.200.000,00	100 %	159.200.000,00	100 %	Kecamatan Kadungora
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	72.000.000,00	100 %	72.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangtengah
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangpawitan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	129.000.000,00	100 %	129.000.000,00	100 %	Kecamatan Kersamanah



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	140.200.000,00	100 %	140.200.000,00	100 %	Kecamatan Leles
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	140.200.000,00	100 %	140.200.000,00	100 %	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	72.000.000,00	100 %	72.000.000,00	100 %	Kecamatan Malangbong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	169.800.000,00	100 %	169.800.000,00	100 %	Kecamatan Mekarmukti
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	115.600.000,00	100 %	115.600.000,00	100 %	Kecamatan Pamulihan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	110.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100 %	Kecamatan Pakenjeng
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	115.600.000,00	100 %	115.600.000,00	100 %	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	91.000.000,00	100 %	91.000.000,00	100 %	Kecamatan Pangatikan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	91.000.000,00	100 %	91.000.000,00	100 %	Kecamatan Pasirwangi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	93.800.000,00	100 %	93.800.000,00	100 %	Kecamatan Peundeuy
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	96.600.000,00	100 %	96.600.000,00	100 %	Kecamatan Samarang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	91.000.000,00	100 %	91.000.000,00	100 %	Kecamatan Selaawi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	167.000.000,00	100 %	167.000.000,00	100 %	Kecamatan Singajaya
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Sucinaraja
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	79.000.000,00	100 %	79.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukaresmi



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	188.800.000,00	100 %	188.800.000,00	100 %	Kecamatan Sukawening
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	124.000.000,00	100 %	124.000.000,00	100 %	Kecamatan Talegong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	185.200.000,00	100 %	185.200.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100 %	99.400.000,00	100 %	99.400.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Banyuresmi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Banjarwangi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukaresmi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Mekarmukti
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Wanaraja
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Talegong



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukawening
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Sucinaraja
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Singajaya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Selaawi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Samarang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Peundeuy
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Pasirwangi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Pamulihan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Pakenjeng
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Malangbong



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Leles
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Kersamanah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Pangatikan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangpawitan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangtengah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Kadungora
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Garut Kota
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisewu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Cilawu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikelet



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikajang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisurupan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Cihurip
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisompet
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Cigedug
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibiuk
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibatu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibalong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	Kecamatan Caringin
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Bungbulang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Balubur Limbangan



Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Garut 2025 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	230.000.000,00	100 %	230.000.000,00	100 %	Kecamatan Bayongbong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Sucinaraja
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikelet
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cilawu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Banyuresmi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Bayongbong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Balubur Limbangan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Bungbulang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Caringin
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibalong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibatu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cibiuk
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cigedug
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cihurip



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cikajang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisewu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisompet
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Cisurupan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	Kecamatan Garut Kota
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Kadungora
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangtengah
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	Kecamatan Karangpawitan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Kersamanah
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Leles
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Leuwigoong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Malangbong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Mekarmukti
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Pakenjeng
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Pameungpeuk



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Pamulihan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Pangatikan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Pasirwangi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Peundeuy
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Samarang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Selaawi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Singajaya
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukaresmi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Sukawening
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kaler
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kidul
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Wanaraja
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Talegong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	Kecamatan Banjarwangi
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang terfasilitasi	n/a Persen	100 Persen	980.724.900,00	100 Persen	1.078.797.390,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih yang mengikuti pendidikan politik	n/a Persen	100 Persen	4.345.084.200,00	100 Persen	4.779.592.620,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	n/a Persen	100 Persen	3.010.392.200,00	100 Persen	3.311.431.420,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang terfasilitasi	n/a Persen	100 Persen	971.547.400,00	100 Persen	1.068.702.140,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani	n/a Persen	100 Persen	6.820.000.000,00	100 Persen	7.502.000.000,00	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X			NON URUSAN								
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	98 %	98 %	70.027.639.865,00	99 %	78.514.194.776,00	99 %	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik SKPD	84 Nilai	85 Nilai	311.484.900.603,00	85 Nilai	342.633.390.663,00	85 Nilai	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UOBK RSUD dr Slamet	88 Nilai	81 Nilai	188.426.602.856,00	82 Nilai	194.079.400.941,00	82 Nilai	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UOBK RSUD Malangbong	81 Nilai	82 Nilai	9.960.960.000,00	83 Nilai	10.674.270.000,00	83 Nilai	Dinas Kesehatan



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Puskesmas dan Labkesda	84 Nilai	85 Nilai	138.208.920.012,00	86 Nilai	145.119.366.013,00	86 Nilai	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	82 Poin	83 Poin	275.000.100,00	84 Poin	302.500.110,00	84 Poin	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %	87 %	9.309.138.774,00	88 %	11.170.966.529,00	88 %	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP	Baik/A Nilai	Baik/A Nilai	39.201.000.000,00	Baik/A Nilai	41.438.000.000,00	Baik/A Nilai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.796.151.395,00	100 %	2.796.151.395,00	100 %	Kecamatan Kadungora
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.544.574.127,00	100 %	2.544.574.127,00	100 %	Kecamatan Cisurupan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.122.431.458,00	100 %	2.122.431.458,00	100 %	Kecamatan Pamulihan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.327.123.354,00	100 %	2.327.123.354,00	100 %	Kecamatan Pakenjeng
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.008.635.811,00	100 %	2.208.635.811,00	100 %	Kecamatan Kersamanah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.090.552.621,00	100 %	2.090.552.621,00	100 %	Kecamatan Cisewu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.167.887.435,00	100 %	3.167.887.435,00	100 %	Kecamatan Wanaraja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	11.903.206.616,00	100 %	9.370.706.616,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kidul
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.284.156.411,00	100 %	4.251.656.411,00	100 %	Kecamatan Tarogong Kaler
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.646.935.271,00	100 %	2.646.935.271,00	100 %	Kecamatan Talegong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.190.422.775,00	100 %	2.190.422.775,00	100 %	Kecamatan Sukawening



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.602.347.455,00	100 %	2.402.347.455,00	100 %	Kecamatan Sukaresmi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.397.643.778,00	100 %	2.397.643.778,00	100 %	Kecamatan Sucinaraja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.566.944.459,00	100 %	2.566.944.459,00	100 %	Kecamatan Singajaya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.992.537.384,00	100 %	2.992.537.384,00	100 %	Kecamatan Samarang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.380.113.491,00	100 %	3.380.113.491,00	100 %	Kecamatan Pasirwangi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	16.936.121.617,00	100 %	14.403.621.617,00	100 %	Kecamatan Garut Kota
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.750.123.234,00	100 %	2.350.123.234,00	100 %	Kecamatan Pangatikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.181.402.374,00	100 %	2.181.402.374,00	100 %	Kecamatan Pameungpeuk
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.999.468.339,00	100 %	2.199.468.339,00	100 %	Kecamatan Mekarmukti
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.283.356.709,00	100 %	2.283.356.709,00	100 %	Kecamatan Leuwigoong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.920.195.643,00	100 %	9.687.695.643,00	100 %	Kecamatan Karangpawitan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.455.678.869,00	100 %	2.455.678.869,00	100 %	Kecamatan Cilawu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.877.563.301,00	100 %	2.077.563.301,00	100 %	Kecamatan Karangtengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.410.143.682,00	100 %	2.410.143.682,00	100 %	Kecamatan Cikajang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.485.003.867,00	100 %	4.125.003.867,00	100 %	Kecamatan Peundeuy



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.070.077.566,00	100 %	2.070.077.566,00	100 %	Kecamatan Cihurip
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.140.899.014,00	100 %	2.140.899.014,00	100 %	Kecamatan Cikelet
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.106.078.792,00	100 %	2.106.078.792,00	100 %	Kecamatan Banjarwangi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.500.220.770,00	100 %	2.500.220.770,00	100 %	Kecamatan Banyuresmi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.970.827.232,00	100 %	2.970.827.232,00	100 %	Kecamatan Cisompet
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.799.490.152,00	100 %	2.897.490.152,00	100 %	Kecamatan Leles
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.123.980.537,00	100 %	2.423.980.537,00	100 %	Kecamatan Selaawi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.787.498.009,00	100 %	2.987.498.009,00	100 %	Kecamatan Malangbong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.251.023.620,00	100 %	2.251.023.620,00	100 %	Kecamatan Cibalong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.477.290.702,00	100 %	2.477.290.702,00	100 %	Kecamatan Cibatut
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.083.672.468,00	100 %	4.083.672.468,00	100 %	Kecamatan Cibiuk
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.996.976.592,00	100 %	2.296.976.592,00	100 %	Kecamatan Cigedug
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai SAKIP	BB Predikat	BB Predikat	19.152.180.462,00	A Predikat	20.863.959.323,00	A Predikat	Dinas Pemuda dan Olah Raga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bappeda	86,01 poin	86,20 poin	12.134.905.040,00	86,30 poin	13.348.395.544,00	86,30 poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Bapenda	100 %	100 %	31.418.275.808,00	100 %	29.084.336.839,00	100 %	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BPBD	A kategori	A kategori	5.179.257.713,00	A kategori	5.697.183.485,00	A kategori	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BPKAD	100 %	100 %	12.288.000.000,00	100 %	12.728.000.000,00	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja DPMD	A Predikat	A Predikat	9.383.061.843,00	A Predikat	9.383.061.843,00	A Predikat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin	80 poin	11.786.000.000,00	80 poin	9.271.000.000,00	80 poin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai PK APIP pada unsur akuntabilitas manajemen dan kinerja, pengelolaan SDM, budaya dan hubungan organisasi serta tata kelola APIP	1,6 Poin	1,7 Poin	28.066.247.400,00	1,8 Poin	36.486.121.620,00	1,8 Poin	Inspektorat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	BB Predikat	BB Predikat	1.275.340.702.698,00	BB Predikat	1.332.911.552.272,00	BB Predikat	Dinas Pendidikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Predikat	A Predikat	108.425.493.319,00	A Predikat	62.249.542.650,00	A Predikat	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80,61 Nilai	80,63 Nilai	15.646.822.968,00	80,65 Nilai	17.211.505.265,00	80,65 Nilai	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	A Predikat	A Predikat	8.137.330.044,00	A Predikat	8.951.063.048,00	A Predikat	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB Predikat	BB Predikat	5.259.637.735,00	BB Predikat	5.785.601.508,00	BB Predikat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	B Predikat	B Predikat	9.857.500.000,00	B Predikat	10.257.500.000,00	B Predikat	Dinas Perumahan dan Permukiman
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.821.500.000,00	100 %	9.942.500.000,00	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
											Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas penunjang layanan adminduk	100 Persen	100 Persen	13.579.828.123,00	100 Persen	14.937.810.935,00	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pelayanan Kantor	100 %	100 %	7.562.031.891,00	100 %	8.330.085.079,00	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi penunjang	100 %	100 %	8.671.981.160,00	100 %	8.671.981.160,00	100 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	14.725.000.000,00	100 %	14.821.000.000,00	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	75 %	80 %	25.215.000.000,00	80 %	27.690.000.000,00	80 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100% %	100% %	14.725.000.000,00	100% %	14.821.000.000,00	100% %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100% %	100% %	21.047.127.000,00	100% %	21.057.127.000,00	100% %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	95 %	95 %	19.795.000.000,00	95 %	21.769.500.000,00	95 %	Dinas Perikanan dan Pternakan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan BKD	98 %	98 %	20.656.000.376,00	98 %	26.750.252.678,00	98 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	1.856.018.263,00	100 %	1.856.018.263,00	100 %	Kecamatan Caringin



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	2.644.588.857,00	100 %	2.644.588.857,00	100 %	Kecamatan Bayongbong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	3.748.985.329,00	100 %	2.168.985.329,00	100 %	Kecamatan Balubur Limbangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	2.172.489.766,00	100 %	2.172.489.766,00	100 %	Kecamatan Bungbulang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	7.692.873.561,00	100 %	8.002.537.001,00	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	35.330.276.000,00	100 %	37.113.998.000,00	100 %	Dinas Pertanian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	14.495.677.621,00	100 %	8.872.277.621,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	27.193.794.780,00	100 %	29.465.910.524,00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Masyarakat	81,71 Kategori	84,2 Kategori	3.934.635.605,00	88,35 Kategori	4.328.099.165,00	88,35 Kategori	Dinas Pendidikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Penunjang Pelayanan Administrasi, SDM dan Keuangan	100 %	100 %	52.511.871.090,00	100 %	49.807.215.990,00	100 %	Dinas Perhubungan

Sumber: Diolah Bappeda Kab Garut, 2023 yang dikelola dalam SIPD

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut tercermin dari pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut merupakan penjabaran indikator makro pembangunan daerah, indikator sasaran pembangunan daerah yang menjadi sasaran strategis pencapaian kinerja daerah serta indikator kinerja daerah berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah.

8.1 Indikator Makro

Indikator makro merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator makro meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini, Pendapatan per Kapita dan Inflasi.

Indikator makro Kabupaten Garut beserta target Tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan dimasa yang akan datang. Adapun Indikator makro Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 tercantum pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut
Tahun 2025-2026

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian					Target		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,77	66,12	66,45	67,41	68,11	69,7-70,68	69,51	70,10
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,1	-1,4	0,72	0,86	0,85	1,1	1,17	1,13
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	-1,26	3,58	5,08	n/a	4,87 - 5,57	5,10	4,66
4	Persentase Penduduk Miskin	%	8,81	9,98	10,65	10,42	9,77	6,92 - 7,03	9,21	8,96
5	Pendapatan Per Kapita	Rp (Juta)	21,28	22,01	23,356	25,346	n/a	25,43-25,61	30,00	31,38
6	Persentase Pengangguran Terbuka	%	6,79	8,96	8,68	7,6	7,33	6,41 - 6,61	7,03	6,89
7	Indeks Gini	Poin	0,36	0,352	0,322	0,302	n/a	0,35 - 0,36	0,30	0,30

Sumber:

diolah

Bappeda

2023

8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Garut yang memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Penentuan IKU Kabupaten Garut tidak seluruhnya sama dengan IKU yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, terdapat beberapa indikator yang ditambahkan dan dikurangi berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun rincian target capaian IKU daerah disajikan dalam tabel 8.1 sebagai berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Tahun 2025-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	2021		2022		2023		2024	2025	2026
			Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Poin	Baik	Baik	83,56 (Baik)	Baik	84,49 (Baik)	Baik	Baik	84,89 (Baik)	85,40 (Baik)
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,59	71,63 - 71,74	71,85	71,76 - 71,88	72,07	71,89 - 72,01	72,03 - 72,1	72,51	72,72
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,62 - 7,64	7,83	7,73 - 8,23	7,84	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	7,94	7,98
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	11,98 - 12	12,15	12,01 - 12,09	12,16	12,07 - 12,15	12,13 12,21	12,32	12,45
5	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa	281,36	240,96-254,38	276,67	227,67-230,67	260,48	209,17-212,17	190,67-193,67	253,13	249,19
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,68	8,96 - 9,46	7,6	8,21 - 8,41	7,33	7,31 - 7,50	6,41-6,61	7,03	6,89
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,72	1,1	0,86	1,1	0,84	1,1	1,1	1,09	1,05
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,87		73,74		n/a			73,82	73,9
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	82,13		82,78		n/a			82,00	82,98
10	Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Triliun Rp.	1,29	1,45-1,46	1,165	1,46-1,48	1,357	2,12- 2,13	1,52 - 1,53	1,71	1,91
11	Laju pertumbuhan sektor pertanian	%	3,61		4,43		n/a			4,31	3,61
12	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	3,08		4,53		n/a			4,85	4,55
13	Laju pertumbuhan sektor pariwisata	%	0,25		17,02		n/a			12,5	10,45
14	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,91		6,29		n/a			6,1	6,1
15	Pengeluaran per kapita	Rp. 000	7961	8.205,00-8.220,00	8.227	8.562,5-8.762,5	8.685	9.012,50-9.212,50	9.462,50-9.662,50	9.305,82	9.609,80
16	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	79,7	79	83,1	80	91,7	81	82	90	90
17	Persentase kemantapan jalan kabupaten dan poros desa	%	48,91	49,95	51,42	52,61	55,25	55,27	57,92	60,42	62,5

**Rancnagan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Garut
Tahun 2025-2026**



No	Indikator Sasaran	Satuan	2021		2022		2023		2024	2025	2026
			Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target	Target
18	Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	75,23	76,83	82,7	80,7	83,43	84,4	88,04	91,25	93,55
19	Persentase kawasan permukiman layak huni	%					35,66		36,02	36,59	37,16
20	Cakupan air minum layak	%	87,26	88,74	88,51	89,27	90,04	90,04	90,74	91,25	93
21	Cakupan sanitasi layak	%	67,13	67,27	67,17	67,69	68,11	68,11	68,53	69,05	70
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,82	57,62	69,25	59,18	66,89	60,75	62,31	62,33	62,74
23	Indeks Risiko Bencana	Poin	185	203	164,91	200	147,39	197	194	145	140
24	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	30,17	32,30	34,91	53,45	39,67	68,65	72,209	75,77	79,33
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	84 (Baik)	85 (Baik)
26	Sistem Merit	Nilai	266 (Baik)	270.6 (Baik)	259,5 (Baik)	291.1 (Baik)	328,5 (Sangat Baik)	311.6 (Sangat Baik)	328 (Sangat Baik)	329 (Sangat Baik)	329 (Sangat Baik)
27	Nilai SAKIP	Nilai	74,28(BB)	BB	74,38(BB)	BB	74,91(BB)	BB	A	80,05 (A)	81,05 (A)
28	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	39,86 (Inovatif)		54,13 (Inovatif)		42,96 (Inovatif)			60,01 (Inovatif)	61,7 (Inovatif)
29	Indeks SPBE	Nilai	3,25	1,02	3,25	2,73	3,26	3,11	3,87	3,35	3,40
30	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	B	A	75,701 (B)	A	77,829 (B)	A	A	86,38 (A)	89,23 (A)
31	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi (3,4962)	Tinggi (3.1)	Tinggi (3.1)	3,4966 (Tinggi)	3,497 (Tinggi)
32	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Nilai					68,76 (Baik)			73,2 (Baik)	75,1 (Baik)

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab. Garut, 2023

8.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Adapun Pada Tabel 8.3 diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2025-2026 dan Pada tabel 8.4 diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2025-2026

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Garut Tingkat Dampak/ *Impact* Tahun 2025-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,09	-1,26	3,58	5,08	4,94	4,59 - 5,51	4,87 - 5,57	5,10	4,66	Indikator Makro
2	Laju inflasi	%	3,6	1,61	1,17	6,65	2,48	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	Indikator Makro
3	PDRB per kapita ADHB	Juta Rp	21,28	22,01	23,35	25,346	26,91	24,33-24,49	25,43-25,61	30,00	31,38	Indikator Makro
4	Indeks Gini	Poin	0,36	0,352	0,322	0,302	0,361	0,36 - 0,362	0,35 - 0,36	0,302	0,301	Indikator Makro
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Bukan Kewenangan Kabupaten										
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)											
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	91,19	90,02	89,35	89,58	90,23	92,23-92,34	92,97-93,08	90,79	91,04	Indikator Makro
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	Bukan Kewenangan Kabupaten										
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	Bukan Kewenangan Kabupaten										
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,77	66,12	66,45	67,41	68,11	68,63-69,62	69,7-70,68	69,51	70,10	Indikator Makro
11	Angka melek huruf	%	99,06	99,58	99,14	99,6	n/a	99,45	99,53	99,61	99,69	Dinas Pendidikan
12	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,75	7,52	7,53	7,83	7,84	8,08 - 8,58	8,43 - 8,93	7,94	7,98	BPS
13	Angka usia harapan hidup	Tahun	71,01	71,41	71,59	71,85	72,07	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	72,51	72,72	BPS
13	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,13	11,91	12,03	12,15	12,16	12,07 - 12,15	12,13 - 12,21	12,32	12,45	BPS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
15	Persentase balita gizi buruk	%	0,04	0,08	0,07	0,094	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	Dinas Kesehatan
16	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,95	2,62	2,4	4,24	3,9	1,28	0,86	3,8	3,7	Dinas Kesehatan
17	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,35	61,11	62,76	68,84	70,1	64,81-65,95	66,96-68,05	70,3	70,35	BPS
19	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,79	8,96	8,68	7,6	7,33	7,31 - 7,51	6,41 - 6,61	7,03	6,89	BPS
20	Jumlah pengangguran terbuka	Jiwa	84.045	103.607	104.212	101.135	102.010	98.560-106.473	94.560-102.473	100.931	100.412	BPS
21	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,21	91,04	91,32	92,4	92,67	92,69-92,49	93,59-93,39	92,97	93,11	BPS
18	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	54,06	55,47	55,5	54,17	n/a	62,76	64,46	64,46	64,46	BPS
19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	56,26	56,62	57,45	56,61	57,31	60,07-61	62,66-63,55	62,66-63,55	62,66-63,55	BPS
20	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	34,21	34,25	35	37,69	n/a	35,69-34,01	34,69-33,08	34,69-33,08	34,69-33,08	BPS
21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera											Dinas Sosial
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	84 (Baik)	85 (Baik)	Setda
23	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,79	15,75	11,97	10,5	n/a	16,15	18	25	28	Badan Pendapatan Daerah
24	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
25	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	77	77,5	79,7	83,1	91,7	80,4	81,3	90	90	Dinas Ketahanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
												Pangan
26	Penguatan cadangan pangan	%	11,25	15	n/a	n/a	473	26	30	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
27	Penanganan daerah rawan pangan	%	5,88	6,28	n/a	n/a	9,28	8,6	9,28	9,95	10,63	Dinas Ketahanan Pangan
28	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	37,64	37,45	37,35	37,38	36,32	35,44-35,31	35-34,92	37,51	37,33	BPS
29	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,52	n/a	3,73	4,15	4,43	3,6-3,66	3,65-3,71	4,32	4,36	BPS
30	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,47	18,5	18,54	18,46	8,96	19,73-19,79	19,74-19,88	18,85	19,04	BPS
31	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	7,88	8,17	8,49	8,58	18,54	8,04-8,1	8,14-8,12	8,44	8,43	BPS
32	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	19,47	18,5	18,54	18,46	8,05	19,73-19,79	19,74-19,88	18,85	19,04	BPS
33	Pertumbuhan Industri	%	6,13	n/a	5,91	6,29	16,428	4-6	6-6,5			BPS
	PDRB per kapita ADHK	Juta Rp	14,9	14,64	15,35	15,991	473	16,45-16,6	17,18-17,29	17,51	18,12	BPS
ASPEK DAYA SAING DAERAH												
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	515.095	940.065	503.987	522.212	588.794	728.980	782.472	782.472	782.472	BPS
2	Nilai tukar petani	Poin	110,93	100,65	98,8	103	n/a	111,26	111,38	111,38	111,38	Distan
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	n/a	41,04	39,36	39,14	43,36			44,50	45,00	BPS
4	Produktivitas total daerah	juta	46,51	36,04	36,47	50,05	n/a	46,75	46,81	46,81	46,81	BPS
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	Indikator swasembada sudah tidak digunakan									
6	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1,7	1,07	1,98	4,55	n/a	1,7	1,7	1,7	1,7	BPS
7	Rasio ketergantungan	Angka	57,72	47,31	47,1	46,97	46,92	56,8	56,75	47,11	47,34	BPS

Sumber : diolah oleh Bappeda Kab. Garut, 2023

Tabel 8.4
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Garut Tingkat Hasil/ Outcome Tahun 2025-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
ASPEK PELAYANAN UMUM												
LAYANAN UMUM WAJIB DASAR												
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
	1.01 PENDIDIKAN											
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											Disdik
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	74,50%	55,05	85,4	85,4	N/A	77	78	67,26	73,26	Disdik
1	APK SD sederajat	%	111,11%	105,66	98,58	100,2	N/A	111,93	112,43	105,06	106,68	Disdik
2	APK SMP sederajat	%	99,54%	115,11	79,66	100,15	N/A	109,22	110,04	104,02	105,08	Disdik
	Angka pendidikan yang ditamatkan											Disdik
1	APT SD sederajat	%	40	40,16	32,63	n/a	n/a	32,79	32,95	33,11	33,27	Disdik
2	APT SMP sederajat	%	18	18,09	16,6	n/a	n/a	18,34	18,42	18,52	18,62	Disdik
	Angka Partisipasi Murni											Disdik
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,00%	99,3	94,45	97,18	97,97	100	100	97,31	98,01	Disdik
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	93,37%	98	67,13	83,28	79,9	97,6	98,58	99,07	99,56	Disdik
3	Angka Partisipasi Murni (APM)	%										Disdik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	SMA/SMK/MA/Paket C											
	Angka partisipasi sekolah :											Disdik
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	100	85,76	98,49	99,59	100	100	100	100	Disdik
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	59,59	95,29	95,77	100	100	100	100	Disdik
3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%										Disdik
	Angka Putus Sekolah:											Disdik
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	poin	0,00003	0,036	0,003	0,1	n/a	0	0	0	0	Disdik
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	poin	0,00015	0,004	0,021	0,5	n/a	0,00005	0,00003	0,002	0,001	Disdik
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	poin										Disdik
	Angka Kelulusan:											Disdik
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	Disdik
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	Disdik
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%										Disdik
	Angka Melanjutkan (AM):											Disdik
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,79	96,67	77,17	80,75	n/a	100	100	100	100	Disdik
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	67,30%	80,81	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	Disdik
	Fasilitas Pendidikan:											Disdik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	77,91%	73	99,26	65,48	n/a	79,05	79,34	80,34	81,34	Disdik
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	85,67%	83	99,25	70,13	n/a	90,25	91,4	92,15	92,9	Disdik
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	satuan	3,9	n/a	42,52	n/a	n/a	3,9	3,9	3,9	3,9	Disdik
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Disdik
5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	angka	500,08	23	24	25	n/a	500,08	500,08	26	26	Disdik
6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	angka	n/a	20	19	19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Disdik
7	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	angka	20,5	23	24	25	n/a	20,5	20,5	26	26	Disdik
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata- rata	angka	20,5	20	19	19	n/a	20,5	20,5	21	22	Disdik
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	99,54	100	n/a	n/a	n/a	99,74	99,79	99,84	99,89	Disdik
10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	100	100	99,9	n/a	100	100	100	100	Disdik
11	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,54	99,56	99,66	99,6	n/a	99,78	99,84	99,9	99,96	Disdik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1 2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,15	95,55	96,49	87,84	n/a	93,67	94,55	95,43	96,31	Disdik
1.02. KESEHATAN												
1	Persentase pelayanan medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
2	Persentase pelayanan penunjang medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3	Persentase pelayanan profesi medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
4	Persentase pelayanan keperawatan	%	100	99,9	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan	%	100	85,5	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
6	Persentase Capaian SPM (standar pelayanan minimum) yang mencapai target	%	n/a	n/a	70,83	72,07	74,77	95	96	76	77	Dinkes
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	45	210(angka kejadian)	225(angka kejadian)	334(angka kejadian)	320	325	300	275	250	Dinkes
8	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	54752	44778	51175	48178	n/a	54971	55026	55030	55036	Dinkes
9	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	orang	23	7 orang (0,02)	6 orang (0,027)	11	n/a	17	15	14	12	Dinkes
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	orang	4,7	196 orang (4,58)	219 orang (4,28)	250	6,5	3,9	3,7	3,6	3,5	Dinkes
11	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	orang	148,97	58 orang (135,51)	112 orang (242,3)	48	117,65	147,97	147,72	140	135	Dinkes
12	Rasio posyandu per satu balita	rasio	1/100	19360	19360	0,08	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	Dinkes
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satu penduduk	rasio	1/38000	1/13.300	1/13.235	1:7.600	n/a	1/34000	1/33000	1/33000	1/33000	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	1/500000	1/439440	1/396825	1:382.221	n/a	1/ 416666	1/ 416666			Dinkes
15	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1/10000	2215198	1285290	1/11291	n/a	1/10000	1/10000	1/5000	1/5000	Dinkes
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	1/10000	1422622	1101573	1973772	n/a	1/10000	1/10000	1/5000	1/5000	Dinkes
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	rasio		14,46	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,98	87,05	89,68	94	96	100	100	98	99	Dinkes
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95	77,6	60,42	90,04	96,28	95	95	100	100	Dinkes
20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	100	n/a	n/a	Tidak ada data	100	100	100	100	100	Dinkes
22	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95	95	87,71	101,5	96,77	95	95	100	100	Dinkes
23	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	2	0.042	2,13	2,6	11,35	2	4	4	4	Dinkes
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	71,64	41.19	35,64	63,15	n/a	100	100	100	100	Dinkes
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	34,69	71,8	120,1	91,86	100	100	91	92	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	124	86	178,2	278,5	281,5	104	99	165	145	Dinkes
27	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	1,01	2,3	2,6	2,2	4,03	0,81	0,76	2	1,9	Dinkes
28	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	54,78	34,69	100	100	91,85	100	100	90	90	Dinkes
29	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	57,3	85,8	72,5	84,18	83,82	100	100	90	90	Dinkes
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
31	Penderita diare yang ditangani	%	82,51	36	100	89,57	100	100	100	100	100	Dinkes
32	Angka kejadian Malaria	Kasus/ 100.000	10	4	0,27	0,34	0,41	10	10	<1	<1	Dinkes
33	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/ 1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkes
34	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	15	0	0	-	0	15	15	0	0	Dinkes
35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	0	0	-	0	100	100	0	0	Dinkes
36	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,5	0,025	0,23	0,32	0,38	1,5	1,5	<1,5	<1,5	Dinkes
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks	%	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	berisiko tinggi terakhir											
38	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	15	20	47,23	-	49,1	25	25	45	45	Dinkes
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	3,5	25,75	100	100		20	20			Dinkes
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	n/a	n/a	49,95	52,61	55,25	55,27	57,92	60,42	62,5	Dinas PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	n/a	n/a	0,25	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	Dinas PUPR
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	79,21	85,52	87,6	88,75	88,25	89,75	90,5	92,5	94	Dinas PUPR
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	n/a	n/a	0,5	1,5	0,39	2	3	3,5	4	Dinas PUPR
5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	n/a	n/a	30	28	18	26	25	20	15	Dinas PUPR
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	66,73	67,03	67,27	67,69	68,11	68,11	68,53	69,05	70	Dinas PUPR
7	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar,	%	n/a	n/a	35	33	24	31	30	28	25	Dinas PUPR
8	Persentase drainase dalam kondisi baik/	%	n/a	n/a	40	50	33,5	60	70	50	55	Dinas PUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	pembuangan aliran air tidak tersumbat:											
9	Tidak terjadi genangan »2 kali setahun:	%	n/a	n/a	60	65	54	70	75	60	70	Dinas PUPR
10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor,	%	n/a	n/a	20	25	20	30	35	40	50	Dinas PUPR
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	71,6	80	82	85	79,3	87	90	85	90	Dinas PUPR
12	Rasio Jaringan Irigasi,	%	75,1	77,75	79,5	81	76,55	81,5	82	80	82	Dinas PUPR
13	Persentase penduduk berakses air minum	%	79,84	84	88,74	89,27	90,04	90,04	90,74	91,25	93	Dinas PUPR
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	79,84	84	88,74	89,27	90,04	90,04	90,74	91,25	93	Dinas PUPR
	Penataan Ruang :											
1	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan,	%	0,023	0,028	8,4	8,92	10,31	9,45	9,98	12,32	13,33	Dinas PUPR
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	80,5	82,5	83	83,5	83,92	84	84,5	85	85,5	Dinas PUPR
3	Persentase kemandapan Jalan kabupaten(%)	%	79,21	85,52	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas PUPR
4	Persentase kemandapan Jalan Desa(%)	%	44,95	36,69	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas PUPR
5	Persentase kemandapan Jalan (%)	%	n/a	n/a	49,95	52,61	55,25	55,27	57,92	60,42	62,5	Dinas PUPR
6	Persentase Luas Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	%	n/a	n/a	6	12	32,48	20	30	n/a	n/a	Dinas PUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase bangunan dan lingkungan kawasan yang ditata	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	17	Dinas PUPR
8	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
9	Cakupan air Minum layak (%)	%	79,84	84	88,74	89,27	90,04	90,04	90,74	91,25	93	Dinas PUPR
10	Cakupan sanitasi layak (%)	%	66,73	67,03	67,27	67,69	68,11	68,11	68,53	69,05	70	Dinas PUPR
11	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis (%)	%	72,15	76,48	76,83	80,7	83,43	84,4	88,04	91,25	93,55	Dinas PUPR
12	Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	n/a	60	50	27,5	25	0	n/a	n/a	Dinas PUPR
13	Persentase tampungan air yang tersedia	%	n/a	6,93	30,16	57,14	38,1	82,54	100	47	58	Dinas PUPR
14	Persentase bangunan yang Layak Teknis (%)	%	0,023	0,028	8,4	8,92	10,31	9,45	9,98	12,32	13,33	Dinas PUPR
15	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (%)	%	80,5	82,5	83	83,5	83,92	84	84,5	85	85,5	Dinas PUPR
16	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih (%)	%	3,2	8,33	19,64	23,44	32,27	27,24	31,04	40,8	49,35	Dinas PUPR
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	Rasio rumah layak huni,	%	93,1	94,1	94,7	95	95,3	146,5	100	100	100	Dinas Perkim
2	Rasio permukiman layak huni,	%	n/a	n/a	289,13	284,98	280,42	286,70	282,13	278,10	274,18	Dinas Perkim
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni,	%	78,54	79,36	79,86	80,13	80,42	80,42	80,45	80,56	80,63	Dinas Perkim
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang	%	n/a	n/a	n/a	n/a	12,3	12,3	12,37	12,44	12,51	Dinas Perkim

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	terjangkau,											
5	Persentase pemukiman yang tertata,	%	n/a	n/a	289,13	284,98	280,42	286,70	282,13	278,10	274,18	Dinas Perkim
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh,	%	92,81	48,9	n/a	1,48	4,75	7,31	7,89	4,28	4,47	Dinas Perkim
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan,	%	0,246	0,0093	n/a	0,014	0,044	0,064	0,064	0,032	0,032	Dinas Perkim
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan,	%	n/a	n/a	n/a	1,27	1,24	1,24	n/a	1,21	1,18	Dinas Perkim
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU,	%	n/a	n/a	n/a	n/a	77,98	77,98	82,57	89,45	96,33	Dinas Perkim
10	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh (7 + 1)	Ha	24,76	0,87	0	1,3	4,12	6	6	3	3	Dinas Perkim
11	Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkim
12	Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	41.990	36.138	32.504	31.010	28.936	29.260	26.990	26.490	25.990	Dinas Perkim
13	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Unit	n/a	n/a	6727	6825	6936	6765,6	6870,4	6.994	7.094	Dinas Perkim
14	Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi	Pengembang	n/a	n/a	n/a	n/a	30	30	35	37	39	Dinas Perkim
1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT												
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas),	%		45	60	75	n/a	85	90	100	100	Satpol PP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan),	%	n/a	80	75	64	n/a	65	60	90	95	Satpol PP
3	Persentase Penegakan PERDA.	%	83	62	60	62	n/a	75	84	90	95	Satpol PP
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota,	%	14,29	14,29	16,67	16,67	23,81			33	35	Disdamkar
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan	%	100	100	100	100	97			100	100	Disdamkar
6	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,36	0,46	0,39	0,65	0,72	0,43	0,44	0,78	0,8	BPBD
1.06. SOSIAL												
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	6,4	n/a	59,77	35,24	70	9,17	10,3	65	70	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,5	n/a	76,82	57,93	77	0,77	0,77	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya,	Bukan Kewenangan Kabupaten										
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	60	n/a	75,01	100	100	77	80	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0,57	n/a	0,57	1,68		0,57	0,57	0,57	0,58	Dinas Sosial
2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												
2.01. TENAGA KERJA												
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	35	23	16	21	30	18	16	12	12	Disnakertrans
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	35	17	8	14	26	18	16	12	12	Disnakertrans
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	2600	2362	11210	9377	5970	3061	3367	3000	3500	Disnakertrans
4	Keselamatan dan perlindungan	%	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	Disnakertrans
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	125 Perusaha an	31559	40317	-	58962	33000 orang	33000 orang	59962	61212	Disnakertrans
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	35	17	0	0	0	18	16	0	0	Disnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	942	560	1372	304	32	624	656	800	960	Disnakertrans
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	64	75	320	0	176	70	86	0	0	Disnakertrans
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	64	75	100	0	0	72	72	0	0	Disnakertrans
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	7,66	5,51	5,96	n/a	n/a	8,02	8,11	n/a	n/a	Disnakertrans
2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,34	62	47,28	52,41	52,35	50	50	52	54	Dinas P2KBP3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16	18	18	16	10	16	16	16	16	Dinas P2KBP3A
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	39,53	54	39,97	77,6	45,74	48,33	50,53	50,6	61	Dinas P2KBP3A
4	Rasio KDRT	%	0,022	0,014	0,014	0,014	0,014	0,018	0,017	0,017	0,017	Dinas P2KBP3A
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3,60	2,65	2,65	2,65	2,56	2,40	2,1	2,1	2	Dinas P2KBP3A
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	24,63	38,73	43,19	34,2	39,53	32,63	34,63	35	35,5	Dinas P2KBP3A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	96,23	100	50,4	98,73	97,27	97,27	97,67	97,7	98	Dinas P2KBP3A
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	76,24	93,4	44,63	85,2	77,84	77,84	78,24	78,5	78,8	Dinas P2KBP3A
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	54,23	62,4	41,59	42,56	55,83	55,83	56,23	56,43	56,43	Dinas P2KBP3A
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	18,04	12,2	53,68	53,66	19,64	19,64	20,04	20,44	21,12	Dinas P2KBP3A
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,13	99,36	103	99,56	99,53	99,53	99,63	99,7	99,8	Dinas P2KBP3A
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	26,25	35	35	35	35,05	35,05	37,25	37,5	37,5	Dinas P2KBP3A
2.03. PANGAN												
1	Ketersediaan pangan utama	ton	492.442,25	n/a	459341,32	568770	297.194,12	359.211,19	362.803,01	295.917,93	298.877,11	Dinas Ketahanan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kcal/kap/hari										Dinas Ketahanan Pangan
3	Energi per kapita	kcal/kap/hari	2566	5909	4455	5888	1488,86	4269	4306	2520	2640	Dinas Ketahanan Pangan
4	Protein Perkapita	kcal/kap/hari	78	177,4	120,47	176,9	39,9	124,5	126,3	66,15	69,3	Dinas Ketahanan Pangan
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	75	n/a	78,76	83,35	82,33	79	80	81	82	Dinas Ketahanan Pangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	2.04. PERTANAHAN											
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%										Dinas Perkim/ Setda
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	kasus	35	5	8	8	30	5	5	5	5	Dinas Perkim
3	Penyelesaian Izin Lokasi	%		n/a	n/a	n/a				-	-	DPMPTSP
	2.05. LINGKUNGAN HIDUP											
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota,	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas LH
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota,	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas LH
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi,	Dokumen	1	1	3	6	4	4	1	1	3	Dinas LH
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air,	Poin	53,33	51,67	55	61,36	47,62	51,63	51,69	51,82	52,42	Dinas LH
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara,	Poin	68,72	73,4	90,64	88,27	94,83	84,25	89,25	80,15	80,6	Dinas LH
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	49,48	49,48	47,64	47,64	48,32	49,84	49,96	47,43	47,44	Dinas LH
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	usaha/kegiatan yang diawasi	data di P2KL	data di P2KL	data di P2KL	100	60	60	25	25	25	Dinas LH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	kabupaten/kota,											
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota,	PPLH	-	-	-	2	2	2	1	2	2	Dinas LH
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	Dinas LH
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Lokasi	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	n/a	Dinas LH
11	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan,	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas LH
12	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana,	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas LH
13	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat,	Lembaga	n/a	n/a	n/a	5	5	5	5	5	5	Dinas LH
14	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup,	Entitas	n/a	n/a	n/a	10	10	10	25	50	50	Dinas LH
15	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah daerahKabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.											Dinas LH
16	Timbulan sampah yang ditangani,	persen	16,2	n/a	18,2	20,07	20,81	31,5	38,5	24,5	26,6	Dinas LH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
17	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	persen	5,69	n/a	7,46	9,87	10,67	13,5	16,5	10,5	11,4	Dinas LH
18	Persentase cakupan area pelayanan,	persen	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	100	100	100	100	Dinas LH
19	Persentase jumlah sampah yang tertangani,	persen	21,89	n/a	25,66	29,94	31,48	45	55	35	38	Dinas LH
20	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota,	poin		n/a	n/a	43.11		71	71	71	71	Dinas LH
21	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan, dan	persen										Dinas LH
22	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.	persen										Dinas LH
23	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	lokasi				2		1	1	1	1	Dinas LH
24	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas LH
25	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%			4	2		3	3	3	3	Dinas LH
26	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas LH
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%		56,22	67,82	70,75	66,89	60,75	63,21	62,33	62,74	Dinas LH
28	Persentase pelaporan	%				100		100	100	100	100	Dinas LH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
8	pengendalian B3 dan LB3											
29	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	10		25	25		25	50	50	50	Dinas LH
30	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%			20	20		20	20	20	20	Dinas LH
31	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,148	0,146	0,164	0,164	0,16	0,188	0,188	Dinas LH
32	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	25	25,27	25,66	29,95	31,48	45	55	35	38	Dinas LH
2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
1	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	99,8	98,4	98,82	72,45	98,45	100	100			Disdukcapil
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	25	80,1	79,03	85,62	92,31	49	54			Disdukcapil
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	40	43,9	100	112,7	84	49	53			Disdukcapil
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			Disdukcapil
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah			Disdukcapil
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,8	97,3	96,78	72,6	98,25	100	100			Disdukcapil
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	68	34,9	71,6	90	80,11	72	73			Disdukcapil
8	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%			75	75		60	65			Disdukcapil
<i>*Indikator permen86 dan permen 18 berisikan dengan permendagri 00096-5384-DUKCAPIL 2023 sehingga untuk tahun 2023 menggunakan perubahan berdasarkan permendagri 5483-disdukcapil</i>												

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	%				Perekaman 98,90% dan Pencetakan 98,08%	n/a			99,40%	99,50%	Disdukcapil
2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%				17,83%	n/a			50,00%	60,00%	Disdukcapil
3	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%				n/a	n/a			25% dari total perekaman	35% dari total perekaman	Disdukcapil
4	Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%				83,17%	n/a			98%	99%	Disdukcapil
5	Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Kelurahan/Pemukaman Umum/Pemukaman Keluarga yang ada petugasnya	%				n/a	n/a			75%	76%	Disdukcapil
6	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	%				0	n/a			3	6	Disdukcapil
7	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	%				4	n/a			15	20	Disdukcapil
8	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%				n/a	n/a			15	15	Disdukcapil
9	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	%				Ada	n/a			1	1	Disdukcapil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
10	Keluaran/output kinerja pelayanan dokumen lainnya	%				0	n/a			1 Laporan output 24 (dua puluh empat) dokumen layanan adminduk dan agregat	1 Laporan output 24 (dua puluh empat) dokumen layanan adminduk dan agregat	Disdukcapil
2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	15	20	30	40	60	50	60	80	90	DPMDesa
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	42	42	42	42	42	DPMDesa
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	442	442	442	442	442	DPMDesa
4	Persentase LPM Berprestasi	%	6	7	8	9	10	10	11	11	11	DPMDesa
5	Persentase PKK Aktif	%	55	100	70	80	87	85	90	100	100	DPMDesa
6	Persentase Posyandu Aktif	%	55	100	70	80	87	85	90	100	100	DPMDesa
7	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	65	70	72	75	79	78	80	90	90	DPMDesa
8	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DPMDesa
9	Persentase peningkatan status desa mandiri	%		4,08	4,97	31,23	10,26		9,52	10,52	11,76	DPMDesa

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,1	1,1	0,74	0,89	0,84	1,1	1,1	1,09	1,05	Dinas P2KBP3A
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,35	2,34	2,3	2,45	2,33	2,2	2,1	2,3	2,29	Dinas P2KBP3A
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	46,87	4,05	6,05	8,12	8,3	78,12	87,5	87,55	87,8	Dinas P2KBP3A
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	20	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	0	0	0	0		0	1	0	0	Dinas P2KBP3A
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	0	0	8	8		8	8			Dinas P2KBP3A
7	Jumlah Kerjasama	Sekolah	2	2	5	5	5	6	6	6	7	Dinas

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan											P2KBP3A
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,83	2,98	2,77	1,37	2,64	2,69	2,65	2,5	2,4	Dinas P2KBP3A
9	Ratio Akseptor KB	%	70,44	71,29	71,96	72,39	73,21	70,12	70,82	71,92	72,33	Dinas P2KBP3A
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	70,44	71,29	71,96	72,39	73,21	70,12	70,82	71,92	72,33	Dinas P2KBP3A
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Angka	49/1000	49/1000	49/1000	36/1000	36,36/1000	48.80/1000	48/1000	36,34/100	36,32/100	Dinas P2KBP3A
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,85	3,89	3,44	3,36	3.36	2,96	2,66	2,6	2,56	Dinas P2KBP3A
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	12,56	13,66	13,44	13,13	13,13	12,76	12,58	12,26	12	Dinas P2KBP3A
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	29,6	29,72	30,93	32,16	24,46	22	22,09	23,11	23,89	Dinas P2KBP3A
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	70,44	70,67	70,91	71,48	71,49	70,12	70,82	70,93	71,03	Dinas P2KBP3A
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	79,5	83,04	84,15	84,32	84,45	80	80,5	80,75	80,85	Dinas P2KBP3A
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	78,5	78,94	80,74	82,94	82,95	80,05	81	81,35	81,45	Dinas P2KBP3A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Ber-KB											
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	77	78,24	80,79	79,88	79,9	79	79,5	79,54	79,75	Dinas P2KBP3A
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	7,14	4,76	4,76	4,76	4,76	19,05	21,43	23,81	28,57	Dinas P2KBP3A
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	52	55	60	78,69	78,7	62	65	65,35	65,45	Dinas P2KBP3A
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	65,8	65,8	65,8	65,8	53,2	70,4	74,7	79,2	83,7	Dinas P2KBP3A
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	86	87	84,92	86,41	86,5	90	91	91,11	91,25	Dinas P2KBP3A
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	442	100	442	442	442	442	79,18	83,71	Dinas P2KBP3A
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	70	67	100	100	90	74	76	79	82	Dinas P2KBP3A
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P2KBP3A
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-	-		-	-			Dinas Kesehatan
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	50	55	60	101	72	70	75	77	80	Dinas P2KBP3A
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	60	65	68	81	81	80	85	87	88	Dinas P2KBP3A
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	18,98	19	19,01	19,01	19,09	19,03	19,05	19,15	19,2	Dinas P2KBP3A
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,22	1,25	2	-	1,2	1,4	1,45	1,5	1,55	Dinas P2KBP3A
2.09. PERHUBUNGAN												

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum,	%	0,38	67,6	0.44	105.82	120,25	158.71	174.58	190.45	191.9	Dinas Perhubungan
2	Rasio ijin trayek,	%	0,13	0,08	0,06	0,08	0,03	0.08	0.09	0.09	0.09	Dinas Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum,	Unit	15.936	8.891	8.662	9.035	3,968	14,117	14,541	14964	14976	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis,	Lokasi	13	2	3	2	2	3	3	3	3	Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat,	%	0,38	0,08	0,44	0,1	0,06	0.08	0.09	0.09	0.09	Dinas Perhubungan
6	Persentase kepeniilikan KIR angkutan umum,	%	16,94	13,39	18,07	29,57	39.10	6.92	6.4	5.18	5.3	Dinas Perhubungan
7	Pemasangan Rambu-rambu,	%	85,00	93,75	158	158	89,2	89.00	90.00	91.01	91.02	Dinas Perhubungan
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan:	Kend/Km	0,06	0,07	0,06	0,06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	Dinas Perhubungan
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, dan	Orang	65.156.064	816.643	501.224	1.031.637	341.836	1,873,053	1,966,706	2,060,358	2,064,818	Dinas Perhubungan
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun.	Orang	65.156.064	816.643	501.224	1.031.637	341,836	1,873,053	1,966,706	2,060,358	2,064,818	Dinas Perhubungan
2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi	kelompok	42	42	42	42	42	42	42	42	42	Sudah Terbangun KiM di 42

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat di Tingkat Kecamatan,											kecamatan pada tahun 2019
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi,	Bukan Kewenangan Daerah										
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon,											
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet, dan											
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi.											
6	Indeks SPBE	Angka	n/a	n/a	3,25	3,25	n/a	3,11	3,87	3,35	3,40	Diskominfo
7	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	n/a	n/a	52	75	n/a	82	100	3,10	3,20	Diskominfo
2.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH												
1	Persentase koperasi aktif,	%	n/a	n/a	1,5	2,34	2,4	1,5	1,5	2,5	2,5	Dinas Koperasi dan UKM
2	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	80,5	n/a	10,6	7,9	6,2	84	85	7	7,4	Dinas Koperasi dan UKM
3	Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	UKM	3657	n/a	1537	1347	1435	2000	2000	2000	2000	Dinas Koperasi dan UKM
4	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru	%	100	n/a	215	48	35	12,25	12,25	20	20	Dinas Koperasi dan UKM
5	Persentase koperasi yang diawasi	%	3	n/a	5	6,12	4,29	5,5	5,5	7,5	7,5	Dinas Koperasi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
												dan UKM
6	Persentase koperasi sehat	%	5	n/a	5	3,74	3,19	50	50	5,3	8	Dinas Koperasi dan UKM
7	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	%	25	n/a	15	4,9	n/a	15	15	1,5	1,5	Dinas Koperasi dan UKM
8	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%	2,5	n/a	1,36	1,25	2,2	4	4,5	2,5	3	Dinas Koperasi dan UKM
9	Jumlah wirausaha Baru	Wirausaha Baru	1401	n/a	737	3795	1411	1000	1000	1000	1000	Dinas Koperasi dan UKM
10	Jumlah UKM yang terbina	Pelaku Usaha Mikro	2256	n/a	975	1689	1141	1000	1000	1000	1000	Dinas Koperasi dan UKM
2.12. PENANAMAN MODAL												
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/PMA	4300	4426	466	711	146	100	100	100	100	DPMPTSP
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp	1,4	1,11	1,29	1,165	1,357	2,12- 2,13	1,52 - 1,53	1,30	1,32	DPMPTSP
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	n/a	-0,29	0,18	-0,125	n/a					DPMPTSP
4	Rasio Penanam Modal (PMA -PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	20	n/a	n/a	20	36	20	20	20	20	DPMPTSP
5	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	33	n/a	n/a	33	n/a	33	33	33	33	DPMPTSP
6	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase penyelesaian Perizinan tepat waktu	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
8	Persentase data dan informasi perizinan dan non peizinan	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
9	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	Baik	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	DPMPTSP
2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	25,45	40,8	60	58	85	32,73	34,55	100	100	Dispora
2	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	20,33	1	n/a	Tida Ada	38	36,78	45	45	45	Dispora
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	28,91	0*)	n/a	58	82	34,55	34,55	100	100	Dispora
4	Prosentase nomor cabang olahraga di ikuti	%	100	0*)	85	100	100	100	100	n/a	n/a	Dispora
5	Prosentase Olahraga Masyarakat secara rutin	%	19,05	0*)	n/a	n/a	n/a	97,62	100	n/a	n/a	Dispora
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	10	0*)	28,5	n/a	n/a	80	90	n/a	n/a	Dispora
7	Persentase Wirausaha Muda	%	0,12	1,00	30,91	32,73	34,45	0,16	0,17	35,46	36,37	Dispora
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	71,43	0*)	n/a	-	n/a	90,48	95,24	100	100	Dispora
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	80,95	0*)	n/a	-	n/a	90,48	95,24	20	25	Dispora
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	29,2	0*)	n/a	-	n/a	33	34	22,63	24,83	Dispora
11	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	133	0*)	n/a	234	73	165	175	180	185	Dispora
12	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlet	15	0*)	n/a	148	117	35	40	120	175	Dispora
1	Prestasi Organisasi	%	n/a	100	100	100	n/a	100	100	n/a	n/a	Dispora

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
3	Kepramukaan yang Dibina											
2.14. STATISTIK												
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Kategori	n/a	n/a	50	79	100	87	100	100	100	Diskominfo
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPS
3	Buku "PDRB"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPS
4	Buku " Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
2.15. PERSANDIAN												
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Diskominfo
2	Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)	Poin	n/a	n/a	n/a	125	450	450	350	400	450	Diskominfo
2.16. KEBUDAYAAN												
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Pagelaran	5	0	8	15	42	5	5	5	5	Disparbud
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	CB/ODCB	20	20	25	20	25	20	20	30	30	Disparbud
3	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Buah	5	5	0	3	1	5	5	5	5	Disparbud
4	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	CB/ODCB	5	5	3	4	4	5	5	5	5	Disparbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	2.17. PERPUSTAKAAN											
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	28.849	9.333	6.219	32.112	39.550	39.500	41.000	42000	43000	Dispusip
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	Eksemplar	58.853	59.446	65.583	67.635	74.135	195.483	80000	82000	Dispusip
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,1	0	1	1	0,0056	0,13	0,13	0,006	0,006	Dispusip
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	120	40	30	85	160	1.000	1.100	1300	1500	Dispusip
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	9.770	10.434	12.045	13.039	14.885	8.754	9.704	15000	17000	Dispusip
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	0	0	0	8	6	10	10	10	10	Dispusip
	2.18. KEARSIPAN											
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	21,53	63,08	63,08	63,08	47,12	53,94	56,67	55	60	Dispusip
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	2	0,4	6	6	6	17	17	17	17	Dispusip
3	URUSAN PILIHAN											
	3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	Konsumsi Ikan	kg	26,45	25,7	37,5	37,5	30,77	27,53	27,8	30,5	30,9	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Nilai Tukar Nelayan	poin	108,36	108,01	101,5	101,5	105,4	110,36	110,86	105,6	105,7	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
3	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	64540	60884	66442,04	66442,04	69056,03	67130	67794	65.602	65.982	Dinas Perikanan dan Pernakan
4	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	710	655	764,6	764,6	832,3	812	836	848	857	Dinas Perikanan dan Pernakan
5	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelompok	5	n/a	7	7	9	12	15	12	12	Dinas Perikanan dan Pernakan
3.02. PARIWISATA												
1	Kunjungan Wisata	orang	2.700.000	1489011	2152000	4406083	3.874.751	3.100.000	3.200.000	3.360.000	3.400.000	Disparbud
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	2	1	2	2	2	2	2	2	2	Disparbud
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	973.801.885	755078488	781453625	2391591411	2.105.327.876	1.324.846.715	1.430.834.088	2.800.000.000	2.800.000.000	Disparbud
3.03. PERTANIAN												
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	37,64	37,45	37,35	37,38	n/a	35,44-35,31	35-34,92	37,51	37,33	Dinas Pertanian
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pertanian
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pertanian
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Pertanian
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kw/ha	63,14	51,51	60,38	61,28	67,89	61,52	62,14	67,93	67,93	Dinas Pertanian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
6	Cakupan bina kelompok petani	%	3,72	5	7,25	8,53	9	10,83	12,61	10	10	Dinas Pertanian
3.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
1	Persentase Perusahaan yang berizin	%	19	n/a	18,25	28,57	28,57	26,19	28,57	29, 00	30	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik,	Bukan kewenangan Kabupaten										Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3	Rasio ketersediaan daya listrik, dan											Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
4	Persentase pertambangan tanpa ijin.											Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3.06. PERDAGANGAN												
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	%	4	n/a	2,95	3	3	3	4	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Swalayan)											
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	34	n/a	35	36	34	36	37	38	38	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	40,5	n/a	41,4	41,8	38	41,9	42	42,5	43	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
4	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	4	12	3	5	1	4	4	4	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
5	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis	6	n/a	10	12	14	14	15	16	17	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
6	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha	12	n/a	16	18	20	19	20	22	24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
7	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	7	n/a	9	10	12	12	13	14	15	Dinas Perindustrian, Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
												n dan ESDM
8	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha	6	n/a	7	7	7	7	7	8	8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3.07. PERINDUSTRIAN												
1	Pertambahan jumlah industri kecil	%	1	n/a	1	1,14	4,86	0,4	1	1,2	1,4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%	20	n/a	39,8	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	%	40	n/a	100	100	100	44	45	45	45	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan	%	40	n/a	100	100	100	44	45	45	45	Dinas Perindustrian, Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait											n dan ESDM
5	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut	IKM	100	n/a	200	250	705	300	350	400	450	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
6	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	5	n/a	50	10	10	10	10	10	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
7	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	%	1	n/a	0,15	0,18	0,2	0,2	0,25	0,28	0,3	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3.08. TRANSMIGRASI												
1	Jumlah MOU Antar Daerah dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian	mou	5	0	0	0	0	5	7			Disnakertrans
4 PENUNJANG URUSAN												
4.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN												
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	Inspektorat Daerah
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	Persen	75	55	55	65	100	75	80	85	90	Inspektorat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
3	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	39	L.3	L3	L3	L.3	L.3	L.3	L.3	Inspektorat Daerah
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persen	72	78	82	82	94,54	75	78	82	85	Inspektorat Daerah
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	L.3	L.3	L3	L3	L.3	L.3	L.3	L.3	Inspektorat Daerah
7	Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	Persen	72	83	77,04	93	92	75	77,5	80	82,5	Inspektorat Daerah
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)	unit	-	n/a	0	0	0	1	1	1	1	Inspektorat Daerah
9	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persen	72	78	82	82	94,54	85	90	95	98	Inspektorat Daerah
10	Jumlah temuan BPK											Inspektorat Daerah
11	Nilai/Kapabilitas APIP	Poin				3	3,09	3,09	3,1	3,2	3,3	Inspektorat Daerah
12	Nilai/Level Maturitas SPIP	Poin				3	3,17	3,17	3,18	3,2	3,3	Inspektorat Daerah
13	Nilai/Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	3,08	3,08	3,09	3,1	3,15	Inspektorat Daerah
14	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	2,77	2,77	2,78	2,79	2,8	Inspektorat Daerah
4.02. PERENCANAAN												
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	PERDA											
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	78	82,5	83	84	n/a	86	88	88	89	Bappeda
4.03. KEUANGAN												
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,82	6,73	3,22	5,37	3,78	3,78	3,77	5,38	5,25	BPKAD
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20	32,33	34,12	33,59	20	20	20	20	20	BPKAD
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10	13,95	14,14	12,81	10	10	10	10	10	BPKAD
5	Persentase program/kegiatan yang	%	46,42	41	n/a	n/a	0,35			0,28	0,26	BPKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	tidak terlaksana,											
6	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	46,42	41	n/a	n/a	48,83	46,08	46,48	49,5	49,8	BPKAD
7	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	53,58	59	n/a	n/a	51,17	53,92	53,52	50,5	50,2	BPKAD
8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,31	0,32	0,34	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	BPKAD
9	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
10	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD
11	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD
12	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%	90	92	95	95	95	98	100	95	95	BPKAD
13	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	72	76	80	85	90	90	95	95	95	BPKAD
4.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	37	37	39	36	38	39	39	39	39	BKD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	231	258	250	255	259	258	258	3226	3226	BKD
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	10891	10059	9463	8888	8469	10891	10891	10260	10362	BKD
4	Kebijakan kepegawaian kabupaten garut yang ditetapkan	Kebijakan	2	n/a	4	4	4	3	3	3	3	BKD
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	Persen	80	80	95,36	97,5	82	86	88	50	50	BKD
6	Prosentase Terpenuhi nya Pengadaan Pegawai	Persen	80	112	30,3	97,5	82	86	88	88	88	BKD
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui.	Persen	100	98,68	99,13	99,57	97	100	100	99,48	99,48	BKD
8	Peresntase ASN yang Disiplin	Persen	99,9	99,9	99,9	99,77	99,96	99,9	99,9	99,87	99,87	BKD
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	20	20	20	20	20	BKD
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	75	15	n/a	3	3	100	100	33	33	BKD
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	56	43	44	46	93	100	100	46	46	BKD
12	Persentase Terpenuhi nya Pengembangan Kompetensi PNS	%	67	14	82	77	86	86	88	58,8	58,8	BKD
4.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.	%	70	n/a	6,82	56,1	166,7	90	95	95	95	Bappeda
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	%	65	50	66,67	51,22	75	85	90	95	95	Bappeda
	Penerapan SIDA:											
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah.	%	35	9,09	27,27	115,15	100	70	80	100	100	Bappeda
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah.	%	70	60	78,95	36,84	100	85	90	100	100	Bappeda
5 PENDUKUNG												
5.01 PENDUKUNG KDH DAN WKDH												
1	Persentase aktifitas keagamaan yang difasilitasi	%				97	98			98	98	Setda
2	Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi (3,5117)	Tinggi	Tinggi (3,44962)	Sangat Tinggi (3,5117)	Sangat Tinggi (3,5117)	Tinggi (3.1)	Tinggi (3.1)	Setda
3	Persentase kualitas kebijakan dan koordinasi pembangunan	%								98	98	Setda
4	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai				68.89	n/a			66.00	66.00	Setda
5	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai		3.37	3,37	3,3164	n/a			3,4	3,5	Setda
6	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/ WKDH	%	80	85	90	96,56	98.00			98.50	98.50	Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	5.02. PENDUKUNG DPRD											
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
4	tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
6	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
	6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Target				Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	%	n/a	66,67	80	100	100	75	75	100	100	Bakesbang pol
2	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	%	n/a	99,98	80	100	100	80	80	100	100	Bakesbang pol
3	Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	n/a	85,94	97,29	100	99,13	90	90	100	100	Bakesbang pol
4	tingkat Partisipasi Masyarakat dalam politik	%	70	-	78,91	n/a	79,57	72	72	80	80	Bakesbang pol
5	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Baik	n/a	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Bakesbang pol
6	Persentase LSM Aktif	%	65	70	72	75	n/a	78	80	82	84	Bakesbang pol
7 KEWILAYAHAN												
7.01. PEMERINTAHAN												
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Point	100	100	N/A	83	83,19	82,9	83,7	83,5	84	Kecamatan (42 Kecamatan)
2	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Nilai	100	100	N/A	76,35	78,40	81,19	84,89	85	85,2	Kecamatan (42 Kecamatan)
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	N/A	100	100,00	94,12	98,15	99	99,5	Kecamatan (42 Kecamatan)
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	100	100	N/A	B	B	B	BB	BB	A	Kecamatan (42 Kecamatan)

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab. Garut, 2023



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Garut selama belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dokumen ini menjadi bahan pelaksanaan tugas Pj. Kepala Daerah serta seluruh perangkat daerah di Kabupaten Garut mulai tahun 2025 hingga 2026. Dokumen ini penting untuk menjadi pedoman bersama, baik pemerintah Kabupaten Garut maupun para pemangku kepentingan dalam rangka membangun sinergi yang harmonis demi kepentingan pembangunan daerah.

RPD menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2025-2026.

- Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan RPJMD setelah periode RPJMD 2019-2024 ini berakhir dan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif pada periode berikutnya pada saat pemilukada serentak Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan berpedoman pada RPJP Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026.

- Kaidah Pelaksanaan

RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Garut tahun 2025-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Garut setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
2. Seluruh Perangkat Daerah menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.



Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN